SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 45 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan dan sejahtera, dengan berlandaskan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik, diperlukan arah dan kebijakan yang jelas melalui penyusunan perubahan rencana kerja pemerintah daerah;
b. bahwa dalam pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah terdapat dinamika pembangunan yang mendorong perlu dilakukan penyesuaian pada target proyeksi pendapatan dan perencanaan pembangunan;
c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap penyesuaian pelaksanaan perencanaan pembangunan di Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perubahan RKPD adalah penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan.

BAB II
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026

Pasal 2

Perubahan RKPD tahun 2026 menjadi pedoman dalam:
a. penyusunan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2026;
b. pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
c. penyusunan perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026.

Pasal 3

Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. pendahuluan;
b. evaluasi hasil triwulan II (dua) tahun berkenaan;
c. kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tahun 2026;
e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
f. penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Juli 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.
AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.
TRI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 45 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. LATAR BELAKANG DAN DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN .. 1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 2
1.3. KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN 5
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 5
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026 1
2.1. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN 1
2.2. EVALUASI KINERJA UTAMA 3
2.3. EVALUASI KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13
2.4. EVALUASI KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40
2.5. EVALUASI KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 78
2.6. Evaluasi Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 89
2.7. Evaluasi Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan..... 95
2.8. EVALUASI KINERJA UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 109
2.9. EVALUASI KINERJA UNSUR KEWILAYAHAN 111
2.10. EVALUASI KINERJA UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 119
2.11. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN..... 125
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH..... 1
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH..... 1
3.1.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional..... 1
3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional..... 3
3.1.3. Kondisi Perekonomian Jawa Tengah..... 5
3.1.4. Proyeksi dan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 6
3.1.5. Kondisi Perekonomian Kabupaten Temanggung 8
3.1.6. Proyeksi dan Arah Pembangunan Kabupaten Temanggung 9
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 16
3.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 19
3.1.2. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah 27
3.1.3. Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah 32
3.3. Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . 36

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1
4.1. VISI DAN MISI 1
4.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SERTA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6
4.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 6
4.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan 18
4.3. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026 31
4.3.1. Tema Pembangunan Tahun 2026 31
4.3.2. Prioritas Pembangunan 35
4.4. DUKUNGAN SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 130
4.4.1. Dukungan terhadap Asta Cita oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung 130
4.4.2. Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (ProSN) oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung 135
4.4.3. Dukungan terhadap Program Prioritas dan Program Delegasi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung 149
4.4.4. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 160
4.4.5. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2026 163
4.4.6. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan 169
4.4.7. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung 172
4.4.8. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDGs Kabupaten Temanggung 172
4.4.9. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung 177
4.4.10. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim 179
4.4.11. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur 180
4.4.12. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Arah Kebijakan Kewilayahan WP Gelangmanggung 181
4.4.13. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 184
4.4.14. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung

Pembangunan Infrastruktur 185
4.4.15. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Pintu Tol Bawen-Yogyakarta 187
4.4.16. Penyelenggaran Satu Data Indonesia 188
4.4.17. Penyelenggaraan Pengendalian Pemerintah Daerah 189
4.4.18. Manajemen Risiko 190
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 1
5.1. RENCANA KERJA DAERAH 1
5.1.1. Dukungan Program Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 terhadap Prioritas Nasional (PN) 1
5.1.2. Super Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) 70
5.1.3. Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah 75
5.2. PENDANAAN DAERAH 134
5.2.1. Kegiatan Prioritas Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang 135
5.2.2. Pagu Indikatif per Program berdasarkan Urusan dan Bidang 151

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen P-RKPD dengan Dokumen Lain 5
Gambar 2.1 Capaian Kinerja Indikator Tujuan s.d. Triwulan II Tahun 2026 121
Gambar 2.2 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Indikator Tujuan s.d. Triwulan II Tahun 2026 121
Gambar 2.3 Capaian Kinerja Indikator Sasaran s.d. Triwulan II Tahun 2026 122
Gambar 2.4 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Indikator Sasaran s.d. Triwulan II Tahun 2026 122
Gambar 2.5 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Daerah (IKD) 123
Gambar 2.6 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja pada Indikator IKUPD. 124
Gambar 2.7 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja pada Indikator Program 124
Gambar 3.1 Capaian Sektor Utama terhadap PDRB 14
Gambar 4.1 Konsep THIS dalam Kebijakan Pembangunan Kabupaten Temanggung 32
Gambar 4.2 Implementasi Konsep THIS dalam Kebijakan Pembangunan..... 33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II 1
Tabel 2.2 Simbol dan Status Capaian Kinerja 4
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) s.d Triwulan II Tahun 2026 4
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Sasaran S.D Triwulan II Tahun 2026..... 7
Tabel 2. 5 Capaian Kinerja Kinerja Daerah (IKD) s.d Triwulan II Tahun 2026 8
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sampai dengan TW II Tahun 2026..... 13
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan s.d Triwulan II Tahun 2026 17
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada RSUD s.d Triwulan II Tahun 2026 24
Tabel 2.9 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s.d. Triwulan II Tahun 2026 27
Tabel 2.10 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada DPRKPLH s.d. Triwulan II Tahun 2026 30
Tabel 2.11 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman s.d. Triwulan II Tahun 2026..... 31
Tabel 2.12 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.. 33
Tabel 2.13 Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana s.d Triwulan II Tahun 2026 36
Tabel 2.14 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial s.d Triwulan II Tahun 2026 38
Tabel 2.15 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja s.d Triwulan II Tahun 2026 41
Tabel 2.16 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s.d Triwulan II Tahun 2026 44
Tabel 2.17 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan s.d Triwulan II Tahun 2025 46
Tabel 2.18 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup s.d Triwulan II Tahun 2026 48
Tabel 2.19 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d Triwulan II Tahun 2026..... 53

Tabel 2.20 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s.d Triwulan II Tahun 2026 55
Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s.d Triwulan II Tahun 2026..... 57
Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan s.d Triwulan II Tahun 2026 59
Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika s.d Triwulan II Tahun 2025..... 61
Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah s.d Triwulan II Tahun 2026 63
Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal s.d Triwulan II Tahun 2026 65
Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga s.d Triwulan II Tahun 2026 66
Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik s.d Triwulan II Tahun 2026 68
Tabel 2.28 Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan s.d Triwulan II Tahun 2026 69
Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan s.d Triwulan II Tahun 2026 71
Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan s.d Triwulan II Tahun 2026 77
Tabel 2.31 Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan s.d Triwulan II Tahun 2026 79
Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata s.d Triwulan II Tahun 2026 81
Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian s.d Triwulan II Tahun 2026 84
Tabel 2.34 Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan s.d Triwulan II Tahun 2026..... 86
Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian s.d Triwulan II Tahun 2026 88
Tabel 2.36 Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2026 90
Tabel 2.37 Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD s.d Triwulan II Tahun 2026 94
Tabel 2.38 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan s.d Triwulan II Tahun 2026..... 96

Tabel 2.39 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan s.d Triwulan II Tahun 2026 100
Tabel 2.40 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Kepegawaian s.d Triwulan II Tahun 2026 103
Tabel 2.41 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan s.d Triwulan II Tahun 2026 105
Tabel 2.42 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan s.d Triwulan II Tahun 2026 107
Tabel 2.43 Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan s.d Triwulan II Tahun 2026 109
Tabel 2.44 Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan s.d Triwulan II Tahun 2026 111
Tabel 2.45 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum s.d Triwulan II Tahun 2026 120
Tabel 2.46 Identifikasi Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 129
Tabel 2.47 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 132
Tabel 3.1 Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Nasional 4
Tabel 3.2 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2026 . 7
Tabel 3.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2026..... 12
Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 13
Tabel 3.5 Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung 14
Tabel 3.6 Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional.... 16
Tabel 3.7 Realisasi Pendapatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2025 23
Tabel 3.8 Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Temanggung 24
Tabel 3.9 Realisasi Belanja Tahun 2024-2026 Semester I 28
Tabel 3.10 Proyeksi Belanja Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 29
Tabel 3.11 Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 30
Tabel 3.12 Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 31
Tabel 3.13 Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah Perubahan

RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 31
Tabel 3.14 Persentase Belanja Tidak Terduga terhadap Belanja Daerah . 31
Tabel 3.15 Pembiayaan Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 34
Tabel 3.16 Kerangka Pendanaan Kabupaten Temanggung 34
Tabel 4.1 Sinkronisasi Visi dan Misi RPJP/RPJM Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 4
Tabel 4.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 9
Tabel 4.3 Kesesuaian Penetapan Target Indikator Makro Pembangunan pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026..... 10
Tabel 4.4 Persandingan Keselarasan IUP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan RKP Tahun 2026 dan 11
Tabel 4.5 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 20
Tabel 4.6 Keterkaitan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 .. 30
Tabel 4.7 Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026..... 31
Tabel 4.8 Tema/Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Daerah..... 33
Tabel 4.9 Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan/Isu Strategis,..... 43
Tabel 4.10 Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2026 49
Tabel 4.11 Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026..... 52
Tabel 4.12 Persandingan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan..... 56
Tabel 4.13 Persandingan antara Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung 2025-2029 70
Tabel 4.14 Keterkaitan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan Sasaran Prioritas Nasional73
Tabel 4.15 Keterkaitan dan Konsistensi antara Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Kabupaten Temanggung 88
Tabel 4.16 Persandingan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Janji Tahunan Kepala Daerah 106
Tabel 4.17 Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah

Kabupaten Temanggung dengan Sasaran Prioritas Nasional RPJMN 109
Tabel 4.18 Persandingan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan Program Nomenklatur..... 115
Tabel 4.19 Outcome Prioritas dan Program dalam mendukung Asta Cita di Kabupaten Temanggung Tahun 2026 130
Tabel 4. 20 Dukungan Program Rill terhadap Program Strategis Nasional..... 136
Tabel 4.21 Dukungan terhadap Program Strategis Nasional 137
Tabel 4.22 Dukungan terhadap Tematik Pembangunan..... 148
Tabel 4.23 Dukungan terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah..... 149
Tabel 4.24 Dukungan terhadap Program Intervensi Provinsi Jawa Tengah..... 151
Tabel 4.25 Dukungan terhadap Program Aksi Provinsi Jawa Tengah 152
Tabel 4.26 Dukungan terhadap Program Delegasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah 156
Tabel 4.27 Sasaran, Prioritas Daerah, dan Program yang Mendukung Pemenuhan SPM..... 161
Tabel 4.28 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 164
Tabel 4.29 Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan..... 170
Tabel 4.30 Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Penanganan Stunting..... 172
Tabel 4.31 Keterkaitan Tujuan SDGs, Sasaran Daerah dan Prioritas Daerah..... 173
Tabel 4.32 Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung..... 177
Tabel 4.33 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim 180
Tabel 4.34 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur..... 181
Tabel 4.35 Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Kewilayahan WP Gelangmanggung..... 183
Tabel 4.36 Usulan Program/ Kegiatan Kawasan Purwomanggung di Lokasi Kabupaten Temanggung Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 185
Tabel 4.37 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 185

Tabel 4.38 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur 186
Tabel 4.39 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Pintu Tol Bawen-Yogyakarta 187
Tabel 5.1 Rekapitulasi Dukungan Program Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Terhadap Kegiatan Prioritas Utama RKP Tahun 2026 2
Tabel 5.2 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama Prioritas Nasional 1 4
Tabel 5.3 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama Prioritas Nasional 2 4
Tabel 5.4 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama PN 3 12
Tabel 5.5 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama PN 4 14
Tabel 5.6 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama PN 5 55
Tabel 5.7 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama PN 6 56
Tabel 5.8 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama PN 7 57
Tabel 5.9 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama PN 8 59
Tabel 5.10 Dukungan Program Daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2026 terhadap Program Prioritas/Kegiatan Prioritas Masing-Masing Prioritas Nasional..... 60
Tabel 5.11 Dukungan program RKPD terhadap Asta Cita 61
Tabel 5.12 Dukungan Program Daerah terhadap Tema Tahunan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung: Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan 67
Tabel 5.13 Keruntutan Kebijakan Pembangunan Daerah RKPD 2026 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) 71
Tabel 5.14 Dukungan terhadap Program Strategis Nasional oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung 75
Tabel 5.15 Dukungan terhadap Tematik Pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung 89
Tabel 5. 16 Dukungan terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah 91
Tabel 5.17 Dukungan terhadap Program Intervensi Provinsi Jawa Tengah

oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung 92
Tabel 5.18 Dukungan terhadap Program Aksi Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung..... 95
Tabel 5.19 Dukungan terhadap Program Delegasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung..... 99
Tabel 5.20 Dukungan Program Kabupaten Temanggung terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung SPM Tahun 2026..... 104
Tabel 5.21 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD 2026..... 107
Tabel 5.22 Program Daerah yang Mendukung Penanganan Kemiskinan 108
Tabel 5.23 Program Daerah yang Mendukung Aksi Konvergensi Stunting..... 117
Tabel 5.24 Program Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 119
Tabel 5.25 Program Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pengarusutamaan Gender..... 121
Tabel 5.26 Pemetaan Indikator SDGs dalam Dokumen Perencanaan Daerah..... 125
Tabel 5.27 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung..... 126
Tabel 5.28 Program Daerah yang Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim 128
Tabel 5.29 Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung Terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur 128
Tabel 5.30 Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Kewilayahan WP Gelangmanggung..... 130
Tabel 5.31 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 132
Tabel 5.32 Dukungan Program Kabupaten Temanggung terhadap Pembangunan Infrastruktur Tahun 2026 132
Tabel 5.33 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Pintu Tol Bawen-Yogyakarta 133
Tabel 5.34 Program Daerah yang Mendukung Satu Data Indonesia..... 134
Tabel 5.35 Rekapitulasi Anggaran per Urusan dan per Bidang 151

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG DAN DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

RKPD Kabupaten Temangggung 2026 merupakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah resmi ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 pada tanggal 04 Juli 2024. Dokumen ini sudah menjadi acuan resmi semua Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung dalam semester pertama Tahun 2026 ini. Namun karena munculnya beberapa permasalahan dan kebutuhan dalam dinamika pembangunan daerah yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan pembangunan di enam bulan pertama tahun 2026 maka Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu untuk dilakukan.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 juga dilakukan sebagaimana menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Penyesuaian alokasi anggaran kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan harga;
b. Penghapusan kegiatan karena menyesuaikan kemampuan keuangan, penambahan kegiatan baru yang disesuaikan dengan nomenklatur DAK oleh Pusat, penambahan atau pengurangan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
c. Penyesuaian saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk Tahun berjalan mempedomani hasil audit BPK atas laporan pertanggungjawaban LPP APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025

Fokus kebijakan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ditujukan untuk percepatan petumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, dengan prioritas sebagai berikut :

a. Penguatan Ekonomi Kerakyatan untuk tercapainya percepatan pertumbuhan ekonomi;
b. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (*good governance*);
c. Penanggulangan kemiskinan; dan
d. Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026;
36. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026; dan
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3 KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan, dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2026 pelaksanaan RKPD Tahun 2026 dengan dan tetap berpedoman pada RPJPD, RPJMD, dan Renstra. Selain berdasarkan evaluasi capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2026 dokumen Perubahan RKPD juga disusun berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 untuk penyesuaian struktur anggaran. Dokumen Perubahan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta Penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) yang nantinya menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun renja, RKA, dan DPA Perangkat Daerah. Hubungan antar dokumen tersebut tergambar dalam bagan sebagai berikut.

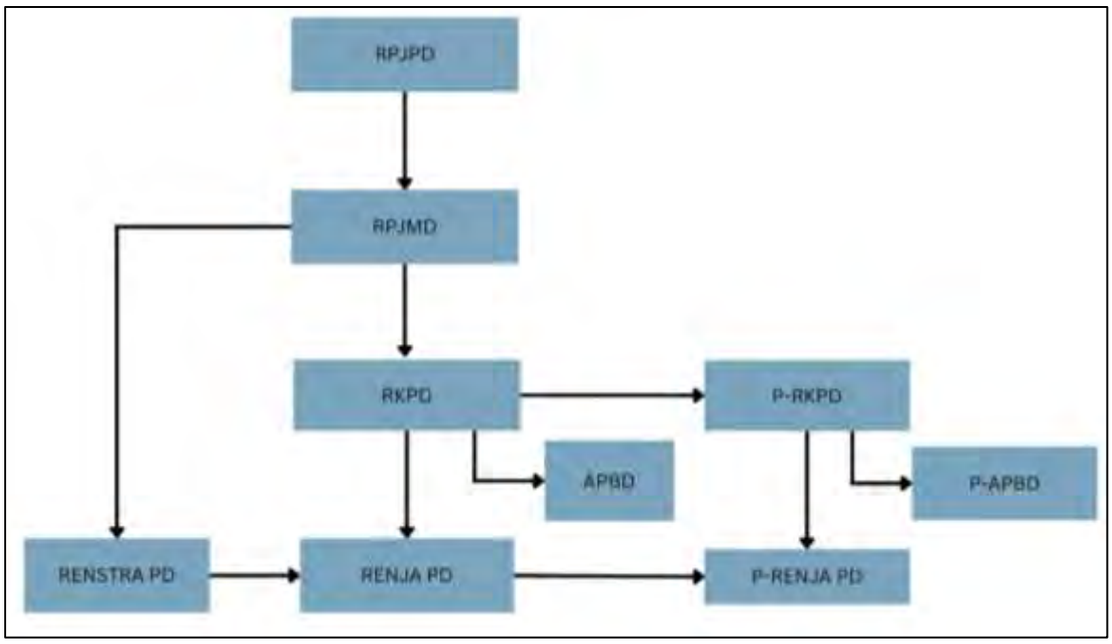

Gambar 1. 1
Keterkaitan Dokumen P-RKPD dengan Dokumen Lain

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah untuk melakukan penyesuaian perkembangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, kerangka keuangan daerah, serta rencana program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2026 Triwulan II.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026; dan
b. Menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026.

Proses penyusunan dokumen perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 meliputi:

a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
c. Penetapan perubahan RKPD. Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 meliputi sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang dan dasar pertimbangan perubahan, dasar hukum, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan kinerja sasaran pembangunan dan program semua urusan dan bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2026 sampai dengan Triwulan II.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Memuat rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026 yang disesuaikan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Upaya pencapaian target pembangunan daerah tidak terlepas dari dukungan pendanaan/ keuangan yang dalam hal ini terkait pembiayaan Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap belanja langsung pada masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung. Pendanaan belanja langsung tersebut dialokasikan tidak hanya untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 namun juga telah disinkronkan dengan dukungan pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah maupun prioritas nasional.

Realisasi anggaran Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II

No	Nama SKPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	629.301.179.146,00	356.244.498.039,00	56,61
2	Dinas Kesehatan	162.056.703.747,00	80.338.749.626,00	49,57
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	340.000.000.000,00	74.885.597.985,00	22,03
4	Puskesmas Parakan	3.073.442.000,00	1.284.335.234,00	41,79
5	Puskesmas Traji	1.610.347.000,00	729.233.415,00	45,28
6	Puskesmas Kledung	2.447.900.000,00	958.736.788,00	39,17
7	Puskesmas Bansari	2.584.719.800,00	785.335.820,00	30,38
8	Puskesmas Bulu	3.708.246.000,00	1.592.249.495,00	42,94
9	Puskesmas Temanggung	3.188.937.791,00	1.208.620.114,00	37,90
10	Puskesmas Dharma Rini	2.652.894.889,00	1.164.077.544,00	43,88
11	Puskesmas Tlogomulyo	1.968.295.063,00	702.783.162,00	35,71
12	Puskesmas Tembarak	2.848.099.800,00	1.160.275.592,00	40,74
13	Puskesmas Selopampang	2.588.046.000,00	1.070.551.849,00	41,37
14	Puskesmas Kranggan	2.104.493.625,00	999.459.027,00	47,49
15	Puskesmas Pare	1.595.419.400,00	702.929.813,00	44,06
16	Puskesmas Pringsurat	3.369.928.000,00	1.142.174.891,00	33,89
17	Puskesmas Rejosari	1.891.606.000,00	848.196.164,00	44,84
18	Puskesmas Kaloran	2.215.317.825,00	981.174.779,00	44,29
19	Puskesmas Tepusen	1.631.865.000,00	699.748.578,00	42,88
20	Puskesmas Kandangan	3.811.933.800,00	1.575.941.096,00	41,34
21	Puskesmas Kedu	4.067.440.000,00	1.521.863.181,00	37,42
22	Puskesmas Ngadirejo	4.327.079.000,00	2.022.868.906,00	46,75
23	Puskesmas Banjarsari	1.995.542.008,00	806.526.788,00	40,42
24	Puskesmas Jumo	2.653.613.000,00	989.180.957,00	37,28
25	Puskesmas Gemawang	3.702.510.000,00	1.556.860.262,00	42,05
26	Puskesmas Candiroto	2.940.500.000,00	1.178.047.046,00	40,06
27	Puskesmas Bejen	3.683.288.000,00	1.411.804.921,00	38,33
28	Puskesmas Tretep	1.986.650.000,00	700.765.768,00	35,27

No	Nama SKPD	Anggaran	Realisasi	%
29	Puskesmas Wonoboyo	3.673.209.890,00	1.511.846.162,00	41,16
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69.769.053.398,00	9.216.852.081,00	13,21
31	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	34.022.768.431,00	11.678.483.746,00	34,33
32	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	10.813.291.151,00	4.738.189.211,00	43,82
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.162.558.720,00	1.871.846.361,00	44,97
34	Dinas Sosial	17.702.568.111,00	4.810.084.828,00	27,17
35	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.324.253.819,00	3.825.921.601,00	33,79
36	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	47.281.299.559,00	12.689.869.852,00	26,84
37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.119.009.993,00	2.692.765.746,00	44,01
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.099.517.515,00	3.901.207.432,00	48,17
39	Dinas Perhubungan	18.721.840.387,00	8.436.693.170,00	45,06
40	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.596.025.937,00	3.860.990.353,00	44,92
41	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	18.256.206.687,00	7.882.694.116,00	43,18
42	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.615.055.100,00	1.664.108.680,00	46,03
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11.717.798.966,00	2.139.870.734,00	18,26
44	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.926.159.334,00	2.162.238.239,00	43,89
45	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8.331.234.239,00	3.495.067.093,00	41,95
46	Bagian Pemerintahan	112.500.000,00	25.860.000,00	22,99
47	Bagian Hukum	456.000.000,00	128.072.500,00	28,09
48	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina mental	29.249.975.350,00	827.836.424,00	2,83
49	Bagian Perekonomian	526.250.000,00	78.467.900,00	14,91
50	Bagian Pembangunan	34.151.700,00	12.663.925,00	37,08
51	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	23.695.050,00	5.263.351,00	22,21
52	Bagian Umum	26.972.888.067,00	11.911.322.051,00	44,16
53	Bagian Organisasi	79.343.750,00	18.649.017,00	23,50
54	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.231.558.600,00	945.830.474,00	42,38
55	Sekretariat DPRD	49.878.282.142,00	19.127.359.750,00	38,35
56	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.739.287.011,00	3.082.723.119,00	45,74
57	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	400.225.907.997,00	130.845.279.702,00	32,69
58	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.763.614.414,00	2.401.922.279,00	41,67
59	Inspektorat	23.121.405.722,00	4.597.958.503,00	19,89
60	Kecamatan Temanggung	12.827.959.523,00	6.616.013.609,00	51,57
61	Kelurahan Temanggung I	510.206.380,00	84.119.873,00	16,49
62	Kelurahan Temanggung II	493.189.118,00	93.075.955,00	18,87
63	Kelurahan Butuh	600.635.800,00	100.153.135,00	16,67
64	Kelurahan Jampiroso	706.200.083,00	76.360.371,00	10,81
65	Kelurahan Jampirejo	771.912.880,00	67.427.195,00	8,74
66	Kelurahan Kertosari	784.016.008,00	82.002.341,00	10,46
67	Kelurahan Banyuurip	362.779.500,00	74.416.443,00	20,51
68	Kelurahan Kowangan	726.538.215,00	81.981.566,00	11,28

No	Nama SKPD	Anggaran	Realisasi	%
69	Kelurahan Jurang	451.110.900,00	92.569.832,00	20,52
70	Kelurahan Tlogorejo	606.721.000,00	171.337.282,00	28,24
71	Kelurahan Kebonsari	385.415.380,00	93.914.536,00	24,37
72	Kelurahan Manding	485.675.870,00	97.267.844,00	20,03
73	Kelurahan Mungseng	456.739.000,00	74.126.066,00	16,23
74	Kelurahan Purworejo	394.429.070,00	73.578.735,00	18,65
75	Kelurahan Giyanti	700.944.380,00	79.335.226,00	11,32
76	Kelurahan Madureso	607.301.500,00	71.161.015,00	11,72
77	Kelurahan Sidorejo	536.883.500,00	111.316.326,00	20,73
78	Kelurahan Walitelon Selatan	669.274.536,00	76.084.088,00	11,37
79	Kelurahan Walitelon Utara	939.149.500,00	68.520.704,00	7,30
80	Kecamatan Tembarak	1.613.419.987,00	819.906.069,00	50,82
81	Kecamatan Pringsurat	2.158.546.558,00	1.042.799.016,00	48,31
82	Kecamatan Kaloran	1.809.505.602,00	916.435.141,00	50,65
83	Kecamatan Parakan	3.063.710.052,00	1.583.669.357,00	51,69
84	Kelurahan Parakan Kauman	1.135.658.510,00	113.715.824,00	10,01
85	Kelurahan Parakan Wetan	668.222.762,00	101.249.588,00	15,15
86	Kecamatan Bulu	1.937.030.372,00	963.096.181,00	49,72
87	Kecamatan Kedu	1.888.050.082,00	910.088.656,00	48,20
88	Kecamatan Kandangan	1.796.402.886,00	855.687.268,00	47,63
89	Kecamatan Candiroto	1.920.413.568,00	946.046.950,00	49,26
90	Kecamatan Ngadirejo	2.678.611.437,00	1.321.853.345,00	49,35
91	Kelurahan Manggong	461.907.500,00	51.808.920,00	11,22
92	Kecamatan Jumo	1.909.321.716,00	974.446.205,00	51,04
93	Kecamatan Wonoboyo	1.764.309.973,00	899.511.179,00	50,98
94	Kecamatan Kranggan	2.422.836.135,00	1.197.688.138,00	49,43
95	Kelurahan Kranggan	748.742.950,00	83.411.889,00	11,14
96	Kecamatan Bejen	1.996.059.589,00	971.246.971,00	48,66
97	Kecamatan Kledung	2.035.670.753,00	1.020.610.595,00	50,14
98	Kecamatan Bansari	1.784.276.957,00	899.559.001,00	50,42
99	Kecamatan Tlogomulyo	1.961.470.894,00	1.008.033.653,00	51,39
100	Kecamatan Selopampang	1.698.632.761,00	825.932.983,00	48,62
101	Kecamatan Gemawang	1.802.167.083,00	819.460.371,00	45,47
102	Kecamatan Tretep	1.840.314.712,00	914.752.436,00	49,71
103	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.170.845.796,00	1.679.421.524,00	27,22
	Jumlah	**2.103.835.918.712,00**	**829.055.718.642,00**	**39,41**

Sumber BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2026

Capaian kinerja keuangan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II sebesar 39,41 % capaiannya masih sangat rendah. Faktor pengambatnya diantaranya adalah :

1. Belanja KKPD baru dilaksanakan mulai Bulan April dan mulai dibayarkan di Bulan Mei.
2. Realisasi BOS s.d. Semester I belum selesai, sehingga belum masuk realisasi.
3. Belanja yang sifatnya pengadaan/fisik masih berproses.

2.2 EVALUASI KINERJA UTAMA

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan

dengan membandingkan target, realisasi dan capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja sasaran dan indikator program terhadap target RPJMD Tahun 2025-2029 dengan mencantumkan status capaiannya. Adapun status capaian digambarkan dalam simbol penanda dengan bentuk dan warna yang berbeda untuk memudahkan evaluasi. Untuk mengukur capaian kinerja, digunakan skala nilai yang terdapat didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tabel 2.2.

Tabel 2. 2
Simbol dan Status Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100,00%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90,00%	Tinggi
3	66% ≤ 75,00%	Sedang
4	51% ≤ 65,00%	Rendah
5	≤ 50,00%	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, bahwa indikator tujuan merupakan indikator kinerja utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2.1. Indikator Kinerja Tujuan

Evaluasi capaian Kinerja Tujuan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana pada tabel 2.3.

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) s.d Triwulan II Tahun 2026

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026		Capaian s.d. TW II 2026 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
					Target 2026	Realisasi s.d TW II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6	7	8	10
1	Mewujudkan Mesyarakat Temanggung yang Sejahtera, Partisipatif, Setara, Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan, Mudah Mengakses Layanan Publik dan adanya Rasa Aman	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,66	5.10 - 5.50	5,73**	100	Sangat Tinggi
		Tingkat Kemiskinan	Persen	7,78	7.90 - 7.85	7,78*	100	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87,66	87.56	87,66*	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							**100**	**Sangat Tinggi**

Sumber : BPS, Bapperida Kabupatan Temanggung Tahun 2026
Keterangan) menggunakan angka Tahun 2025*
***) Masing angka sementara sd TW I 2026*

Capaian rata-rata indikator kinerja tujuan RPJMD sampai dengan Triwulan II sebesar 100 % dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Penjelasan terkait peningkatan kinerja dari indikator kinerja, sebagai

berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

   Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2025 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu 5,66 persen (2024 = 5,02 persen). Sektor Industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Temanggung yaitu sebesar 25,34 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 3,45 persen. Dari angka-angka indeks harga implisit PDRB dapat diketahui kenaikan harga dari waktu ke waktu baik secara agregat maupun secara sektoral. Untuk angka Tahun 2026 Pertumbuhan Ekonomi menggunakan PDRB TW I 2026 ADHK secara Y on Y tumbuh sekita 5,73%. Karena Kategori F (kontruksi), G2 (perdagangan besar dan eceran non mobil dan motor, H2 (angkutan darat), J (komunikasi dan informasi) naik dengan adanya momen puasa, lebaran, bansos, THR, MBG dan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) lebih dominan dibanding TW I 2025.

2. Tingkat Kemiskinan

   Tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dengan capaian 7,78% mengalami penurunan positif yaitu 0,89 persen dibandingkan capaian Tahun 2024. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di Garis Kemiskinan/GK) pada Maret 2025 sebesar 62,05 ribu jiwa, turun 6,72 ribu jiwa dibanding Maret 2024 yang sebanyak 68,77 ribu jiwa.

   Garis Kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp.443.089,-per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp.27.003,-bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2024 yang sebesar Rp. 416.086,-.

   Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2025 sebesar 0,67 mengalami penurunan sebesar 0,30 poin jika dibandingkan Maret 2024 yaitu sebesar 0,97.

   Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Pada Maret 2025 sebesar 0,10 mengalami penurunan sebesar 0,08 poin dibandingkan Maret 2024 yaitu sebesar 0,18.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

   Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.Berdasarkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yaitu 87,66 atau dengan predikat BAIK.

2.2.2. Indikator Kinerja Sasaran

Evaluasi capaian kinerja sasaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana pada tabel 2.4.

Tabel 2. 4
Capaian Kinerja Sasaran S.D Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2026 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
					Target 2026	Realisasi s.d TW II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6	7	8	10
1.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Indek Pembangunan Manusia	Angka	72,52	73,3	72,52	98,08	Sangat Tinggi
2.		PDRB Perkapita (Juta Rupiah /tahun)	Juta Rupiah	38	39,31	38	96,67	Sangat Tinggi
3.		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,31	2.20 - 2.00	2,31	95,24	Sangat Tinggi
4.	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	72,54	75,5	72,54	96,08	Sangat Tinggi
5.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing (%)	%	70,72	73,8	59,93	81,21	Tinggi
6.		Indeks Integritas Nasional	Angka	77,93	77,72	77,93	99,91	Sangat Tinggi
7.		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	87,27	86,23	87,27	100,00	Sangat Tinggi
8.	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini / Gini Rasio	Angka	0,356	0.370-0.360	0,356	100,00	Sangat Tinggi
9.		Indeks Pembangunan Gender	Angka	96,27	97,13	96,01	98,85	Sangat Tinggi
10	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.	Indeks Harmoni	Angka	6,72	6,79	6,72	98,97	Sangat Tinggi
RATA-RATA SASARAN							**96,00**	**Sangat Tinggi**

Sumber: BAPPERIDA KabupatenTemanggung, 2025, data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator Sasaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 pada 10 indikator dengan capaian rata-rata kinerja 96,00% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi.

2.2.3.Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan. Ada 105 indikator terbagi pada 4(empat) aspek pada Indikator kinerja daerah diantaranya :

1. Aspek geografi dan demografi dengan 14 indikator;
2. Aspek kesejahteraan masyarakat dengan 46 indikator;
3. Aspek daya saing dengan 36 indikator; dan
4. Aspek pelayanan umum dengan 8 indikator.

Indikator kinerja daerah (IKD) merupakan indikator tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKUPD). Secara lengkap indikator kinerja daerah Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel 2.5.

Tabel 2. 5
Capaian Kinerja Kinerja Daerah (IKD) s.d Triwulan II Tahun 2026

No	Aspek/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026		Tingkat Capaian Rpjmd S.D. Tahun 2026 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
				Target 2026	Realisasi s.d TW II		
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**						
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	11,72	9,29	11,23	84,23	Tinggi
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	19,08	31,13	33,60	100,00	Sangat Tinggi
3	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	22,25	22,3	22,27	99,87	Sangat Tinggi
4	Disparitas Harga	%	1,65	±10	0,35	100,00	Sangat Tinggi
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	68,25	75,5	72,54	96,08	Sangat Tinggi
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	TonCO2eq	690.921,63	75,5	713,957.59	63,23	Rendah
7	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	3,11	13,06	0,85	25,52	Sangat Rendah
8	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah	%	32,98	34,14	32,13	94,12	Sangat Tinggi
9	Cakupan pelayanan persampahan	%	74,39	77,85	77,51	99,56	Sangat Tinggi
10	Indeks Risiko Bencana	Angka	105,76	101,48	113,08	89,74	Tinggi
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,58	0,61	0,61	100,00	Sangat Tinggi

No	Aspek/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026		Tingkat Capaian Rpjmd S.D. Tahun 2026 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
				Target 2026	Realisasi s.d TW II		
12	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	78,91	79,63	68,50	86,02	Tinggi
13	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	89,43	90,03	89,87	99,82	Sangat Tinggi
14	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,8	0,78	0,77	100,00	Sangat Tinggi
Capaian Kinerja Aspek Geografi dan Demografi						**88,44**	**Tinggi**
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
15	Tingkat kemiskinan	%	8,67	7.85-7.90	7,78	100,00	Sangat Tinggi
16	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	71,86	73,3	72,52	98,94	Sangat Tinggi
17	Usia Harapan Hidup	tahun	75,94	76,45	76,16	99,62	Sangat Tinggi
18	Jumlah kematian ibu	kasus	5	5	6	83,33	Tinggi
19	Jumlah kematian balita	kasus	117	158	34	100,00	Sangat Tinggi
20	Prevalensi Stunting	%	27,3	23,05	14,34	100,00	Sangat Tinggi
21	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	%	na	62	61,54	99,26	Sangat Tinggi
22	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	95,54	95,75	94,15	99,26	Sangat Tinggi
23	Persentase kecamatan memenuhi syarat kesehatan lingkungan	%	na	12	20	100,00	Sangat Tinggi
24	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	na	84	100	100,00	Sangat Tinggi
25	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD	%	87,6	88	89,95	100	Sangat Tinggi
26	Net Death Rate (NDR)	per mill	20,3	20	22,38	99,80	Sangat Tinggi
27	Persentase anggota rumah tangga dengan aktivitas fisik yang cukup	%	na	3	16,99	100,00	Sangat Tinggi
28	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	66,31	74	28,70	35,87	Sangat Rendah
29	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	81,00	87	70,17	80,66	Tinggi
30	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	17,83	21,22	19,40	91,42	Sangat Tinggi
31	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,56	7,59	7,61	100,00	Sangat Tinggi
32	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,88	13,16	12,63	95,97	Sangat Tinggi
33	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 tahun	Tahun	8,00	8,04	7,99	99,38	Sangat Tinggi
34	Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	61,48	62,19	58,89	94,69	Sangat Tinggi
35	Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	71,09	71,87	70,70	98,37	Sangat Tinggi

No	Aspek/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026		Tingkat Capaian Rpjmd S.D. Tahun 2026 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
				Target 2026	Realisasi s.d TW II		
36	Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	48,19	50,55	49,23	97,39	Sangat Tinggi
37	Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	63,55	64,84	62,98	97,13	Sangat Tinggi
38	Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional	%	77,23	77,79	68,00	95,61	Sangat Tinggi
39	Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada asesmen nasional	%	76,88	77,51	75	96,76	Sangat Tinggi
40	Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional	%	70,55	71,67	60	83,72	Tinggi
41	Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional	%	72,05	72,84	71	97,47	Sangat Tinggi
42	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	6,2	6,27	5,38	85,81	Tinggi
43	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	94,66	95,41	100	100,00	Sangat Tinggi
44	Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun	%	98,89	99,00	97,98	98,97	Sangat Tinggi
45	Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan	%	44,19	52,40	43,48	82,98	Tinggi
46	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
47	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	angka	60,48	60,73	24,03	39,57	Sangat Rendah
48	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	angka	0,0038	0,15	0,1438	95,87	Sangat Tinggi
49	Jumlah kejadian konflik SARA (IUP)	kejadian	8	8	0	100,00	Sangat Tinggi
50	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	angka	63,17	64,79	73	100,00	Sangat Tinggi
51	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	70,18	60,32	100,00	100,00	Sangat Tinggi
52	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04	5.10 - 5.50	5,73	100,00	Sangat Tinggi
53	Indeks Pembangunan Gender	angka	96,27	97,13	96,27	98,85	Sangat Tinggi
54	Indeks Ketimpangan Gender	angka	0,22	0,201	0,22	91,36	Sangat Tinggi
55	Indeks Pemberdayaan Gender	angka	74,28	74,35	74,28	99,91	Sangat Tinggi
56	Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan	Persen	n.a	100	100	100,00	Sangat Tinggi

No	Aspek/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026		Tingkat Capaian Rpjmd S.D. Tahun 2026 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
				Target 2026	Realisasi s.d TW II		
	dan anak						
57	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	Angka	2,19	2,17	1,24	100,00	Sangat Tinggi
58	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	35,49	39,31	38	96,67	Sangat Tinggi
59	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	2,35	2.20 - 2.00	2,31	95,24	Sangat Tinggi
60	Indeks Gini/ Gini Rasio	Angka	0,383	0.370-0.360	0,356	100,00	Sangat Tinggi
Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat						**94,13**	**Sangat Tinggi**
III	**ASPEK DAYA SAING**						
61	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	1,22	1,88	1,24	65,93	Sedang
62	*Return on Asset* (RoA) BUMD	%	3,23	4,29	1,60	37,30	Sangat Rendah
63	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	2,16	2,29	2,02	91,56	Sangat Tinggi
64	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,1	3,15	2,43	77,14	Tinggi
65	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	68,52	69,59	69,20	99,44	Sangat Tinggi
66	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,55	2,65	2,66	100,00	Sangat Tinggi
67	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	72,42	73,5	88,88	100,00	Sangat Tinggi
68	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Milyar	2	2,152	969	45,03	Sangat Rendah
69	Nilai Ekspor	US $	13.254.118 .160	126.276.147	36,169,891	28,64	Sangat Rendah
70	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	88,92	89,85	85,92	95,63	Sangat Tinggi
71	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	41,55	42,03	42,03	100,00	Sangat Tinggi
72	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	angka	58,87	59,26	58,90	100	Sangat Tinggi
73	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	%	96,31	96,43	96,70	100,00	Sangat Tinggi
74	Persentase rumah tangga dengan akses internet	%	90,52	91,5	94,24	100,00	Sangat Tinggi
75	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	%	68,40	73,8	64,93	87,98	Tinggi
76	Persentase desa mandiri	%	37,97	41,35	52,63	100,00	Sangat Tinggi
77	Tingkat Inflasi (%)	%	1,52	1.50 - 2.50	0,31	20,67	Sangat Rendah
78	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang	80	90	112	100	Sangat Tinggi
79	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir	%	9,09	49,35	16,67	20,45	Sangat Rendah
80	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan	%	44,76	20,7	10,09	80,52	Tinggi

No	Aspek/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026		Tingkat Capaian Rpjmd S.D. Tahun 2026 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
				Target 2026	Realisasi s.d TW II		
	Budaya Tak Benda(WBTB) yang dilestarikan						
81	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	26.944	29,706	23,009	77,46	Tinggi
82	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	25,53	27,44	25,34	92,35	Sangat Tinggi
83	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,85	1,91	1,91	100,00	Sangat Tinggi
84	Rasio PDRB Perdagangan	%	21,07	21	20,78	98,95	Sangat Tinggi
85	Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	22,47	22,35	23,01	100,00	Sangat Tinggi
86	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%)	Persen	2,61	2,76	2,54	92,03	Tinggi
87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK)	%	78,06	78.42-78.80	77,77	99,17	Sangat Tinggi
88	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	%	16,84	17,87	17,51	97,99	Sangat Tinggi
89	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,22	0,48	0,71	100,00	Rendah
90	Persentase Pemuda Berprestasi	%	16,66	24,00	25,71	100,00	Sangat Tinggi
91	Persentase Atlet Berprestasi	%	83,19	83,81	42,86	51,14	Rendah
92	Persentase Prestasi Olahraga	%	92,86	94,28	75	79,91	Tinggi
93	Persentase Wirausaha Muda	%	10,31	14,00	10,35	73,90	Sedang
94	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	%	9,36	13,00	24,99	100,00	Sangat Tinggi
95	Persentase Atlet Unggulan	%	n.a.	30,00	19,81	66,04	Sedang
96	Persentase Cabang Olahraga Unggulan	%	n.a.	55,00	58,14	100,00	Sangat Tinggi
97	Indeks Zakat Nasional	Angka	0,8	0,81	0,53	65,43	Rendah
Capaian Kinerja Aspek Daya Saing						**82,29**	**Tinggi**
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
98	Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,88	97,08	97,12	100,00	Sangat Tinggi
99	Indeks Integritas Nasional	Angka	76,91	77,72	77,93	99,91	Sangat Tinggi
100	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	nilai	3,64	3,75	3,80	100,00	Sangat Tinggi
101	Indeks pelayanan publik	angka	4,29	3,8	4,29	100,00	Sangat Tinggi
102	Indeks reformasi birokrasi	angka	86,13	86,23	87,27	100,00	Sangat Tinggi
103	Indeks kualitas kebijakan	angka	48,25	66	75,71	100,00	Sangat Tinggi
104	Indeks Harmoni	angka	n.a	6,79	6,72	98,97	Sangat Tinggi
105	Indek Kepuasan Masyarakat	Angka	86,91	87,56	87,66	100,00	Sangat Tinggi
Capaian Kinerja Pelayanan Umum						**99,86**	**Sangat Tinggi**
Capaian Indikator Kinerja Daerah						**89,45**	**Tinggi**

Sumber: BAPPERIDA KabupatenTemanggung, 2026, data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator Kinerja Daerah (IKD) sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 pada 105 indikator dengan capaian rata-rata kinerja 89,45% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Dari 105

indikator masih ada 4 indikator dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat rendah diantarnya adalah:

1. Aspek geografi dan demografi dengan 14 indikator dengan rata-rata capaian kinerja 88,44% kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi;
2. Aspek kesejahteraan masyarakat dengan 46 indikator dengan rata-rata capaian kinerja 94,13% kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi;
3. Aspek daya saing dengan 36 indikator dengan rata-rata capaian kinerja 82,29% kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi; dan
4. Aspek pelayanan umum dengan 8 indikator dengan rata-rata capaian 99,86% kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi.

2.3 EVALUASI KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan terdiri dari 21 indikator IKUPD dan 30 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel 2.6.

Tabel 2. 6
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sampai dengan TW II Tahun 2026

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2025	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
					2026	2026			
A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
1		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	89,17	89,20	89,17	99,97	Sangat Tinggi	Dindikpora
2		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	73,45	74,23	73,45	98,95	Sangat Tinggi	Dindikpora
Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar									
3		Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 tahun	Tahun	7,99	8,04	7,99	99,38	Sangat Tinggi	Dindikpora
4		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,61	7,59	7,61	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
5		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,63	13,16	12,63	95,97	Sangat Tinggi	Dindikpora

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2025	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
					2026	2026			
6		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	5,38	6,27	5,38	85,81	Tinggi	Dindikpora
7		Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional	%	73,84	77,79	73,84	94,92	Sangat Tinggi	Dindikpora
8		Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada asesmen nasional	%	77,45	77,51	77,45	99,92	Sangat Tinggi	Dindikpora
9		Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional	%	73,84	71,67	72,29	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
10		Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional	%	75,08	72,84	75,08	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
11		Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	angka	62,48	62,19	62,48	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
12		Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	angka	72,19	71,87	72,19	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
13		Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	angka	54,33	50,55	54,33	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
14		Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	angka	63,53	64,84	63,53	97,98	Sangat Tinggi	Dindikpora
15		Proporsi PAUD terakreditasi minimal B	%	88,46	82,00	87,12	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
16		Persentase SD terakreditasi minimal B	%	98,85	100,00	98,85	98,85	Sangat Tinggi	Dindikpora
17		Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	96,39	96,00	96,39	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
18		Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	%	78,26	76,92	60,00	78,00	Tinggi	Dindikpora

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2025	Target Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
19		Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun	%	89,75	95,41	100	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
20		Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun	%	98,41	99,00	97,98	98,97	Sangat Tinggi	Dindikpora
21		Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun kesetaraan	%	35,97	52,40	43,48	82,98	Tinggi	Dindikpora
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	Program Pengelolaan Pendidikan								
1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	%	46,07	57,45	44,09	76,74	Tinggi	Dindikpora
2		Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	%	55,63	64,25	56,76	88,35	Tinggi	Dindikpora
3	Meningkatnya Kompetensi Pendidik	Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	64,00	70,00	84,32	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
4		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	64,17	66,04	68,28	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
5		Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	%	90,00	72,00	75,25	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
6		Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	90	86,53	95,68	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
7		Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik	%	33,33	16,60	33,33	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
8		Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	%	58,21	28,57	58,21	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
9	Terciptanya iklim lingkungan	Iklim Inklusivitas SD	Angka	53,25	56,69	53,25	93,93	Sangat Tinggi	Dindikpora

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2025	Target Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
	belajar yang aman. berkebhinekaan dan Inklusi								
10		Iklim Keamanan SD	Angka	68,55	73,22	68,55	93,62	Sangat Tinggi	Dindikpora
11		Iklim Kebhinekaan SD	Angka	66,26	71,78	66,26	92,31	Sangat Tinggi	Dindikpora
12		Iklim Inklusivitas SMP	Angka	57,16	62,04	57,16	92,13	Sangat Tinggi	Dindikpora
13		Iklim Keamanan SMP	Angka	67,69	70,41	67,69	96,14	Sangat Tinggi	Dindikpora
14		Iklim Kebhinekaan SMP	Angka	67,46	71,32	67,46	94,59	Sangat Tinggi	Dindikpora
15	Tercukupinya kebutuhan pendidik	Rasio Guru/Siswa SD	angka	1:14	01:28	1:14	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
16		Rasio Guru/Siswa SMP	angka	1:17	01:32	1:17	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
17		Rasio Guru/Siswa PAUD	angka	1:17	01:15	01:17	97,33	Sangat Tinggi	Dindikpora
18		Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
19	Meningkatnya Kesempatan bersekolah	APK SD Sederajat	%	100,7	99,71	97,82	98,10	Sangat Tinggi	Dindikpora
20		APM SD Sederajat	%	95,49	93,11	92,94	99,82	Sangat Tinggi	Dindikpora
21		APK SMP Sederajat	%	103,5	100	96,15	96,15	Sangat Tinggi	Dindikpora
22		APM SMP Sederajat	%	84,03	86,65	78,12	90,16	Sangat Tinggi	Dindikpora
23		APM PAUD (5-6)	%	90,72	85,95	86,18	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
24		Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD	%	99,06	100	99,06	99,06	Sangat Tinggi	Dindikpora
25	Menurunnya Angka Tidak Sekolah	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	angka	399	266	382	56,39	Rendah	Dindikpora
26		Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat	angka	1038	620	1019	35,65	Sangat Rendah	Dindikpora
27		Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	angka	1046	777	1050	66,41	Rendah	Dindikpora
66,41	Rendah	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat	angka	3168	2379	3164	67,42	Sedang	Dindikpora
67,42	Sedang	Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun	angka	181	220	179	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2025	Target Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
100,00	Sangat Tinggi	Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun	angka	230	255	229	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
100,00			Sangat Tinggi	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD**			**95,92**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**30**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**90,26**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG PENDIDIKAN			**51**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PENDIDIKAN**			**93,09**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA KabupatenTemanggung, 2026, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian IKUPD sebesar 95,92% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Rata-rata capaian indicator program sebesar 90,26% dengan skala nilai peringkat kinerja Tinggi. Capaian kinerja Bidang Pendidikan sampai dengan Triwulan II 93,09% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Masih ada 1 indikator dengan kriterian penilaian realisasi kinerja sangat rendah yaitu angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat dikarenakan masih terdapat siswa SD yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kinerja penyenggaraan Urusan Bidang Kesehatan ada pada Dinas Kesehatan dan RSUD, indikator pada Dinas Kesehatan terdiri dari 11 indikator kinerja IKUPD dan 42 indikator program, sedangkan pada RSUD terdiri dari 2 indikator IKUPD dan 10 indikator program dengan capaian kinerja sebagaimana tabel 2.7.

Tabel 2. 7
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
					2026	2026			
	1	Nilai IKM Perangkat Daerah	angka	93,98	94,23	93,98	99,73	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	angka	70,6	70,8	70,6	99,72	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	1	Usia Harapan Hidup	tahun	76,16	76,45	76,16	99,62	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	2	Jumlah kasus kematian ibu	kasus	0	5	6	83,33	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	3	Jumlah kematian balita	kasus	16	158	34	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	4	Prevalensi Stunting	%	14,16	23,05	14,34	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	5	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	%	61,54	62	61,54	99,26	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	93,45	95,75	94,15	98,33	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	7	Persentase kecamatan memenuhi syarat kesehatan lingkungan	%	55	12	20	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	100	84	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	9	Persentase anggota rumah tangga dengan aktivitas fisik yang cukup	%	3,72	3	16,99	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat									

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
					2026	2026			
Menurunnya kasus kematian ibu	1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	100	44,13	44,13	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
	2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,00	100	45,28	45,28	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
Menurunnya kasus kematian balita	3	Angka kematian bayi	Per 1.000 KH	11,55	11,84	4,49	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	4	Angka kematian neonatal	Per 1.000 KH	8,02	8,24	3,27	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	100	45,22	45,22	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
	6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100,00	100	49,62	49,62	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
Menurunnya kasus dan faktor resiko stunting	7	Prevalensi wasting balita	%	3,93	7,5	3,57	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	8	Insiden Stunting balita (kasus baru)	%	1,51	3	1,33	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	9	Persentase anemia pada ibu hamil	%	11,10	11,2	5,29	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
Terpenuhinya pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup sesuai standar	10	Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	%	94,97	100	91,39	87,93	Tinggi	Dinas Kesehatan

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
					2026	2026			
	11	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	%	99,71	100	50,96	50,96	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
	12	Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan	%	95,41	100	52,34	52,34	Rendah	Dinas Kesehatan
Meningkatnya tata kelola pelayanan kesehatan	13	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	41,26	25	31,54	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	14	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	88,91	84,5	89,21	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	15	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN	%	77,10	83	87,66	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	16	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna	%	96,67	96,67	96,67	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	17	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	100,00	85	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	18	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	%	80,65	100	54,84	54,84	Rendah	Dinas Kesehatan
Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	19	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100,00	100	65,62	65,62	Rendah	Dinas Kesehatan

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
					2026	2026			
	20	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100,00	100	57,51	57,51	Rendah	Dinas Kesehatan
	21	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100	66,87	66,87	Rendah	Dinas Kesehatan
	22	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	96,62	100	50,14	50,14	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
	23	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100,00	100	82,48	82,48	Tinggi	Dinas Kesehatan
	24	Prevalensi Obesitas	%	8,77	15	6,91	46,06	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
	25	Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	%	100	73,08	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	26	Insidensi Hepatitis B	per 100.000 penduduk	5,33	20	2,30	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	27	Prevalensi kusta	per 10.000 penduduk	0,02	1	0,02	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	28	Eliminasi Rabies	%	0	0	0	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
					2026	2026			
	29	Penurunan Angka Kematian Dengue	%	0	0,4	0	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	30	Eliminasi Malaria	%	0	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	31	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	99,62	100	51,16	51,16	Rendah	Dinas Kesehatan
	32	Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	%	100	80	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kepesertaan jaminan kesehatan nasional	33	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	%	68,69	69,58	65,41	94,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	34	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis	%	91,89	50	83,89	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan	35	Persentase Desa /Kelurahan STBM	%	85,12	25	92,39	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	36	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	%	55,96	20	42,89	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
Meningkatnya masyarakat berperilaku hidup sehat	37	Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	%	80,00	19	85,70	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	38	Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	%	2,56	5	4,04	80,77	Tinggi	Dinas Kesehatan

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan									
Meningkatnya kuantitas. kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	39	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	per 1000 penduduk	2,35	2,28	2,48	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi . Alat Kesehatan. dan Makanan Minuman / Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Pemerintah Daerah									
Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	40	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	100	62	81,82	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	41	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	54,29	58	8,57	14,78	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan									
Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	42	Persentase posyandu aktif bidang kesehatan	%	99,34	87	99,34	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
JUMLAH IKUPD			**11**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD**			**98,18**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**42**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**81,98**	**Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR DINAS KESEHATAN			**53**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG KESEHATAN**			**90,08**	**Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA KabupatenTemanggung, 2026, data diolah

Berdasarkan tabel di atas capaian rata-rata indikator IKUPD bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar 98,18% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi, rata-rata capaian pada indikator program bidang kesehatan sebesar 81,98% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sedang. Masih ada 7 indikator dengan kriteria penilaian realisasi kenerja sangat rendah diantaranya adalah:

1. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
3. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
5. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar
6. Prevelensi Obesitas
7. Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan

Dapat dilihat rata-rata capaian kinerja bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebasar 90,08% dengan skala capaian tinggi. Pada capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dapat di lihat pada tabel 2.8.

Tabel 2. 8
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada RSUD s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung jawab
				2025	2026	2026			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar									
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD	Angka	87,97	88	89,95	100	Sangat Tinggi	RSUD
	2	Net Death Rate	per mill	18,48	20,25	22,38	90,48	Sangat Tinggi	RSUD
INDIKATOR PROGRAM									

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung jawab
				2025	2026	2026			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
Meningkatnya fasilitas pelayanan di RSUD	1	Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit (%)	%	100	100	0	0,00	Sangat Rendah	RSUD
	2	Persentase capaian pengembangan rumah sakit (%)	%	100	100	0	0,00	Sangat Rendah	RSUD
	3	Persentase capaian pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan (%)	%	100	100	0	0,00	Sangat Rendah	RSUD
Meningkatnya kualitas pelayanan di RSUD	4	Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah Sakit	Nilai	91,2	92 (Paripurna)	91,2	99,13	Sangat Tinggi	RSUD
	5	Persentase indikator mutu pelayanan medis yang mencapai target	%	60	80	100	100	Sangat Tinggi	RSUD
	6	Persentase indikator mutu penunjang medis dan nonmedis yang mencapai target	%	75	80	75	93,75	Sangat Tinggi	RSUD
	7	Persentase indikator mutu keperawatan yang mencapai target	%	93,5	82	25	30,49	Sangat Rendah	RSUD
Meningkatnya kualitas BLUD RSUD	8	Peringkat Penilaian Kinerja BLUD RSUD	Nilai	93,5	94 (Peringkat AA)	93,5	99,47	Sangat Tinggi	RSUD
	9	Persentase kecukupan SDMK sesuai standar	%	15,60	75	89,49	100,00	Sangat Tinggi	RSUD
	10	Persentase capaian ketersediaan sarpras dan	%	84,22	80	84,34	100,00	Sangat Tinggi	RSUD

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung jawab
				2025	2026	2026			
		alkes sesuai standar							
	11	Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan	%	15,6	75	91,56	100,00	Sangat Rendah	RSUD
	12	Persentase SIMRS yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	83,33	70	83,33	100	Sangat Tinggi	RSUD
	13	Persentase indikator kinerja keuangan BLUD yang mencapai target	%	100	80	100	100	Sangat Tinggi	RSUD
JUMALAH INDIKATOR IKUPD			**2**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD**			**95,24**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**13**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**70,99**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG KESEHATAN/RSUD			**15**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG KESEHATAN**			**83,11**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA KabupatenTemanggung, 2026, data diolah

Capaian kinerja bidang Kesehatan pada RSUD pada indikator IKUPD sebesar 95,24% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Pada indikator program bidang urusan Kesehatan pada RSUD baru mencapai kategori sedang 70,99%, kondisi ini disebabkan karena masih adanya 4 indikator dengan skala nilai sangat rendah. Akan tetapi pada rata-rata capaian RSUD yaitu 83,11% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terdiri dari 4 indikator IKUPD dan 16 indikator kinerja dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan 3 indikator program kinerja pada dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2. 9
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s.d. Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar									
	1	Nilai IKM Perangkat Daerah	%	85,98	85,70	85,98	100,00	Sangat Tinggi	DPUPR
	2	Nilai AKIP Perangkat Daerah		75,80	73,85	75,80	100,00	Sangat Tinggi	DPUPR
	3	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum	%	61,00	*62,88*	47,27	75,17	Sedang	DPUPR
	4	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	%	57,56	70,2	66,66	94,96	Sangat Tinggi	DPUPR
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)									
Meningkatnya kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	1	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	58,90	59,26	59,28	100,00	Sangat Tinggi	DPUPR
Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum									
Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih	2	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	100	100	0	0,00	Sangat Rendah	DPUPR
	3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	60,38	59,02	60,50	100,00	Sangat Tinggi	DPUPR
	4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	19,23	31,14	19,41	62,34	Rendah	DPUPR
	5	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	19,23	31,13	33,60	100,00	Sangat Tinggi	DPUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase									

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
Meningkatnya kualitas jaringan drainase perkotaan	6	Presentase saluran drainase kondisi baik	%	69,22	69,25	69,22	99,95	Sangat Tinggi	DPUPR
Program penataan bangunan gedung									
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung	7	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	86,94	80,25	86,94	100,00	Sangat Tinggi	DPUPR
	8	Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG	%	68,83	64,64	54,17	83,80	Sangat Tinggi	DPUPR
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya									
Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	9	Persentase Trotoar Kondisi Baik	%	68,83	68,63	68,83	100,00	Sangat Tinggi	DPUPR
	10	Persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten	%	10,13	10,13	10,13	100,00	Sangat Tinggi	DPUPR
Program Penyelenggaraan Jalan									
Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan	11	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	87,90	89,85	85,92	95,63	Sangat Tinggi	DPUPR
	12	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	92,58	94,37	91,10	96,53	Sangat Tinggi	DPUPR
	13	Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	%	22,73	22,62	22,73	100,00	Sangat Tinggi	DPUPR
Program Pengembangan Jasa konstruksi									
Meningkatnya Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi	14	Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina	%	100	100	0	0,00	Sangat Rendah	DPUPR

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang									
Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang. pemanfaatan ruang. dan pengendalian pemanfaatan ruang	15	Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan tata ruang	%	98,46	90,38	99,99	100,00	Sangat Tinggi	DPUPR
	16	Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan	%	16,67	50,01	33,33	66,65	Sedang	DPUPR
JUMLAH IKUPD			**4**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD**			**92,53**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**16**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**81,55**	**Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR DPUPR			**20**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**87,04**	**Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Dari tabel di atas rata-rata capaian kinerja IKUPD yaitu 92,53% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi, dan rata-rata caiapain indikator program 81,55%, masih ada 2 indikator dengan skala nilai sangat rendah yaitu pada indikator jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari dan Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina sehingga harus diperhatiakan capaiannya pada triwulan berikutnya. Rata-rata capaian kinerja urusan bidang pekerjaan umum dan tata ruang yaitu 87,04% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi.

Pada urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang selain diampu oleh dinas DPUPR juga diampu oleh DPRKPLH, capaian pada 3 indikator program baru 68,85% dengan skala peringkat kinerja sedang dikarenakan masih ada 1 indikator dengan capaian yang sangat rendah yaitu indikator Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 10
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada DPRKPLH s.d. Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
				2025	2026	2026			
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
INDIKATOR PROGRAM									
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah									
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	**%**	0,80	13,06	0,85	6,54	Sangat Rendah	DPRKPLH
	2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) (%)	**%**	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
Program Pengmbangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional									
Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	3	Persentase jumlah TPS 3R	%	17,65	17,3	17,65	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**3**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**68,85**	**Sedang**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**3**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**68,85**	**Sedang**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diampu oleh DPRKPLH terdiri dari 3 indikator IKUPD dan 9 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja pada tabel berikut

Tabel 2. 11

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman s.d. Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
				2025	2026	2026			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
	1	Nilai IKM Perangkat Daerah		85,67	79,00	85,67	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
	2	Nilai AKIP Perangkat Daerah		74,90	75,00	74,90	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	3	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	%	84,67	72,47	84,67	100,00	Sangat Tinggi	DPRKPLH
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
Program Pengembangan Perumahan									
Meningkatnya Hunian Layak	1	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
	2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
	3	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
Program Kawasan Permukiman									
Meningkatnya Kawasan Permukiman	4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	%	96,70	96,43	96,70	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
	5	Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani	%	48,80	48,81	48,80	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
	6	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	68,38	69,06	68,38	99,02	Sangat Tinggi	DPRKPLH
	7	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	%	78,79	80,03	78,79	98,45	Sangat Tinggi	DPRKPLH
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan									
Terselesaikannya sengketa tanah garapan	8	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum									
Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	9	Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
JUMLAH IKUPD			**3**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**			**99,35**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**9**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**99,76**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			**12**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**99,55**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Dari tabel di atas rata-rata capaian kinerja IKUPD yaitu 99,35% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi, dan rata-rata caiapain indikator program 99,76%. Pada rata-rata capaian kinerja urusan bidang perumahan dan kawasan pemukiman sebesar 99.55% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaran pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari 5 indikator IKUPD dan 10 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2. 12
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung jawab
				2025	2026	2026			
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
	1	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	81,82	80,62	81,82	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
	2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	73	73,05	73	99,93	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar									
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
	1	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	%	84,14	100	78,04	78,04	Tinggi	Satpol PP dan Damkar
	2	Persentase penegakan Perda/Perbup	%	16,22	100	56,67	56,67	Rendah	Satpol PP dan Damkar
	3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/kota	%	76,63	100	72,73	72,73	Sedang	Satpol PP dan Damkar
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum									
Meningkatnya kapasitas SDM satlinmas	1	Persentase Satlinmas yang terlatih	%	13,49	30,79	24,91	80,91	Tinggi	Satpol PP dan Damkar

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung jawab
				2025	2026	2026			
Meningkatnya layanan aduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	2	Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
Meningkatnya penegakan pelanggaran perda dan perbup	3	Persentase penegakan Pelanggaran Perda/Perbup	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
Meningkatnya layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	4	Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
Program Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran									
Meningkatnya pemahaman Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap layanan respon time sesuai aturan yang berlaku	5	Tingkat Waktu Tanggap *(Respon Time Rate)* dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	48,08	100	51,85	51,85	Rendah	Satpol PP dan Damkar
Meningkatnya layanan pemadaman yang dilakukan oleh petugas damkar	6	Persentase layanan pemadaman. penyelamatan. dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	53,26	100	45,45	45,45	Sangat Rendah	Satpol PP dan Damkar
Meningkatnya layanan pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh relawan kebakaran	7	Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	%	0	100	0	0,00	Sangat Rendah	Satpol PP dan Damkar

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung jawab
				2025	2026	2026			
Meningkatnya luas wilayah manajemen kebakaran	8	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	%	60,64	61,05	60,64	99,34	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
Meningkatnya jumlah inspeksi bangunan/gedung/lingkungan yang menjadi prioritas	9	Persentase Bangunan/Gedung yang menjadi prioritas inspeksi	%	5,88	6,15	3,68	59,89	Sangat Rendah	Satpol PP dan Damkar
Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manuasia (operasi penyelamatan non Kebakaran)	10	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia (operasi penyelamatan non kebakaran)	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
JUMLAH IKUPD			**5**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**			**81,49**	**Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**10**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**73,74**	**Sedang**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			**15**	**Rata-Rata Capaian Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**77,62**	**Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Dari tabel di atas rata-rata capaian kinerja IKUPD yaitu 81,49% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sedang, dan rata-rata caiapain indikator program 73,74% kriteria penilaian realisasi kinerja sedang dikarenakan masih ada 2 indikator dengan kriteria penilaian kinerja sangat rendah diantaranya adalah :

1. Persentase layanan pemadaman. penyelamatan. dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Persentase Bangunan/Gedung yang menjadi prioritas inspeksi
2. Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah.

Pada urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat juga didukung oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 5 IKUPD, dan 5 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2. 13

Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
				2025	2026	2026			
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
	1	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	85,81	77,75	85,81	100,00	Sangat Tinggi	BPBD
	2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	73,75	74,00	73,75	99,66	Sangat Tinggi	BPBD
Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar									
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
	1	Indeks risiko bencana	Angka	113,08	101,48	113,08	89,74	Tinggi	BPBD
	2	Indeks Ketahanan Daerah	angka	0,61	0,61	0,61	100,00	Sangat Tinggi	BPBD
	3	Persentase desa tangguh bencana	%	100	100	20,00	20,00	Sangat Rendah	BPBD
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
Program Penanggulangan Bencana									
Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	72,2	72,20	Sedang	BPBD

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	16,6	16,60	Sangat Rendah	BPBD
Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	32,80	32,80	Sangat Rendah	BPBD
Meningkatnya koordinasi penanganan pasca bencana	4	Persentase koordinasi penanganan pasca bencana	%	100	100	50,00	50,00	Sangat Rendah	BPBD
Meningkatnya layanan pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	5	Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	97,33	97,33	Tinggi	BPBD
JUMLAH IKUPD			**5**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**			**81,88**	**Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**5**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**57,27**	**Rendah**	
JUMLAH INDIKATOR BPBD			**10**	**Rata-Rata Capaian Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**69,57**	**Sedang**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Rata-rata capaian bidang Penyelenggaran Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada indikator IKUPD baru 81,88% dengan dengan kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi dan indikator program 57,27% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja rendah sedangkan rata-rata capaian bidang ketentraman

dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebesar 69,57% dengan kriterian realisiasi kinerja sedang dikarenakan masih ada 3 indikator dengancapaian kinerja sangat rendah.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial terdiri dari 4 indikator IKUPD dan 10 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2. 14
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
				2025	2026	2026			
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
	1	Nilai IKM Perangkat Daerah	%	89,98	87,01	89,98	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
	2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	78,20	72	78,20	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar									
Sosial									
	1	Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial. rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	91,44	84,5	91,44	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
	2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	82,87	69	82,87	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
Program Pemberdayaan Sosial									
Meningkatnya pemberdayaan sosial	1	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan. Keluarga. Masyarakat. dan kelembagaan dalam usaha	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
		kesejahteraan sosial							
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan									
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	2	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial									
Meningkatnya rehabilitasi sosial	3	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
	4	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
	5	Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
	6	Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial									
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial									
	7	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial
	8	Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE	%	97,22	86	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
		yang aktif							
Program Penanganan Bencana									
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	9	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan									
Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	10	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
JUMLAH IKUPD			**4**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**			**100,00**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**10**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**100,00**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR DINAS SOSIAL			**14**	**RATA-RATA CAPAIAN Bidang Sosial**			**100,00**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Bidang sosial memiliki total 14 indikator, 4 pada IKUPD dan 10 indikator program. Rata-rata capaian bidang sosial pada indikator IKUPD, indikator program dan rata-rata bidang sosial yaitu 100% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi.

2.4 EVALUASI KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan terdiri dari 4 indikator IKUPD dan 12 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 15

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Terget 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
URUSAN TENAGA KERJA									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
	1	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	86,71	86,72	86,71	99,99	Sangat Tinggi	DISNAKER
	2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	72,55	73	72,55	99,38	Sangat Tinggi	DISNAKER
Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar									
	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	77,77	78.42-78.80	77,77	99,17	Sangat Tinggi	DISNAKER
	2	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	86,15	60,32	82,00	100	Sangat Tinggi	DISNAKER
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
Program Perencanaan Tenaga Kerja									
Meningkatnya implementasi pelaksanaan program sesuai dengan dokumen Rencana Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	91,67	1	91,67	100	Sangat Tinggi	DISNAKER
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja									
Meningkatnya keterampilan dan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri	2	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	69,31	50	25,41	51,00	Rendah	DISNAKER
	3	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	%	97,06	82	58,82	71,74	Sedang	DISNAKER
Program Penempatan Tenaga Kerja									
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di dunia kerja	4	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negri) melalui mekanisme	%	60,40	37	76,94	100,00	Sangat Tinggi	DISNAKER

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Terget	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
				2025	2026	2026			
		layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten							
	5	Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	%	88,43	32	37,88	100	Sangat Tinggi	DISNAKER
	6	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	%	68,44	37	80,11	100	Sangat Tinggi	DISNAKER
	7	Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	100	94	100,00	100,00	Sangat Tinggi	DISNAKER
	8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP)	%	69,20	69,59	69,20	99,44	Sangat Tinggi	DISNAKER
Program Hubungan Industrial									
Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis. dinamis. dan berkeadilan serta bermartabat	9	Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan	%	64,89	42,52	72,73	100	Sangat Tinggi	DISNAKER
	10	Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	74,05	75	73	97,98	Sangat Tinggi	DISNAKER
	11	Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	77,10	47	77	100	Sangat Tinggi	DISNAKER
	12	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DISNAKER
JUMLAH IKUPD			**4**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**			**99,64**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**12**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**93,33**	**Sangat Tinggi**	

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Terget	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
				2025	2026	2026			
JUMLAH INDIKATOR BIDANG TENAGA KERJA			**16**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG TENAGA KERJA**			**96,48**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang tenaga kerja terdiri dari 4 indikator IKUPD dengan rata-rata capaian kinerja 99,64% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Pada indikator kinerja program terdapat 12 indikator yang memiliki Tingkat capaian sangat tinggi dengan rata – rata capaian indikator program 93,33%. Sedangakan untuk rata-rata capaian kinerja bidang tenaga kerja yaitu 96,48% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 5 indikator IKUPD dan 11 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 16

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
				2025	2026	2026			
A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah		71,65	71,66	71,65	99,99	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA
	2	Nilai IKM Perangkat Daerah		85,29	85,45	85,29	99,81	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA
	3	Indeks Ketimpangan Gender	angka	0,22	0,201	0,22	91,36	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA
	4	Indeks Pemberdayaan Gender	angka	74,28	74,35	74,28	99,91	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA
	5	Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan									
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	10,49	9,7	8,44	87,04	Tinggi	DPPKBPPPA
	2	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	3,02	2,35	2,97	100,00	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA
Program Perlindungan Perempuan									
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	3	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA
	4	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	angka	5,6235	5,15	3,17	100,00	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
				2025	2026	2026			
Program Peningkatan kualitas Keluarga									
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender. pemenuhan hak. serta perlindungan perempuan dan anak	5	Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas	%	65,38	73,08	65,38	89,46	Tinggi	DPPKBPPPA
Program Pemenuhan Hak Anak									
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komperhensif	6	Kabupaten Layak Anak	kategori	87,42	Madya	87,42	87,42	Tinggi	DPPKBPPPA
	7	Persentase terbentuknya DRPPA	%	6,57	30,1	6,57	21,84	Sangat Rendah	DPPKBPPPA
Program Perlindungan Khusus Anak									
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan. eksploitasi. penelantaran. perkawinan. dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	8	Indeks Perlindungan Anak	angka	61,62	63,2	61,62	97,50	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA
	9	Persentase pernikahan usia anak	%	0,049	0,092	0,03	100,00	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA
	10	Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
		ditangani							
	11	Rasio kasus kekerasan terhadap anak	angka	8,79	8,48	6,80	100,00	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA
JUMLAH IKUPD			**5**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**			**98,21**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**11**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**89,39**	**Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			**16**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**93,80**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 5 indikator IKUPD dengan capaian 99,21% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Pada indikator program dengan rata-rata 89,39% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Sedangkan rata-rata capaian kinerja pada bidang perempuan dan perlindngan anak 93,80% dengan kriteria realisasi kinerja sangat tinggi.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pangan terdiri dari 4 indikator kinerja IKUPD dan 4 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2. 17
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan s.d Triwulan II Tahun 2025

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		86.63	85.7	86.63	100.00	Sangat Tinggi	DKPPP
	2	Nilai AKIP Perangkat Daerah		74.80	74.85	74.80	99.93	Sangat Tinggi	DKPPP
	3	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	68.50	79.63	68.5	86.02	Tinggi	DKPPP
	4	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan *(of Undernourishment)*	%	11.23	9.29	11.23	100.00	Sangat Tinggi	DKPPP
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan									
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	1	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok	%	98.63	100	77,71	77,71	Tinggi	DKPPP
Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan masyarakat									
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	89.87	90.03	89.87	99.82	Sangat Tinggi	DKPPP
Program Penanganan Kerawanan Pangan									
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan masyarakat	3	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	100.00	100	100.00	100.00	Sangat Tinggi	DKPPP
Program Pengawasan Keamanan Pangan									
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	4	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar	%	93.10	100	88,71	88,71	Tinggi	DKPPP
JUMLAH IKUPD			**4**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**			**96.49**	**Sangat Tinggi**	

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**4**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**91,56**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG PANGAN			**8**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PANGAN**			**94,02**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, pada bidang pangan capaian kinerja IKUPD 92,66% dengan skala nilep peringkat kinerja sangat tinggi, dan pada indikator program capaian kinerja yaitu 97,93% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Sedangkanga rata-rata capaian kinerja bidang pangan yaitu 95,30% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup terdiri dari 3 indikator IKUPD dan17 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 18
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung j awab
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar									
Lingkungan Hidup									
	1	Indeks Kualitas Air	Angka	74,71	74,27	74,71	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
	2	Indeks Kualitas Udara	Angka	77,23	85,01	77,23	90,85	Sangat Tinggi	DPRKPLH
	3	Penurunan	TonCO2e	709.905,7	1.129.065,7	713.957,5	63,23	Rendah	DPRKPLH

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung j awab
				2025	2026	2026			
		Emisi Gas Rumah Kaca	q	1	7	9			
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Program Perencanaan Lingkungan Hidup									
Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	1	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
	2	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	85,71	100	100	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup									
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	angka	60,15	60,03	60,15	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
	4	Luas Lahan kritis tertangani	Ha	33,125	4	6,307	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
	5	Persentase sumber mata air yang dilindungi	%	7,08	7,4	7,08	95,72	Sangat Tinggi	DPRKPLH

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung j awab
				2025	2026	2026			
		dan dikelola							
	6	Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	%	30,23	23,3	23,26	99,81	Sangat Tinggi	DPRKPLH
	7	Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	%	15,7	15,7	17,6	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati									
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	8	Persentase RTH publik Kabupaten yang terpelihara	%	81,70	80	81,70	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)									
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	9	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	100	30,00	30,00	Sangat Rendah	DPRKPLH
	10	Persentase pembinaan usaha dan/atau	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung j awab
				2025	2026	2026			
		kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air							
	11	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
Program Peningkatan Pendidikan. Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat									
Meningkatnya Pendidikan. Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	12	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	30,80	30,93	32,13	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat									
Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	13	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100	100	60	60	Rendah	DPRKPLH
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup									
Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	14	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung j awab
				2025	2026	2026			
		ditindaklanjuti							
Program Pengelolaan Persampahan									
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	15	Timbulan sampah terolah difasilitas pengolah sampah	%	33,84	34,14	32,13	94,12	Sangat Tinggi	DPRKPLH
	16	Persentase sampah yang terkelola	%	62,80	64,07	62,80	98,02	Sangat Tinggi	DPRKPLH
	17	Cakupan Pelayanan persampahan	%	76,47	77,85	77,51	99,56	Sangat Tinggi	DPRKPLH
JUMLAH IKUPD			**3**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**			**84,69**	**Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**17**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**92,79**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			**20**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**88,74**	**Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Berdasarkan tabel di atas Capaian kinerja IKUPD 84,69% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi dan capaian kinerja Berdasarkan tabel diatas, Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari 3 indikator IKUPD dengan capaian kinerja yaitu 84,69% kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi. 17 indikator program dengan rata-rata capaian kinerja yaitu 92,79% kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Sedangkan rata-rata capaian kinerja bidang lingkungan hidup yaitu 88,74% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Kependudukan dan Catatan

Sipil terdiri dari 4 indikator IKUPD dan 5 indikator kinerja program, dengan capaian sebagaimana tertuang pada tabel.

Tabel 2. 19
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
				2025	2026	2026			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
	1	Nilai IKM Perangkat Daerah	angka	86,91	86,7	86,98	100,00	Sangat Tinggi	DINDUKCAPIL
	2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	angka	80,60	80,8	80,6	99,75	Sangat Tinggi	DINDUKCAPIL
Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar									
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	1	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	99,71	98,54	99,73	100,00	Sangat Tinggi	DINDUKCAPIL
	2	Ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan	%	94,64	90	99,21	100,00	Sangat Tinggi	DINDUKCAPIL
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
Program Pendaftaran Penduduk									
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1	Cakupan Kepemilikan KK. KTP el. KIA	%	99,53	97,2	99,64	100	Sangat Tinggi	DINDUKCAPIL
Program Pencatatan Sipil									
Meningkatnya Pelayanan pencatatan sipil	2	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	99,99	99,98	99,997	100	Sangat Tinggi	DINDUKCAPIL
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	3	Persentase ketersediaan Sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan Administrasi	%	70,87	71	68,93	97,09	Sangat Tinggi	DINDUKCAPIL
	4	Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	%	31,94	32	32,62	100,00	Sangat Tinggi	DINDUKCAPIL

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
	5	Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	%	46,15	15	46,15	100,00	Sangat Tinggi	DINDUKCAPIL
JUMLAH IKUPD			**4**	**Rata-Rata Capaian Ikupd**			**99,94**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**5**	**Rata-Rata Capaian Indikator Program**			**99,42**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			**9**	**Rata-Rata Capaian Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**			**99,68**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Berdasarkan tabel diatas pada bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 4 IKUPD dengan capaian 99,94% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi dan 5 indikator kinerja Program dengan capaian 99,42% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Rata-Rata capaian bidang adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 99,68% dengan kriteria penilaian kinerja sangat tinggi.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 4 indikator kinerja IKUPD dan 7 indikator kinerja program, dengan capaian sebagaimana tertuang pada tabel beriku

Tabel 2. 20

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
				2025	2026	2026			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
	1	Nilai IKM Perangkat Daerah	%	82,86	81,25	82,86	100,00	Sangat Tinggi	DINPERMADES
	2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	71,75	70,10	71,75	100,00	Sangat Tinggi	DINPERMADES
Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar									
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	3	Persentase desa mandiri	%	*52,63*	41,35	52,63	100,00	Sangat Tinggi	DINPERMADES
	4	Nilai Skor Indeks desa	%	94,73	92,86	94,73	100,00	Sangat Tinggi	DINPERMADES
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
Program Penataan Desa									
Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa	1	Presentase Desa yang terfasilitasi dalam rangka penataan Desa	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	DINPERMADES
Program Peningkatan Kerjasama Desa									
Meningkatnya Kerja Sama Desa	2	Persentase kerjasama antar Desa	%	100	100	0	100,00	Sangat Tinggi	DINPERMADES
	3	Persentase kerjasama Desa dengan pihak ketiga	%	80	100	0	100,00	Sangat Tinggi	DINPERMADES
Program Administrasi Pemerintahan Desa									
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel	4	Presentase Desa dalam penyusunan LPPD tepat waktu	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	DINPERMADES
	5	Presentase Desa dalam penyusunan RKPDes tepat waktu	%	100	100	0	0,00	Sangat Rendah	DINPERMADES
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat. dan Masyarakat Hukum Adat									
Meningkatnya Pemberdayaan	6	Persentase laporan LKD	%	4,94	8,33	4,94	59,30	Rendah	DINPERMADES

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat									
	7	Persentase BUM Desa Maju dan berkembang	%	42,11	40,6	42,11	100,00	Sangat Rendah	DINPERMADES
JUMLAH IKUPD			**4**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**			**100,00**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**7**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**79,90**	**Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR DINPERMADES			**11**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**89,95**	**Tinggi**	

Sumber:BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Dari tabel diatas pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pada indikator IKUPD telas tercapai 100 % dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi dan capaian kinerja 79,90% pada kinerja program dikarenakan masih ada 1 indikator yang sangat rendah capaiannya yaitu Presentase Desa dalam penyusunan RKPDes tepat waktu dengan faktor penghambat yaitu kurangnya Optimalnya tim penyusun dalam membuat RAB dan gambar tehnis sehingga pelu pendampingan yang intensif. Rata-rata capaian 89,95% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 3 indikator IKUPD dan 11 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 21

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar									
	1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)	Angka	73	64,79	73	100,00	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA
	2	TFR (*Total Fertility Rate*/Angka Kelahiran Total)	angka	1,24	2,17	1,24	100,00	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA
	3	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	0,77	0,78	0,77	100,00	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
Program Pengendalian Penduduk									
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	1	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	angka	60,1	58,8	60,1	100,00	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA
	2	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi {unmetneed)	%	7,44	7,58	7,32	96,57	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA
	3	Median usia kawin pertama (MUKP)	angka	22	20,1	22	100,00	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA
	4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19 tahun)	%	4,01	9,22	4,01	100,00	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA
Program Pembinaan KB									
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	5	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	48,68	46,95	48,46	100,00	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA
	6	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	%	82,54	77,8	82,84	100,00	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA
	7	Persentase KB pasca	%	52,09	59,9	83,07	100,00	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
		persalinan							
	8	Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri	%	15,57	15,91	16,61	100,00	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)									
meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	9	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita	%	50,23	45,75	63,25	100	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA
	10	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	angka	86,8	87,4	86,8	99,31	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA
	11	Indeks lansia berdaya	angka	75,9	58	75,9	100,00	Sangat Tinggi	DPPKBPPPA
JUMLAH IKUPD			**3**	**Rata-Rata Capaian Ikupd**			**100,00**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**11**	**Rata-Rata Capaian Indikator Program**			**99,63**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			**14**	**Rata-Rata Capaian Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**			**99,81**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian IKUPD Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada indikator IKUPD sebesar 100% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Rata-rata capaian indikator program yaitu 99,63%, dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Rata-rata capaian pada binag pengendalian penduduk dan keluarga berancana 99,81% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang terdiri dari 5 indikator IKUPD dan 10 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 22
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
				2025	2026	2026			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
	1	Nilai IKM Perangkat Daerah		86,08	84,97	86,08	100	Sangat Tinggi	DINHUB
	2	Nilai AKIP Perangkat Daerah		70,60	70,61	70,60	99,99	Sangat Tinggi	DINHUB
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1	Persentase Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah	%	81,97	81,74	74,33	90,94	Tinggi	DINHUB
	2	Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	%	73,12	72,94	68,86	94,41	Sangat Tinggi	DINHUB
	3	Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	%	90,81	90,54	79,81	88,15	Tinggi	DINHUB
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan	1	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP)	%	42,03	42,03	42,03	100	Sangat Tinggi	DINHUB
	2	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	%	67,03	67,14	67,03	99,84	Sangat Tinggi	DINHUB
Meningkatnya kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	3	Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan	%	99,68	99,66	69,85	70,09	Sedang	DINHUB
Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan	4	Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten	%	35,98	36,63	35,98	98,23	Sangat Tinggi	DINHUB
	5	Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di	%	67,13	65,11	67,13	100	Sangat Tinggi	DINHUB

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
		wilayah Kabupaten Temanggung							
Meningkatnya pengelolaan perparkiran	6	Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DINHUB
	7	Persentase Layanan Perhubungan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DINHUB
Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	8	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	%	87,99	89,39	88,31	98,79	Sangat Tinggi	DINHUB
	9	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	84,44	82,22	84,44	100	Sangat Tinggi	DINHUB
	10	Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	100	100	66,67	66,67	Sedang	DINHUB
JUMLAH IKUPD			**5**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**			**94,70**	Sangat Tinggi	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**10**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**93,36**	Sangat Tinggi	
JUMLAH INDIKATOR DINHUB			**15**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**94,03**	Sangat Tinggi	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian IKUPD sebesar 94,70% dengan krietria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Rata-rata capaian indikator program yaitu sebesar 93,36% Rata-rata capaian pada bidang Perhubungan 94,03% dengan krietria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari 6 indikator kinerja sasaran dan 7 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 23

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika s.d Triwulan II Tahun 2025

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung jawab
				2025	2026	2026			
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
	1	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	88,59	82,3	88,59	100,00	Sangat Tinggi	DINKOMINFO
	2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	74,20	75,25	74,20	98,60	Sangat Tinggi	DINKOMINFO
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,80	3,75	3,80	100	Sangat Tinggi	DINKOMINFO
	2	Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	4,39	4,6	4,39	95,43	Sangat Tinggi	DINKOMINFO
	3	Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	nilai	3,50	3,3	3,50	100	Sangat Tinggi	DINKOMINFO
	4	Nilai keterbukaan informasi publik	nilai	91,34	96,5	91,34	94,65	Sangat Tinggi	DINKOMINFO
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik									
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	1	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	%	85,29	85,75	85,29	99,47	Sangat Tinggi	DINKOMINFO
	2	Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	%	556,30	100	139,07	100	Sangat Tinggi	DINKOMINFO
	3	Persentase penanganan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DINKOMINFO

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung jawab
		laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo							
	4	Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik	%	28,74	17,5	28,74	100	Sangat Tinggi	DINKOMINFO
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika									
	5	Persentase layanan publik secara elektronik	%	55,73	75	55,73	74,30	Sedang	DINKOMINFO
	6	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	%	100	37,68	100	100	Sangat Tinggi	DINKOMINFO
	7	Persentase rumah tangga dengan akses internet	%	94,24	91,5	94,24	100	Sangat Tinggi	DINKOMINFO
JUMLAH IKUPD			**6**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**			**98,12**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**6**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**95,63**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			**6**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**96,87**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Rata-rata capaian kinerja IKUPD pada bidang Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah 98,12 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Pada indikator program dengan rata-rata capaian kinerja 95,63% dan rata-rata capaian bidang komunikasi dan informatika 96,87% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja 96,87%.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari 4 indikator IKUPD dan 3 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 24
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung jawab
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
	1	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	89,69	87,60	89,69	100,00	Sangat Tinggi	DINKOPDAG
	2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	72,55	72,80	72,55	99,66	Sangat Tinggi	DINKOPDAG
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	1,44	1,88	1,24	65,93	Rendah	DINKOPDAG
	2	Rasio Kewirausahaan daerah	%	2,43	3,15	2,43	77,14	Tinggi	DINKOPDAG
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH									
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi									
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	1	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan. pemeriksaan dan pembinaan	%	41,21	12,25	23,03	100	Sangat Tinggi	DINKOPDAG
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian									
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	2	Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	%	62,83	4,54	70,66	100	Sangat Tinggi	DINKOPDAG
Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (UMKM)									
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	3	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi. pendampingan usaha. kemitraan usaha. pengembangan kelembagaan. akses pembiayaan	%	0,239	0,25	0,31	100	Sangat Tinggi	DINKOPDAG
JUMLAH IKUPD			**4**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**			**85,68**	**Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**3**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**100**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH			**7**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH**			**92,84**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Rata-rata capaian kinerja IKUPD pada bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah 85,68% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi. Faktor pendorong yang mempengaruhi capaian kinerja IKUPD tersebut yaitu keberadaan koperasi yang tergolong aktif untuk selalu melaporkan laporan keuangan tepat waktu. Di sisi lain adanya penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan keterampilan berkaitan dengan kewirausahaan turut menjadi faktor pendorong yang mempengaruhi capaian tersebut. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi capaian yang belum maksimal antara lain masih ditemukan beberapa koperasi yang tidak membuat lapora keuangan dan tidak dikirimkan ke Dinkopdag sehingga tidak dapat dihitung volume usaha koperasi tersebut. Terkait kewirausahaan daerah, pengaplikasian ilmu dan pembelajaraan yang tidak dilakukan oleh peserta pelatihan serta keterbatasan sumber daya dalam memberikan pendampingan lanjutan secara rutin masih menjadi kendala dalam upaya peningkatan kewirausahaan daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja IKUPD bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah antara lain meningkatkan sosialisasi terkait cara pembuatan laporan keuangan koperasi sesuai dengan Permenkop serta meningkatkan pendampingan lanjutan kepada peserta pelatihan wirausaha.

Sedangkan rata-rata kinerja indikator program pada bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar 100% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Rata-rata bidang koperasi,usaha kecil dan menengah yaitu 92,84% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaran pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal terdiri dari 6 indikator kinerja IKUPD dan 5 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 25

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
	1	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	94,19	94	94,03	100,00	Sangat Tinggi	DPMPTSP
	2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,5	83	81,5	98,19	Sangat Tinggi	DPMPTSP
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	3	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Milyar	100,0	2,150	45,03	100	Sangat Tinggi	DPMPTSP
	4	Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan	%	100	92	100	100	Sangat Tinggi	DPMPTSP
	5	Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN	Proyek	271,2	5020	5989	100	Sangat Tinggi	DPMPTSP
	6	Peningkatan jumlah jenis layanan di MPP	Layanan	5	2	5	100	Sangat Tinggi	DPMPTSP
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal									
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	1	Persentase Realisasi Total terhadap target investasi	%	100,0	92	45,03	45,03	Sangat Rendah	DPMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal									
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	2	Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	%	100	92	100	100,00	Sangat Tinggi	DPMPTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal									
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	3	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo	%	100	92	100	100,00	Sangat Tinggi	DPMPTSP
	4	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	100	92	100	100,00	Sangat Tinggi	DPMPTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal									
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	5	Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal	%	100	92	73,33	79,71	Tinggi	DPMPTSP
JUMLAH IKUPD			**6**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**			**99,70**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**5**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**84,95**	**Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG PENANAMAN MODAL			**11**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**92,32**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian IKUPD, program dan rata-rata capaian bidang penanaman modal sebesar 99,70% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Rata-rata capaian program yaitu 84,95% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi. Sedangkan rata-rata capaian kinerja bidang penanaman modal sebesar 92,32% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaran pemerintah daerah Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari 7 indikator kinerja IKUPD dan 5 indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2. 26
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja		Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
				2025	2026	2025	2026			
B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)										
Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar										
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga										
	1	Persentase pemuda berprestasi	%	25.71	24.00	25.71	25.71	100.00	Sangat Tinggi	DINDIKPORA
	2	Persentase atlet berprestasi	%	84.14	83.81	84.14	42,86	51,14	Rendah	DINDIKPORA
	3	Persentase prestasi olahraga	%	82.35	94.28	82.35	75,00	79,55	Tinggi	DINDIKPORA
	4	Persentase Wirausaha Muda	%	10.35	14.00	10.35	10.35	73,91	Sedang	DINDIKPORA
	5	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	%	24.99	13.00	24.99	24.99	100.00	Sangat Tinggi	DINDIKPORA
	6	Persentase Atlet Unggulan	%	42.45	30.00	42.45	19,81	66,04	Sedang	DINDIKPORA
	7	Persentase Cabang Olahraga Unggulan	%	58.14	55.00	58.14	58.14	100.00	Sangat Tinggi	DINDIKPORA

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja		Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
				2025	2026	2025	2026			
INDIKATOR PROGRAM										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan										
Meningkatnya kemampuan pemuda dan keaktifan organisasi kepemudaan	1	Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan	%	1.85	4	1.85	1,85	100	Sangat Tinggi	DINDIKPORA
	2	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	96.30	87	96.30	96,30	100	Sangat Tinggi	DINDIKPORA
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan										
Meningkatnya Kualitas sarana prasarana olahraga dan kompetensi pelatih olah raga	3	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	%	69.62	63	69.62	72,15	100.00	Sangat Tinggi	DINDIKPORA
	4	Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat	%	75.00	78	75.00	75.35	96.60	Sangat Tinggi	DINDIKPORA
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan										
Meningkatnya Keaktifan organisasi kepramukaan	5	Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif	%	96.49	98.22	96.49	96,49	98,24	Sangat Tinggi	DINDIKPORA
JUMLAH IKUPD			**7**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**				**81,52**	**Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**5**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**				**88.21**	**Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			**12**	**RATA-RATA CAPAIAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**84,86**	**Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian IKUPD sebesar 81,52% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi. Rata-rata capaian program yaitu 88,21% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi. Sedangkan rata-rata capaian kinerja bidang kemudaan dan olahraga 84,86% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Statistik terdiri dari 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2. 27
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral									
Tercapainya kolaborasi. integrasi. dan standarisasi. dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	1	Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)	angka	74,40	50	74,40	100	Sangat Tinggi	DINKOMINFO
	2	Ketersediaan data statistik sektoral	%	100,00	100	76,06	76,06	Tinggi	DINKOMINFO
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**2**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**88,03**	**Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG STATISTIK			**2**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG STATISTIK**			**88,03**	**Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, angka indikator kinerja program penyelenggaraan statistik sektoral pada bidang statistik sebesar 88,03% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi. Dengan faktor pendorong Sinergitas kerja sama Dinkominfo dengan BPS Temanggung, Bapperida dan Perangkat Daerah dalam penyediaan data statistik sektoral yang terupdate setiap tahunnya.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Persandian terdiri dari 2 indikator program sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung jawab
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
INDIKATOR PROGRAM									
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi									
Meningkatnya keamanan siber dan sandi dilingkungan pemerintah daerah	1	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	300	300	548	100	Sangat Tinggi	DINKOMINFO
	2	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	100	100	33,33	33,33	Sangat Rendah	DINKOMINFO
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**2**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**66,67**	Sedang	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG KEPEGAWAIAN			**2**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PERSANDIAN**			**66,67**	Sedang	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Capaian rata-rata bidang persandian dengan kriteria penilaian kinerja sedang yaitu 66,67% dikarekan masih ada 1 indikator yang sangat rendah yaitu tingkat keamanan informasi pemerintahan hal ini disebabkan oleh kekurangan personel untuk melaksanakan VA.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan terdiri dari 4 Indikator kinerja IKUPD dan 4 indikator kinerja program daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 28
Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
	1	Nilai IKM Perangkat Daerah		92,38	90	92,38	100,00	Sangat Tinggi	DINBUDPAR

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
				2025	2026	2026			
	2	Nilai AKIP Perangkat Daerah		70,9	71	70,9	99,86	Sangat Tinggi	DINBUDPAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Kebudayaan									
	1	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda(WBTB) yang dilestarikan	%	15,15	20,7	16,67	80,52	Tinggi	DINBUDPAR
	2	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir	%	46,99	49,35	10,09	20,45	Sangat Rendah	DINBUDPAR
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
Program Pengembangan Kebudayaan									
Meningkatnya pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	1	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda	Obyek	1	1	0	0,00	Sangat Rendah	DINBUDPAR
	2	Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata	Kelompok	10	10	6	60,00	Rendah	DINBUDPAR
	3	Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata	Orang	0	10	2	20,00	Sangat Rendah	DINBUDPAR
	4	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	29.677	29.706	23,006	77,45	Tinggi	DINBUDPAR
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya									
peningkatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	5	Jumlah Cagar Budaya	Obyek	9	3	3	100,00	Sangat Tinggi	DINBUDPAR
JUMLAH IKUPD			**4**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**			**80,15**	**Tinggi**	

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
				2025	2026	2026			
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**5**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**51,49**	**Rendah**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG KEBUDAYAAN			**9**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**65,82**	**Rendah**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian IKUPD sebesar 80,15% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi. Rata-rata capaian indikator program yaitu 51,49% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja rendah. Sedangkan rata-rata capaian kinerja bidang kebudayaan 65,82% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja rendah.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kinerja penyelenggaran Bidang Perpustakaan terdiri dari 5 indikator kinerja IKUPD dan 3 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2. 29
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung jawab
				2025	2026	2026			
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
	1	Nilai IKM Perangkat Daerah	angka	81,848	80,9	81,848	100	Sangat Tinggi	DINPUSIP
	2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	angka	69,7	69,74	69,7	99,94	Sangat Tinggi	DINPUSIP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	24,03	60,73	24,03	39,57	Sangat Rendah	DINPUSIP
	2	Tingkat kegemaran membaca	nilai	57,62	69,54	57,62	82,86	Tinggi	DINPUSIP
	3	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	angka	0,2106	0,15	0,1438	95,87	Sangat Tinggi	DINPUSIP
INDIKATOR PROGRAM									

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung jawab
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
Program Pembinaan Perpustakaan									
Terlaksananya pembinaan perpustakaan	1	Persentase pengunjung di perpustakaan	%	50,24376	25	92,79	100,00	Sangat Tinggi	DINPUSIP
	2	Persentase perpustakaan yang aktif	%	55,15548	36	34,40	95,56	Sangat Tinggi	DINPUSIP
Program Pelestarian Koleksi Nasional & Naskah Kuno									
Terselenggaranya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	3	Persentase penelusuran naskah kuno	%	160	100	95,00	95,00	Sangat Tinggi	DINPUSIP
JUMLAH IKUPD			**5**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**			**86,37**	**Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**3**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**96,85**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG PERPUSTAKAAN			**8**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**91,61**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Rata-rata capaian IKUPD yaitu 96,57 % pada skala penilaian kinerja sangat tinggi. Sedangkan rata-rata kinerja pada indikator program yaitu 96,85% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi. Sedangkan rata-rata capaian kinerja bidang perpustakaan 91,61 % dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi.

Faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi capaian kinerja IKUPD pada bidang Perpustakaan adalah sebagai berikut:

1) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

   Faktor pendorong : Adanya alokasi anggaran dari DAK Non Fisik untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pendataan perpustakaan yang didalamnya termasuk kegiatan sosialisasi mengenai pengisian IPLM.

   Faktor penghambat : Adanya perubahan indikator dan metode penghitungan IPLM, masih minimnya alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan, kegiatan pengembangan koleksi perpustakaan tidak dilakukan secara teratur setiap tahun, seringnya penggantian personil pengelola perpustakaan serta belum tercukupinya kebutuhan SDM Pustakawan di setiap perpustakaan.

   Upaya yang dilakukan antara lain melaksanakan sosialisasi dan visitasi pendataan perpustakaan di wilayah Kabupaten Temanggung, mengoptimalkan komunikasi menggunakan grup WA dengan pengelola perpustakaan di wilayah Kabupaten Temanggung, serta membuat SE mengenai himbauan penyelenggaraan perpustakaan dan dukungan budaya literasi.

2) Tingkat kegemaran membaca

   Faktor pendorong : Semakin mudahnya akses informasi gratis untuk masyarakat serta semakin banyak kegiatan literasi yang diadakan di masyarakat.

   Faktor penghambat : Adanya perubahan komponen pengukuran yang baru, sehingga hasil TKM juga berubah walaupun intepretasi tetap dibandingkan tahun 2024, belum banyak komunitas baca di Kabupaten Temanggung, serta tren pembaca di Kabupaten Temanggung masih ada di fase saat membaca, kegiatan pasca membaca belum banyak dilakukan.

   Upaya yang dilakukan antara lain memperbanyak kegiatan literasi yang diminati oleh masyarakat, melakukan promosi perpustakaan, melakukan sosialisasi mengenai survey TKM di masyarakat serta

mendorong pembentukan komunitas-komunitas literasi atau kelompok membaca di masyarakat.

3) Tingkat pemanfaatan perpustakaan

Faktor pendorong : Adanya kegiatan pendampingan kepada pengelola perpustakaan untuk mengisi data pokok perpustakaan serta adanya anggaran DAK Non Fisik untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan literasi di tingkat Kabupaten Temanggung.

Faktor penghambat : Belum semua perpustakaan melaporkan data pokok perpustakaan yang digunakan sebagai dasar penghitungan TPP serta tidak semua sekolah/Lembaga/Instansi/Pemerintah Desa memiliki Perpustakaan.

Upaya yang dilakukan antara lain melakukan sosialisasi pendampingan pengisian data pokok perpustakaan secara rutin setiap tahunnya.

Sedangkan rata-rata kinerja indikator program pada bidang Perpustakaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar 98,52 dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi capaian kinerja program pada bidang Perpustakaan adalah sebagai berikut:

1) Persentase pengunjung di perpustakaan

Faktor pendorong : Adanya Keputusan Perpustakaan Nasional RI untuk mengembalikan penjaringan data Perpustakaan sesuai dengan yang menjadi kewenangan masing-masing daerah mengurangi beban Pemerintah Kabupaten dalam melakukan monitoring dan evaluasi untuk pengumpulan data pokok perpustakaan, pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendataan perpustakaan yang dilaksanakan secara bertahap untuk memberikan pembinaan kepada pengelola perpustakaan terkait pembuatan dan pelaporan di akun data.perpusnas.go.id serta adanya program TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial) yang menjadikan perpustakaan tidak hanya tempat membaca atau meminjam buku di perpustakaan tetapi juga menjadi tempat berkegiatan masyarakat/pemustaka.

Faktor penghambat : Penurunan kunjungan ke perpustakaan dikarenakan waktu mulai operasional (jam buka) perpustakaan tidak konsisten, tidak adanya kegiatan yang menarik di perpustakaan, kurangnya tenaga perpustakaan, tidak ada penambahan buku baru di perpustakaan, masih banyak perpustakaan yang tidak melaporkan data pokok perpustakaannya, kurangnya pemahaman tenaga perpustakaan mengenai cara pengisian data pokok perpustakaanperpustakaan yang

menjadi kewenangan kabupaten, metode pengisian data pokok perpustakaan menggunakan melalui *Google Spreadsheet* masih kurang dipahami oleh pengelola perpustakaan sehingga pengisian tidak lengkap/tidak sesuai serta masih banyak perpustakaan yang belum memiliki pengelola khusus untuk perpustakaan sehingga perpustakaan tidak terkelola dengan baik.

Upaya yang dilakukan antara lain melaksanakan kegiatan sosialisasi pendataan perpustakaan kepada seluruh perpustakaan yang menjadi kewenangan Pemkab serta membuat Surat Edaran Bupati Temanggung tentang kewajiban pelaporan data perpustakaan bagi perpustakaan-perpustakaan yang menjadi kewenangan Pemkab.

2) Persentase perpustakaan yang aktif

Faktor pendorong : Adanya kegiatan sosialisasi pendataan perpustakaan yang bersumber dari anggaran DAK Non Fisik Tahun 2026.

Faktor penghambat : Belum semua perpustakaan melaporkan data perpustakaan Triwulan II Tahun 2026, bertambahnya jumlah perpustakaan yang pasif di tahun 2026, serta keterbatasan tenaga pengelola perpustakaan terutama untuk Perpustakaan SD dan Perpustakaan Desa/Kelurahan.

Upaya yang dilakukan antara lain melakukan advokasi kepada penanggung jawab masing-masing perpustakaan yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung agar dapat merekrut tenaga khusus untuk perpustakaan, melaksanakaan pembinaan perpustakaan untuk perpustakaan-perpustakaan di wilayah Kabupaten Temanggung, membuat Surat Edaran Bupati Temanggung mengenai kewajiban melaporkan data pokok perpustakaan bagi seluruh perpustakaan di wilayah Kabupaten Temanggung, mengadakan kegiatan sosialisasi pendataan perpustakaan, menambah kegiatan pembinaan perpustakaan bagi pengelola perpustakaan atau mengadakan bimbingan teknis bagi petugas perpustakaan serta mendorong perpustakaan untuk mengadakan kerjasama tukar pinjam koleksi antar perpustakaan.

3) Persentase penelusuran naskah kuno

Faktor pendorong : Adanya dukungan anggaran dari DAK Non Fisik Tahun 2026 untuk melakukan kegiatan penelusuran naskah kuno.

Faktor penghambat : Kegiatan penelusuran baru akan dilaksanakan pada awal Semester 2 Tahun 2026 serta belum ada informasi

keberadaan naskah kuno Temanggung sehingga rute penelusuran belum ditentukan.

Upaya yang dilakukan antara lain memperluas jejaring dengan komunitas-komunitas sejarah di Temanggung.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kinerja penyelenggaran pemerintah daerah Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan terdiri dari 2 indikator kirja IKUPD dan 2 indikator, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 30
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1	Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	70,71	73,56	70,71	96,13	Sangat Tinggi	DINPUSIP
	2	Nilai pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten	Angka	67,87	59,59	67,87	100	Sangat Tinggi	DINPUSIP
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
Program Pengelolaan Arsip									
Meningkatnya pengelolaan arsip	1	Persentase arsip yang dialihmediakan	%	60,57	65	60,57	93,19	Sangat Tinggi	DINPUSIP
	2	Persentase pembinaan kearsipan	%	73,33	75,55	73,33	97,06	Sangat Tinggi	DINPUSIP
JUMLAH IKUPD			**2**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**			**98,07**	Sangat Tinggi	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**2**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**95,13**	Sangat Tinggi	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG KEARSIPAN			**4**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG KEARSIPAN**			**96,60**	Sangat Tinggi	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Rata-rata capaian kinerja IKUPD pada bidang kearsipan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah 98,07% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Faktor pendorong yang mempengaruhi capaian kinerja IKUPD tersebut yaitu adanya pembinaan kearsipan sehingga mendorong peningkatan manajemen kearsipan. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi capaian yang belum maksimal antara lain adanya perubahan instrumen audit kearsipan yang dibuat oleh ANRI menyebabkan adanya tambahan pemenuhan data dukung yang berpengaruh terhadap penilaian. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja IKUPD bidang kearsipan antara lain dengan melaksanakan tahapan-tahapan dalam pengawasan kearsipan sesuai dengan peraturan atau pedoman ANRI serta terus melakukan pembinaan kearsipan termasuk mendorong pelaksanaan pemusnahan arsip pada PD dan menyerahkan arsip statis pada LDK.

Sedangkan rata-rata kinerja indikator program pada bidang kearsipan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar 95,13% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Faktor pendorong yang mempengaruhi capaian kinerja program tersebut yaitu adanya upaya koordinasi dengan Perangkat Daerah yang mengelola arsip vital dan arsip statis. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi capaian yang belum maksimal antara lain upaya pengelolaan arsip vital pada Perangkat Daerah masih dalam tahap proses identifikasi. Untuk meningkatkan capaian kinerja program pada bidang kearsipan tersebut, upaya yang dilakukan antara lain menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Bupati) terkait pengelolaan arsip vital dalam rangka menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5 EVALUASI KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Kinerja penyelenggaran pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang perikanan terdiri dari 1 indikator kinerja IKUPD dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 31

Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
Urusan Pemerintahan Pilihan									
Kelautan dan Perikanan									
	1	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	22,27	22,3	22,27	99,87	Sangat Tinggi	DPK3
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap									
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	1	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	140,18	140,2	84,8	60,48	Sangat Rendah	DPK3
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya									
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	2	jumlah produksi perikanan budidaya	ton	10.671,40	10.672,01	6771,33	63,45	Rendah	DPK3
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan									
Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	3	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan	%	28,57	10	28,49	100,00	Sangat Tinggi	DPK3
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan									
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	4	Jumlah produksi pengolahan ikan	ton	395,75	395,752	191,6	48,41	Sangat Rendah	DPK3
JUMLAH IKUPD			**1**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**			**99,87**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**4**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**68,08**	**Rendah**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			**5**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**83,97**	**Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Rata-rata capaian kinerja indikator IKUPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) pada urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan menyentuh angka 99,87% dengan predikat Sangat Tinggi, di mana tingginya Angka Konsumsi Ikan didorong oleh tiga strategi utama DKPPP mulai dari edukasi gizi bagi anak dan ibu hamil, sosialisasi gerakan Gemarikan, hingga pembinaan diversifikasi produk olahan ikan seperti bakso dan abon guna meningkatkan nilai tambah. Sebaliknya, rata-rata indikator kinerja program baru mencapai 68,08% dengan predikat rendah karena adanya faktor penghambat pada masing-masing sektor kerja. Pada program pengelolaan perikanan tangkap (60,84%), *output* terhambat oleh kerusakan lingkungan, perubahan iklim, maraknya ikan predator, serta penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Sementara itu, program pengelolaan perikanan budidaya (63,45%) terkendala tingginya biaya pakan, keterbatasan modal, serangan wabah penyakit, serta rantai pasar yang panjang bagi pembudidaya kecil. Di sisi lain, meskipun indikator kepatuhan pelaku usaha mendapat nilai tinggi, pengawasan lapangan secara umum masih dibatasi oleh minimnya jumlah petugas, sarana pemantauan, serta rendahnya pemahaman regulasi oleh pelaku usaha kecil. Terakhir, program pengolahan dan pemasaran hasil ikan (48,41%) menghadapi tantangan berat berupa lemahnya penerapan rantai dingin (*cold chain*) yang memicu kerusakan bahan baku, keterbatasan teknologi, dan rumitnya proses sertifikasi bagi industri rumah tangga, sehingga diperlukan intervensi strategis pada triwulan berikutnya untuk memacu target-target produksi tersebut.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata terdiri dari 4 indikator kinerja IKUPD dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja berikut ini.

Tabel 2. 32
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,91	1,91	1,91	100,00	Sangat Tinggi	DINBUDPAR
	2	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik)	orang	639.616	610.271	287.496	47,11	Sangat Rendah	DINBUDPAR
	3	Jumlah Desa Wisata Aktif	desa	31	31	31	100,00	Sangat Tinggi	DINBUDPAR
	4	Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang	%	94,12	90	94,12	100,00	Sangat Tinggi	DINBUDPAR
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata									
Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1	Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi	DTW	20	17	13	76,47	Sangat Rendah	DINBUDPAR
	2	Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata	orang	598	598	701	100,00	Sangat Tinggi	DINBUDPAR
Program Pemasaran Pariwisata									
Meningkatnya pemasaran pariwisata	3	Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	%	100	100	70,59	70,59	Sangat Rendah	DINBUDPAR
	4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP)	orang	180	90	112	100	Sangat Rendah	DINBUDPAR
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual									
Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	5	Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	orang	1	1	1	100,00	Sangat Tinggi	DINBUDPAR
Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif									

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
				2025	2026	2026			
pengembangan sumber daya ekonomi kreatif	6	Jumlah Pelaku Ekraf yang terdata	orang	135	130	135	100,00	Sangat Tinggi	DINBUDPAR
JUMLAH IKUPD			**4**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**			**86,78**	**Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**6**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**91,18**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG PARIWISATA			**10**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PARIWISATA**			**88,98**	**Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Rata–rata capaian kinerja bidang Pariwisata yaitu 88,98% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi. Indikator IKUPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada urusan pemerintahan bidang pariwisata mencapai 86,78% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi, yang didorong oleh optimalnya realisasi tiga indikator sasaran perangkat daerah hingga mencapai 100% (Sangat Tinggi). Faktor pendorong keberhasilan tersebut meliputi pelaksanaan pendataan pelaku sub-sektor ekonomi kreatif secara intensif yang sukses memacu perkembangan ekraf, serta aktivitas monitoring desa wisata yang konsisten didukung oleh pertemuan rutin Forum Komunikasi Desa Wisata guna menjaga keaktifan 31 desa wisata setempat. Selain itu, perluasan fasilitasi destinasi tujuan wisata (DTW) juga berjalan optimal seiring dengan penambahan data pendapatan para pelaku usaha pariwisata yang lebih akurat. Meskipun begitu, jumlah kunjungan wisatawan baru menyentuh 47,11% (Sangat Rendah) dengan faktor penghambat berupa kondisi unsur 3A (Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas) di beberapa destinasi yang dinilai masih belum memadai sehingga diperlukan pembenahan infrastruktur objek wisata dan penguatan promosi pada triwulan berikutnya.

Sementara itu, rata-rata capaian indikator program berada pada kategori Sedang di angka 91,18%. dengan faktor pendorong pencapaian pada sejumlah indikator program adalah keaktifan pelaksanaan program fasilitasi langsung dan pendataan secara intensif di lapangan. Keberhasilan penuntasan target pendataan SDM usaha pariwisata dan pelaku subsektor ekonomi kreatif didorong oleh eksekusi pendataan yang dilakukan secara konsisten dan masif. Selain itu, optimalnya capaian perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didukung penuh oleh penyediaan fasilitasi pengurusan yang memberikan kemudahan nyata bagi para pelaku ekonomi kreatif.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang pertanian terdiri dari 1 indikator kinerja IKUPD dan 21 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 33

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung jawab
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PERTANIAN									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
Urusan Pemerintahan Pilihan									
Pertanian									
	1	Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	23,01	22,35	23,01	100,00	Sangat Tinggi	DKP3
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian									
Meningkatnya produksi. dan kualitas hasil pertanian	1	Produktivitas Padi	ton/ha	6,09	6,16	6,03	97,89	Sangat Tinggi	DKP3
	2	Produktivitas jagung	ton/ha	5,05	5,55	5,26	94,77	Sangat Tinggi	DKP3
	3	Produktivitas bawang putih	ton/ha	7,16	6,15	8,80	100,00	Sangat Tinggi	DKP3
	4	Produktivitas bawang merah	ton/ha	8,14	7,1	8,58	100,00	Sangat Tinggi	DKP3
	5	Produktivitas cabai rawit	ton/ha	7,38	7,01	7,32	100,00	Sangat Tinggi	DKP3
	6	Produktivitas cabai keriting	ton/ha	7,56	7,01	7,42	100,00	Sangat Tinggi	DKP3
	7	Produktivitas tembakau	ton/ha	0,672	0,643	0,672	100,00	Sangat Tinggi	DKP3
	8	Produktivitas kopi robusta	ton/ha	0,73	0,7025	0,73	100,00	Sangat Tinggi	DKP3
	9	Produktivitas kopi arabika	ton/ha	0,56	0,410	0,56	100,00	Sangat Tinggi	DKP3
	10	Jumlah produksi daging ternak besar	kg	1.160.527,20	807.654	767.124	94,89	Sangat Rendah	DKP3
	11	jumlah produksi daging ternak kecil	kg	417.341,82	268.110	437.740	100	Sangat Rendah	DKP3
	12	jumlah produksi ternak unggas	kg	6537554,12	6.243.337	4.698.242	75,25	Sangat Rendah	DKP3
	13	jumlah produksi telur	kg	8.888.810,54	6.867.846	5.619.866	81,83	Sangat Rendah	DKP3
	14	Persentase kelahiran pedet	%	64,15	48	52,54	100,00	Sangat Tinggi	DKP3
	15	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	28,86	37,13	28,86	77,72	Tinggi	DKP3
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian									
Meningkatnya penyediaan dan pengembangan	16	Persentase Prasarana yang digunakan	%	100	100	100,0	100,00	Sangat Tinggi	DKP3

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung jawab
prasarana pertanian									
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner									
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	17	Persentase penanganan penyakit hewan	%	99,44	86	96,42	100,00	Sangat Tinggi	DKP3
	18	Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	79,75	76	77,76	100,00	Sangat Tinggi	DKP3
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian									
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	19	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	%	94,32	78	98,9	100,00	Sangat Tinggi	DKP3
Program Penyuluhan Pertanian									
Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan petani	20	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	%	61,88	58	61,88	100,00	Sangat Tinggi	DKP3
	21	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	%	1,40	1,3	1,40	100,00	Sangat Tinggi	DKP3
JUMLAH IKUPD			**1**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**			**100,00**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**21**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**96,30**	**Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG PERTANIAN			**22**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PERTANIAN**			**98,15**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Pada indikator IKUPD pada urusan pemerintahan bidang pertanian berada pada kategori Sangat Tinggi (100%). Faktor pendorong utama keberhasilan capaian indikator ini didorong oleh kombinasi penguatan investasi, serapan tenaga kerja, dan stimulus fiskal yang kontributif. Faktor pendorong utama bersumber dari tingginya elastisitas investasi swasta (0,639%) dan perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang terbukti berpengaruh positif-signifikan, serta optimalisasi tenaga kerja sektor pertanian yang setiap kenaikan 1% mampu mendongkrak PDRB sektor ini sebesar 0,633%. Kinerja makro ini diperkuat oleh ekspansi pasar melalui aktivitas ekspor, peningkatan pengeluaran pertanian (di mana setiap kenaikan 1% berkontribusi meningkatkan PDRB sebesar 0,156%), serta dukungan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur yang secara simultan

memperlancar jalur distribusi dan memicu pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian daerah.

Sementara itu rata-rata capaian kinerja program mencapai 96,30% dengan skala nilai peringkat kinerja Tinggi. Ini didorong oleh keberhasilan masif 100% pada komoditas pertanian/perkebunan unggulan serta optimalnya program penyuluhan dan prasarana. Namun, capaian ini tertahan oleh rendahnya realisasi subsektor peternakan (daging, telur, dan kelahiran pedet) hingga Semester I. Hal tersebut utamanya dihambat oleh keterbatasan lahan dan pakan berkualitas, kerentanan ternak terhadap penyakit dan stres lingkungan, tingginya biaya produksi, serta dominasinya manajemen pemeliharaan tradisional yang memicu rendahnya keterampilan reproduksi maupun efisiensi budidaya peternak.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang perdagangan terdiri dari 2 indikator kinerja IKUPD dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2. 34
Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Terget	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung jawab
				2025	2026	2026			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	1	Rasio PDRB sektor perdagangan	%	21,05	21	20,78	98,95	Sangat Tinggi	DINKOPDAG
	2	*Disparitas Harga*	%	0,3	±10	0,35	100,00	Sangat Tinggi	DINKOPDAG
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan									
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien. merata dan terintegrasi	1	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	%	66,67	67	66,67	99,50	Sangat Tinggi	DINKOPDAG
	2	Persentase Pedagang yang menggunakan transaksi	%	1,92	2	2,07	100	Sangat Tinggi	DINKOPDAG

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Terget 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung jawab
		digital							
	3	Persentase Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	%	11,31	6,85	13,71	100,00	Sangat Tinggi	DINKOPDAG
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting									
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	4	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	%	100,00	90	49,59	55,10	Sangat Rendah	DINKOPDAG
Program Pengembangan Ekspor									
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	5	Nilai Ekspor	US$	110.071.498	126276147	36,17	28,64	Sangat Rendah	DINKOPDAG
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen									
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	6	Cakupan alat ukur. takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	%	88,85	95	29,45	31,00	Sangat Rendah	DINKOPDAG
JUMLAH IKUPD			**2**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**			**99,48**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**6**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**69,64**	**Rendah**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG PERDAGANGAN			**8**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PERDAGANGAN**			**84,26**	**Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Rata-rata capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan pada urusan pemerintahan bidang perdagangan sebesar 84,26% berada pada kategori Tinggi. Indikator IKUPD dengan capaian 99,48%. Faktor pendorong utama keberhasilan capaian indikator ini didorong oleh keberhasilan pada Rasio PDRB Sektor Perdagangan yang dipicu oleh lancarnya arus distribusi barang, terjaganya daya beli masyarakat, serta perluasan adopsi transaksi digital yang meningkatkan volume perdagangan daerah. Kinerja makro ini diperkuat oleh optimalnya pengendalian Disparitas Harga melalui penjaminan ketersediaan (stok) barang kebutuhan pokok yang cukup dan berkelanjutan di pasar, sehingga secara efektif mampu meredam gejolak harga sekaligus meminimalkan kesenjangan harga antar-wilayah.

Sementara itu rata-rata capaian kinerja program mencapai 69,64% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Rendah. Rendahnya capaian ini dipengaruhi oleh karakteristik beberapa program intervensi yang realisasinya baru berjalan di awal tahun (Semester I), seperti program informasi harga bapokting (55,10%), pengembangan nilai ekspor (28,64%), dan cakupan tera ulang UTTP (6,86%) yang masih berada pada kategori Sangat Rendah.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kinerja penyelenggaran pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang perindustrian terdiri dari 2 indikator kinerja IKUPD dan 3 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2. 35
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
				2025	2026	2026			
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar									
	1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	25,34	27,44	25,34	92,35	Sangat Tinggi	DINPERINAKER
	2	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten	%	0,382	0,4	0,39	97,05	Sangat Rendah	DINPERINAKER
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri									
Meningkatnya pertumbuhan industri	1	Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	78,21	48,27	78,23	100	Sangat Tinggi	DINPERINAKER
Program Pengendalian Izin Usaha Industri									
Meningkatnya komitmen perizinan berusaha sektor industri	2	Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri	%	0,21	0,6	0,28	46,92	Sangat Rendah	DINPERINAKER
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional									
Meningkatnya Pemanfaatan informasi industri	3	Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas	%	1,80	2	1,80	90,15	Tinggi	DINPERINAKER

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
				2025	2026	2026			
JUMLAH IKUPD			**2**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**			**94,70**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**3**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**79,02**	**Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG PERINDUSTRIAN			**5**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**86,92**	**Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Rata-rata capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada urusan pemerintahan bidang perindustrian sebesar 86,92% dengan kriteria penilaian realisasi kategori Tinggi. Rata-rata capaian kinerja indikator IKUPD berkategori Sangat Tinggi (94,70%). Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh Rasio PDRB Industri Pengolahan (92,35%) yang dipicu oleh optimalnya hilirisasi komoditas unggulan daerah serta stabilitas operasional industri skala besar dan menengah yang menjaga kontribusi nilai tambah sektor manufaktur terhadap perekonomian daerah serta Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten yang mencapai 0,39% (97,05%).

Sementara itu rata-rata capaian kinerja program mencapai 79,02% dengan skala nilai peringkat kinerja Tinggi. Keberhasilan optimal pada persentase industri berbasis komoditas unggulan (99,61%) utamanya didorong oleh tingginya kesadaran pengusaha untuk melakukan diversifikasi produk daerah. Selain itu juga didukung oleh tingginya capaian kepemilikan akun industri terdaftar dalam SIINas (90,15%). Namun, akselerasi kinerja secara keseluruhan masih terhambat oleh faktor pemahaman pelaku usaha, yaitu kurangnya pengetahuan mereka terhadap komitmen perizinan berusaha yang menekan capaian pembinaan dan pengawasan izin industri (46,92%).

2.6 Evaluasi Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaran Sekretariat Daerah terdiri dari 10 indikator kinerja IKUPD pemda, 25 indikator kinerja program dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2. 36
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
SEKRETARIAT DAERAH									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien	1	Indeks kualitas kebijakan	angka	75,71	66	75,71	100	Sangat Tinggi	Bagian Organisasi Setda
	2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Pemda)	angka	67,37	67,5	67,37	99,81	Sangat Tinggi	Bagian Organisasi Setda
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	3	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	angka	3,298	3,46	2,805	81,07	Tinggi	Bagian Pemerintahan Setda
Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	4	Indeks reformasi hukum	angka	97,12	97,08	97,12	100	Sangat Tinggi	Bagian Hukum Setda
Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	5	Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Setda
Meningkatnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	6	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bagian Pembangunan Setda
	7	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	angka	3,82	3,93	3,82	97,2	Sangat Tinggi	Bagian Perekonomian Setda
Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	8	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	angka	84,35	84,5	84,35	99,82	Sangat Tinggi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	9	IKM Sekretariat Daerah	angka	86,22	81,25	86,22	100	Sangat Tinggi	Bagian Umum Setda
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah	10	Persentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	%	84,78	41,3	84,78	100	Sangat Tinggi	Bagian Organisasi Setda
INDIKATOR PROGRAM									

Program	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
Program Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	50	50	Sangat Rendah	Bagian Umum Setda
	2	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	nilai	75,35	76	75,35	99,14	Sangat Tinggi	Bagian Umum Setda
	3	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bagian Umum Setda
	4	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
	5	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	nilai	4,04	3,8	4,04	100	Sangat Tinggi	Bagian Organisasi Setda
	6	Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bagian Organisasi Setda
Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	7	Persentase produk hukum yang difasilitasi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bagian Hukum Setda
	8	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bagian Hukum Setda
	9	Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bagian Hukum Setda
	10	Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bagian Hukum Setda
	11	Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bagian Hukum Setda
	12	Persentase administrasi tata pemerintahan yang baik	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bagian Pemerintahan Setda
	13	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bagian Pemerintahan Setda
	14	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	%	80	80	40	50	Sangat Rendah	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Setda

Program	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
	15	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	87,84	88	87,84	99,82	Sangat Tinggi	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Setda
	16	Indeks Zakat Nasional	angka	0,8	0,81	0,53	65,43	Rendah	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Setda
Program perekonomian dan pembangunan	17	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100	50	50	Sangat Rendah	Bagian Perekonomian Setda
	18	Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bagian Perekonomian Setda
	19	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	83,33	83,33	66,67	80	Tinggi	Bagian Perekonomian Setda
	20	Persentase nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
	21	Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	%	100	95	46.07	48,49	Sangat Rendah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
	22	Persentase Pendampingan proses PBJ	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
	23	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	89,13	89,13	Tinggi	Bagian Pembangunan Setda
	24	Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	73,79	100	72,82	72,82	Sedang	Bagian Pembangunan Setda
	25	Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	%	75,58	100	43,53	43,53	Sangat Rendah	Bagian Pembangunan Setda
JUMLAH IKUPD			**10**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**			**97,79**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH PROGRAM			**25**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**86,92**	**Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR URUSAN PEMERINTAHAN SEKDA			**35**	**RATA-RATA CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN SEKDA**			**92,36**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Rata-rata capaian kinerja Sekretariat Daerah berada pada kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi (92,36%). Capaian kinerja IKUPD sebesar 97,79%, capaian optimal ini didorong oleh komitmen pimpinan dan kuatnya konsolidasi unit kerja pada Indeks Kualitas Kebijakan (100%), tindak lanjut evaluasi tahun lalu pada Nilai AKIP Pemda (99,81%), serta sinergitas intensif dengan OPD pengampu pada Nilai EPPD (81,07%). Keberhasilan ini diperkuat oleh komitmen pelaksana pada Indeks Reformasi Hukum (100%), dukungan perumusan naskah pada kebijakan bina mental spiritual (100%), serta koordinasi lintas sektor dan kompetensi SDM pada fasilitasi kebijakan perekonomian dan pembangunan (100%). Kinerja tersebut ditopang oleh efektivitas pengukuran inklusi keuangan pada IKAD (97,2%) serta penerapan sistem perhitungan komprehensif pada Indeks Tata Kelola PBJ (99,82%). Pada akhirnya, pemenuhan target ini bermuara pada keberhasilan standardisasi laporan kinerja pada AKIP PD berpredikat BB (100%) serta optimalisasi layanan berbasis daring dan sarana prasarana pada IKM Sekretariat Daerah (100%).

Sementara itu, rata-rata capaian kinerja program mencapai 86,92% dengan skala nilai peringkat kinerja Tinggi. Capaian optimal berskala Sangat Tinggi (100%) mendominasi mayoritas indikator pada sektor kedinasan, administrasi hukum, tata pemerintahan, serta pengadaan barang/jasa, yang didorong oleh kuatnya komitmen manajemen, sinergitas lintas instansi, ketepatan waktu penetapan APBD, tertibnya pelaporan administrasi dan keuangan, serta implementasi Surat Edaran Bupati Temanggung terkait percepatan PBJ. Namun, laju capaian ini masih tertahan oleh beberapa indikator yang berada pada kategori Rendah hingga Sangat Rendah di awal tahun anggaran, seperti ketersediaan administrasi penunjang (50%) karena kendala pemeliharaan aplikasi, realisasi kegiatan keagamaan (50%) akibat perubahan kebijakan, Indeks Zakat Nasional (65,43%) yang menantikan sosialisasi Perda, rendahnya ketersediaan produk barang bersubsidi (50%) akibat tidak semua agen/pemasok melaporakan ketersediaan stok BBM/LPG serta rendahnya persentase pencatatan non-tender (48,49%) dan verifikasi dokumen kontrak (43,53%) yang realisasinya baru akan terakumulasi secara bertahap pada triwulan berikutnya.

2. Sekretariat DPRD

Kinerja penyelenggaran Sekretariat DPRD terdiri dari 4 indikator kinerja IKUPD dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana berikut.

Tabel 2. 37

Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung jawab
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
	1	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	84,39	80	84,39	100,00	Sangat Tinggi	SETWAN
	2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	70,9	71,1	70,9	99,72	Sangat Tinggi	SETWAN
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	3	Tingkat kepuasan DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	Angka	100	86	50,6	58,48	Rendah	SETWAN
	4	Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	83	50.05	60,84	Sedang	SETWAN
INDIKATOR PROGRAM									
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
SEKRETARIAT DPRD									
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD									
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	1	Persentase jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	SETWAN
	2	Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Dilaksanakan Sesuai Rencana	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	SETWAN
	3	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	100	100	78,72	78,72	Tinggi	SETWAN
	4	Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD	%	100	100	50	50	Sangat Rendah	SETWAN
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	5	Persentase Laporan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan oleh DPRD	%	100	90	100	100,00	Sangat Tinggi	SETWAN
	6	Persentase Laporan Pembahasan kebijakan Anggaran	%	100	90	100	100,00	Sangat Tinggi	SETWAN
JUMLAH IKUPD			**4**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**			**79,76**	**Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**6**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**82,18**	**Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR SETWAN			**10**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SETWAN**			**80,97**	**Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Rata-rata capaian kinerja pada indikator Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi sebesar 80,97% dan capaian kinerja IKUPD sebesar 79,76%. Sisi keberhasilan ditunjukkan oleh Nilai IKM Perangkat Daerah (100%) yang didorong oleh perbaikan pelayanan berbasis hasil survei sebelumnya, kemudahan akses, dan pemanfaatan teknologi informasi, serta Nilai AKIP Perangkat Daerah (99,72%) yang dipicu oleh optimalisasi tata kelola kinerja yang sudah terintegrasi dengan SIPD. Namun, capaian ini masih tertahan pada level Sangat Rendah oleh Tingkat kepuasan DPRD terhadap layanan sekretariat (58,48%) akibat hambatan keterbatasan sumber daya staf maupun teknologi serta kurangnya komunikasi efektif yang membuat sebagian kebutuhan anggota dewan belum terpenuhi dengan baik. Selain itu, capaian Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (60,84%) masih memerlukan optimalisasi karena adanya penyesuaian teknis tata kelola internal serta padatnya agenda kegiatan kedewanan yang berjalan bersamaan sepanjang Triwulan II.

Sementara itu, rata-rata capaian kinerja program mencapai 82,18% dengan skala nilai peringkat kinerja Tinggi. Capaian optimal berskala Sangat Tinggi pada persentase Raperda yang dibahas (100%) didorong oleh adanya inisiatif Perangkat Daerah dalam mengusulkan Raperda pada tahun sebelumnya melalui penetapan Propemperda 2026, yang diperkuat oleh suksesnya pelaksanaan kegiatan Pokir DPRD (100%) berkat integrasi sistem dalam SIPD serta laporan pembahasan kebijakan anggaran yang telah dilaksanakan (100%). Layanan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (100%) pada realisasi namun memerlukan penguatan yang memerlukan optimalisasi akses informasi yang lebih relevan dan akurat. Kegiatan DPRD yang dipublikasikan telah mencapai 78,72% dari target yang telah ditetapkan. Adapun capaian yang masih berada pada skala Rendah dan Sangat Rendah dipengaruhi oleh dinamika operasional, seperti kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD (50%) yang berada dalam masa transisi keanggotaan periode 2024-2029.

2.7 Evaluasi Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Kinerja penyelenggaran fungsi penunjang perencanaan terdiri dari 6 indikator kinerja IKUPD, dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 38

Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung jawab
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
	1	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	85,76	88,28	85,76	97,15	Sangat Tinggi	BAPPERIDA
	2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,65	83,75	83,65	100	Sangat Tinggi	BAPPERIDA
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	94,78	82,2	94,78	100,00	Sangat Tinggi	BAPPERIDA
	2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Indeks	2,911	3,01	2,911	96,71	Sangat Tinggi	BAPPERIDA
	3	Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai	98,56	87	98,56	100,00	Sangat Tinggi	BAPPERIDA
	4	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	Nilai	21,75	21,30	21,75	100,00	Sangat Tinggi	BAPPERIDA
INDIKATOR PROGRAM									
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN									
Program Perencanaan. Pengendalian. dan Evaluasi Pembangunan Daerah									
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1	Persentase Keselarasan Perencaaan Pembangunan Daerah	**%**	100	90	98,80	100,00	Sangat Tinggi	BAPPERIDA
	2	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko	**%**	100	55	100	100,00	Sangat Tinggi	BAPPERIDA
	3	Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	97,83	75	97,83	100,00	Sangat Tinggi	BAPPERIDA
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN									
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	4	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	98,37	88	100	100,00	Sangat Tinggi	BAPPERIDA
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	5	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang ekonomi dan SDA	%	96,23	88	100	100,00	Sangat Tinggi	BAPPERIDA
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan	6	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang infrastruktur	%	97,37	88	100	100,00	Sangat Tinggi	BAPPERIDA

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung jawab
kewilayahan									
JUMLAH IKUPD			**6**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD**			**98,98**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**6**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**100,00**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG PERENCANAAN			**12**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PERENCANAAN**			**99,49**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian indikator IKUPD mencapai 99,49% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan rata-rata capaian indikator program mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah daerah, didukung oleh ketersediaan data yang valid, koordinasi lintas perangkat daerah yang efektif, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Kondisi tersebut mendorong tercapainya indikator IKM Perangkat Daerah, AKIP Perangkat Daerah, Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, dan Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP pada kategori sangat tinggi.
2. Penguatan Manajemen Risiko Indeks (MRI) didukung oleh tersedianya sasaran strategis yang jelas, pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas sesuai ketentuan, serta komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan manajemen risiko pada sektor-sektor strategis. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM, penyempurnaan cascading kinerja, monitoring, dan evaluasi secara berkala menjadi faktor penting dalam meningkatkan implementasi manajemen risiko.
3. Tingginya komitmen perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara tepat waktu, sehingga mendukung ketercapaian indikator persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
4. Meningkatnya kesadaran perangkat daerah dalam menyusun dokumen evaluasi pembangunan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, sehingga proses pengendalian dan evaluasi pembangunan dapat berjalan secara optimal.
5. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang intensif antara BAPPERIDA dengan perangkat daerah dalam penyusunan RKPD, Renja, dan Renstra pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, sehingga keselarasan dokumen perencanaan dapat dipertahankan pada kategori sangat tinggi.
6. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang intensif dalam penyusunan RKPD, Renja, dan Renstra pada bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, yang mendukung sinkronisasi program dan kegiatan dengan arah pembangunan daerah.
7. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang intensif dalam penyusunan

RKPD, Renja, dan Renstra pada bidang Infrastruktur, sehingga keselarasan perencanaan antar dokumen dan antar perangkat daerah dapat tercapai secara optimal.

2. Keuangan

Kinerja penyelenggaran keuangan terdiri dari 5 indikator kinerja IKUPD, dan 9 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 39

Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan s.d Triwulan II Tahun 2026

Program		No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung jawab
					2025	2026	2026			
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)										
		1	Nilai IKM Perangkat Daerah		86,87	86,87	86,87	100,00	Sangat Tinggi	BPKPAD
		2	Nilai AKIP Perangkat Daerah		77,00	77,1	77,00	99,87	Sangat Tinggi	BPKPAD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN										
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)										
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
		1	Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)	angka	66,8	73,9	66,8	90,39	Sangat Tinggi	BPKPAD
		2	Persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	%	21,99	20,17	20,18	100,00	Sangat Tinggi	BPKPAD
		3	Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi	BPKPAD
INDIKATOR PROGRAM										
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN										
Program Pengelolaan Keuangan Daerah										
	Meningkatnya Kualitas Penganggaran	1	Cakupan pengalokasian anggaran belanja *mandatory spending* dalam APBD	%	75	75	71,43	95,24	Sangat Tinggi	BPKPAD
		2	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	BPKPAD
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perbendaharaan Daerah	3	Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	BPKPAD
		4	Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	BPKPAD
	Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban & pelaporan keuangan daerah	5	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	BPKPAD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah										
	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	6	Persentase Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	BPKPAD

Program		No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung jawab
					2025	2026	2026			
		7	Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja	%	100	98,25	100	100	Sangat Tinggi	BPKPAD
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah										
	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	8	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	%	76,62	4,57	1,12	24,50	Sangat Rendah	BPKPAD
	-	~~9~~	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah	%	94,94	98,29	40,37	41,07	Sangat Rendah	BPKPAD
JUMLAH IKUPD				**5**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD**			**98,05**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM				**9**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**84,53**	**Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG KEUANGAN				**14**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG KEUANGAN**			**91,29**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian indikator IKUPD sebesar 98,05% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi, sedangkan rata-rata capaian indikator program sebesar 84,53% dengan skala penilaian kinerja Tinggi. Meskipun secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat 2 indikator program dengan skala penilaian kinerja Sangat Rendah, yaitu:

1. Indikator Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah memperoleh tingkat capaian sebesar 24,50%. Faktor penghambat utama capaian indikator ini adalah masih terdapat data objek pajak yang belum termutakhir serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan pendataan objek pajak baru secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan potensi pajak daerah belum teridentifikasi secara menyeluruh sehingga berdampak pada peningkatan target pajak daerah. Adapun upaya yang dilakukan adalah melakukan pemutakhiran data objek pajak secara bertahap, mengoptimalkan kegiatan pendataan objek pajak baru, serta meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan SDM dalam pengelolaan data perpajakan daerah.
2. Indikator Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah memperoleh tingkat capaian sebesar 41,07%. Rendahnya capaian dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat/provinsi serta dinamika jumlah dan mutasi kendaraan bermotor, wajib pajak self-assessment yang belum melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar dan mandiri, serta wajib pajak official assessment yang belum melakukan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah diterbitkan. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian antara lain melalui intensifikasi sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat, optimalisasi pengawasan dan penagihan pajak daerah, pemanfaatan berbagai platform digital dalam pelayanan dan penyuluhan perpajakan, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

3. Kepegawaian

Kinerja penyelenggaran kepegawaian terdiri dari 3 indikator kinerja IKUPD dan 5 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja berikut.

Tabel 2. 40
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Kepegawaian s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung jawab
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
	1	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	83,93	82	83,93	100,00	Sangat Tinggi	BKPSDM
	2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	73,45	74	73,45	99,26	Sangat Tinggi	BKPSDM
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
	3	Indeks Sistem Merit	angka	0,62	0,69	0,62	89,86	Tinggi	BKPSDM
INDIKATOR PROGRAM									
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN									
Program Kepegawaian Daerah									
Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	1	Persentase layanan kepegawaian tepat waktu	%	100	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	BKPSDM
Meningkatnya keterisian jabatan	2	Persentase keterisian jabatan	%	84,42	85,16	89,86	100,00	Sangat Tinggi	BKPSDM
Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan ASN	3	Persentase Kebutuhan ASN	%	100	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	BKPSDM
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	4	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	%	99,96	99,18	93,63	94,40	Sangat Tinggi	BKPSDM
Meningkatnya kedisiplinan ASN	5	Persentase kedisiplinan ASN	%	89,36	99,48	62,31	62,64	Rendah	BKPSDM
JUMLAH IKUPD			**3**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD**			**96,37**	Sangat Tinggi	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**5**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**91,41**	Sangat Tinggi	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG KEPEGAWAIAN			**8**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG KEPEGAWAIAN**			**93,89**	Sangat Tinggi	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian indikator IKUPD sebesar 96,37% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi, sedangkan rata-rata capaian indikator program sebesar 91,41% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian secara umum telah berjalan dengan baik. Keberhasilan tersebut didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian, pengelolaan jabatan yang sesuai kebutuhan organisasi, pemenuhan kebutuhan ASN, serta penerapan Sistem Merit, AKIP, dan pelayanan kepada perangkat daerah yang terus mengalami perbaikan.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaran pendidikan dan pelatihan terdiri dari 1 indikator kinerja IKUPD dan 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 41

Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	1	Indeks Profesionalitas ASN	angka	79,81	80,5	79,81	99,14	Sangat Tinggi	BKPSDM
INDIKATOR PROGRAM									
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
Program Pengembangan Sumberdaya Manusia									
Meningkatnya kualitas pengembangan potensi ASN	1	Persentase pengembangan potensi ASN	%	45,06	24,73	83,75	100,00	Sangat Tinggi	BKPSDM
JUMLAH IKUPD			**1**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD**			**99,14**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**1**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**100,00**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			**2**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**99,57**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian indikator IKUPD sebesar 99,14% dengan skala nilai peringkat kinerja Tinggi, sedangkan rata-rata capaian indikator program sebesar 100% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan telah berjalan dengan sangat baik.

Keberhasilan tersebut didukung oleh pemutakhiran data kepegawaian yang dilakukan melalui aplikasi MySAPK, pembaruan data yang dilakukan secara berkala, meningkatnya kesadaran ASN dalam mengikuti pengembangan kompetensi, serta semakin meningkatnya kualifikasi pendidikan pegawai. Selain itu, tersedianya media pembelajaran digital dan pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui berbagai rumpun kompetensi turut mendukung optimalnya capaian indikator.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian, yaitu belum seluruh pegawai melakukan pemutakhiran data kepegawaian pada aplikasi MySAPK, sehingga dapat memengaruhi penilaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN). Di samping itu, ketersediaan ASN yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pengembangan kompetensi masih terbatas pada awal tahun sehingga perlu terus ditingkatkan.

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja, BKPSDM akan terus melakukan koordinasi secara intensif dengan pengelola kepegawaian perangkat daerah agar seluruh ASN melakukan pemutakhiran data kepegawaian melalui aplikasi MySAPK. Selain itu, akan terus dilaksanakan pengembangan kompetensi ASN melalui berbagai rumpun kompetensi sesuai kebutuhan organisasi, serta melakukan penyesuaian terhadap indikator penilaian apabila terdapat perubahan kebijakan nasional, seperti penggantian indikator IP ASN menjadi NSPK, sehingga kualitas pengelolaan sumber daya manusia aparatur tetap terjaga dan target kinerja dapat dipertahankan pada periode berikutnya.

5. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaran Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan terdiri dari 2 indikator kinerja IKUPD dan 3 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 42

Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung jawab
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	1	Indeks Inovasi Daerah	nilai	88,88	73,5	88,88	100,00	Sangat Tinggi	BAPPERIDA
	2	Kapabilitas Inovasi	angka	2,66	2,65	2,66	100,00	Sangat Tinggi	BAPPERIDA
INDIKATOR PROGRAM									
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
Program Penelitian dan Pengembangan									
Meningkatnya fasilitasi. pembinaan. bimbingan teknis. dan supervisi terkait penelitian. pengembangan. pengkajian dan penerapan di daerah	1	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	%	100	60	100	100,00	Sangat Tinggi	BAPPERIDA
Program Riset dan Inovasi									
Meningkatnya fasilitasi. pembinaan. bimbingan teknis. dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	2	Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis	%	100	50	100	100,00	Sangat Tinggi	BAPPERIDA
	3	Persentase inovasi yang dimanfaatkan	%	100	60	100	100,00	Sangat Tinggi	BAPPERIDA
JUMLAH IKUPD			**2**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD**			**100,00**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**3**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**100,00**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			**5**	**RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**100,00**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian indikator IKUPD sebesar 100% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi, sedangkan rata-rata capaian indikator program fungsi penelitian dan pengembangan sebesar 100% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi penelitian, pengembangan, riset, dan inovasi telah berjalan secara optimal dan mampu mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah.

Keberhasilan tersebut didukung oleh meningkatnya capaian pada dimensi keanekaragaman dan kolaborasi dalam Indeks Daya Saing Daerah, tersedianya data dan hasil kajian yang relevan untuk diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, serta terjalinnya kerja sama dan sinergi dengan BRIN, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan riset sesuai isu strategis daerah. Selain itu, dokumen kematangan inovasi yang disampaikan telah memenuhi kualitas yang baik dan memperoleh hasil validasi yang baik dari tim penilai, sehingga turut mendukung peningkatan capaian indikator inovasi daerah.

Meskipun seluruh indikator program telah mencapai target, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain kontribusi dimensi riset yang masih relatif kecil terhadap peningkatan kapabilitas daerah, keterbatasan anggaran penelitian, kelengkapan dan kesesuaian data dukung inovasi yang masih perlu ditingkatkan, serta rekomendasi kebijakan yang pada beberapa kegiatan baru dihasilkan setelah dokumen perencanaan ditetapkan, sehingga pemanfaatannya dalam proses perencanaan belum sepenuhnya optimal.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, akan dilakukan peningkatan publikasi ilmiah dan fasilitasi Kekayaan Intelektual (KI), penguatan quality control terhadap data dukung inovasi melalui pembentukan tim verifikasi, pendampingan penyusunan laporan inovasi dan inventarisasi pelaporan inovasi, perluasan kerja sama riset dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian, serta percepatan penyusunan rekomendasi kebijakan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan, dan inovasi serta memperkuat daya saing daerah secara berkelanjutan.

2.8 EVALUASI KINERJA UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Inspektorat Daerah

Kinerja pengawasan terdiri dari 5 indikator kinerja IKUPD dan 7 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja tertuang pada tabel berikut

Tabel 2. 43
Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan s.d Triwulan II Tahun 2026

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
				2025	2026	2026			
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
	1	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	91,59	81,00	91,59	100,00	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
	2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	78,15	79	87,15	100	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
	3	Maturitas SPIP	Angka	2,979	3,125	2,979	95,33	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
	4	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	2,42	3,003	2,42	80,59	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
	5	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	2,91	3,003	2,91	96,90	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
INDIKATOR PROGRAM									
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
INSPEKTORAT DAERAH									
Program Penyelenggaraan Pengawasan									
Meningkatnya Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang efektif dan efisien	1	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I. II. III.IV. Khusus)	%	100	100	20,72	20,72	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2	Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3	Persentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan Dan Asistensi									
Mewujudkan Keyakinan Terhadap Proses Pengawasan	4	Persentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan	%	100	100	0	0	Sangat Rendah	INSPEKTORAT

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
Mewujudkan komitmen pembangunan Zona Integritas	5	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	66,67	100	0	0,00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
Meningkatnya identifikasi Resiko dan Pengendaliannya pada Perangkat Daerah	6	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
Meningkatnya respon terhadap aduan masyarakat	7	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing. Benturan Kepentingan. dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
JUMLAH IKUPD			**5**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**			**94,56**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**7**	**RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM**			**60,10**	**Sangat Rendah**	
JUMLAH INDIKATOR INSPEKTORAT			**12**	**RATA-RATA CAPAIAN INSPEKTORAT**			**77,33**	**Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian IKUPD Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebesar 94,56% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Capaian tersebut didukung oleh indikator Nilai IKM Perangkat Daerah, Nilai AKIP Perangkat Daerah, Maturitas SPIP, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang telah mencapai kategori Sangat Tinggi, sedangkan Nilai Kapabilitas APIP berada pada kategori Tinggi.

Pada tingkat program, Program Penyelenggaraan Pengawasan menunjukkan kinerja yang sangat baik, dimana seluruh indikator memperoleh kategori Sangat Tinggi, meliputi persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, serta persentase penyelesaian pengawasan dengan tujuan tertentu.

Sementara itu, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi masih memiliki rata-rata capaian sebesar 48,17% dengan kategori Sangat Rendah. Indikator yang masih memiliki capaian sangat rendah meliputi Persentase kebijakan

teknis pengawasan yang ditetapkan dengan capaian 0%, Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan capaian 0%, serta Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi pengelolaan risikonya dengan capaian 23,91%.

Rendahnya capaian indikator tersebut disebabkan karena sebagian besar tahapan penyusunan kebijakan teknis, pengusulan Zona Integritas, dan evaluasi pengelolaan risiko baru dilaksanakan secara bertahap pada semester berikutnya. Selain itu, proses pemenuhan dokumen pendukung dari Perangkat Daerah belum sepenuhnya selesai sehingga pelaksanaan evaluasi dan pendampingan belum dapat dilakukan secara optimal pada Triwulan II.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja pada akhir tahun antara lain meningkatkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dalam pemenuhan dokumen pendukung, mempercepat penyusunan dan penetapan kebijakan teknis pengawasan, mengoptimalkan pendampingan kepada Perangkat Daerah yang diusulkan menuju WBK/WBBM, meningkatkan asistensi penerapan manajemen risiko, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala agar seluruh tahapan kegiatan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

2.9 EVALUASI KINERJA UNSUR KEWILAYAHAN

Capaian Kinerja Penyelenggaran Unsur Kewilayahan Urusan terdiri dari 4 indikator IKUPD 6 indikator kinerja program daerah pada kecamatan yang tidak ada kelurahannya, dan 8 indikator program pada kecamatan yang ada wilayah kelurahannya. Rata-rata capaian kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 44
Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan s.d Triwulan II Tahun 2026

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
IKUPD									
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan							
		Kecamatan Temanggung	%	84,64	85	80,74	94.89	Sangat Tinggi	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Tembarak	%	86,086	84.01	81.07	97.25	Sangat Tinggi	Kecamatan Tembarak
		Kecamatan Pringsurat	%	85,97	85.10	82,49	96,39	Sangat Tinggi	Kecamatan Pringsurat
		Kecamatan Kaloran	%	84,55	84.15	74,63	87,36	Tinggi	Kecamatan Kaloran

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
		Kecamatan Parakan	%	86	85	85	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Bulu	%	85,95	84.82	81,94	96,60	Sangat Tinggi	Kecamatan Bulu
		Kecamatan Kedu	%	85,52	83.25	80.47	96,66	Sangat Tinggi	Kecamatan Kedu
		Kecamatan Kandangan	%	86	83.25	80.91	97,19	Sangat Tinggi	Kecamatan Kandangan
		Kecamatan Candiroto	%	84,35	83.25	79.85	95,91	Sangat Tinggi	Kecamatan Candiroto
		Kecamatan Ngadirejo	%	86,11	86.5	82.69	95,59	Sangat Tinggi	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Jumo	%	82,673	87.4	81,39	93,12	Tinggi	Kecamatan Jumo
		Kecamatan Wonoboyo	%	84.09	84.16	99,7	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Wonoboyo
		Kecamatan Kranggan	%	84.85	82.85	82,05	99,04	Sangat Tinggi	Kecamatan Kranggan
		Kecamatan Bejen	%	85.30	83.25	80,84	97,10	Sangat Tinggi	Kecamatan Bejen
		Kecamatan Kledung	%	85.41	83.69	80,51	96,20	Sangat Tinggi	Kecamatan Kledung
		Kecamatan Bansari	%	85.27	83.25	80,22	96,36	Sangat Tinggi	Kecamatan Bansari
		Kecamatan Tlogomulyo	%	85.46	84.1	78,46	93,29	Sangat Tinggi	Kecamatan Tlogomulyo
		Kecamatan Selopampang	%	86.95	84.25	84,66	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Selopampang
		Kecamatan Gemawang	%	84.06	83.25	81,03	97,33	Sangat Tinggi	Kecamatan Gemawang
		Kecamatan Tretep	%	84.12	83.25	79,79	95,85	Sangat Tinggi	Kecamatan Tretep
RATA-RATA Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan							96,78	Sangat Tinggi	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi pemerintahan kecamatan							
		Kecamatan Temanggung	Angka	96.93	96.84	84,95	84,95	Tinggi	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Tembarak	Angka	99.28	97.2	86,14	88,62	Tinggi	Kecamatan Tembarak
		Kecamatan Pringsurat	Angka	99.39	99.25	88,94	90,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Pringsurat
		Kecamatan Kaloran	Angka	99.81	98.52	70,04	71,09	Tinggi	Kecamatan Kaloran
		Kecamatan Parakan	Angka	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Bulu	Angka	99.13	99.18	87,22	87,94	Tinggi	Kecamatan Bulu
		Kecamatan Kedu	Angka	99.95	97.25	84,28	87,22	Tinggi	Kecamatan Kedu
		Kecamatan Kandangan	Angka	99.81	99.18	84,56	97,19	Sangat Tinggi	Kecamatan Kandangan
		Kecamatan Candiroto	Angka	100	97.25	84,73	87,13	Tinggi	Kecamatan Candiroto
		Kecamatan Ngadirejo	Angka	99.90	99.3	89,68	90,31	Sangat Tinggi	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Jumo	Angka	90.6	97.25	86,24	88,68	Tinggi	Kecamatan Jumo
		Kecamatan Wonoboyo	Angka	96	96.2	99.7	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Wonoboyo
		Kecamatan Kranggan	Angka	98.95	96.25	90,55	94,08	Sangat Tinggi	Kecamatan Kranggan
		Kecamatan Bejen	Angka	99.93	97.75	86,53	88,52	Tinggi	Kecamatan Bejen
		Kecamatan Kledung	Angka	99.64	99.42	80,51	96,20	Sangat Tinggi	Kecamatan Kledung
		Kecamatan Bansari	Angka	100	97.5	84,87	87,05	Tinggi	Kecamatan Bansari
		Kecamatan Tlogomulyo	Angka	100	100	78,46	93,29	Sangat Tinggi	Kecamatan Tlogomulyo
		Kecamatan Selopampang	Angka	100	97.25	93,13	95,77	Sangat Tinggi	Kecamatan Selopampang
		Kecamatan Gemawang	Angka	97.00	97.25	87,90	90,39	Sangat Tinggi	Kecamatan Gemawang
		Kecamatan Tretep	Angka	99.21	97.25	86,23	88,68	Tinggi	Kecamatan Tretep
RATA-RATA Nilai capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi pemerintahan kecamatan							90,36	Sangat Tinggi	
3	Meningkatnya	Nilai IKM Kecamatan							

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
	kualitas pelayanan publik	Kecamatan Temanggung	%	86,5	87	87,26	99,73	Sangat Tinggi	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Tembarak	%	88,01	88,02	88,08	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Tembarak
		Kecamatan Pringsurat	%	n.a	86,73	86,73	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Pringsurat
		Kecamatan Kaloran	%	n.a	84,52	84,55	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kaloran
		Kecamatan Parakan	%	n.a	86,1	86,1	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Bulu	%	86,9	86,9	86,91	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Bulu
		Kecamatan Kedu	%	n.a	84,5	86,3	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kedu
		Kecamatan Kandangan	%	86,9	86,91	88,48	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kandangan
		Kecamatan Candiroto	%	84,33	84,5	84,51	99,83	Sangat Tinggi	Kecamatan Candiroto
		Kecamatan Ngadirejo	%	n.a	87	86,43	98,78	Sangat Tinggi	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Jumo	%	n.a	84,5	88,023	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Jumo
		Kecamatan Wonoboyo	%	84,89	84,9	84,95	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Wonoboyo
		Kecamatan Kranggan	%	84,09	84,2	85,16	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kranggan
		Kecamatan Bejen	%	86,23	86,25	86,53	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Bejen
		Kecamatan Kledung	%	86	84,5	86,30	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kledung
		Kecamatan Bansari	%	84,36	84,5	84,60	99,94	Sangat Tinggi	Kecamatan Bansari
		Kecamatan Tlogomulyo	%	85,04	85,04	85,70	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Tlogomulyo
		Kecamatan Selopampang	%	88,41	88,41	88,41	99,55	Sangat Tinggi	Kecamatan Selopampang
		Kecamatan Gemawang	%	n.a	84,5	88,18	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Gemawang
		Kecamatan Tretep	%	85,3	85,4	85,40	99,88	Sangat Tinggi	Kecamatan Tretep
RATA-RATA Nilai IKM Kecamatan							99,89	Sangat Tinggi	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai AKIP Kecamatan							
		Kecamatan Temanggung	Angka	87.00	87.5	87,26	99,73	Sangat Tinggi	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Tembarak	Angka	88.08	88.03	70,09	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Tembarak
		Kecamatan Pringsurat	Angka	86.73	86.74	71,80	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Pringsurat
		Kecamatan Kaloran	Angka	84.55	84.53	69,3	99,86	Sangat Tinggi	Kecamatan Kaloran
		Kecamatan Parakan	Angka	86.1	86.1	70,3	99,01	Sangat Tinggi	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Bulu	Angka	86.91	86.91	71,80	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Bulu
		Kecamatan Kedu	Angka	86.3	84.65	70,03	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kedu
		Kecamatan Kandangan	Angka	88.48	86.92	69,7	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kandangan
		Kecamatan Candiroto	Angka	84.51	84.65	70,30	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Candiroto
		Kecamatan Ngadirejo	Angka	86.43	87.5	82,69	95,59	Sangat Tinggi	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Jumo	Angka	88.023	84.65	69,4	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Jumo
		Kecamatan Wonoboyo	Angka	84.9	84.91	71,35	99,97	Sangat Tinggi	Kecamatan Wonoboyo
		Kecamatan Kranggan	Angka	85.16	84.3	70,45	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kranggan
		Kecamatan Bejen	Angka	86.53	86.3	69,45	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Bejen
		Kecamatan Kledung	Angka	86.30	84.65	70,30	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kledung
		Kecamatan Bansari	Angka	84.6	84.65	71,2	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Bansari
		Kecamatan Tlogomulyo	Angka	85.70	85.29	70,70	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Tlogomulyo

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
		Kecamatan Selopampang	Angka	88.41	88.45	72,45	99.93	Sangat Tinggi	Kecamatan Selopampang
		Kecamatan Gemawang	Angka	88.18	84.65	67.00	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Gemawang
		Kecamatan Tretep	Angka	85.40	85.5	67,75	99.93	Sangat Tinggi	Kecamatan Tretep
RATA-RATA Nilai AKIP Kecamatan							99,67	Sangat Tinggi	
INDIKATOR PROGRAM									
1	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan							
		Kecamatan Temanggung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Tembarak	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Tembarak
		Kecamatan Pringsurat	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Pringsurat
		Kecamatan Kaloran	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kaloran
		Kecamatan Parakan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Bulu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Bulu
		Kecamatan Kedu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kedu
		Kecamatan Kandangan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kandangan
		Kecamatan Candiroto	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Candiroto
		Kecamatan Ngadirejo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Jumo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Jumo
		Kecamatan Wonoboyo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Wonoboyo
		Kecamatan Kranggan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kranggan
		Kecamatan Bejen	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Bejen
		Kecamatan Kledung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kledung
		Kecamatan Bansari	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Bansari
		Kecamatan Tlogomulyo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Tlogomulyo
		Kecamatan Selopampang	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Selopampang
		Kecamatan Gemawang	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Gemawang
		Kecamatan Tretep	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Tretep
RATA-RATA Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan							100	Sangat Tinggi	
2		Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan							
		Kecamatan Temanggung	%	90.11	90.2	26,00	0,29	Sangat Rendah	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Tembarak	%	95.67	97.8	61.81	17,19	Sangat Rendah	Kecamatan Tembarak
		Kecamatan Pringsurat	%	96.32	95.5	33,61	35,20	Sangat Rendah	Kecamatan Pringsurat
		Kecamatan Kaloran	%	99.44	98.52	10,12	10,27	Sangat Rendah	Kecamatan Kaloran
		Kecamatan Parakan	%	97.68	95	15,96	16,80	Sangat Rendah	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Bulu	%	94.76	100	23,32	24,53	Sangat Rendah	Kecamatan Bulu
		Kecamatan Kedu	%	99.70	96	8,90	9,28	Sangat Rendah	Kecamatan Kedu
		Kecamatan Kandangan	%	98.88	96	7,35	7,65	Sangat Rendah	Kecamatan Kandangan
		Kecamatan Candiroto	%	100	95	8,38	8,82	Sangat Rendah	Kecamatan Candiroto
		Kecamatan Ngadirejo	%	99.19	97.72	17,45	17,86	Sangat Rendah	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Jumo	%	100	100	17,46	17,46	Sangat Rendah	Kecamatan Jumo
		Kecamatan Wonoboyo	%	100	100	14.44	14.44	Sangat Rendah	Kecamatan Wonoboyo

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
		Kecamatan Kranggan	%	95.75	96.25	28,57	29,68	Sangat Rendah	Kecamatan Kranggan
		Kecamatan Bejen	%	69.45	68.5	19,16	20,11	Sangat Rendah	Kecamatan Bejen
		Kecamatan Kledung	%	97.81	96.5	9,55	9,90	Sangat Rendah	Kecamatan Kledung
		Kecamatan Bansari	%	100	96.5	9,22	9,55	Sangat Rendah	Kecamatan Bansari
		Kecamatan Tlogomulyo	%	100	100	15,95	15,95	Sangat Rendah	Kecamatan Tlogomulyo
		Kecamatan Selopampang	%	100	100	28,40	29,40	Sangat Rendah	Kecamatan Selopampang
		Kecamatan Gemawang	%	100	100	27,41	27,41	Sangat Rendah	Kecamatan Gemawang
		Kecamatan Tretep	%	100	96	17,42	18,15	Sangat Rendah	Kecamatan Tretep
RATA-RATA Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan							17,13	Sangat Rendah	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak							
		Kecamatan Temanggung	%	85.32	84.5	83,67	99,01	Sangat Tinggi	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Kranggan	%	90.79	100	95.83	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kedu
		Kecamatan Ngadirejo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Parakan	%	95.83	84	90,79	90,79	Sangat Tinggi	Kecamatan Jumo
RATA-RATA Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak							97,45	Sangat Tinggi	
4		Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif							
		Kecamatan Temanggung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Parakan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Ngadirejo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Kranggan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kranggan
RATA-RATA Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif							100	Sangat Tinggi	
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian. gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan							
		Kecamatan Temanggung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Tembarak	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Tembarak
		Kecamatan Pringsurat	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Pringsurat
		Kecamatan Kaloran	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kaloran
		Kecamatan Parakan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Bulu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Bulu
		Kecamatan Kedu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kedu
		Kecamatan Kandangan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kandangan
		Kecamatan Candiroto	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Candiroto
		Kecamatan Ngadirejo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Jumo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Jumo
		Kecamatan Wonoboyo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Wonoboyo
		Kecamatan Kranggan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kranggan
		Kecamatan Bejen	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Bejen
		Kecamatan Kledung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kledung
		Kecamatan Bansari	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Bansari
		Kecamatan Tlogomulyo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Tlogomulyo
		Kecamatan Selopampang	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Selopampang

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
		Kecamatan Gemawang	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Gemawang
		Kecamatan Tretep	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Tretep
RATA-RATA Persentase penanganan laporan kejadian. gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan							100	Sangat Tinggi	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan							
		Kecamatan Temanggung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Tembarak	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Tembarak
		Kecamatan Pringsurat	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Pringsurat
		Kecamatan Kaloran	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kaloran
		Kecamatan Parakan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Bulu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Bulu
		Kecamatan Kedu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kedu
		Kecamatan Kandangan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kandangan
		Kecamatan Candiroto	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Candiroto
		Kecamatan Ngadirejo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Jumo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Jumo
		Kecamatan Wonoboyo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Wonoboyo
		Kecamatan Kranggan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kranggan
		Kecamatan Bejen	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Bejen
		Kecamatan Kledung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kledung
		Kecamatan Bansari	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Bansari
		Kecamatan Tlogomulyo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Tlogomulyo
		Kecamatan Selopampang	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Selopampang
		Kecamatan Gemawang	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Gemawang
		Kecamatan Tretep	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Tretep
RATA-RATA Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan							100	Sangat Tinggi	
7		Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu							
		Kecamatan Temanggung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Tembarak	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Tembarak
		Kecamatan Pringsurat	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Pringsurat
		Kecamatan Kaloran	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kaloran
		Kecamatan Parakan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Bulu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Bulu
		Kecamatan Kedu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kedu
		Kecamatan Kandangan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kandangan
		Kecamatan Candiroto	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Candiroto
		Kecamatan Ngadirejo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Jumo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Jumo
		Kecamatan Wonoboyo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Wonoboyo

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggungjawab
		Kecamatan Kranggan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kranggan
		Kecamatan Bejen	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Bejen
		Kecamatan Kledung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kledung
		Kecamatan Bansari	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Bansari
		Kecamatan Tlogomulyo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Tlogomulyo
		Kecamatan Selopampang	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Selopampang
		Kecamatan Gemawang	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Gemawang
		Kecamatan Tretep	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Tretep
RATA-RATA Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu							100	Sangat Tinggi	
8		Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu							
		Kecamatan Temanggung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Tembarak	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Tembarak
		Kecamatan Pringsurat	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Pringsurat
		Kecamatan Kaloran	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kaloran
		Kecamatan Parakan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Bulu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Bulu
		Kecamatan Kedu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kedu
		Kecamatan Kandangan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kandangan
		Kecamatan Candiroto	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Candiroto
		Kecamatan Ngadirejo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Jumo	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Jumo
		Kecamatan Wonoboyo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Wonoboyo
		Kecamatan Kranggan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kranggan
		Kecamatan Bejen	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Bejen
		Kecamatan Kledung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Kledung
		Kecamatan Bansari	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Bansari
		Kecamatan Tlogomulyo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Tlogomulyo
		Kecamatan Selopampang	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Selopampang
		Kecamatan Gemawang	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Gemawang
		Kecamatan Tretep	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Tretep
RATA-RATA Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu							100	Sangat Tinggi	
TOTAL RATA-RATA INDIKATOR IKUPD							96,67	Sangat Tinggi	
TOTAL RATA-RATA INDIKATOR PROGRAM							89,32	Tinggi	

Sumber: BAPPERIDA KabupatenTemanggung, 2026 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, ata-rata capaian IKUPD unsur kewilayahan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebesar 96,67% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan pemerintahan kecamatan telah berjalan dengan baik dan sebagian besar indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan.

Pada tingkat program, sebagian besar indikator memperoleh capaian 100% dengan kategori Sangat Tinggi, meliputi:

1. Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan;
2. Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif;
3. Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kamtibmas dan bencana alam di kecamatan;
4. Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa di tingkat kecamatan;
5. Persentase jumlah desa di kecamatan yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu; dan
6. Persentase jumlah desa di kecamatan yang menyelesaikan APB Desa tepat waktu.

Meskipun demikian, masih terdapat indikator yang memperoleh skala nilai peringkat kinerja Sangat Rendah, yaitu Persentase Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan dengan capaian rata-rata sebesar 17,13% pada Triwulan II Tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB pada awal tahun anggaran masih jauh dari target yang ditetapkan sehingga memerlukan perhatian dan langkah percepatan pada triwulan berikutnya.

Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya realisasi penerimaan PBB antara lain belum optimalnya distribusi dan validasi SPPT kepada wajib pajak, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak, terdapat SPPT yang belum dibagikan kepada Wajib Pajak sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, adanya wajib pajak yang berdomisili di luar daerah, keterlambatan penyetoran oleh petugas pemungut pajak desa, serta karakteristik perekonomian masyarakat yang sebagian besar bergantung pada musim panen sehingga pembayaran PBB cenderung dilakukan setelah masa panen dan menjelang jatuh tempo.

Sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja pada akhir tahun,

langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain memperkuat koordinasi dengan BPKPAD, meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi PBB di desa, mengoptimalkan peran petugas pemungut pajak dan mantri pajak, mempercepat pendistribusian serta pemutakhiran data SPPT, melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak tepat waktu, mengembangkan pelayanan pembayaran PBB secara digital, serta melakukan pelayanan jemput bola bagi wajib pajak yang mengalami kendala dalam melakukan pembayaran.

2.10 EVALUASI KINERJA UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Capaian Kinerja unsur pemerintahan umum diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 5 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2. 45

Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum s.d Triwulan II Tahun 2026

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026	Capaian s.d TW II 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Penanggung jawab
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)										
		1	Nilai IKM Perangkat Daerah		81,79	87,56	81,79	93,41	Sangat Tinggi	BAKESBANGPOL
		2	Nilai AKIP Perangkat Daerah		77,80	72,5	77,80	100,00	Sangat Tinggi	BAKESBANGPOL
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
		3	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	BAKESBANGPOL
		4	Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	BAKESBANGPOL
INDIKATOR PROGRAM										
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										
	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila	1	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BAKESBANGPOL
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik										
	Meningkatnya demokrasi melalui pendidikan politik	2	Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	%	210	100	100	100	Sangat Rendah	BAKESBANGPOL
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan										
	Meningkatnya ormas yang berdaya	3	Persentasae ormas yang mendapat pembinaan	%	31,25	20	36,55	100,00	Sangat Tinggi	BAKESBANGPOL
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya										
	Meningkatnya kerukunan agama. budaya. suku. dan kondisi sosial ekonomi yang kondusif	4	Jumlah kejadian konflik SARA	kejadian	2	8	0	100,00	Sangat Tinggi	BAKESBANGPOL
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial										
	Meningkatnya koordinasi dalam deteksi dini	5	Persentase koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat	%	150,00	100	66,67	66,67	Sangat Rendah	BAKESBANGPOL
JUMLAH IKUPD				**4**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**			**98,35**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM				**5**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**			**93,33**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH INDIKATOR KESBANGPOL PADA UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				**9**	**RATA-RATA CAPAIAN UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**			**95,84**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian IKUPD sebesar 98,35% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi dan rata-rata capaian indikator program yaitu 93,33% atau dengan kategori sangat tinggi.

Rekapitulasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2025 – 2029 S.D Triwulan II Tahun 2026.

Total indikator pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yaitu 852 indikator terdisri dari indikator Tujuan 3 indikator, indikator sasaran 10 indikator, indikator IKD 105 indikator, kinerja utama Perangkat Daerah 251 indikator, dan indikator program 483 indikator.

Capaian kinerja indikator tujuan dan capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja disajikan pada gambar 2.1 dan gambar 2.2 berikut ini.

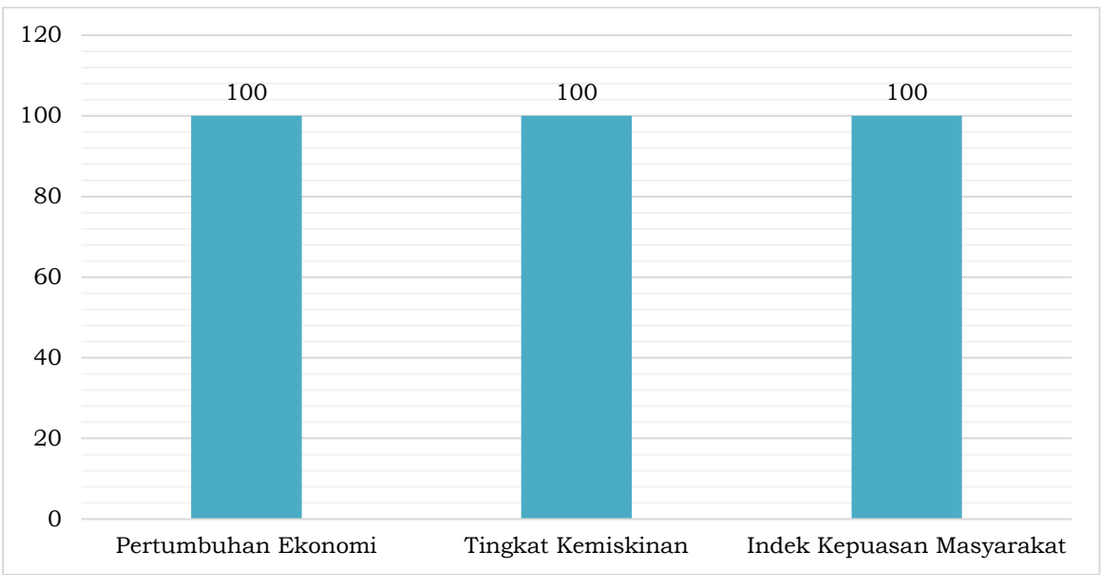

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026

Gambar 2. 1
Capaian Kinerja Indikator Tujuan s.d. Triwulan II Tahun 2026

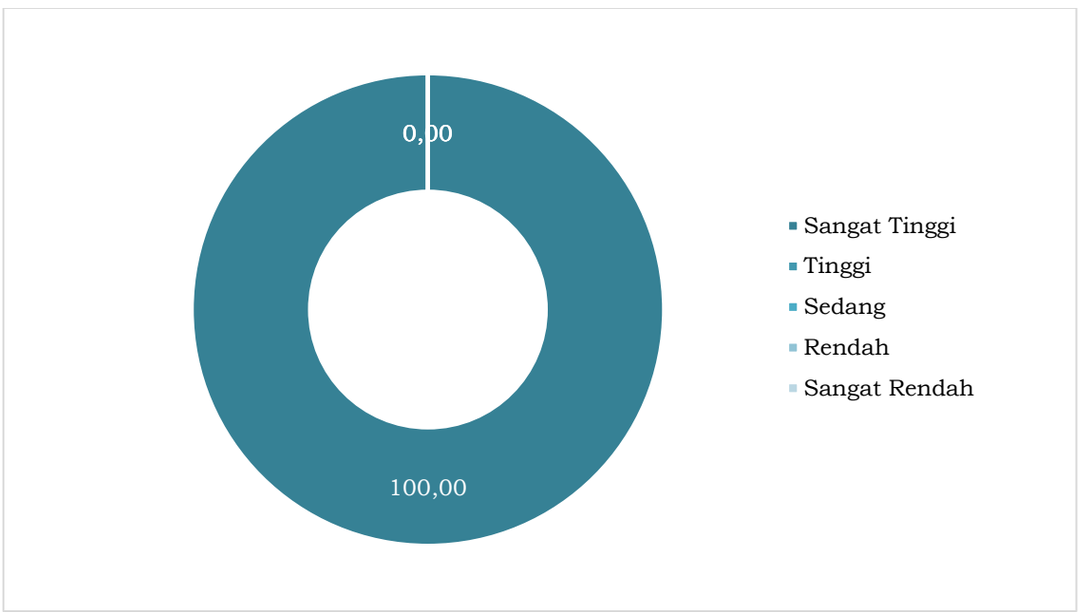

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026

Gambar 2. 2
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Indikator Tujuan s.d. Triwulan II Tahun 2026

Capaian kinerja pada indikator kinerja sasaran yang terdiri dari 10 indikator yang tercapai sebesar 96,85% atau dengan kategori sangat tinggi. Secara lebih rinci terdapat 9 indikator kategori sangat tinggi dan 1 indikator kategori tinggi. Capaian kinerja indikator sasaran dan dengan skala nilai peringkat kinerja disajikan pada gambar 2.3 dan 2.4.

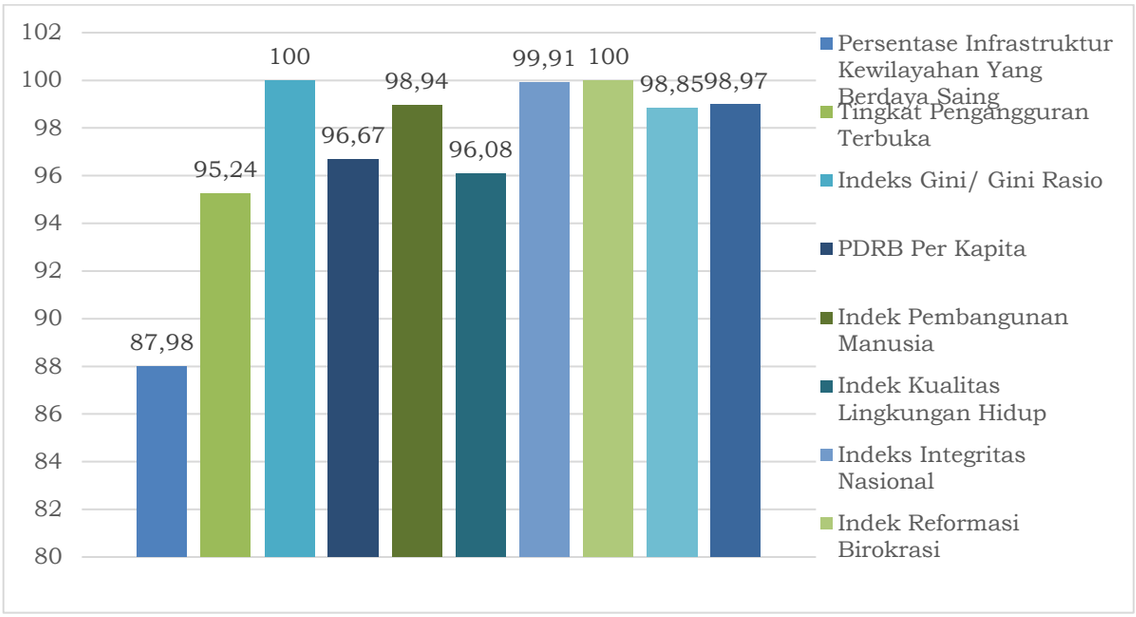

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026

Gambar 2. 3
Capaian Kinerja Indikator Sasaran s.d. Triwulan II Tahun 2026

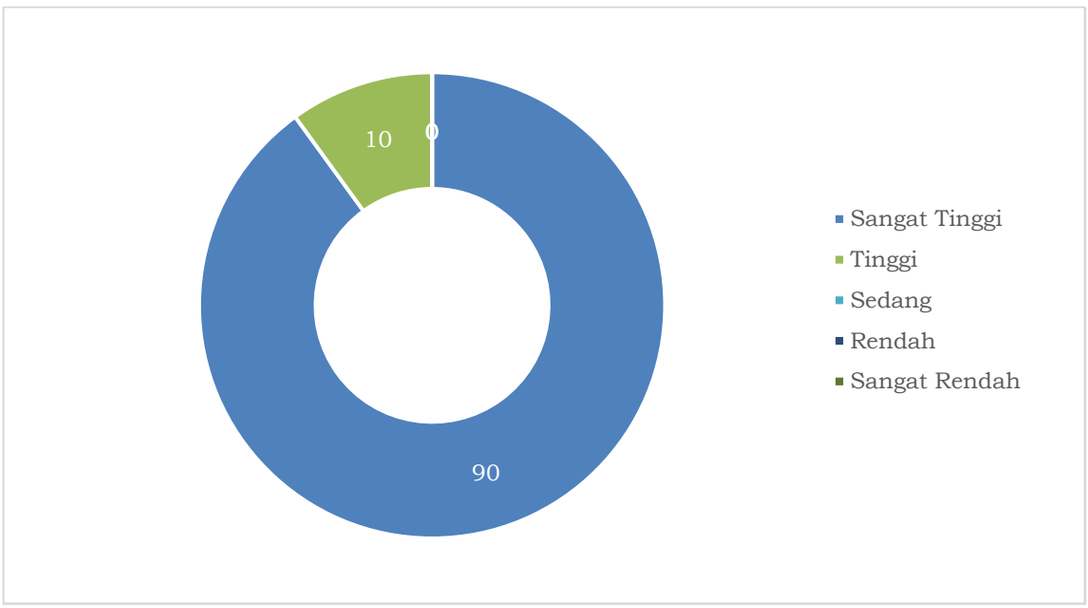

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026

Gambar 2. 4
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Indikator Sasaran s.d. Triwulan II Tahun 2026

Pada indikator kinerja daerah (IKD) yang terdiri dari 105 indikator tercapai kinerja sebesar 89,91% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi. Secara lebih rinci terdapat 78 indikator kriteria penilaian

realisasi kinerja sangat tinggi, 11 indikator kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi, 3 indikator kriteris penilaian realisasi kinerja sedang, 5 indikator kriteria penilaian realisasi kinerja rendah, dan 8 indikator kriteris penilaian realisasi kinerja sangat rendah.

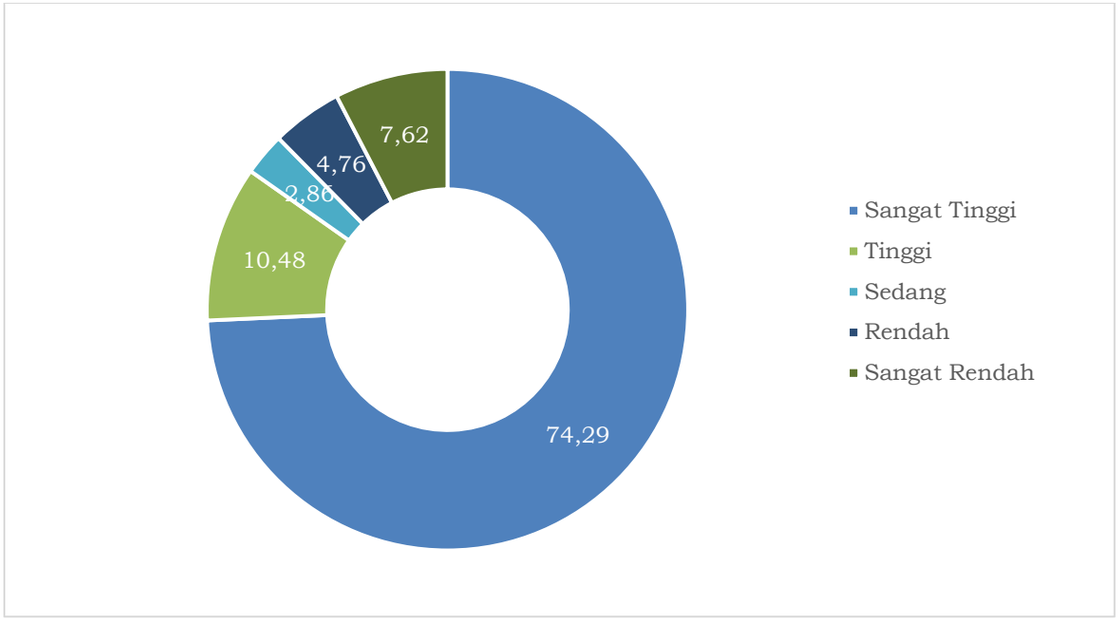

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026

Gambar 2. 5
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Daerah (IKD)
s.d. Triwulan II Tahun 2026

Sedangkan IKUPD ada 251 indikator dengan rata-rata capaian IKUPD pada Triwulan II Tahun 2026 yaitu 93,92% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Secara lebih rinci terdapat 202 indikator kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi, 32 indikator kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi, 5 indikator kriteria penilaian realisasi kinerja sedang, 7 indikator kriteria penilaian realisasi kinerja rendah, dan 5 indikator kriteria penilaian realisasi kinerja sangat rendah. Berikut merupakan persentase sebaran kriteria penilaian realisasi kinerja pada indikator IKUPD disajikan pada gambar 2.6.

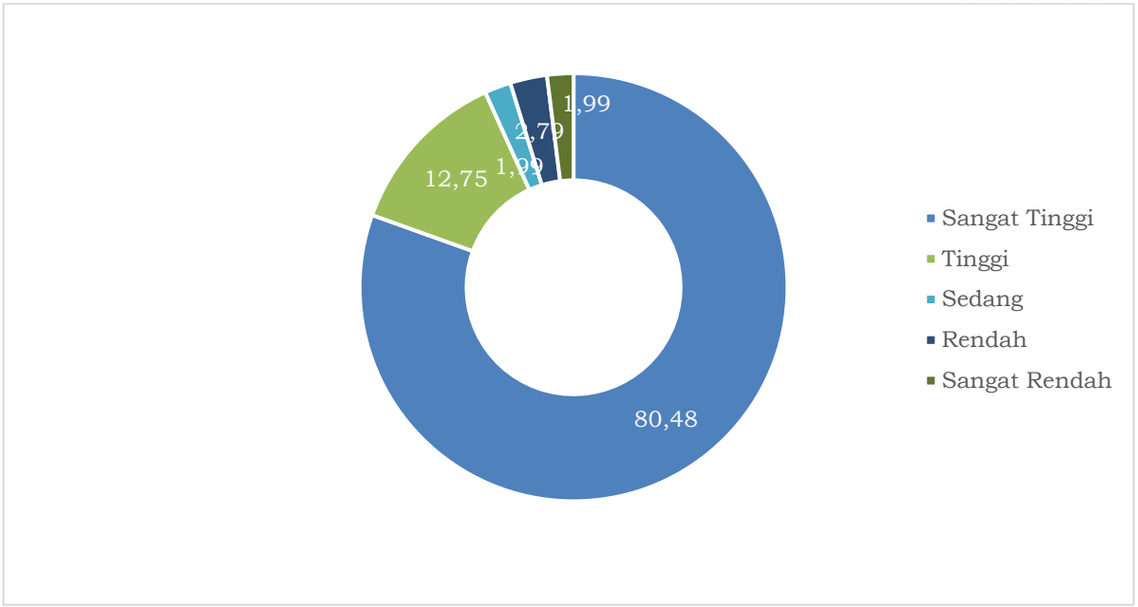

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026

Gambar 2. 6
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja pada Indikator IKUPD
s.d. Triwulan II Tahun 2026

Sementara itu, terdapat 483 indikator program sebagaimana tergambar dalam diagram berikut ini. Rata-rata capaian indikator program yaitu 85,20% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi. Secara lebih rinci terdapat 366 indikator kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi, 16 indikator kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi, 10 indikator kategori sedang, 18 indikator kriteria penilaian realisasi kinerja rendah, dan 61 indikator kriteria penilaian realisasi kinerja sangat rendah. Persentase sebaran skala nilai pringkat kinerja pada indikator program disajikan pada gambar 2.7.

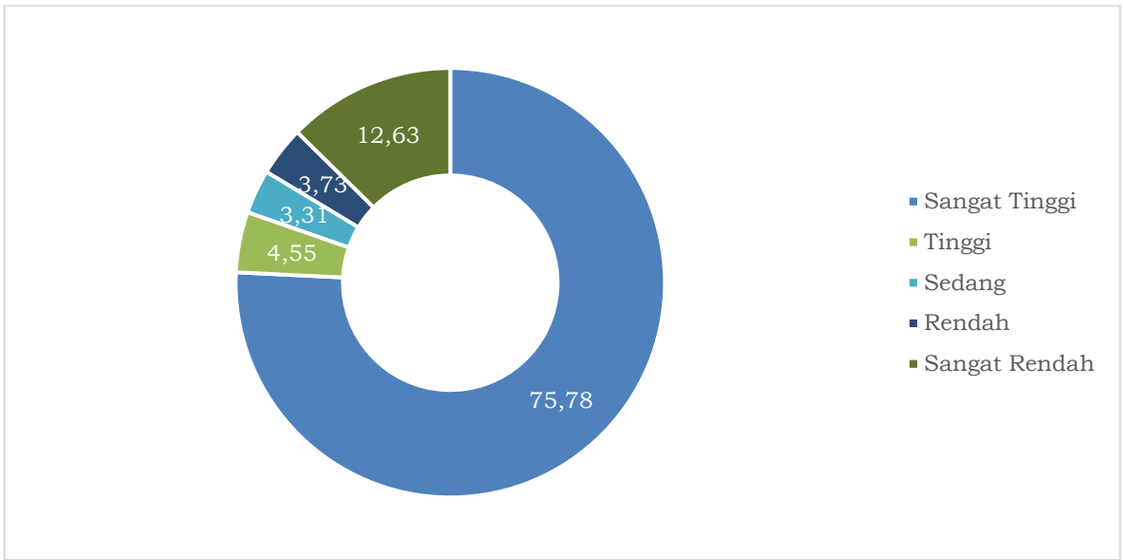

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026

Gambar 2. 7
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja pada Indikator Program

2.11 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

2.11.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Program Strategis Nasional

Pelaksanaan Program Strategis Nasional di Kabupaten Temanggung merupakan bagian dari upaya mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Kabupaten Temanggung berkomitmen mengakselerasi pelaksanaan Program Strategis Nasional sesuai kewenangan daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu diatasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, memperkuat keterpaduan perencanaan dan penganggaran, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Adapun permasalahan Kabupaten Temanggung yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Strategis Nasional sebagai berikut.

1. Belum optimalnya pengembangan inovasi pada setiap subkegiatan pendukung PSN, sehingga kontribusi program dalam mendorong efektivitas dan percepatan pencapaian target pembangunan belum maksimal;
2. Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat masih menghadapi permasalahan berupa belum terpenuhinya *readiness criteria* sebagai persyaratan pengusulan program, serta rendahnya minat masyarakat untuk bersekolah di Sekolah Rakyat pada tahun anggaran 2026 karena peserta didik direncanakan mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat Kabupaten Wonosobo;
3. Program Swasembada Pangan masih dihadapkan pada keterbatasan ketersediaan air irigasi dan belum memadainya sarana dan prasarana pertanian yang berdampak pada optimalisasi produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian;
4. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan KDKMP di Kabupaten Temanggung disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan lahan yang sesuai di sebagian desa/kelurahan, sehingga mengakibatkan belum seluruh wilayah dapat melaksanakan pembangunan tersebut secara merata;
5. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi kendala berupa belum terintegrasinya data sasaran antar instansi, sehingga berpotensi mempengaruhi ketepatan penetapan penerima manfaat dan efektivitas pelaksanaan program; dan

6. Upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem masih terkendala oleh ketidaksesuaian data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang berdampak pada kurang optimalnya penetapan sasaran, sinkronisasi intervensi, dan pengukuran capaian program pengentasan kemiskinan.

2.11.2. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Program Prioritas Bupati

Penyelenggaraan pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan program prioritas bupati yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Masih terdapat sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara lebih terfokus agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal. Identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan program prioritas bupati menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan program pembangunan yang lebih efektif, terarah, dan tepat sasaran guna menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Temanggung. Berikut merupakan permasalahan terkait dengan pelaksanaan program prioritas bupati pada Triwulan II Tahun 2026.

1. Belum dapat direalisasikannya penyediaan *Early Warning System* (EWS) di Kabupaten Temanggung;
2. Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi;
3. Belum terwujudnya pembangunan *City Walk* Parakan di Jalan Diponegoro dan Jalan Brigjen Katamso;
4. Belum dapat direalisasikannya penyediaan layanan *hotline/panic button* secara memadai;
5. Belum terpenuhinya kebutuhan pembangunan gedung SMA/SMK di Kabupaten Temanggung karena merupakan kewenangan pemerintah provinsi;
6. Belum dapat dilaksanakannya fasilitasi penyediaan tanah pemerintah daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat;
7. Belum optimalnya pemerataan akses pendidikan untuk semua warga Kabupaten Temanggung;
8. Masih terbatasnya pelaksanaan kegiatan Pimpinan Daerah Sambang Sekolah;

9. Belum optimalnya pengelolaan *database* pendidikan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi;
10. Belum optimalnya pemberdayaan PAUD memengaruhi mutu layanan pendidikan anak usia dini;
11. Rendahnya minat baca dan budaya literasi membaca masyarakat Temanggung melalui pemanfaatan layanan perpustakaan daerah;
12. Masih terbatasnya pembinaan, pengembangan, dan pemajuan cabang olahraga unggulan di Kabupaten Temanggung;
13. Masih terbatasnya dukungan terhadap profesionalitas dan kesejahteraan atlet di Kabupaten Temanggung;
14. Masih rendahnya cakupan kepesertaan dan kepesertaan aktif BPJS, serta akses layanan kesehatan;
15. Belum optimalnya kualitas dan pemerataan layanan puskesmas;
16. Masih terdapat kesenjangan kualitas pelayanan posyandu antar desa;
17. Belum tersedianya lahan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan teknis dan administratif menjadi kendala dalam fasilitasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Temanggung;
18. Belum terbangunnya *greenhouse* di Kabupaten Temanggung karena terbatasnya ketersediaan lahan yang dapat dimanfaatkan;
19. Masih terbatasnya keterlibatan pelaku seni dan budaya lokal *goes to school* karena merupakan kegiatan *cross cutting* antara Dinbudpar dan Dindikpora;
20. Belum optimalnya upaya *rebranding* Temanggung karena belum tersusunnya konsep, identitas, dan arah pengembangan *branding* daerah yang jelas, terukur, dan disepakati oleh para pemangku kepentingan;
21. Masih terbatasnya jumlah pos kebencanaan dan personil (SDM) dalam merespon terjadinya bencana baik kebakaran maupun non kebakaran;
22. Belum memadainya ketersediaan infrastruktur sumber air untuk penanganan kebencanaan kebakaran;
23. Masih terbatasnya penyediaan *Early Warning System* (EWS) pada wilayah rawan bencana di Kabupaten Temanggung;
24. Belum optimalnya upaya perlindungan dan konservasi sumber mata air;
25. Masih terdapat kendala dalam pembinaan dan pengelolaan sumber daya air menyebabkan potensi air yang tersedia belum dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;

26. Masih terbatasnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam pemasaran produk hasil pengolahan sampah;
27. Masih terdapat kendala dalam Pembangunan City Walk pada koridor Jalan Jenderal Sudirman, Jalan S. Parman, Jalan R. Suprapto, dan Jalan M.T. Haryono;
28. Masih terdapat kebutuhan rehabilitasi dan penataan kawasan Alun-alun dan Pendopo Pengayoman untuk meningkatkan daya tarik kawasan, kualitas lingkungan, serta mendukung aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat;
29. Belum optimalnya penguatan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Alun-alun menyebabkan pelaksanaan fungsi pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan kawasan belum berjalan secara maksimal;
30. Masih terdapat kendala dalam revitalisasi Taman Kartini;
31. Belum optimalnya peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten menyebabkan tingkat kemantapan jalan pada beberapa ruas masih perlu ditingkatkan;
32. Belum optimalnya sistem transportasi dan infrastruktur pendukung transportasi publik di Kabupaten Temanggung;
33. Masih minimnya penyediaan *warning light* pada titik-titik rawan kecelakaan dan lokasi dengan tingkat aktivitas lalu lintas yang tinggi di Kabupaten Temanggung;
34. Masih terdapat rumah tidak layak huni yang memerlukan penanganan;
35. Belum tersedianya *Citywalk* di kawasan Perkotaan Ngadirejo;
36. Belum optimalnya *branding* yang terintegrasi terkait Temanggung sebagai daerah penghasil tembakau dan kopi;
37. Belum optimalnya pendampingan dan asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi;
38. Masih terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kualitas layanan yang diberikan, sehingga capaian Indeks Kepuasan Masyarakat belum optimal;
39. Belum optimalnya pelaksanaan Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, amanah);
40. Masih terbatasnya dukungan kesejahteraan bagi Ketua RT dan RW, karena belum sepenuhnya sebanding dengan beban tugas dan tanggung jawab;

41. Masih perlunya penguatan tata kelola pemerintahan terutama tata kelola kelurahan yang akuntabel, efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat;
42. Belum terbentuknya Satgas PPA dari tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa/kelurahan;
43. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas rumah aman menyebabkan layanan perlindungan sementara bagi korban kekerasan bagi perempuan dan anak;
44. Masih terbatasnya jumlah desa yang menerapkan prinsip Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPPA);
45. Terbatasnya akses perempuan terhadap pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan, pendampingan usaha, permodalan, dan pemasaran produk;
46. Belum optimalnya fungsi rumah singgah bagi keluarga pasien rujukan asal Kabupaten Temanggung yang menjalani perawatan di rumah sakit rujukan di Yogyakarta dan Semarang;
47. Masih terdapat kelompok rentan dan marjinal yang belum sepenuhnya terjangkau oleh program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi; dan
48. Belum optimalnya kolaborasi dan koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan daerah.

2.11.3. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah pada triwulan II Tahun 2026, masih terdapat beberapa indikator utama yang memerlukan perhatian khusus karena belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Identifikasi permasalahan ini disusun untuk memetakan kesenjangan antara realisasi dengan target sasaran yang direncanakan, sekaligus menentukan faktor-faktor strategis yang menjadi kunci keberhasilan dalam upaya perbaikan ke depan. Adapun rincian permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran daerah adalah sebagai tabel berikut:

Tabel 2. 46
Identifikasi Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Indeks Pembangunan Manusia	- Target 2026 : 73,3 - Realisasi TW II 2026 : 72,52 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia	1. Pendidikan - Peningkatan kualitas layanan pendidikan dengan rehabilitasi dan melengkapi sarana prasarana pendidikan formal

No	Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				dan non formal - Peningkatan kompetensi pendidik - Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan bagi peserta didik pendidikan formal dan non formal - Sosialisasi pentingnya pendidikan dan gerakan kembali ke sekolah kepada masyarakat melalui media sosial dan media elektronik 2. Kesehatan - Penurunan angka penyakit tidak menular (PTM) dapat dilakukan melalui peningkatan deteksi dini dan pelayanan kesehatan pada usia produktif maupun lanjut usia sesuai standar - Peningkatan KIE kepada masyarakat akan pentingnya pencegahan penyakit sebelum penyakit terjadi melalui kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Puskesmas, kegiatan Integrasi Layanan Primer, dll - Melakukan validasi dan sisir data teekait dengan data-data yang memungkinkan berhubungan dengan kasus penyakit menular (PM) dan penyakit tidak menular (PTM) - Peningkatan kepesertaan dan keaktifan masyarakat dalam program jaminan kesehatan (JKN) 3. Pengeluaran per kapita yang disesuaiakan - Peningkatan daya beli masyarakat - Pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal - Perluasan pemasaran produk unggulan Temanggung melalui digitalisasi - Peningkatan keterampilan tenaga kerja (vokasi) agar sesuai kebutuhan pasar - Pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pokok
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	- Target 2026 : 2.20 - 2.00 - Realisasi TW II 2026 : 2.31 - Status capaian : Tidak Tercapai	Tingkat Pengangguran Terbuka relatif rendah namun rentan terhadap fluktuasi ekonomi	- Sinkronisasi pendidikan dan pasar kerja (*link and match*) - Penguatan Balai Pelatihan Kerja (BLK) - Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investasi padat karya - Pengembangan UMKM dan penumbuhan wirausaha baru - Optimalisasi bursa kerja dan informasi pasar kerja - Penanganan pengangguran musiman di perdesaan
3	PDRB Per Kapita	- Target 2026 : 39,31 juta rupiah - Realisasi TW II 2026 : 38 juta rupiah - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung	- Peningkatan distribusi produk barang dan jasa lokal sehingga selain dapat melayani permintaan dan kebutuhan lokal namun juga dapat melayani wilayah sekitarnya - Peningkatan peluang investasi dari berbagai sektor baik dalam maupun luar wilayah - Peningkatan pembangunan infrastruktur - Pemerataan kesejahteraan Masyarakat dengan mendorong UMKM agar bertumbuh dan naik

No	Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				kelas
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	- Target 2026 : 2.20 - 2.00 - Realisasi TW II 2026 : 2.31 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Kualitas Udara: - Peningkatan fungsi adsorbsi polutan melalui penambahan vegetasi penyerap partikulat PM 2.5 di area dengan intensitas aktivitas transportasi dan industri yang tinggi - Pengendalian emisi sektor transportasi melalui pelaksanaan uji emisi berkala - Penegakan aturan pelarangan pembakaran sampah di pemukiman dan lahan terbuka 2. Kualitas Lahan: - Intensifikasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) - Pengembangan agroforestri berkelanjutan - Optimalisasi tutupan tajuk permanen 3. Kualitas Air: - Reduksi beban pencemaran limbah rumah tangga - Pengendalian emisi limbah industri dan usaha - Pengendalian erosi dan sedimen
5	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing (%)	- Target 2026 : 73,8 - Realisasi TW II 2026 : 59,93 - Status capaian : Tidak Tercapai	Rendahnya kualitas dan pemerataan infrastruktur	- Optimalisasi pendanaan dari berbagai sumber - Pemerataan distribusi pembangunan infrastruktur - Percepatan pemenuhan readiness criteria - Penguatan pemeliharaan rutin pada infrastruktur yang telah terbangun - Sinergitas perencanaan lintas sektor dalam pembangunan infrastruktur
6	Indeks Pembangunan Gender	- Target 2026 : 97,13 - Realisasi TW II 2026 : 96,01 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya pembangunan dan pemberdayaan gender	- Optimalisasi program peningkatan usia perkawinan (PUP) untuk mencegah perkawinan usia anak dan pencegahan putus sekolah - Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan kewirausahaan - Memperkuat peran perempuan dalam pengambilan Keputusan - Peningkatan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender - Peningkatan kualitas konstruksi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

2.11.4. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Pada Triwulan II Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan identifikasi permasalahan terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan indikator-indikator pembangunan yang telah ditetapkan. Identifikasi ini mencakup berbagai aspek pembangunan, baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib nonpelayanan dasar, maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Berikut merupakan rincian permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Tabel 2. 47
Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
I	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**			
A	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
1	Harapan Lama Sekolah	- Target 2026 : 13,16 - Realisasi TW II 2026 : 12,63 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah	- Rehabilitasi dan melengkapi fasilitas pendidikan - Peningkatan kompetensi pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi guru - Peningkatan sarana prasarana pendidikan formal dan non formal - Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan bagi peserta didik pendidikan formal dan non formal - Sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat melalui media sosial dan media elektronik
2	Rata-Rata Lama Sekolah	- Target 2026 : 7,59 - Realisasi TW II 2026 : 7,61 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah	- Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh - Peningkatan kualitas layanan pendidikan - Sosialisasi gerakan kembali ke sekolah - Memprioritaskan usia peserta didik 13-15 tahun dengan memberikan poin tinggi
3	Rata-rata kemampuan numerasi siswa SMP Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional	- Target 2026 : 64,84 - Realisasi TW II 2026 : 63,53 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum tercapainya rata-rata kemampuan numerasi siswa SMP sederajat berdasarkan asesmen nasional	- Pembentukan tim literasi sekolah dan daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan literasi. - Pendampingan intensif bagi sekolah dengan capaian literasi rendah - Penyusunan modul literasi kontekstual sesuai kearifan lokal Temanggung (misal teks tentang kopi, tembakau, atau legenda lokal) - Penguatan supervisi akademik untuk memastikan guru menerapkan strategi membaca kritis dan reflektif. - Pemanfaatan teknologi digital untuk literasi interaktif (platform baca online, aplikasi membaca)
4	Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional	- Target 2026 : 77,79 - Realisasi TW II 2026 : 73,84 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya siswa SD yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional	- Penguatan kompetensi guru matematika melalui pelatihan *teaching numeracy*, asesmen diagnostik, dan strategi pembelajaran berbasis konteks kehidupan - Integrasi numerasi dalam semua mata pelajaran melalui pendekatan lintas disiplin (misalnya menghitung data dalam IPS, dan sains) - Pengembangan bank soal kontekstual dan lembar kerja numerasi berbasis masalah lokal Temanggung (misalnya menghitung hasil panen kopi, jarak antar desa, atau perbandingan harga) - Peningkatan penggunaan teknologi digital dan media manipulatif dalam pembelajaran matematika.

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				- Pemberian penghargaan kepada sekolah yang berhasil meningkatkan capaian numerasi secara signifikan
5	Persentase siswa SMP Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada Asesmen Nasional	- Target 2025 : 77,51 - Realisasi 2025 : 77,45 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya siswa SMP yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional	- Penguatan program literasi daerah melalui gerakan Temanggung Literat, yang mendorong kegiatan membaca 15 menit setiap hari - Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan literasi berbasis teks, asesmen literasi, dan strategi pembelajaran berbasis HOTS *(Higher Order Thinking Skills)* - Penyediaan bahan bacaan kontekstual yang memuat kearifan lokal, misalnya legenda daerah, hasil bumi, atau tokoh inspiratif dari Temanggung - Revitalisasi perpustakaan sekolah dan digitalisasi bahan bacaan, termasuk penggunaan aplikasi bacaan digital - Pelaksanaan lomba literasi antar sekolah seperti menulis cerpen, resensi buku, dan membaca puisi, untuk menumbuhkan minat baca dan menulis siswa - Integrasi kegiatan literasi dalam intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler - Kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat untuk membangun budaya membaca di rumah dan lingkungan sekitar - Monitoring capaian literasi melalui asesmen literasi daerah secara berkala dan tindak lanjut hasilnya di setiap satuan pendidikan.
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	- Target 2026 : 6,27 - Realisasi TW II 2026 : 5,38 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	- Peningkatan upaya gerakan kembali ke sekolah melalui verval data ATS - Optimalisasi pemberian bantuan pendidikan bagi usia 15 tahun keatas
7	Angka partisipasi sekolah	- Target 2026 : * Angka partisipasi sekolah usia 7 - 15 tahun : 99,00 * Angka partisipasi sekolah usia 7 - 18 tahun kesetaraan : 52,40 - Realisasi TW II 2026 : * Angka partisipasi sekolah usia 7 - 15 tahun : 97,98 * Angka partisipasi sekolah usia 7 - 18 tahun kesetaraan : 43,48 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS)	- Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh - Peningkatan kualitas pendidikan jenjang PAUD Formal - Pendataan dan pemetaan ATS, putus sekolah, dan LTM berbasis desa/kelurahan - Penetapan Peraturan Bupati Temanggung tentang pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah - Pembentukan Tim Terpadu yang melibatkan Dinas, Satuan Pendidikan dan Pemerintah Desa dalam penanganan Anak Tidak Sekolah - Penyediaan bantuan biaya pendidikan (BOP, BSM, PIP, dll) bagi siswa dari keluarga kurang mampu
8	Persentase sarana prasarana pendidikan	- Target 2026 : 57,45 - Realisasi TW II 2026 : 44,09 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih terbatasnya sarana prasarana pendidikan jenjang SD	Mendorong Satuan Pendidikan untuk memperbaharui sarana dan prasarana yang ada di dapodik agar sesuai dengan data

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	jenjang SD kondisi baik		dan SMP yang layak dan dalam kondisi baik	yang ada di Satuan Pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya dengan tujuan untuk bisa mendapat bantuan revitalisasi sekolah
9	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	- Target 2026 : 64,25 - Realisasi TW II 2026 : 56,76 - Status capaian : Tidak Tercapai		
10	Angka putus sekolah	- Target 2026 : * Angka putus sekolah SD sederajat : 266 * Angka putus sekolah SMP sederajat : 777 - Realisasi TW II 2026 : * Angka putus sekolah SD sederajat : 390 * Angka putus sekolah SMP sederajat : 1050 - Status capaian : Tidak Tercapai	Tingginya angka putus sekolah pada jenjang SD dan SMP	- Pengembangan kurikulum dan metode pembejaran yang efektif - Peningkatan akses fasilitas pendidikan yang memadai serta melibatkan orang tua melalui komunikasi yang efektif - Bantuan ekonomi bagi siswa tidak mampu (BSM, BOP, PIP, dll) - Pencegahan faktor sosial yang menyebabkan putus sekolah - Peningkatan kualitas pendidikan dan motivasi siswa - Penguatan kebijakan dan monitoring data pendidikan
11	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat dan SMP sederajat	- Target 2026 : * Angka LTM jenjang SD sederajat : 620 * Angka LTM jenjang SMP sederajat : 2397 - Realisasi TW II 2026 : * Angka LTM jenjang SD sederajat : 1029 * Angka LTM jenjang SMP sederajat : 3164 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih tingginya angka lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang SD dan SMP sederajat	- Pemutakhiran data melalui verifikasi lapangan dan pemetaan calon peserta didik dengan desa/kelurahan - Peningkatan akses dan ketersediaan layanan pendidikan - Pemberian bantuan beasiswa dan stimulus ekonomi bagi peserta didik (BOP, BSM, PIP, dll) - Penguatan layanan konseling dan motivasi belajar - Pemantauan pasca kelulusan (tracking system)terhadap siswa yang lulus untuk memastikan keberlanjutan studi
12	Rasio Guru/Siswa PAUD	- Target 2026 : 1:15 - Realisasi TW II 2026 : 1:17 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum idealnya rasio guru terhadap siswa pada PAUD	- Pengadaan formasi guru jenjang PAUD - Pemerataan distribusi guru PAUD melalui penataan ulang penempatan guru agar lebih merata antar desa/lembaga - Penguatan standar pelayanan minimal PAUD - Penguatan kelembagaan PAUD
13	Iklim Inklusivitas SD dan SMP	- Target 2026 : * Angka Iklim Inklusivitas SD : 56,69 * Angka Iklim Inklusivitas SMP : 62,04 - Realisasi TW II 2026 : * Angka Iklim Inklusivitas SD : 53,25 * Angka Iklim Inklusivitas SMP : 57,16 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya iklim inklusivitas di lingkungan sekolah SD dan SMP	- Peningkatan fasilitasi dan pendampingan kepada peserta didik dan pendidik melalui bimtek maupun pelatihan - Penguatan kebijakan dan regulasi sekolah inklusi - Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan - Penguatan budaya sekolah yang inklusif - Peningkatan sarana dan aksesibilitas fisik sekolah - Kemitraan dan pelibatan pemangku kepentingan
14	Iklim Keamanan SD dan SMP	- Target 2026 : * Angka Iklim Keamanan SD : 73,22 * Angka Iklim Keamanan SMP : 70,41 - Realisasi TW II 2026 : * Angka Iklim Keamanan SD : 68,55 * Angka Iklim Keamanan SMP : 67,69	Belum optimalnya iklim keamanan di lingkungan sekolah SD dan SMP	- Penguatan kebijakan dan tata tertib sekolah aman - Menyelenggarakan pelatihan guru, pegawai, dan peserta didik mengenai keselamatan, penanggulangan bencana, serta pencegahan kekerasan dan perundungan - Peningkatan sarana dan prasarana keamanan sekolah

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		- Status capaian : Tidak Tercapai		- Pencegahan kekerasan dan perundungan dengan program Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Aman dari Kekerasan (SRA) - Menjalin kerja sama dengan Unit PPA Polres, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga psikologi pendidikan.
15	Iklim Kebhinekaan SD dan SMP	- Target 2026 : * Angka Iklim Kebhinekaan SD : 71,78 * Angka Iklim Kebhinekaan SMP : 71,32 - Realisasi TW II 2026 : * Angka Iklim Kebhinekaan SD : 66,26 * Angka Iklim Kebhinekaan SMP : 67,46 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya iklim kebhinekaan pada satuan pendidikan SD dan SMP	- Penguatan nilai-nilai kebhinekaan dalam kurikulum dan pembelajaran - Penerapan program Sekolah Ramah Keberagaman untuk menumbuhkan empati dan solidaritas antarsiswa - Menyusun tema P5 seperti “Bhinneka Tunggal Ika”, “Bangunlah Jiwa dan Raganya”, atau “Suara Demokrasi” - Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan - Mendorong partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam mendukung kegiatan yang menumbuhkan sikap saling menghormati antar siswa - Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler dan proyek kebhinekaan
16	Persentase SD terakreditasi minimal B	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 98,85 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih terbatasnya jumlah SD yang memenuhi akreditasi minimal B	- Pemenuhan standar sekolah sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) - Pelatihan dan pengembangan kompetensi guru (pedagogik, profesional, digital) - Rehabilitasi sarana prasarana sekolah yang tidak layak - Penguatan manajemen dan tata kelola sekolah
B	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			
1	Angka Harapan Hidup	- Target 2026 : 76,45 - Realisasi TW II 2026 : 76,16 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung	Peningkatan pelayanan kesehatan baik akses maupun mutu pelayanan, jaminan kesehatan, penyehatan lingkungan, asupan gizi yang baik, serta tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan
2	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	- Target 2026 : 62,00 - Realisasi TW II 2026 : 61,54 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar	- Pengusulan rehabilitasi dan pembangunan fasilitas kesehatan - Pengadaan alat kesehatan sesuai standar - Supervisi rutin oleh dinas kesehatan
3	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	- Target 2026 : 95,75 - Realisasi TW II 2026 : 94,48 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	- Advokasi kepada pemangku kebijakan untuk meningkatkan anggaran kepesertaan PBPU Pemda untuk mendukung tercapainya UHC (BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, BPKPAD) - Koordinasi lintas sektor untuk dapat meningkatkan kepesertaan JKN melalui berbagai segmen kepesertaan (Dinkes, BPJS Kesehatan, Kemenag, Disnaker, OPD atau instansi vertikal yang memberikan pelayanan publik) - Mendorong masyarakat yang secara ekonomi mampu untuk

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				menjadi peserta JKN dari segmen mandiri dan perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta JKN dari segmen PBPU Badan Usaha (BPJS Kesehatan)
4	Persentase kecamatan memenuhi syarat kesehatan lingkungan	- Target 2026 : 12,00 - Realisasi TW II 2026 : 0 - Status capaian : Tidak Tercapai	Rendahnya persentase kecamatan yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan	Melaksanakan pemeriksaan pangan dan pemeriksaan udara di pada minggu ke-3 bulan Oktober-November
5	Persentase anggota rumah tangga dengan aktivitas fisik yang cukup	- Target 2026 : 3,00 - Realisasi TW II 2026 : 2,01 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya persentase anggota rumah tangga dengan aktivitas fisik yang cukup	- Kebijakan nasional dan daerah yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) - Peningkatan dukungan dan komitmen pemerintah daerah serta lintas sektor dalam penguatan program kesehatan berbasis masyarakat - Peningkatan akses informasi kesehatan masyarakat - Peningkatan peran aktif kader kesehatan, PKK, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam menyosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat - Munculnya inovasi daerah dan kegiatan berbasis komunitas
6	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	- Target 2026 : 80,00 - Realisasi TW II 2026 : 12,67 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (TB)	- Advokasi untuk dukungan anggaran program P2TB - Monev dan koordinasi jejaring dengan Kader Komunitas Mentari Sehat Indonesia, Fasyankes, Lintas program dan Lintas Sektor - Optimalisasi kegiatan penjaringan, screening aktif kasus TBC baik dalam CKG ataupun program Speling, screening ILTB (Infeksi Laten TBC) terutama di tempat-tempat khusus yang beresiko terjadi penularan - Meningkatkan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) penyakit TBC melalui kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Puskesmas, kegiatan Integrasi hLayanan Primer, dll - Melakukan validasi dan sisir data teekait dengan data-data yang memungkinkan berhubungan dengan kasus TBC - Mengkonfirmasi dan menindaklanjuti data yang sudah saling terintegrasi antara beberapa aplikasi
7	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	- Target 2026 : 87,00 - Realisasi TW II 2026 : 48,59 - Status capaian : Tidak Tercapai		
8	Jumlah kasus kematian ibu	- Target 2026 : 5 - Realisasi TW II 2026 : 4 - Status capaian : Tercapai	Masih ditemukan kasus kematian ibu	- Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal - Peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan - Peningkatan pelayanan pencegahan komplikasi kebidanan - Pelayanan KB berkualitas - Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu responsif gender - Penguatan manajemen program kesehatan ibu

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				- Peningkatan upaya deteksi dini penyakit penyerta pada ibu hamil - Pendampingan ibu hamil risiko tinggi dan peningkatan kualitas dan informasi kesehatan terkait kunjungan nifas - Pelatihan kader kesehatan untuk turut medampingi, mendeteksi ibu hamil dengan masalah kesehatan serta gencar melakukan sosialisasi terkait semua aspek kesehatan ibu hamil dalam rangkaian kegiatan KIA (kelas ibu hamil, kunjungan ANC, posyandu, dll
9	Jumlah kematian balita	- Target 2026 : 161 - Realisasi TW II 2026 : 16 - Status capaian : Tercapai	Masih ditemukan kasus kematian neonatal, kematian bayi, dan kematian balita	- Pedeteksian faktor risiko kehamilan secara rutin dan berkala - Peningkatan dan pengelolaan pendidikan pola asuh terhadap bayi dan balita - Pemberian pendidikan/pelatihan/pemberdayaan kegiatan deteksi faktor risiko pada bayi dan balita oleh keluarga - Koordinasi dengan penanggung jawab kasus kematian anak di faskes luar daerah untuk memastikan kasus terlapor dalam sistem MPDN - Melaksanakan kegiatan PKAT dan pemeriksaan bayi balita risiko tinggi oleh tenaga ahli di puskesmas untuk deteksi dini kasus risiko tinggi
10	Angka kematian bayi	- Target 2026 : 11,84 - Realisasi TW II 2026 : 2,18 - Status capaian : Tercapai		- Peningkatan kualitas ANC (terutama deteksi risiko tinggi) - Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam pelayanan persalinan dan neonatal esensial - Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam manajemen kasus risiko tinggi secara aktif dan cepat - Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam deteksi dan penanganan BBLR dan premature - Penguatan rujukan dan pelayanan kegawatdaruratan obstetri-neonatal - Peningkatan kualitas edukasi ibu hamil dan keluarga tentang tanda bahaya dan perawatan neonatal awal
11	Angka kematian neonatal	- Target 2026 : 8,24 - Realisasi TW II 2026 : 1,50 - Status capaian : Tercapai		
12	Prevalensi stunting	- Target 2026 : 23,05 - Realisasi TW II 2026 : 27,3 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih tingginya kasus permasalahan gizi pada balita	- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara rutin setiap satu bulan sekali - Pemantauan tumbuh kembang balita secara serentak pada Februari dan Agustus - Pelaksanaan monitoring oleh Dinas Kesehatan terhadap puskesmas terkait kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dilapangan secara rutin dilakukan setiap bulan Februari dan Agustus - Pemeriksaan bayi balita risiko tinggi oleh tenaga ahli di
13	Prevalensi wasting balita	- Target 2026 : 7,5 - Realisasi TW II 2026 : 3,52 - Status capaian : Tercapai		

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				puskesmas untuk deteksi dini kasus risiko tinggi - Pemberian makanan tambahan melalui intervensi serentak (INTAK)
14	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 22,22 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	- Supervisi dan monitoring rutin oleh Puskesmas/Dinkes - Pelatihan refresh standar 12T bagi tenaga kesehatan - Audit maternal perinatal (AMPSR) - Penggunaan checklist standar ANC - Deteksi dini pada ibu hamil - Pendampingan tenaga ahli oleh tenaga ahli pada bumil resti - Peningkatan kualitas kelas ibu hamil - Pemetaan bumil resti - Pemerataan alat CTG pada puskesmas - Monitoring dan evaluasi laporan bulanan - Digitalisasi pencatatan (e-Kohort/aplikasi pelaporan) - *Feedback* rutin dari Dinkes ke fasilitas pelayanan
15	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 23,46 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	- Pelatihan dan refresh APN bagi bidan - Supervisi berkala ke Puskesmas dan jejaring - Audit klinis kasus komplikasi - Audit kepatuhan penggunaan partograph - *On the job training* oleh dokter spesialis obgyn jejaring - Penetapan Puskesmas prioritas penguatan PONED - Penguatan sistem rujukan terintegrasi (PSC/Call Center). - MoU dengan RS rujukan - Pembentukan desa siaga & ambulans desa - Simulasi rujukan kegawatdaruratan maternal - Sosialisasi definisi operasional indikator persalinan - Bimbingan teknis pencatatan dan pelaporan - Digitalisasi pelaporan (e-Kohort/aplikasi KIA) - Pelaksanaan AMP secara rutin dan tindak lanjut rekomendasi
16	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 23,27 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	- Peningkatan kualitas ANC (terutama deteksi risiko tinggi) - Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam pelayanan persalinan dan neonatal esensial - Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam manajemen kasus risiko tinggi secara aktif dan cepat - Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam deteksi dan penanganan BBLR dan premature

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				- Penguatan rujukan dan pelayanan kegawatdaruratan obstetri-neonatal - Peningkatan kualitas edukasi ibu hamil dan keluarga tentang tanda bahaya dan perawatan neonatal awal
17	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 23,66 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Melakukan monitoring bulanan terhadap pelayanan balita
18	Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 87,93 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	- Peningkatan kerjasama dengan pihak sekolah untuk pemantauan kesehatan secara virtual dan offline bila - Sosialisasi untuk menanamkan kesadaran siswa untuk aktif mendeteksi kesehatan pribadi dan segera menghubungi pihak sekolah/tenaga kesehatan bila ada gejala.
19	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 24,79 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	- Peningkatan pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar pada pelayanan di gedung Puskesmas ataupun pada Posbindu - Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pada masyarakat akan pentingnya pencegahan penyakit sebelum penyakit terjadi - Peningkatan peran kader kesehatan/kader posyandu dalam meningkatkan layanan skrining
20	Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 32,16 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan	- Aktivasi kegiatan Posyandu lansia - Peningkatan kemampuan kader lansia dan melibatkan lintas sektor terkait untuk berpartisipasi dalam kegiatan di Posyandu lansia
21	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	- Target 2026 : 25 - Realisasi TW II 2026 : 11,55 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Bekerja semaksimal mungkin dan melibatkan LP/LS
22	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN	- Target 2026 : 83 - Realisasi TW II 2026 : 74,69 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya fasilitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan SIKN	- Peningkatan kesadaran faskes terkait pentingnya terintegrasi SIKN dan manfaat SIKN - Pendampingan implementasi SIKN pada fasyankes yang belum terintegrasi
23	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna	- Target 2026 : 96,67 - Realisasi TW II 2026 : 93,33 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna	- Secara rutin mengusulkan anggaran untuk pembinaan pasca akreditasi - Peningkatan kompetensi petugas dalam pemantauan mutu secara rutin - Pendampingan pasca akreditasi
24	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 83,87 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	- Koordinasi dengan faskes untuk memonitoring dan evaluasi inputing dan updating data SPA pada aplikasi ASPAK - Penguatan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dan SOP pelayanan fasyankes
25	Persentase orang terduga TBC mendapatkan	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 29,58 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya orang terduga TBC mendapatkan	- Advokasi untuk dukungan anggaran program P2TB - Monev dan koordinasi jejaring dengan Kader Komunitas

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	pelayanan TBC sesuai standar		pelayanan TBC sesuai standar	Mentari Sehat Indonesia, Fasyankes, Lintas program dan Lintas Sektor - Optimalisasi kegiatan penjaringan, screening aktif kasus TBC baik dalam CKG ataupun program Speling, screening ILTB (Infeksi Laten TBC) terutama di tempat-tempat khusus yang beresiko terjadi penularan - Meningkatkan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) penyakit TBC melalui kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Puskesmas, kegiatan Integrasi Layanan Primer, dll - Melakukan validasi dan sisir data teekait dengan data-data yang memungkinkan berhubungan dengan kasus TBC - Mengkonfirmasi dan menindaklanjuti data yang sudah saling terintegrasi antara beberapa aplikasi
26	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 26,33 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	- Memaksimalkan kegiatan penjangkauan kelompok populasi kunci bekerjasama dengan LSM Kalandara dan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) Smile Plus serta bekerjasama dengan Rutan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan HIV pada Warga Binaaan Permasyarakatan (WBP) - Meningkatkan pemeriksaan HIV terutama pada pasien TB dan ibu hamil - Meningkatkan edukasi terkait HIV AIDS kepada masyarakat terutama pada anak sekolah - Memperluas dan memperkuat jejaring eksternal layanan HIV AIDS dan IMS yang melibatkan puskesmas, rumah sakit, klinik, dokter praktik mandiri maupun bidan praktik mandiri (peningkatan eksternal dalam hal jejaring pencegahan terkait dengan penemuan terduga ODHIV) - Menyediakan layanan kesehatan yang inklusif, aman, dan ramah, mendorong akses terhadap tes HIV, pengobatan HIV, dan konseling tanpa stigma
27	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 36,28 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	- Bimbingan Teknis dan monev terhadap Puskesmas terkait pelaksanaan pelayanan DM terpadu, catpor dan hasil capaian program - OJT terkait teknis pelaksanaan skrining lanjutan (komplikasi) untuk kasus DM - Melakukan sosialisasi dan OJT terkait pelaksanaan skrining di masyarakat dan teknis pelaporan ASIK pada kader - Melaksanakan skrining kesehatan pada instansi untuk menjaring sasaran pekerja yang

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				tidak terjaring pada pelayanan Posyandu
28	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 22,47 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	- Bimbingan Teknis dan monev terhadap Puskesmas terkait pelaksanaan pelayanan, catpor dan hasil capaian program - OJT terkait teknis pelaksanaan skrining lanjutan (komplikasi) untuk kasus Hipertensi - Melakukan sosialisasi dan OJT terkait pelaksanaan skrining di masyarakat dan teknis pelaporan ASIK pada kader - Melaksanakan skrining kesehatan pada instansi untuk menjaring sasaran pekerja yang tidak terjaring pada pelayanan Posyandu
29	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 12,17 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	- Bimbingan Teknis dan monev terhadap Puskesmas terkait pelaksanaan pelayanan jiwa, catpor dan hasil capaian program - Orientasi upaya promotif preventif kesehatan jiwa kepada petugas - Melaksanakan skrining kesehatan pada instansi untuk menjaring sasaran pekerja yang tidak terjaring pada pelayanan Posyandu
30	Prevalensi Obesitas	- Target 2026 : 15 - Realisasi TW II 2026 : 13,67 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih tingginya angka prevalensi obesitas	- Peningkatan Skrining dan pencatatan pelaporan rutin IMT dan lingkar perut di fasilitas kesehatan - Konseling gizi oleh tenaga kesehatan. - Manajemen kasus obesitas berbasis komunitas - Integrasi program obesitas dalam CKG, ILP, dan Pandu PTM
31	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 23,98 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya cakupan imunisasi bayi lengkap	- Optimalisasi sumber daya yang ada - Peningkatan koordinasi dengan Dinkes Provinsi Jawa Tengah dan Pusat (Kemkes) - Pemberian masukan usulan ke Kemkes terkait VR utk kab. Temanggung termasuk lokus pengadaan VR dibuka bagi Kab. Temanggung - Monitoring evaluasi mulai dari tingkat Provinsi sd Puskesmas di Kab. Temanggung - Memaksimalkan koordinasi dan peran POKJA KIPI, Bimbingan teknis, validasi dan verfiikasi data, sweeping data dan sasaran - Meningkatkan peran jejaring, upaya promosi (dirasa belum optimal)
32	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	- Target 2026 : 69,58 - Realisasi TW II 2026 : 63,93 - Status capaian : Tidak Tercapai	Rendahnya kepesertaan aktif masyarakat dalam jaminan kesehatan nasional (JKN)	- Advokasi kepada pemangku kebijakan untuk meningkatkan anggaran kepesertaan PBPU Pemda untuk mendukung tercapainya UHC (BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, BPKPAD) - Koordinasi lintas sektor untuk dapat meningkatkan kepesertaan JKN melalui berbagai segmen kepesertaan

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				(Dinkes, BPJS Kesehatan, Kemenag, Disnaker, OPD atau instansi vertikal yang memberikan pelayanan publik) - Mendorong masyarakat yang secara ekonomi mampu untuk menjadi peserta JKN dari segmen mandiri dan perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta JKN dari segmen PBPU Badan Usaha (BPJS Kesehatan) - Mendorong peserta JKN segmen PBPU dan BP Mandiri dan PPU badan usaha untuk membayar iuran JKN secara rutin untuk meningkatkan cakupan keaktifan (BPJS Kesehatan)"
33	Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	- Target 2026 : 5 - Realisasi TW II 2026 : 1,75 - Status capaian : Tidak Tercapai	Rendahnya pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	Peningkatan penyediaan anggaran, fasilitas kesehatan, dan kebijakan yang memadai
34	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	- Target 2026 : 8 - Realisasi TW II 2026 : 1,43 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum semua sarana IRTP di Kabupaten Temanggung memenuhi ketentuan	- Edukasi keamanan pangan secara rutin - Sosialisasi CPPB-IRT dan label pangan
35	Persentase posyandu aktif bidang kesehatan	- Target 2026 : 87 - Realisasi TW II 2026 : 68,80 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum semua posyandu memenuhi kriteria posyandu aktif siklus hidup	- Melaksanakan pembinaan dan pelatihan kader Posyandu secara berkala - Meningkatkan peran lintas sektor dan pemerintah desa dalam pembiayaan dan pengelolaan kegiatan Posyandu - Mengoptimalkan fungsi Posyandu sebagai pusat layanan terpadu - Melaksanakan inovasi Posyandu berbasis digital; Meningkatkan frekuensi supervisi dan monitoring oleh puskesmas - Mengembangkan kegiatan integratif lintas program dan lintas sektor - Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk memperkuat dukungan anggaran; Pemanfaatan media komunikasi dan sosialiasi public - Penguatan sistem informasi Posyandu (SIP) agar data keaktifan, sasaran, dan capaian program dapat diperbarui secara kontinyu
36	*Net Death Rate*	- Target 2026 : 20,25 - Realisasi TW II 2026 : 20,21 - Status capaian : Tercapai	Masih tingginya angka net death rate di Kabupaten Temanggung	- Penguatan Manajemen Klinis - Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan - Penguatan Sistem Pelayanan dan Rujukan Internal - Pengendalian dan Pemantauan Kasus Risiko Tinggi - Penguatan Pelaporan dan Evaluasi
37	Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 0 - Status capaian : Tidak Tercapai	Rendahnya pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit	- Perencanaan yang Matang (Bottom-Up) dengan melibatkan unit kerja dalam mengidentifikasi kebutuhan sarpras berdasarkan volume layanan dan tingkat kerusakan alat (skala prioritas)

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				- Percepatan Tender/Pengadaan dengan melakukan proses pengadaan di awal tahun anggaran dan memastikan dokumen teknis (KAK dan Spek) sudah siap sebelum tahun berjalan dimulai
38	Persentase capaian pengembangan rumah sakit	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 0 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya capaian pengembangan rumah sakit	- Monitoring dan Evaluasi (Monev) Berkala: Melakukan rapat koordinasi rutin (mingguan atau bulanan) untuk meninjau progres fisik dan membandingkannya dengan target. - Identifikasi Manajemen Risiko dengan mengidentifikasi potensi hambatan sejak awal dan menyiapkan rencana mitigasi (Plan B)
39	Persentase capaian pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 0 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya capaian pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Pengajuan usulan DAK di tahun berikutnya
40	Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah Sakit	- Target 2026 : 92 (Paripurna) - Realisasi TW II 2026 : 91,2 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum maksimalnya peringkat penilaian akreditasi rumah sakit	- Pembentukan dan Penguatan Tim Akreditasi RS membentuk struktur tim lintas bidang dengan peran dan tanggung jawab jelas agar koordinasi berjalan efektif - Penyusunan dan Review Dokumen Akreditasi (Kebijakan, SPO, Formulir) menjamin kesesuaian dokumen dengan standar edisi terbaru. - Pelatihan dan Sosialisasi Standar Akreditasi bagi seluruh pegawai, meningkatkan pemahaman sdm terhadap implementasi standar mutu dan keselamatan pasien. - Perbaikan sarana prasarana pelayanan melengkapi fasilitas yang mendukung standar keselamatan pasien dan kenyamanan pelayanan - Peningkatan budaya mutu dan keselamatan pasien, melalui kampanye, reward unit berprestasi, dan penerapan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien (IKP)
41	Persentase indikator mutu penunjang medis dan nonmedis yang mencapai target	- Target 2026 : 80 - Realisasi TW II 2026 : 75 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya capaian indikator mutu penunjang medis dan nonmedis yang mencapai target	- Pelatihan teknis berkala bagi tenaga laboratorium, radiologi, gizi, farmasi, sanitasi, dan petugas nonmedis - Sertifikasi kompetensi tenaga penunjang medis sesuai standar profesi - Optimalisasi penggunaan SIMRS untuk integrasi permintaan, hasil, dan pelaporan layanan penunjang - Digitalisasi dokumen mutu penunjang medis dan nonmedis - Melaksanakan audit internal mutu layanan penunjang secara triwulanan - Rapat koordinasi rutin antara kepala unit penunjang dengan unit klinis dan komite mutu

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
42	Persentase indikator mutu keperawatan yang mencapai target	- Target 2026 : 82 - Realisasi TW II 2026 : 25 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya capaian persentase indikator mutu keperawatan yang mencapai target	- Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan (Continuing Nursing Education) dan workshop keperawatan - Mengikutsertakan perawat dalam pelatihan keselamatan pasien, komunikasi efektif (SBAR), dan asuhan berbasis bukti - Pembentukan tim mutu keperawatan di setiap unit - Melaksanakan Ronde Keperawatan, Rapat Insiden Keselamatan, dan Audit Internal - Melaporkan capaian indikator mutu tiap triwulan kepada tim mutu RS
43	Peringkat Penilaian Kinerja BLUD RSUD	- Target 2026 : 94 - Realisasi TW II 2026 : 93,5 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum maksimalnya peringkat kinerja BLUD RSUD	- Peningkatan Tata Kelola Keuangan dan Perencanaan, meningkatkan disiplin anggaran, efektivitas RBA, serta pengendalian realisasi pendapatan dan belanja agar memenuhi standar BLUD peringkat AA - Peningkatan Kompetensi SDM BLUD, melaksanakan pelatihan teknis terkait penyusunan RBA, pelaporan keuangan berbasis akrual, dan pengukuran kinerja keuangan & nonkeuangan - Optimalisasi Pendapatan Rumah Sakit, diversifikasi sumber pendapatan melalui peningkatan layanan unggulan, efisiensi operasional, dan inovasi layanan digital serta kerjasama dengan pihak ketiga - Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Mutu Klinis Implementasi sistem mutu terintegrasi dengan indikator mutu rumah sakit, survei kepuasan pasien, dan penguatan akreditasi paripurna sebagai dasar peningkatan nilai kinerja nonkeuangan - Pemanfaatan teknologi informasi terpadu - Monitoring dan evaluasi kinerja BLUD secara berkala
44	Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan	- Target 2026 : 75 - Realisasi TW II 2026 : 23,84 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya SDMK RSUD yang mendapatkan pelatihan	- Penyusunan peta kebutuhan pelatihan (Training Need Assessment) tiap tahun berdasarkan jabatan dan unit kerja - Penetapan prioritas pelatihan wajib sesuai kebutuhan akreditasi dan layanan unggulan RS - Pengalokasian anggaran khusus untuk pengembangan SDM dalam RBA BLUD - Pemanfaatan program pelatihan gratis dari Kemenkes, Dinkes, atau mitra. - Pelatihan online / e-learning untuk efisiensi waktu dan biaya - Peningkatan kerja sama dengan universitas, asosiasi profesi, dan lembaga pelatihan resmi - Mendorong pelatihan in-house dengan narasumber internal atau eksternal

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				- Mengatur jadwal rotasi sementara bagi staf yang mengikuti pelatihan agar pelayanan tetap berjalan - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
C	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
				- Perluasan jaringan distribusi dan sambungan rumah (SR) - Penguatan sistem monitoring kualitas air minum (pelaksanaan uji laboratorium secara berkala) - Perlindungan sumber air baku melalui konservasi daerah tangkapan air dan pengendalian pencemaran - Optimalisasi manajemen operasional untuk menekan angka kehilangan air (NRW) dan meningkatkan efisiensi distribusi - Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SPAM Perdesaan - Edukasi PHBS - Pemanfaatan skema pembiayaan alternatif di luar APBD
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	- Target 2026 : 31,14 - Realisasi TW II 2026 : 19,35 - Status capaian : Tidak Tercapai	Rendahnya pemenuhan akses air minum aman bagi rumah tangga	
2	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 0 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum semua warga negara memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	- Pengembangan SPAM - Optimalisasi Sumber Daya Air - Peningkatan Pendanaan - Peningkatan Kapasitas Lembaga pengelola KPSPAM
3	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	- Target 2026 : 89,85 - Realisasi TW II 2026 : 86,14 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya kondisi permukaan jalan mantap pada ruas-ruas jalan kewenangan kabupaten	- Pemanfaatan skema pembiayaan alternatif di luar APBD - Perencanaan dan pendataan presisi kondisi jalan untuk menentukan prioritas penanganan - Pembangunan sistem drainase jalan untuk mencegah genangan yang mempercepat kerusakan jalan - Pengendalian *Over Dimension Over Load* (ODOL) - Penerapan teknologi konstruksi tepat guna
4	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	- Target 2026 : 73,8 - Realisasi TW II 2026 : 59,93 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum maksimalnya infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	- Peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur dasar - Optimalisasi pendanaan melalui kolaborasi pemerintah dan swasta, serta perencanaan terpadu lintas sektor yang selaras dengan tata ruang dan pengembangan ekonomi wilayah - Penerapan dan peningkatan pemanfaatan teknologi dalam perencanaan dan monitoring - Penguatan koordinasi antar perangkat daerah dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur
5	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	- Target 2026 : 94,37 - Realisasi TW II 2026 : 91,10 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya penanganan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur jembatan	- Pengawasan beban kendaraan - Pelaksanaan inspeksi rutin (pemeriksaan visual) dan inspeksi mendalam (inspeksi teknis) untuk mendeteksi kerusakan dini sebelum menjadi kerusakan struktur yang fatal

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				- Pemeliharaan prevsntif melalui pemeliharaan rutin dan perbaikan kerusakan kecil jembatan
6	Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 0 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya lembaga jasa konstruksi yang dibina	Pembinaan kepada penyedia jasa konstruksi melalui sosialisasi secara mandiri dan bekerja sama dengan pihak terkait
7	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum	- Target 2026 : 62,88 - Realisasi TW II 2026 : 47,28 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur pada urusan pekerjaan umum	- Pemanfaatan skema pembiayaan alternatif di luar APBD - Penerapan standar infrastruktur berketahanan dan berkelanjutan - Manajemen risiko penyelenggaraan infrastruktur
8	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	- Target 2026 : 70,2 - Realisasi TW II 2026 : 66,66 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	- Optimalisasi peran Forum Penataan Ruang - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penataan ruang - Penerapan skema insentif bagi pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana dan disinsentif bagi yang menghambat efisiensi ruang - Pelaksanaan pengawasan secara rutin untuk memastikan pemanfaatan ruang di lapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
9	Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan	- Target 2026 : 50,01 - Realisasi TW II 2026 : 33,33 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya pemenuhan target penetapan rencana detail tata ruang	- Penguatan tim teknis penataan ruang - Optimalisasi peran Forum Penataan Ruang - Efisiensi Proses Administrasi dan Legislasi
10	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	- Target 2026 : 13,06 - Realisasi TW II 2026 : 0,85 - Status capaian : Tidak Tercapai	Rendahnya pemenuhan akses sanitasi aman bagi rumah tangga	- Optimalisasi IPLT - Pemanfaatan skema pembiayaan alternatif di luar APBD - Penyediaan tanki septik kedap air sesuai standar - Implementasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) - Perubahan perilaku dan edukasi masyarakat
D	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	- Target 2026 : 72,47 - Realisasi TW II 2026 : 71,12 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	- Pemenuhan standar hunian layak - Percepatan penanganan kawasan kumuh - Legalitas dan Kepastian Penguasaan Lahan - Kolaborasi multi-sektor pada bidang PKP - Skema Pembiayaan Kreatif untuk MBR - Penguatan peran Pokja PKP - Efektivitas penyaluran bantuan sosial atau stimulan - Pendataan profil hunian yang akurat (Backlog, RTLH)
2	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	- Target 2026 : 69,06 - Realisasi TW II 2026 : 68,38 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni	- Peningkatan koordinasi dan kolaborasi pendanaan dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah - Pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas
3	Persentase kepemilikan	- Target 2026 : 80,03 - Realisasi TW II 2026 : 78,79	Rendahnya pemenuhan kebutuhan hunian	- Akurasi data dan perencanaan terpadu

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	rumah terhadap jumlah kepala keluarga	- Status capaian : Tidak Tercapai	layak bagi rumah tangga	- Kemudahan akses pembiayaan bagi MBR - Ketersediaan lahan dan instrumen kebijakan - Standardisasi dan kualitas bangunan - Optimalisasi program CSR dan hibah - Pemberdayaan masyarakat *(self-help housing)*
E	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
1	Indeks Risiko Bencana	- Target 2026 : 101,48 - Realisasi TW II 2026 : 113,08 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih tingginya tingkat risiko bencana	- Peningkatan mitigasi dan pencegahan serta kesiapsiagaan terutama pada wilayah/kawasan rawan bencana - Penyusunan dan pemutakhiran peta rawan bencana (longsor, banjir, erupsi, kekeringan) - Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, optimalisasi pendanaan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa yang tangguh terhadap bencana.
2	Persentase desa tangguh bencana	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 0 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih minimnya jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	- Optimalisasi tindak lanjut pembentukan destana yang terarah, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan - Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, optimalisasi pendanaan - Penguatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa yang tangguh terhadap bencana
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 62,2 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum semua warga negara memperoleh layanan informasi rawan bencana	- Peningkatan partisipasi masyarakat dan integrasi kearifan lokal dalam kegiatan penyebaran informasi - Pelibatan masyarakat secara aktif dalam menyampaikan informasi secara berjenjang melalui kelompok sadar bencana, forum PRB desa, karang taruna, dan lembaga adat - Peningkatan pendekatan berbasis komunitas untuk memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap upaya pengurangan risiko bencana
4	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 16,6 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum semua warga negara memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	- Peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan menjadi langkah strategis yang harus diambil - Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan program kebencanaan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar memiliki dasar hukum dan dukungan pembiayaan yang jelas - Optimalisasi dana desa juga untuk kegiatan pengurangan risiko bencana sesuai dengan prioritas pembangunan desa

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
5	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 37,5 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	- Penguatan kelembagaan dan sistem koordinasi penanganan darurat bencana - Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas BPBD sebagai pusat komando tanggap darurat di wilayahnya - Penyusunan dan penerapan Rencana Operasi Penanggulangan Bencana (Renops PB) dan Rencana Kontinjensi agar penanganan penyelamatan dan evakuasi dapat dilakukan secara cepat, sistematis, dan terarah - Optimalisasi mekanisme koordinasi antarinstansi seperti TNI, Polri, Basarnas, PMI, dan relawan kebencanaan perlu diperkuat melalui pelatihan bersama dan simulasi terpadu
6	Persentase koordinasi penanganan pasca bencana	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 37,5 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya koordinasi penanganan pasca bencana	- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas penting - Pelatihan rutin mengenai manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi, koordinasi multipihak - Penggunaan sistem informasi kebencanaan perlu dilaksanakan secara berjenjang bagi aparatur BPBD, perangkat daerah, dan relawan kebencanaan
7	Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 77,33 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	- Penguatan sistem kesiapsiagaan logistik dengan membentuk gudang logistik bencana di daerah rawan bencana - Peningkatan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan bahan bangunan darurat dan alat berat
8	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 43,34 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	- Optimalisasi peran Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada - Deteksi dini potensi konflik sosial di masyarakat - Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat - Peningkatan sarana dan prasarana ketertiban umum
9	Persentase penegakan Perda/Perbup	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 16,22 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih adanya pelanggaran Perda/Perbup	- Penguatan kapasitas dan profesionalitas Satpol PP melalui pendidikan dan pelatihan - Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran - Peningkatan patroli rutin dan operasi penertiban - Penyusunan dan penyempurnaan SOP penegakan Perda/Perbup - Penguatan koordinasi lintas sektor antara Satpol PP, kepolisian, TNI, dan perangkat daerah terkait
10	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 70,46 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/kota	- Penambahan sarana dan prasarana pemadam kebakaran - Peningkatan kapasitas SDM damkar

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	non kebakaran Kabupaten/kota			- Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat - Penguatan sistem respon cepat dan layanan darurat
11	Persentase Satlinmas yang terlatih	- Target 2026 : 30,79 - Realisasi TW II 2026 : 18,34 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya jumlah Satlinmas yang terlatih	Optimalisasi sosialisasi dan pembinaan linmas ke desa/kelurahan
12	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 43,75 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum terpenuhinya Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	- Peremajaan atau pengadaan armada Damkar baru - Memberikan sosialisasi kepada warga agar cepat memberikan laporan bila terjadi kebakaran - Penambahan Pos Damkar sesuai WMK di RISPK - Pengadaan Sarana dan Prasarana Baru (Nozzle, selang, Y Connection dan kelengkapannya
13	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 40,91 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran - Pemenuhan sarana sumber air (groundtank) di pos Damkar - Penambahan pss pemadam kebakaran di setiap WMK
14	Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 0 - Status capaian : Tidak Tercapai	Rendahnya persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh relawan kebakaran	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran - Pemenuhan sarana sumber air (groundtank) di Pos Damkar - Menambah Pos Pemadam Kebakaran di setiap WMK
15	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	- Target 2026 : 61,05 - Realisasi TW II 2026 : 60,64 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih terdapat wilayah yang belum terjangkau manajemen kebakaran	- Penambahan sarana dan prasarana pemadam kebakaran - Peningkatan kapasitas SDM damkar - Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat - Penguatan sistem respon cepat dan layanan darurat
16	Persentase Bangunan/Gedung yang menjadi prioritas inspeksi	- Target 2026 : 6,15 - Realisasi TW II 2026 : 1,67 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya bangunan/gedung yang menjadi prioritas inspeksi	- Pengusulan kepada BKPSDM untuk mengiuti diklat inspektur - Mengusulkan tambahan pegawai baik melalui mutasi maupun penerimaan baru pegawai (PNS/P3K) kepada pejabat pembina kepegawaian
F	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			
1	Tingkat kemiskinan	- Target 2026 : 7,85 - 7,00 - Realisasi TW II 2026 : 7,78 - Status capaian : Tercapai	Masih tingginya angka kemiskinan	- Peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan - Peningkatan layanan dasar seperti RLH (Rumah Layak Huni), jamban sehat, akses terhadap listrik, dan air bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi rumah tangga miskin

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				- Peningkatan akses terhadap permodalan untuk pengembangan usaha
2	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 0 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Melaksanakan monitoring petugas pemutakhiran data desa/kelurahan
II	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**			
A	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	- Target 2026 : 78,42 - 78,80 - Realisasi TW II 2026 : 77,77 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya penyerapan penduduk usia kerja ke dalam pasar kerja	- Keselarasan kompetensi *(link and match)* - Kemitraan strategis dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI) - Penciptaan iklim investasi dan perluasan lapangan - Penguatan kewirausahaan dan UMKM - Efektivitas informasi dan bursa kerja - Perlindungan dan ketahanan tenaga kerja melalui harmonisasi hubungan industrial dan sertifikasi SDM
2	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	- Target 2026 : 50 - Realisasi TW II 2026 : 0 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya penyiapan tenaga kerja yang kompeten	- Pengembangan soft skill dan karakter kerja - Sertifikasi dan standardisasi profesi melalui aksesibilitas uji kompetensi dan subsidi biaya sertifikasi - Keterlibatan industri sebagai penguji dalam sertifikasi kompetensi - Penguatan infrastruktur pelatihan - Transformasi kurikulum berbasis kebutuhan pasar
3	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	- Target 2026 : 82 - Realisasi TW II 2026 : 29,41 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	- Pembinaan dan sosialisasi secara aktif terkait dengan akreditasi LPKS - Optimalisasi pertemuan dengan LPKS secara rutin
4	Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	- Target 2026 : 94 - Realisasi TW II 2026 : 42,44 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	- Peningkatan penyuluhan tentang proses penempatan ke luar negeri secara mudah dan aman - Peningkatan tindaklanjut CPMI yang sudah mendaftar di sistem Siap Kerja tetapi belum melanjutkan proses, Dinperinaker akan melakukan konfirmasi ke CPMI
5	Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	- Target 2026 : 75 - Realisasi TW II 2026 : 74,24 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya jumlah perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	- Peningkatan sosialisasi dan edukasi regulasi ketenagakerjaan kepada Perusahaan - Pembinaan dan pendampingan kepada Perusahaan - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke perusahan yang ada di Temanggung
B	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Indeks Pemberdayaan Gender	- Target 2026 : 97,13 - Realisasi TW II 2026 : 96,01 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya pemberdayaan gender di berbagai sektor	- Penguatan partisipasi dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				(legislatif, pemerintahan, dan posisi strategis lainnya) - Pelatihan UMKM bagi perempuan bekerja sama dengan organisasi perempuan - Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak - Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) - Penyediaan data terpilah gender dalam perencanaan pembangunan - Pemberdayaan perempuan melalui kelompok PKK, koperasi, dan organisasi masyarakat
2	Indeks Ketimpangan Gender	- Target 2026 : 0,201 - Realisasi TW II 2026 : 0,22 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih adanya ketimpangan gender di berbagai sektor	- Penguatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan - Peningkatan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender - Optimalisasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah - Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja yang layak
3	Indeks Pemberdayaan Gender	- Target 2026 : 74,25 - Realisasi TW II 2026 : 74,28 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya pemberdayaan gender di Kabupaten Temanggung	- Peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, penguatan kapasitas dan kepemimpinan perempuan - Perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja - Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan perempuan - Penguatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan daerah
4	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	- Target 2026 : 9,7 - Realisasi TW II 2026 : 8,44 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum maksimalnya ARG pada belanja langsung APBD	- Penguatan komitmen dan kapasitas perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan - Optimalisasi penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), penyusunan data terpilah gender yang berkualitas - Penguatan koordinasi dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender
5	Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas	- Target 2026 : 73,08 - Realisasi TW II 2026 : 65,38 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih adanya puskesmas yang belum menerapkan pelayanan ramah anak	- Penyusunan regulasi tentang Rumah Sakit dan Puskesmas ramah anak.

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				- Penyusunan dan penerapan SOP pelayanan ramah anak di puskesmas - Penataan lingkungan puskesmas yang aman, nyaman, dan tidak menakutkan bagi anak - Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan anak (fisik, psikologis, dan sosial) - Optimalisasi layanan KIA, imunisasi, gizi, dan tumbuh kembang anak - Sinergi dengan Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, pendidikan, dan desa
6	Kabupaten Layak Anak	- Target 2026 : Madya - Realisasi TW II 2026 : Madya - Status capaian : Tercapai	Masih stagnannya status Kabupaten Layak Anak pada kategori Madya	- Penguatan gugus tugas KLA melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi/kelurahan/desa/lembaga organisasi masyarakat - Peningkatan kualitas pemenuhan hak anak (5 klaster KLA) - Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak melalui penguatan UPTD PPA - Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak - Evaluasi capaian indikator KLA secara berkala
7	Persentase terbentuknya DRPPA	- Target 2026 : 30,1 - Realisasi TW II 2026 : 6,57 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum semua desa melakukan pembetukan DRPPA	- Pembuatan regulasi terkait pembentukan DRPPA - Penguatan komitmen pemerintah desa dalam mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola pemerintahan desa - Peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak
8	Indeks Perlindungan Anak	- Target 2026 : 63,2 - Realisasi TW II 2026 : 61,62 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya tingkat perlindungan terhadap anak	- Optimalisasi UPTD PPA untuk layanan pengaduan, pendampingan, dan rujukan kasus - Penguatan peran Gugus Tugas KLA dan lembaga perlindungan anak - KIE kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan perundungan *(bullying)* - Kampanye sekolah dan lingkungan ramah anak - Penguatan program Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Balita (BKB) dan edukasi parenting - Pencegahan perkawinan usia anak - Penguatan peran Forum Anak sebagai agen pelopor dan pelapor
C	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	- Target 2026 : 9,29 - Realisasi TW II 2026 : 11,23 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kalori masyarakat	- Diversifikasi konsumsi pangan - Peningkatan literasi gizi dan intervensi gizi pada kelompok rentan (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita)

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				- Pengawasan keamanan pangan
2	Indeks Ketahanan Pangan	- Target 2026 : 79,63 - Realisasi TW II 2026 : 68,5 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya ketahanan pangan daerah	- Penguatan produksi pangan melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian - Stabilitas harga pangan pokok - Penyederhanaan rantai pasok pangan - Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan - Diversifikasi konsumsi pangan - Penguatan kapasitas kelembagaan petani - Pemanfaatan teknologi ketahanan pangan
3	Skor Pola Pangan Harapan	- Target 2026 : 90,03 - Realisasi TW II 2026 : 89,87 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya skor pola pangan harapan	- Promosi Pola Konsumsi Pangan B2SA - Pengembangan Desa B2SA - Meningkatkan ketersediaan pangan sampai tingkat rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga - Optimalisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang digalakkan oleh Dinas Kesehatan - Peningkatan Gerakan Gemar Makan Ikan (Gemarikan) - Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk tetap stabil ketersediaan pangan
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 77,78 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum terjaminnya kualitas konsumsi masyarakat	- Penguatan pengawasan dan monitoring pasar - Standardisasi dan sertifikasi pelaku usaha - Peningkatan kapasitas pengawas pangan - Edukasi kepada konsumen dan pembinaan petani serta pedagang
D	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			
	-			
E	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	- Target 2026 : 1,129,065.77 TonCO2eq - Realisasi TW II 2026 : 713,957.59 TonCO2eq - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) daerah	- Penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca - Transisi menuju energi terbarukan - Peningkatan efisiensi energi - Pengembangan transportasi publik berkualitas - Optimalisasi pengelolaan sampah terpadu - Perlindungan dan penambahan RTH - Penguatan inventarisasi produksi dan penurunan emisi secara berkala dari berbagai sektor (energi, limbah, lahan) - Edukasi perubahan perilaku masyarakat dalam penghematan energi, mengurangi sampah, dan penanaman pohon secara swadaya - Mendorong pelaku untuk menerapkan teknologi produksi bersih dan

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				pelaporan jejak karbon melalui skema insentif/penghargaan lingkungan
2	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah	- Target 2026 : 34,14 - Realisasi TW II 2026 : 32,02 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah	- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keberfungsian TPS3R dan TPSD - Fasilitasi pengajuan permohonan bantuan sarpras pengelolaan sampah
3	Cakupan pelayanan persampahan	- Target 2026 : 77,85 - Realisasi TW II 2026 : 76,47 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum maksimalnya cakupan pelayanan persampahan	- Peningkatan koordinasi dengan desa yang belum melaksanakan pengelolaan sampah - Penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, optimalisasi TPS3R dan bank sampah - Peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengurangan, pemilahan, dan pengelolaan sampah dari sumbernya
4	Indeks Kualitas Udara	- Target 2026 : 85,01 - Realisasi TW II 2026 : 77,23 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya pengendalian pencemaran udara	- Peguatan pemantauan kualitas udara - Pengendalian emisi sumber bergerak (transportasi) dan tidak bergerak (industri) - Perlindungan dan peningkatan luas vegetasi - Ketegasan sanksi pembakaran sampah terbuka dan mitigasi Karhutla
5	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 0 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	- Penguatan penyusunan, pemutakhiran, dan pemanfaatan dokumen lingkungan hidup sebagai dasar perencanaan pembangunan yang berkelanjutan - Penguatan analisis penetapan isu prioritas sebagai bahan pembahasan analisis DPSIR
6	Luas Lahan kritis tertangani	- Target 2026 : 4 - Realisasi TW II 2026 : 3,564 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya luas lahan kritis yang tertangani	- Optimalisasi perawatan sisa bibit yang tersisa; - Sosialisasi terkait kesadaran untuk turut serta melakukan kegiatan konservasi - Penguatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan secara terpadu, konservasi tanah dan air, serta pengelolaan daerah aliran sungai yang berkelanjutan - Pengendalian alih fungsi lahan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
7	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	- Target 2026 : 7,4 - Realisasi TW II 2026 : 7,08 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum semua sumber mata air dilindungi dan dikelola secara optimal	- Peningkatan rehabilitasi vegetasi di sekitar sumber mata air - Peningkatan peran serta masyarakat, kelembagaan pengelola sumber daya air, serta penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan sumber mata air
8	Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	- Target 2026 : 23,3 - Realisasi TW II 2026 : 9,98 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih minimnya titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	- Melaksanakan pengambilan contoh uji sesuai jadwal yang telah direncanakan

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				- Peningkatan frekuensi pemantauan, pemutakhiran data secara berkala - Penambahan dan optimalisasi titik pemantauan pada sungai dan badan air lainnya
9	Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	- Target 2026 : 15,7 - Realisasi TW II 2026 : 0 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih minimnya titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	- Melaksanakan pengambilan contoh uji sesuai jadwal yang telah direncanakan - Penambahan dan optimalisasi titik pemantauan pada kawasan strategis dan berpotensi polusi - Peningkatan frekuensi pemantauan dan pemutakhiran data secara berkala
10	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 20 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup	- Peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait pembaruan peraturan yang terbit terkait pengelolaan lingkungan hidup - Peningkatan tindak lanjut hasil pengawasan secara konsisten dan berkelanjutan - Penguatan sistem pengawasan lingkungan yang terintegrasi melalui peningkatan kapasitas aparatur pengawas
11	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	- Target 2026 : 30,93 - Realisasi TW II 2026 : 30,80 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya sekolah berwawasan lingkungan hidup	- 12 Calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten Temanggung Tahun 2026 masih dalam proses pembinaan, penilaian akan dilaksanakan di bulan Mei - Optimalisasi potensi Sekolah di Kabupaten Temanggung untuk menjadi Sekolah Adiwiyata - Peningkatan sosialisasi ke sekolah tentang pentingnya penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) - Koordinasi dengan SKPD terkait (Kemenag dan Dindikpora) untuk dapat diterapkan di sekolah dan madrasah
12	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 0 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya penghargaan di bidang lingkungan hidup	- Mengusulkan keikutsertaan penghargaan dalam bidang lingkungan hidup lainnya baik tingkat provinsi maupun nasional - Melaksanakan sosialisasi mengenai penghargaaan terkait lingkungan hidup - Melakukan verifikasi terhadap calon usulan - Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap usulan yang diajukan - Penguatan koordinasi dengan pusat/provinsi terkait penyelenggaraan penghargaan
13	Persentase sampah yang terkelola	- Target 2026 : 64,07 - Realisasi TW II 2026 : 62,80 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya cakupan sampah yang terkelola	- Monitoring dan evaluasi keberfungsian TPS3R dan TPSD - Sosialisasi pengelolaan sampah dari sumber - Fasilitasi pengajuan permohonan bantuan sarpras pengelolaan sampah

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				- Peningkatan koordinasi dengan desa yang belum melaksanakan pengelolaan sampah
14	Cakupan Pelayanan persampahan	- Target 2026 : 77,85 - Realisasi TW II 2026 : 76,47 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya cakupan pelayanan persampahan	- Peningkatan koordinasi dengan desa yang belum melaksanakan pengelolaan sampah - Penguatan peran serta masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah
F	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Presentase Desa dalam penyusunan RKPDes tepat waktu	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 0 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya tim penyusun dalam membuat RAB dan gambar teknis	- Fasilitasi monitoring dan pendampingan yang intensif kepada desa dalam pelaksanaan penyusunan RKPDes - Peningkatan pendampingan teknis oleh tenaga pendamping profesional - Perlu dilakukan penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa
2	Persentase laporan LKD	- Target 2026 : 8,33 - Realisasi TW II 2026 : 4,94 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum semua desa membuat laporan Lembaga Kemasyarakatan Desa	- Pendampingan dan fasilitasi kepada pemerintah desa, anggota lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat umum dalam proses penyusunan laporan tahunan LKD - Sosialisasi kembali Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa kepada pihak terkait yaitu Kecamatan dan Desa - Mendorong penyusunan laporan tahunan LKD di Desa dilakukan monitoring baik secara langsung maupun tidak langsung - Membangun komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa, Kecamatan untuk mendukung proses penyusunan
G	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	- Target 2026 : 7,58 - Realisasi TW II 2026 : 7,71 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih tingginya pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	- Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB dan penguatan distribusi dan ketersediaan alat kontrasepsi - Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan petugas lapangan KB - Intensifikasi KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kepada masyarakat dan penguatan peran kader dan institusi masyarakat desa
2	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita	- Target 2026 : 45,75 - Realisasi TW II 2026 : 40,28 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum semua keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita	- Penguatan sosialisasi dan edukasi kepada keluarga sasaran mengenai pentingnya pengasuhan anak usia dini yang berkualitas - Peningkatan peran kader BKB dalam menjangkau keluarga di tingkat desa

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				- Optimalisasi kegiatan BKB yang terintegrasi dengan layanan posyandu dan PAUD - Perluasan akses dan partisipasi keluarga dalam kegiatan pembinaan tumbuh kembang anak
3	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	- Target 2026 : 87,4 - Realisasi TW II 2026 : 86,8 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya kualitas pengasuhan dalam keluarga yang memiliki remaja	- Meningkatkan cakupan dan kualitas kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) di semua desa/kelurahan - Revitalisasi dan perluasan kelompok BKR di desa/kelurahan - Edukasi pencegahan pernikahan dini, penyalahgunaan NAPZA, dan kenakalan remaja - Penyediaan layanan konseling keluarga dan remaja - Kolaborasi dengan sekolah dalam pembinaan karakter remaja dan penguatan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan positif remaja
H	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			
1	Persentase Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah	- Target 2026 : 81,74 - Realisasi TW II 2026 : 61,85 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya penyelenggaraan konektivitas wilayah	- Pengembangan infrastruktur pendukung mobilitas barang, jasa, dan masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan - Pemeliharaan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan produksi, kawasan permukiman, serta pusat pelayanan publik
2	Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	- Target 2026 : 72,94 - Realisasi TW II 2026 : 69,54 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih minimnya sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	- Penyediaan sumber daya anggaran untuk untuk mendukung penyelenggaraan konektivitas wilayah - Peningkatan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan konektivitas wilayah
3	Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	- Target 2026 : 90,54 - Realisasi TW II 2026 : 54,16 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum meratanya kondisi penerangan jalan kabupaten	- Mitigasi pencurian dan vandalisme - Peningkatan keandalan operasional an pemeliharaan PJU
4	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	- Target 2026 : 67,14 - Realisasi TW II 2026 : 67,03 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum meratanya pemasangan rambu-rambu lalu lintas	- Memprioritaskan kebutuhan perlengkapan jalan pada jalan kabupaten yang paling mendesak untuk ditangani - Penguatan perencanaan kebutuhan rambu lalu lintas - Pemeliharaan dan penggantian rambu yang rusak atau tidak memenuhi standar keselamatan
5	Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan	- Target 2026 : 99,66 - Realisasi TW II 2026 : 74,61 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum semua kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan	- Perlu adanya kegiatan sosialisasi dan informasi terkait dengan pentingnya pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan bagi keselamatan LLAJ - Peningkatan pemeriksaan kelaikan kendaraan wajib uji di jalan guna memastikan operasional

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
6	Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten	- Target 2026 : 36,63 - Realisasi TW II 2026 : 35,98 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum semua jalan di Temanggung memiliki penerangan jalan	- Memprioritaskan kebutuhan perlengkapan jalan pada jalan kabupaten yang paling mendesak untuk ditangani - Penguatan perencanaan berbasis kebutuhan wilayah untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan
7	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	- Target 2026 : 83,39 - Realisasi TW II 2026 : 11,36 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya angkutan umum yang memnuhi standar minimal pelayanan	Sosialiasasi terhadap pemilik usaha angkutan umum dan memberikan himbauan untuk meremajakan kembali angkutan umum yang usianya sudah tua
8	Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 66,67 - Status capaian : Tidak Tercapai	Tidak semua terminal tipe C di Temanggung dalam kondisi baik	- Optimalisasi anggaran pemeliharaan yang memadai - Peningkatan kinerja petugas yang bertanggung jawab memastikan terminal senantiasa dalam kondisi prima dan siap untuk aktifitas pelayanan
I	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika			
1	Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	- Target 2026 : 4,6 - Realisasi TW II 2026 : 4,39 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum maksimalnya integrasi dan tata kelola SPBE	- Penguatan kebijakan satu data daerah untuk memastikan data akurat, mutakhir, dan saling terhubung - Evaluasi berkala Indeks Layanan SPBE sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan mutu layanan berbasis elektronik - Penguatan peraturan dan kebijakan internal SPBE, dengan pembaruan peta rencana.
2	Nilai keterbukaan informasi publik	- Target 2026 : 96,5 - Realisasi TW II 2026 : 91,34 - Status capaian : Tidak Tercapai	Kurangnya kesadaran perangkat daerah tentang keterbukaan informasi publik dan memaksimalkan pelayanan publik secara elektronik	Memberikan pemahaman, sosialisasi, dan pendampingan yang masif bagi PPID Pelaksana OPD, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan
3	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	- Target 2026 : 85,5 - Realisasi TW II 2026 : 85,29 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum semua lembaga binaan dan mitra Dinkominfo yang tidak aktif dalam menyebarkan informasi	Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) baru dengan berlatarbelakang hobi/interest dan kewilayahan (KIM Desa).
4	Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 70,20 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya penyelenggaraan diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	Peningkatan skill dan mengusulkan tambahan personel SDM khususnya dalam rangka diseminasi informasi
5	Persentase layanan publik secara elektronik	- Target 2026 : 75 - Realisasi TW II 2026 : 55,73 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya layanan publik secara elektronik	Peningkatan koordinasi dengan bidang yang menangani data statistik dan perangkat daerah sebagai upaya mendorong peningkatan layanan secara digital
J	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
1	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	- Target 2026 : 1,88 - Realisasi TW II 2026 : 1,19 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya peran dan kontribusi sektor koperasi dalam menggerakkan perekonomian daerah	- Rebranding, modernisasi, dan adopsi teknologi informasi pada koperasi - Pengembangan unit usaha produktif pada koperasi

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				- Peningkatan kapasitas SDM dan manajemen pengelola koperasi - Pengembangan kemitraan antara koperasi dengan BUMD, swasta atau industri besar - Peningkatan kualitas pengawasan kesehatan koperasi
2	Rasio Kewirausahaan Daerah	- Target 2026 : 3,15 - Realisasi TW II 2026 : 2,43 - Status capaian : Tidak Tercapai	Rendahnya akselerasi penumbuhan wirausaha daerah	- Pembangunan pusat inkubasi bisnis daerah - Kemudahan akses permodalan melalui fasilitasi akses kredit usaha rakyat - Percepatan legalitas usaha (NIB) dan fasilitasi sertifikasi produk - Perluasan akses pasar dan digitalisasi UMKM serta wirausaha baru - Optimalisasi program CSR untuk mendukung program pelatihan dan keterampilan wirausaha potensial
3	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan	- Target 2026 : 4,54 - Realisasi TW II 2026 : 3,23 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum semua koperasi dilakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan	- Sosialisasi pentingnya self assesment bagi koperasi - Penguatan tata kelola kelembagaan koperasi melalui peningkatan intensitas pengawasan dan pemeriksaan secara berkala - Penguatan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi
4	Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	- Target 2026 : 0,25 - Realisasi TW II 2026 : 0,26 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan terkait koperasi	- Penguatan kapasitas sumber daya manusia koperasi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pengurus, pengawas, pengelola, dan anggota koperasi - Pelatihan bagi pengurus KDKMP
K	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
1	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	- Target 2026 : 2.152 M - Realisasi TW II 2026 : 544 M - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih tingginya kerentanan struktur investasi daerah terhadap dinamika ekonomi eksternal	- Penyederhanaan birokrasi dan perizinan - Promosi investasi yang terfokus - Kemitraan penanaman modal dengan pengusaha lokal
2	Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN	- Target 2026 : 5020 proyek - Realisasi TW II 2026 : 4084 proyek - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya jumlah proyek investasi PMA dan PMDN	- Inventarisasi perusahaan yang akan melakukan perluasan usaha - Peningkatan pendampingan bagi perusahaan dalam proses perizinan
3	Persentase realisasi total terhadap target investasi	- Target 2026 : 92 - Realisasi TW II 2026 : 25,28 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya realisasi total terhadap target investasi	- Inventarisasi perusahaan yang akan melakukan perluasan usaha - Peningkatan pendampingan bagi perusahaan dalam proses perizinan - Peningkatan kepastian hukum dan kemudahan berusaha
4	Persentase pengendalian dan pengawasan penanaman modal	- Target 2026 : 92 - Realisasi TW II 2026 : 20 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan penanaman modal	- Melakukan sosialisasi dan pendampingan pelaporan LKPM kepada pelaku usaha - Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				kegiatan investasi secara berkala
L	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
1	Persentase prestasi olahraga	- Target 2026 : 94,28 - Realisasi TW II 2026 : 82,35 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih minimnya prestasi yang diraih pada event olahraga yang diikuti	- Koordinasi dengan pengkab dan KONI dalam penyelnggaraan event kejuaraan - Penelusuran, identifikasi dan pembinaan bakat atlet sejak usia dini - Pembangunan dan rehabilitasi lapangan, stadion, dan fasilitas olahraga
2	Persentase Wirausaha Muda	- Target 2026 : 14,00 - Realisasi TW II 2026 : 10,35 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya jumlah wirausaha muda dibanding jumlah pemuda	- Koordinasi dengan Diperinaker dan Dinkopdag - Pelatihan keterampilan usaha dan manajemen bisnis - Pelatihan e-commerce dan pemanfaatan platform digital - Pendataan, monitoring, dan evaluasi jumlah dan perkembangan wirausaha muda
3	Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan	- Target 2026 : 4,00 - Realisasi TW II 2026 : 1,85 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih minimnya jumlah pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan	- Koordinasi dengan Diperinaker dan Dinkopdag - Penguatan kurikulum kewirausahaan di SMA/SMK - Pemberdayaan karang taruna dan komunitas pemuda - Pelatihan digital marketing, e-commerce, dan branding - Pendataan, monitoring, dan evaluasi pemuda yang mengikuti pendidikan kewirausahaan
4	Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat	- Target 2026 : 78,00 - Realisasi TW II 2026 : 75,00 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat	- Peningkatan koordinasi dengan Pengurus Cabang Olahraga Provinsi dan KONI - Penguatan kompetensi sumber daya manusia keolahragaan melalui fasilitasi pendidikan dan pelatihan sertifikasi pelatih - Pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelatih dalam mendukung pembinaan atlet berprestasi
5	Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif	- Target 2026 : 98,22 - Realisasi TW II 2026 : 96,49 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih terdapat Gugus Depan Pramuka yang tidak aktif	- Penguatan koordinasi dengan Pengurus Pramuka Kabupaten - Penguatan peran Kwartir Cabang (Kwarcab) dalam pembinaan - Penguatan kegiatan berbasis keterampilan, kepemimpinan, dan kewirausahaan - Monitoring dan evaluasi kinerja gugus pramuka secara berkala
M	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik			
1	Ketersediaan data statistik sektoral	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 30,28 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral	Melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada produsen data dalam mencukupi data prioritas yang telah ditetapkan melalui tahapan-tahapan SDI Kabupaten Temanggung yang telah rutin dilaksanakan, antara lain dengan forum data dan pembinaan SDM statistik perangkat daerah
N	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian			

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 33,33 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya tingkat keamanan informasi pemerintah	- Penguatan pelaksanaan vulnerability assessment (VA) secara berkala - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dan perlindungan data - Peningkatan kesadaran aparatur terhadap risiko keamanan data
0	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			
1	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	- Target 2026 : 20,7 - Realisasi TW II 2026 : 16,67 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum semua Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dilakukan pelestarian	- Penguatan pendataan, penetapan, dan pelindungan objek pemajuan kebudayaan melalui inventarisasi yang berkelanjutan - Peningkatan kajian dan penetapan status cagar budaya - Dokumentasi dan revitalisasi warisan budaya tak benda - Penguatan edukasi dan promosi nilai-nilai budaya daerah
2	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir	- Target 2026 : 49,35 - Realisasi TW II 2026 : 12,6 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum bertumbuhnya ekosistem kesenian sebagai bagian dari ekonomi kreatif	- Penyediaan ruang publik dan aksesibilitas sarana pendukung ekosistem kesenian - Perlindungan kekayaan intelektual (HAKI) melalui fasilitasi pendaftaran HAKIL dan edukasi nilai ekonomi intelektual - Penyelenggaraan event dan festival secara berkala - Dukungan skema pembiayaan kreatif bagi seniman yang membutuhkan akses terhadap bantuan hibah seni, dana CSR
3	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda	- Target 2026 : 1 - Realisasi TW II 2026 : 0 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya jumlah warisan budaya tak benda	- Penguatan pendataan, penetapan, dan pelindungan objek pemajuan kebudayaan melalui inventarisasi yang berkelanjutan - Peningkatan kajian dan penetapan status cagar budaya - Dokumentasi dan revitalisasi warisan budaya tak benda - Penguatan edukasi dan promosi nilai-nilai budaya daerah
4	Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata	- Target 2026 : 10 - Realisasi TW II 2026 : 3 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum semua kelompok kesenian telah terdata	- Mendorong kelompok seni untuk membuat register kebudayaan - Pengembangan sistem basis data kebudayaan yang terintegrasi untuk mendukung tertib administrasi dan pembinaan kelompok kesenian
5	Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata	- Target 2026 : 10 - Realisasi TW II 2026 : 0 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum semua pelaku budaya telah terdata	- Pemutakhiran data pelaku budaya secara berkelanjutan melalui koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, komunitas seni, serta lembaga kebudayaan - Fasilitasi pendaftaran dan verifikasi pelaku budaya - Pengembangan sistem data kebudayaan yang terintegrasi

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				guna mendukung pembinaan, pelestarian, dan pengembangan kebudayaan daerah secara lebih terarah
6	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	- Target 2026 : 29,706 - Realisasi TW II 2026 : 11,724 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya pengunjung tempat bersejarah	- Menjalin kerjasama dengan pengelola tempat bersejarah untuk bisa menginformasikan tentang data kunjungan - Pengembangan paket wisata Sejarah - Pelibatan masyarakat dan pelaku wisata dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi bersejarah secara berkelanjutan
P	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan			
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	- Target 2026 : 60,73 - Realisasi TW II 2026 : 24,03 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya pembangunan literasi masyarakat	- Sosialisasi berkelanjutan mengenai pentingnya pengisian data perpustakaan yang benar - Mendorong perpustakaan untuk mengadakan lebih banyak kegiatan2 literasi yang menarik bagi pemustaka - Mendorong perpustakaan untuk melakukan inovasi di tengah efisiensi anggaran - Mendorong perpustakaan untuk lebih banyak melakukan kerja sama antar perpustakaan"
2	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	- Target 2026 : 0,15 - Realisasi TW II 2026 : 0,1031 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya tingkat pemanfaatan perpustakaan	- Sosialisasi pendampingan pengisian data pokok perpustakaan secara rutin setiap tahunnya - Penguatan layanan perpustakaan keliling - Peningkatan kualitas koleksi bahan bacaan dan pengembangan layanan digital
3	Tingkat kegemaran membaca	- Target 2026 : 69,54 - Realisasi TW II 2026 : 57,62 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih kurangnya upaya pembudayaan Gemar Membaca di kalangan masyarakat	- Menyelenggarakan kegiatan peningkatan literasi yang menarik untuk masyarakat - Penyediaan buku yang variatif, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat - Optimalisasi inovasi layanan (perpustakaan keliling, layanan digital, dll.) - Integrasi kegiatan literasi dalam kurikulum sekolah
4	Persentase perpustakaan yang aktif	- Target 2026 : 36 - Realisasi TW II 2026 : 34,40 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya jumlah perpustakaan yang aktif	- Advokasi kepada penanggung jawab masing-masing perpustakaan yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung agar dapat merekrut tenaga khusus untuk perpustakaan - Pembinaan perpustakaan untuk perpustakaan-perpustakaan di wilayah Kabupaten Temanggung - Membuat surat edaran Bupati Temanggung mengenai kewajiban melaporkan data pokok perpustakaan bagi seluruh perpustakaan di wilayah Kabupaten Temanggung - Mengadakan kegiatan sosialisasi pendataan perpustakaan

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				- Menambah kegiatan pembinaan perpustakaan bagi pengelola perpustakaan atau mengadakan bimbingan teknis bagi petugas perpustakaan - Mendorong perpustakaan untuk mengadakan kerjasama tukar pinjam koleksi antar perpustakaan
Q	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			
1	Indeks Manajemen Kearsipan	- Target 2026 : 73,56 - Realisasi TW II 2026 : 70,71 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya manajemen dan pengawasan kearsipan	- Penguatan peran unit kearsipan di setiap perangkat daerah - Optimalisasi pembinaan kearsipan kepada perangkat daerah/instansi/desa/kelurahan - Optimalisasi implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada perangkat daerah/instasi/desa/keluraha n/ dan non pemerintah - Penataan arsip sesuai klasifikasi, retensi, dan jadwal pemusnahan - Monitoring, evaluasi, dan audit pengelolaan arsip secara berkala
2	Persentase arsip yang dialihmediakan	- Target 2026 : 65 - Realisasi TW II 2026 : 60,57 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya arsip yang dialihmediakan	- Penyusunan regulasi terkait pengelolaan arsip vital - Penguatan standar dan prosedur pengelolaan arsip digital guna menjamin keamanan, kemudahan akses, dan keberlanjutan informasi arsip daerah - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola arsip
3	Persentase pembinaan kearsipan	- Target 2026 : 75,55 - Realisasi TW II 2026 : 73,33 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya pembinaan kearsipan	- Penguatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kearsipan pada seluruh perangkat daerah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia kearsipan - Pendampingan teknis secara berkelanjutan - Peningkatan evaluasi penerapan sistem kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
III	**Urusan Pemerintahan Pilihan**			
A	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			
1	Angka Konsumsi Ikan	- Target 2026 : 22,3 - Realisasi TW II 2026 : 22,27 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya minat dan budaya konsumsi ikan di tingkat keluarga	- Stabilitas harga ikan di tingkat konsumen - Diversifikasi produk olahan ikan - Mendorong budidaya ikan skala rumah tangga - Edukasi dan masifikasi kampanye memasyarakatkan makan ikan
2	Jumlah produksi perikanan tangkap	- Target 2026 : 140,2 - Realisasi TW II 2026 : 37,1 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya produksi perikanan tangkap	- Pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dapat membantu meningkatkan produksi perikanan tangkap. - Peningkatan keterampilan nelayan dalam menggunakan

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				teknologi dan metode penangkapan ikan yang lebih efektif dapat membantu meningkatkan produksi perikanan tangkap. - Kerja sama dan koordinasi antara pemerintah, nelayan, dan stakeholder lainnya dapat membantu meningkatkan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan.
3	Jumlah produksi perikanan budidaya	- Target 2026 : 10,672.01 - Realisasi TW II 2026 : 5,506.8 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya produksi perikanan budidaya	- Penguatan kelembagaan & SDM, Pelatihan teknis budidaya, manajemen usaha, dan pengendalian penyakit, Pembentukan kelompok pembudidaya untuk memperkuat posisi tawar - Peningkatan akses teknologi, Penerapan sistem bioflok atau RAS untuk efisiensi pakan dan kualitas air, Penggunaan aplikasi digital untuk monitoring kualitas air dan pemasaran hasil - Dukungan finansial & kebijakan, Subsidi pakan dan benih unggul, Akses kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah - Pengendalian lingkungan & kesehatan ikan, Penerapan biosekuriti ketat untuk mencegah penyakit, Pengelolaan limbah budidaya agar tidak mencemari lingkungan
4	Jumlah produksi pengolahan ikan	- Target 2026 : 395,752 - Realisasi TW II 2026 : 91,1 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya produksi pengolahan ikan	- Pelatihan pengolahan ikan higienis, pengemasan modern, dan manajemen usaha. - Pembentukan kelompok pengolah ikan untuk memperkuat posisi tawar - Penyediaan cold storage, mesin pengolahan, dan fasilitas rantai dingin di sentra produksi - Pemanfaatan teknologi pengolahan sederhana (pengasapan, pengeringan, fermentasi) untuk UMKM - Akses kredit usaha rakyat (KUR) untuk pengolah ikan. - Subsidi alat pengolahan dan sertifikasi mutu dari pemerintah - Pemasaran digital melalui *e-commerce* dan media sosial - Kemitraan dengan industri besar dan restoran - Sertifikasi mutu (HACCP, SNI, halal) untuk meningkatkan daya saing di pasar ekspor
B	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			
1	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	- Target 2026 : 90 - Realisasi TW II 2026 : 45 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya jumlah tamu wisatawan mancanegara	- Melakukan perbaikan dan penambahan 3A (Atraksi. Aksesbilitas dan Amenitas) - Pemanfaatan media digital, kerja sama dengan pelaku industri pariwisata, serta peningkatan branding destinasi unggulan Kabupaten Temanggung

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik)	- Target 2026 : 610,271 - Realisasi TW II 2026 : 133,886 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik	- Melakukan perbaikan dan penambahan 3A (Atraksi. Aksesbilitas dan Amenitas) - Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata secara terpadu melalui media digital dan jejaring kerja sama - Penguatan pengembangan destinasi wisata unggulan berbasis potensi alam, budaya, dan wisata minat khusus yang dimiliki Temanggung
3	Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi	- Target 2026 : 17 - Realisasi TW II 2026 : 6 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi	- Melakukan kerjasama dengan pengelola DTW, Desa Wisata, dan hotel yang ada di Temanggung - Peningkatan kapasitas pengelola destinasi wisata - Peningkatan pendampingan pengelolaan DTW - Optimalisasi promosi dan penguatan daya tarik wisata di berbagai wilayah
4	Persentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 30 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya cakupan Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	- Penguatan strategi promosi pariwisata secara terpadu melalui pemetaan seluruh destinasi wisata daerah - Kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata, komunitas, dan media - Melakukan perbaikan dan penambahan 3A (Atraksi. Aksesbilitas dan Amenitas)
C	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
1	Produktivitas Padi	- Target 2026 : 6,16 - Realisasi TW II 2026 : 6,11 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya produktivitas padi	- Optimalisasi kelompok tani dan peran penyuluh pertanian - Penguatan sistem perlindungan tanaman dan adaptasi perubahan iklim - Optimalisasi jaringan irigasi dan sarana irigasi alternatif - Penerapan teknologi budidaya dan benih unggul
2	Produktivitas Jagung	- Target 2026 : 5,55 - Realisasi TW II 2026 : 5,00 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya produktivitas jagung	
3	Jumlah produksi daging ternak besar	- Target 2026 : 807,654 - Realisasi TW II 2026 : 210,263 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya produksi daging ternak besar	- Penggunaan bibit sapi potong unggul untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas daging - Penerapan manajemen pakan yang baik guna memastikan kebutuhan nutrisi ternak terpenuhi - Penguatan manajemen kesehatan hewan, termasuk pengendalian penyakit dan perawatan rutin, juga menjadi langkah penting untuk menekan angka kematian - Pengembangan infrastruktur peternakan seperti kandang yang memadai dan fasilitas pengolahan pakan turut meningkatkan efisiensi produksi - Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada peternak mengenai teknologi peternakan modern mendorong peningkatan kualitas usaha - Pembukaan dan pengembangan akses pasar

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				membantu memperluas peluang penjualan, sementara kemitraan antara peternak, pemerintah, dan industri dapat memperkuat rantai produksi - Pemanfaatan teknologi, baik informasi maupun bioteknologi, turut meningkatkan efisiensi - Pengembangan usaha peternakan rakyat juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan produksi daging ternak besar serta pendapatan masyarakat
4	Jumlah produksi daging ternak kecil	- Target 2026 : 268,110 - Realisasi TW II 2026 : 9,048 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya produksi daging ternak kecil	- Pengembangan bibit unggul untuk meningkatkan produktivitas, disertai manajemen pakan bergizi dan manajemen kesehatan hewan guna menekan penyakit serta kematian ternak - Penguatan infrastruktur peternakan mulai dari kandang hingga fasilitas pakan dapat meningkatkan efisiensi usaha - Pendidikan dan pelatihan bagi peternak, serta penggunaan teknologi modern, membantu meningkatkan keterampilan dan produktivitas - Pengembangan pasar, kemitraan antar pemangku kepentingan - Penguatan usaha peternakan rakyat menjadi langkah penting untuk memperluas akses usaha dan meningkatkan pendapatan peternak
5	Jumlah produksi ternak unggas	- Target 2026 : 6,243,337 - Realisasi TW II 2026 : 2,345,957.6 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya produksi ternak unggas	- Penyediaan sarana produksi seperti bibit unggas, pakan - Dukungan teknologi pemeliharaan memberikan dampak positif terhadap peningkatan populasi dan produksi
6	Jumlah produksi telur	- Target 2026 : 6,867,846 - Realisasi TW II 2026 : 2,358,939.75 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya produksi telur	- Pemberian nutrisi yang cukup dan seimbang, terutama protein, energi, dan kalsium, untuk meningkatkan produksi telur - Mengelola lingkungan kandang yang nyaman, seperti suhu, kelembaban, dan cahaya, untuk meningkatkan produksi telur - Melakukan pengawasan kesehatan ayam secara teratur untuk mendeteksi potensi masalah kesehatan dan melakukan intervensi jika diperlukan - Melakukan vaksinasi untuk mencegah penyakit yang dapat menurunkan produksi telur - Mengelola kandang yang bersih, nyaman, dan aman untuk meningkatkan produksi telur

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				- Mengelola stres pada ayam dengan menyediakan lingkungan yang nyaman dan tenang - Memilih bibit ayam yang berkualitas tinggi dan memiliki potensi produksi telur yang tinggi - Melakukan pengawasan produksi telur secara teratur untuk memantau kinerja ayam dan melakukan intervensi jika diperlukan
7	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	- Target 2026 : 37,13 - Realisasi TW II 2026 : 28,86 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum terpenuhinya kebutuhan sarana alat mesin pertanian pangan utama	- Skema pembiayaan kreatif dan mandiri dalam penyediaan sarana pertanian - Peningkatan kapasitas operator untuk meminimalkan risiko kerusakan
D	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			
1	Rasio PDRB sektor perdagangan	- Target 2026 : 21 - Realisasi TW II 2026 : 20,78 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya rasio PDRB sektor perdagangan	- Pengembangan pusat-pusat perdagangan rakyat - Fasilitasi promosi dan pemasaran produk lokal unggulan - Penguatan digitalisasi perdagangan - Peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam manajemen usaha, kualitas produk, dan perluasan jaringan distribusi
2	Nilai Ekspor	- Target 2026 : US $ 126,276,147.00 - Realisasi TW II 2026 : US $ 14,875,493.00 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya pertumbuhan nilai ekspor daerah	- Pemenukan standardisasi dan sertifikasi internasional - Kemudahan prosedur dan fasilitasi kegiatan ekspor - Partisipasi dalam pameran dagang strategis dan pemanfaatan platform digital - Penguatan kapasitas SDM eksportir melalui program pendampingan eksportir pemula dan kelembagaan eksportir
3	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	- Target 2026 : 67 - Realisasi TW II 2026 : 66,67 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya kondisi fisik sarana perdagangan daerah	- Partisipasi dan kedisiplinan pengguna pasar dalam hal penggunaan sarana prasarana pasar - Pengelolaan dan pengawasan rutin agar intervensi perbaikan sarana perdagangan dapat dilakukan secara tepat sasaran
4	Persentase pedagang yang menggunakan transaksi digital	- Target 2026 : 2 - Realisasi TW II 2026 : 1,92 - Status capaian : Tidak Tercapai	Balum semua pedagang menggunakan transaksi digital	- Fasilitasi penggunaan sistem pembayaran non-tunai - Peningkatan literasi keuangan digital bagi pelaku usaha - Penguatan kerja sama dengan penyedia layanan keuangan digital - Pendampingan kepada pedagang pasar dan UMKM dalam penggunaan aplikasi transaksi digital
5	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan barang penting	- Target 2026 : 90 - Realisasi TW II 2026 : 24,66 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya ketersediaan informasi harga bahan pokok dan barang penting	- Meningkatkan koordinasi dengan petugas input UPT dan kontributor kabupaten untuk kelancaran ketepatan waktu pelaporan hasil pemantauan - Pemantauan harga secara berkala melalui optimalisasi jejaring pelaporan dari pasar

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				tradisional, distributor, dan pelaku usaha - Pengembangan sistem informasi harga berbasis digital yang mudah diakses masyarakat
6	Cakupan alat ukur. takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	- Target 2026 : 95 - Realisasi TW II 2026 : 6,25 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan	- Pendataan UTTP wajib tera secara berkala - Penyelenggaraan sidang pasar dan optimalisasi layanan tera keliling - Sosialisasi dan kesadaran pelaku usaha dengan edukasi budaya tertib ukur
E	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian			
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	- Target 2026 : 27,44 - Realisasi TW II 2026 : 25,34 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya upaya hilirisasi komoditas unggulan daerah	- Penguatan teknologi pengolahan dan inovasi produk - Fasilitasi pemasaran dan akses pasar produk - Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan - Iklim investasi yang baik dan kemudahaan perizinan
2	Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	- Target 2026 : 0,4 - Realisasi TW II 2026 : 0,12 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	- Pengembangan wirausaha baru berbasis potensi lokal daerah - Optimalisasi pembinaan dan pendampingan pelaku industri kecil menengan
3	Persentase industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	- Target 2026 : 48,27 - Realisasi TW II 2026 : 48,08 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	- Optimalisasi pembinaan dan pendampingan pelaku usaha industri - Penguatan hilirisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis potensi lokal seperti kopi, tembakau srintil, dan komoditas unggulan lainnya
4	Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri	- Target 2026 : 0,6 - Realisasi TW II 2026 : 0,23 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri	- Pengawasan dan pendampingan pemenuhan komitmen perizinan sektor industri - Peningkatan intensitas monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha industri dalam memenuhi ketentuan perizinan berusaha - Optimalisasi pemanfaatan sistem perizinan berbasis elektronik
5	Persentase industri yang terdaftar dalam SIINas	- Target 2026 : 2 - Realisasi TW II 2026 : 1,19 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya industri yang terdaftar dalam SIINas	- Sosialisasi dan pendampingan pendaftaran akun SIINas - Penguatan koordinasi dengan pelaku usaha dan asosiasi industri - Pemanfaatan sistem digital untuk mempercepat proses registrasi dan pemutakhiran data industri
IV	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**			
A	Fungsi Sekretariat Daerah			
1	Return on Asset (RoA) BUMD	- Target 2026 : 4,29 - Realisasi TW II 2026 : 3,83 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya tingkat pengembalian aset (ROA) pada BUMD	Melakukan pengukuran produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki
2	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	- Target 2026 : 2,25 - Realisasi TW II 2026 : 2,067 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya rasio total kredit bank milik kabupaten/kota terhadap PDRB	- Perluasan akses pembiayaan bagi UMKM dan pelaku usaha

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				- Mendorong penyaluran kredit produktif (UMKM, pertanian, perdagangan, industri kecil) - Digitalisasi layanan perbankan (mobile banking, kredit online) - Sinergi antara pemerintah daerah, bank daerah, dan OPD terkait (koperasi, UMKM, pertanian)
3	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	- Target 2026 : 2,77 - Realisasi TW II 2026 : 2,35 - Status capaian : Tidak Tercapai	Rendahnya total dana pihak ketiga pada bank milik daerah dibandingkan dengan PDRB	Melakukan pengukuran kekuatan sektor Bank milik kabupaten, kepercayaan masyarakat terhadap bank, dan efektivitas penghimpunan dana DPK yang bisa disalurkan kembali untuk kredit atau investasi.
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	- Target 2026 : 17,87 - Realisasi TW II 2026 : 16,79 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya Pembentukan Modal Tetap Bruto	- Penguatan investasi pada sektor-sektor produktif melalui peningkatan kemudahan berusaha - Penguatan daya tarik investasi pada sektor unggulan daerah - Pengembangan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat
5	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	- Target 2026 : 3,93 - Realisasi TW II 2026 : 3,82 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya akses keuangan daerah	- Penyelarasan tingkat inklusi keuangan di berbagai kabupaten dan kota - Optimalisasi peran bank daerah (BUMD) dan lembaga keuangan lainnya - Pengembangan layanan keuangan digital (*mobile banking*, QRIS, *e-wallet*) - Penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
6	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	- Target 2026 : 83,33 - Realisasi TW II 2026 : 66,67 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih terdapat BUMD yang belum mendapatkan opini WTP; atas pemeriksaan KAP	Melakukan pembinaan dan koordinasi secara intensif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama dengan Tim Pembina dan Dewan Pengawas
7	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	- Target 2026 : 67,5 - Realisasi TW II 2026 : 67,37 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	- - Menerapkan kebijakan *reward* dan/atau *punishment* yang telah disusun - Penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan capaian kinerja - Peningkatan kapasitas aparatur dalam penerapan manajemen kinerja yang efektif dan akuntabel
8	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	- Target 2026 : 84,35 - Realisasi TW II 2026 : 84,5 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa meskipun telah mencapai target	Mengikuti Kegiatan Pembentukan Mentor Kematangan UKPBJ untuk Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Temanggung dari LKPP RI Tahun 2025
9	Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	- Target 2026 : 95 - Realisasi TW II 2026 : 1,16 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	- Membuat Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				- Penguatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan seluruh proses pengadaan non tender terdokumentasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu
10	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	- Target 2026 : 3,45 - Realisasi TW II 2026 : 3,298 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum maksimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tercermin dari nilai EPPD	- Melaksanakan koordinasi dengan OPD pengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK) - Melaksanakan koordinasi dengan Kemendagri serta provinsi terkait dengan penyelarasan rumus Indikator Kinerja Kunci (IKK) - Melakukan evaluasi secara berkala dengan OPD yang capaian rendah didampingi Inspektorat kabupaten sebagai APIP
11	Indeks Zakat Nasional	- Target 2026 : 0,81 - Realisasi TW II 2026 : 0,53 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya pengelolaan zakat yang tercermin dari Indeks Zakat Nasional	- Peningkatan penghimpunan zakat melalui sosialisasi dan edukasi kewajiban zakat kepada masyarakat dan optimalisasi pengumpulan zakat melalui BAZNAS dan LAZ - Peningkatan kapasitas BAZNAS daerah - Sinergi dengan pemerintah daerah, OPD, dan lembaga sosial pengelola zakat
12	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	- Target 2026 : 60 - Realisasi TW II 2026 : 40 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya kegiatan keagamaan yang difasilitasi	- Pengembangan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan yang mendukung kerukunan dan keharmonisan sosial - Penguatan koordinasi dengan organisasi dan tokoh agama
13	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	- Target 2026 : 88 - Realisasi TW II 2026 : 87,84 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	- Peningkatan kualitas sarana prasarana keagamaan secara bertahap sesuai kebutuhan dan prioritas - Peningkatan koordinasi dengan lembaga keagamaan dan masyarakat - Penguatan dukungan terhadap penyediaan fasilitas yang layak, aman, dan nyaman guna mendukung kegiatan peribadatan dan pendidikan keagamaan
14	Persentase ketersediaan administrasi keuangan. umum dan jasa penunjang perangkat daerah	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 32,14 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya ketersediaan administrasi keuangan. umum dan jasa penunjang perangkat daerah	- Peningkatan koordinasi dan kemampuan SDM - Peningkatan koordinasi antar bagian yang dilaksanakan secara rutin - Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait secara intensif
15	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	- Target 2026 : 76 - Realisasi TW II 2026 : 75,35 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya nilai AKIP Sekretariat Daerah	- Menyusun pohon kinerja, penjenjangan kinerja serta cascading sesuai ketentuan dalam Penyusunan Renstra 2025-2029 - Melaksanakan evaluasi atas isu strategis, tujuan, sasaran, outcome dan output melalui penjenjangan kinerja dan dituangkan dalam dokumen perencanaan
16	Persentase pelaporan	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 96,12	Rendahnya ketertiban pelaporan kegiatan oleh	- Monitoring dan evaluasi pelaporan kegiatan oleh perangkat daerah

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	- Status capaian : Tidak Tercapai	PD/Unit Kerja secara tepat waktu	- Penguatan koordinasi dengan perangkat daerah di Kabupaten Temanggung - Peningkatan kompetensi operator dan admin pelaporan
17	Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 3,22 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih kurangnya dokumen kontrak yang diverifikasi	- Penguatan koordinasi internal dan eksternal - Penetapan target yang realistis - Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan - Monitoring paket pekerjaan fisik - Perencanaan diusahakan N-1 dan meningkatkan pembinaan jasa konstruksi dan juga pembinaan terhadap konsultan pengawas
B	Fungsi Sekretariat DPRD			
1	Tingkat kepuasan DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 25,31 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya tingkat kepuasan DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	- Meningkatkan komunikasi efektif antara Sekretariat DPRD dan anggota DPRD untuk memahami kebutuhan dan permintaan mereka - Melakukan evaluasi dan monitoring secara teratur terhadap kinerja layanan Sekretariat DPRD untuk mengetahui area-area yang perlu diperbaiki
2	Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	- Target 2026 : 83 - Realisasi TW II 2026 : 25,25 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Penguatan koordinasi dan kerjasama yang baik antara Sekretariat DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan
3	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 70,21 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya kegiatan DPRD yang dipublikasikan	Menjaga intensitas dan kualitas kegiatan pendokumentasian kegiatan DPRD
4	Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 33,33 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD	Penguatan koordinasi dan kerjasama yang baik antara Sekretariat DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan
5	Persentase Laporan Pembahasan kebijakan Anggaran	- Target 2026 : 92 - Realisasi TW II 2026 : 0 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya Laporan Pembahasan kebijakan Anggaran	Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kinerja pembahasan kebijakan anggaran
V	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**			
A	Perencanaan			
1	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	- Target 2026 : 21,22 - Realisasi TW II 2026 : 19,44 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum maksimalnya Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	- Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas ekonomi, serta penguatan sektor-sektor usaha produktif - Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial - Penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis rumah tangga untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara merata
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	- Target 2026 : 3,01 - Realisasi TW II 2026 : 2,911	Belum optimalnya capaian Indeks Manajemen Risiko (MRI)	- Reviu dan perbaikan perencanaan kinerja dengan memperhatikan cascading,

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		- Status capaian : Tidak Tercapai		proses bisnis, serta logical framework agar sasaran, indikator, dan target kinerja lebih terukur dan SMART. - Penguatan implementasi pengelolaan risiko terutama pada sektor strategis daerah, serta memastikan proses Monitoring dan Evaluasi MR dapat menguji efektivitas pengurangan dampak dan penyebab risiko secara lebih sistematis dan berkelanjutan - Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2025-2029
B	Keuangan			
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	- Target 2026 : 0,48 - Realisasi TW II 2026 : 0,31 - Status capaian : Tidak Tercapai	Perlunya peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB	- Optimalisasi pemungutan pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, PBB-P2, dan BPHTB - Optimalisasi implementasi integrasi sistem pajak dengan perbankan dan aplikasi pembayaran - Peningkatan aktivitas ekonomi (pariwisata, UMKM, pertanian, industri) dan dukungan terhadap pariwisata daerah - Hilirisasi produk unggulan Temanggung (kopi, tembakau, dll.)
2	Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)	- Target 2026 : 73,9 - Realisasi TW II 2026 : 66,8 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dari IPKD	Optimalisasi Kemampuan Keuangan Daerah untuk mencukupi capaian-capaian dalam dimensi
3	Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandator y spending dalam APBD	- Target 2026 : 75 - Realisasi TW II 2026 : 71,43 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD	- Pengendalian alokasi belanja sesuai kemampuan keuangan daerah - Peningkatan kepatuhan perangkat daerah dalam memenuhi alokasi belanja wajib pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bidang prioritas lainnya - Penguatan sinkronisasi antara perencanaan program dan penganggaran, peningkatan kualitas penandaan *(tagging)* anggaran
4	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	- Target 2026 : 98,25 - Realisasi TW II 2026 : 96,08 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya pemanfaatan aset di satuan kerja	- Evaluasi atas nilai appraisal yang telah berjalan - Sosialisasi terkait pemanfaatan tanah dan bangunan beserta tarifnya Kepada Masyarakat
5	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	- Target 2026 : 4,57 - Realisasi TW II 2026 : 1,12 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya peningkatan target pajak daerah	- Melaksanakan pendataan objek pajak baru secara intensif - Melakukan pemutakhiran data objek pajak - Melaksanakan sosialisasi pajak daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak - Peningkatan kapasitas SDM melalui bimtek dan pelatihan
6	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap	- Target 2026 : 98,29 - Realisasi TW II 2026 : 16,93 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum tercapainya realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target pajak daerah	- Sosialisasi PBB-P2 dan Opsen kepada Kecamatan yang akan diteruskan ke Desa dan Kelurahan

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	Target Pajak Daerah			- Melakukan sosialisasi kepada Bendahara Perangkat Daerah untuk membayar PBJT Makanan dan Minuman atas Mamin Rapat yang dilaksanakan di masing-masing PD - Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran non tunai (melalui QRIS) - Melakukan penagihan kepada wajib pajak
C	Kepegawaian			
1	Indeks Sistem Merit	- Target 2026 : 0,69 - Realisasi TW II 2026 : 0,62 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan kepegawaian	- Pengusulan tambahan anggaran asesmen untuk menambah jumlah pemetaan pegawai melalui asesmen - Melakukan penilaian kinerja, sikap dan perilaku pegawai secara rutin - BKPSDM dengan Dinkominfo mengembangkan aplikasi Sinta Merit untuk manajemen talenta dan aplikasi penilaian kinerja PKSP 360° untuk aspek manajemen kinerja
2	Persentase kedisiplinan ASN	- Target 2026 : 99,81 - Realisasi TW II 2026 : 40,95 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya tingkat kedisiplinan ASN dalam pelaksanaan tugas	- Monitoring dan evaluasi Kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung - Mendata jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pembinaan pegawai secara daring (webinar) maupun luring - Peningkatan rapat koordinasi, sosialisai, dan bimbingan teknis kepegawaian - Optimalisasi program Ngopi Pait (webinar) oleh BKPSDM
D	Pendidikan dan Pelatihan			
1	Indeks Profesionalitas ASN	- Target 2026 : 80,5 - Realisasi TW II 2026 : 79,81 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya tingkat profesionalitas ASN	Koordinasi yang intensif dengan BKN selaku pengelola data kepegawaian (SAPK) dan pemberi rekomendasi/ yang mengeluarkan nilai indeks. Sebagian pegawai telah melakukan update data kepegawaian seperti P2KP (kinerja) dan sertifikat diklat (kompetensi) yang merupakan aspek dalam dimensi penilaian dalam IP ASN. IP ASN perlu digantikan dengan indikator pengganti yaitu NSPK
E	Penelitian dan Pengembangan			
1	Kapabilitas Inovasi	- Target 2026 : 2,65 - Realisasi TW II 2026 : 2,66 - Status capaian : Tercapai	Belum optimalnya peningkatan kapabilitas inovasi	Meningkatkan capaian indikator pada dimensi riset melalui intervensi fasilitasi kekayaan intelektual (KI) dan peningkatan publikasi ilmiah
VI	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**			
A	Inspektorat Daerah			
1	Indeks Integritas Nasional	- Target 2026 : 78 - Realisasi TW II 2026 : 77,93 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya Indeks Integritas Nasional	- Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparansi serta peningkatan akuntabilitas yang lebih baik sebagai upaya memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				Pemerintah Kabupaten Temanggung - Penguatan komitmen pimpinan organisasi untuk memimpin perbaikan nyata, menjadi teladan perubahan, dan mendukung konsistensi pencapaian tujuan organisasi - Secara massive melaksanakan sosialisasi antikorupsi kepada legislatif, eksekutif dan masyarakat
2	Maturitas SPIP	- Target 2026 : 3,125 - Realisasi TW II 2026 : 2,979 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya maturitas SPIP	- Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP - Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian - Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin (1x setahun) - Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada OPD
3	Nilai Kapabilitas APIP	- Target 2026 : 3,003 - Realisasi TW II 2026 : 2,42 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya kapabilitas APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan	- Menetapkan kebijakan pemberian penghargaan dalam peningkatan kapabilitas APIP sebagai stimulan bagi Inspektorat agar lebih bersemangat dalam meningkatkan kapabilitasnya - Mempertimbangkan untuk melakukan penambahan dana operasional yang memadai sebesar 1% dari APBD - Menetapkan mekanisme pemberian reward/ pengharga an bagi pegawai yang berkinerja memuaskan - Melaksanakan evaluasi intern dan ekstern melalui kegiatan Program Jaminan Kualitas dan Peningkatan (*Quality Assurance and Improvement Program*/QAIP) dan Telaah Sejawat guna menjamin mutu dan kualitas audit Inspektorat - Melakukan reviu atas *Internal Audit Charter* - Melakukan penyegaran kembali terhadap Satuan Tugas - Peningkatan Kapabilitas APIP dengan memperhatikan kompetensi dari masing-masing anggota tim - Melibatkan semua tenaga pemeriksa dalam perencanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) guna mengetahui dan menganalisis area kritis mana yang ditemui selama melakukan pengawasan

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
4	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	- Target 2026 : 3,003 - Realisasi TW II 2026 : 2,91 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	- Peningkatkan kompetensi auditor investigasi yang mendukung penugasan pengukuran IEPK - Upaya peningkatan IEPK secara terintegrasi dengan upaya peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) - Sosialisasi dan pemahaman ke K/L arti penting pencegahan korupsi yang efektif dan IEPK menjadi dasar bagi perbaikan tata kelola, peningkatan efektivitas manajemen risiko dan pengguatan pengendalian anti korupsi.
5	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I. II. III.IV. Khusus)	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 13,29 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I, II, III, IV, dn Khusus)	- Diperlukan peningkatan auditor baik secara kualitas maupun kuantitas - Diperlukan peyesuaian jadwal pengawasan agar dapat melaksanakan mandatori pusat tanpa mengurangi rencana pengawasan yang sudah direncanakan dalam PKPT
6	Persentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 0 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan	- Komunikasi dan koordinasi dengan Inspektorat Prov Jawa Tengah terkait pedoman yang digunakan untuk penyusunan kebijakan teknis pengawasan (PKPT) - Tim Inti Penyusun Kebijakan Teknis Pengawasan (PKPT) lebih aktif dan intensif dalam bekerja - Konsultasi dengan BPKP apabila ada kendala dalam penyusunan
7	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 0 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya komitmen Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas	- Pendampingan yang lebih intensif kepada perangkat daerah yang telah dicanangkan sebagai Zona Integritas - Koordinasi dengan Kemenpan dan TPI dalam rangka Sinkronisasi kegiatan ZI - Sosialisasi kepada peranglkat daerah yang dicanangkan sebagai ZI
8	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 23,91 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya perangkat daerah yang diebaluasi pengelolaan risikonya	Melaksanakan asistensi/pendampingan tentang manajemen risiko kepada seluruh Perangkat Daerah
VII	**Unsur Kewilayahan**			
A	Kecamatan			
1	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	- Realisasi TW II 2026 : 80,76 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	- Penetapan indikator kinerja yang jelas, penyusunan rencana kerja yang terarah, dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana - Pemantauan dan evaluasi berkala, serta pelaporan kinerja secara komprehensif sebagai dasar perbaikan berkelanjutan - Peningkatan kapasitas SDM kecamatan

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				- Optimalisasi penyusunan perencanaan dan penganggaran - Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kecamatan - Penguatan budaya kerja organisasi
2	Nilai capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi pemerintahan kecamatan	- Realisasi TW II 2026 : 84,07 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya nilai capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi pemerintahan kecamatan	- Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan - Penguatan sistem koordinasi dan pelaporan kinerja secara berkala - Peningkatan kualitas pembinaan dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa - Penguatan sinergi antara kecamatan, perangkat daerah, dan pemerintah desa dalam pelaksanaan program pembangunan
3	Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan	- Realisasi TW II 2026 : 1,72 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya realisasi penerimaan PBB di kecamatan	- Peningkatan jemput bola kepada wajib pajak dan memberikan sosialisasi serta pengertian kepada masyarakat untuk merubah kebiasaan pembayaran PBB tidak menunggu usai panen tembakau - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin berjenjang di tingkat desa/kelurahan - Pendataan dan pemutakhiran objek pajak secara berkala - Penerapan sanksi tegas dan persuasive - Pembentukan Tim Insentifikasi penarikan PBB di tingkat kecamatan
VIII	**Unsur Pemerintahan Umum**			
A	Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	Indeks Harmoni	- Target 2026 : 6,79 - Realisasi TW II 2026 : 6,72 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya kualitas indeks harmoni	Melaksanakan pemantauan berkelanjutan atas dimensi Indeks Harmoni, agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan strategi pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan keberagamaan agar tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta memperkuat harmoni sosial ke depan
2	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 80,29 - Status capaian : Tercapai	Belum optimalnya penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Penguatan penyampaian pemahaman wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila
3	Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 0 - Status capaian : Tercapai	Masih rendahnya pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	Penguatan penyampaian pendidikan politik dan budaya politik
4	Persentase koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat	- Target 2026 : 100 - Realisasi TW II 2026 : 14,29 - Status capaian : Tercapai	Masih optimalnya koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat	- Pelibatan admin Forkompimda dalam pengumpulan data, melaksanakan rapat koordinasi, forum diskusi, dan sistem pelaporan untuk meningkatkan kewaspadaan

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				- Penguatan kolaborasi lintas sektor melalui dialog, forum, dan sistem peringatan dini

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2026 menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Temanggung yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global, sedangkan kerangka pendanaan daerah memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2026.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional, dan daerah serta mengacu arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah serta sesuai arah dan kebijakan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

3.1.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Perekonomian Indonesia sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan performa yang cukup baik ditengah dinamika global yang sedang terjadi yang dibuktikan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61%. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan capaian petumbuhan ekonomi pada Tahun 2025 yang sebesar 5,11%, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas domestik.

Pertumbuhan ekonomi sepanjang Triwulan I Tahun 2026 didorong oleh struktur ekonomi yang solid baik dari sisi lapangan usaha maupun pengeluaran. Dari sisi lapangan usaha, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi

dengan capaian sebesar 13,14% disusul oleh sektor jasa lainnya sebesar 9,91% dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 8,04%. Pada aspek struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku sampai pada Triwulan I Tahun 2026 tidak menunjukkan perubahan berarti dimana dominasi masih dipegang oleh sektor lapangan usaha industri pengolahan dengan capaian sebesar 19,07% diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,28% dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 12,67%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dari sisi pengeluaran ditunjang oleh kinerja komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dengan capaian sebesar 21,81% diikuti komponen impor barang dan jasa sebesar 7,18%. Pada aspek struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku smapai dengan Triwulan I Tahun 2026 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dimana masih dominasi masih dipegang oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 54,36% atau mencakup separuh lebih PDB Indonesia diikuti komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 28,29% dan komponen ekspor barang dan jasa sebesar 21,22%.

Tantangan dan kondisi yang mewarnai ekonomi global yang patut menjadi perhatian antara lain:

Ketegangan geopolitik dan perdagangan

Ekskalasi konflik regional dan meningatnya fragmentasi perdagangan global menciptakan hambatan baru bagi arus ekspor dan impor

Fluktuasi harga komoditas

Ketidakpastian pasokan energi dan pangan global terus memberikan tekanan pada inflasi di banyak negara maju

Kebijakan moneter ketat

Suku bunga global yang masih berada di level relatif tinggi memberikan tantangan bagi arus modal masuk (*capital inflow*) dan nilai tukar di negara berkembang.

Lembaga ekonomi internasional memperkirakan dinamika ekonomi dunia akan mengalami penyesuaian sebagai dampak dari normalisasi suku bunga dan ketidakpastian geopolitik, hal ini didukung oleh laporan dari *International Monetary Fund* (IMF) per bulan Juli tahun 2026 yang mengumumkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 secara global mengalami pertumbuhan sebesar 3,0%, sedangkan ekonomi negara berkembang tumbuh sebesar 3,8% dibandingkan Tahun 2025 yang sebesar 4,5%. Pada aspek inflasi, hasil proyeksi dari IMF menunjukkan inflasi di negara berkembang relatif lebih tinggi dibandingkan inflasi global dimana inflasi global sebesar 4,7% sedangkan capaian inflasi negara berkembang sebesar 5,8%. Kondisi perekonomian beberapa negara mitra dagang Indonesia dilaporkan tumbuh positif sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 diantaranya Tiongkok tumbuh 5,0%, Amerika Serikat tumbuh 2,7%, Korea Selatan tumbuh 3,6%, Malaysia tumbuh 5,3%, Singapura tumbuh 4,6%, dan Vietnam tumbuh 7,8%.

3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 ini menunjukkan ketahanan ditengah kondisi ketidakpastian global. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61%, lebih baik dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Tahun 2025 yang sebesar 5,11%. PDB Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp6.187,2 triliun sedangkan PDB Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010 sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp3.447,7 triliun.

Sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu:

- Penyediaan akomodasi dan makan minum: tumbuh sebesar 13,14% dan menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi
- Jasa lainnya: tumbuh sebesar 9,91% sekaligus menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi kedua

- Transportasi dan pergudangan: tumbuh sebesar 8,04% dan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi ketiga
- Industri pengolahan: tumbuh sebesar 5,04% dan menjadi penyumbang terbesar PDB dengan kontribusi sebesar 19,07%.

Apabila melihat pertumbuhan PDB menurut pengeluaran, pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 21,81% sekaligus menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi serta berkontribusi sebesar 6,72% terhadap total PDB. Kontributor terbesar yaitu komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) yang tumbuh sebesar 5,52% dan berkontribusi 54,36% terhadap total PDB. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 1,79% dan berkontribusi sebesar 28,29% terhadap total PDB sedangkan kontribusi gabungan dari pengeluaran konsumsi LNPRT, perubahan inventori, ekspor dan impor barang dan jasa hanya berkisar 5,81. Pertumbuhan konsumsi LNPRT di angka 0,09%, ekspor barang dan jasa sebesar 0,21% dan pertumbuhan impor barang dan jasa 1,37% serta untuk perubahan inventori sebesar 0%. Pertumbuhan dan kontribusi PDRB menurut wilayah, Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 57,24% dengan pertumbuhan 5,79% diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,08% dengan pertumbuhan 5,13%.

Dengan mempertimbangkan berbagai resiko, *game changers* transformasi ekonomi (Industrialisasi, Transisi Energi, Integrasi Infrastruktur Konektivitas, *Super Platform*, Pembangunan IKN, dan Anggaran IPTEKIN) dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, target indikator makro nasional Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Nasional
Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Proyeksi	
			RKPD 2026	P-RKPD 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2-5,8	5,2-5,8
2	Inflasi	%	2,5 ± 1,0 ±	2,5 ± 1,0 ±
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,44-4,96	4,44-4,96
4	Angka Kemiskinan	%	6,5-7,5	6,5-7,5
5	Rasio Gini	Angka	0,379-0,382	0,379-0,382

No	Indikator	Satuan	Proyeksi	
			RKPD 2026	P-RKPD 2026
6	Indeks Modal Manusia (GNI)	Angka	0,57	0,57

Sumber: Kementerian Bappenas (Permen PPN Ka Bappenas Nomor 3 Tahun 2025)

3.1.3. Kondisi Perekonomian Jawa Tengah

Performa perekonomian Jawa Tengah sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 ini menunjukkan peningatan yang cukup signifikan yang dibuktikan dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,89% (*y-to-y*) dan berada diatas capaian nasional yang sebesar 5,61%. Capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berada di peringkat kedua setelah Jawa Timur yang memperoleh capaian 5,96% sekaligus provinsi dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Pulau Jawa. Ekonomi Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,50% terhadap perekonomian di Pulau Jawa dan berada pada peringkat keempat di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta dengan kontribusi 29,53%, Jawa Timur degan kontribusi 25,14% dan Jawa Barat dengan kontribusi 22,63%.

Struktur ekonomi Jawa Tengah dapat dilihat berdasarkan PDRB Menurut Lapangan Usaha dan PDRB Menurut Pengeluaran. Pada aspek PDRB Menurut Lapangan Usaha sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan sekaligus pertumbuhan tertinggi yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 14,14% diikuti sektor konstruksi dengan pertumbuhan sebesar 11,91% dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 9,83%. Kontribusi terbesar pada PDRB Jawa Tengah menurut lapangan usaha yaitu oleh sektor industri pengolahan sebesar 32,69% diikuti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 13,98% serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,44%.

Pada aspek PDRB Menurut Pengeluaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 ini komponen yang mengalami pertumbuhan signifikan sekaligus pertumbuhan tertinggi yaitu komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang mencapai 19,36% diikuti komponen impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang dengan pertumbuhan sebesar 19,02% serta komponen ekspor barang dan jasa sebesar 14,39%. Dari segi kontribusi PDRB Menurut Pengeluaran

komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) masih menjadi komponen dengan penyumbang terbesar dengan capaian 60,01% sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 kendati hanya mengalami pertumbuhan sebesar 5,08% yang kemudian diikuti oleh komponen ekspor barang dan jasa dengan capaian sebesar 44,51% serta impor barang dan jasa sebagai faktor pengurang dengan kontribusi sebesar 41,80%.

Capaian dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentu berdampak pada aspek kesejahteraan masyarakat yang dibuktikan dengan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 ini sebesar 4,24% atau turun 0,09% dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2025 atau secara *y-to-y*. Pada aspek lainnya, inflasi di Jawa Tengah sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar 2,11% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,03.

Salah satu upaya meningkatkan pemerataan ekonomi adalah melalui pengembangan investasi di wilayah selatan, guna mengurangi ketimpangan pembangunan dengan wilayah utara. Selain itu, pentingnya menarik investor, baik dalam negeri maupun asing, untuk berinvestasi di sektor industri, pelabuhan, manufaktur, dan energi. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan wilayah selatan dan utara harus terus digencarkan guna meningkatkan daya saing ekonomi. Pemerintah juga mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa agar pembangunan berjalan optimal. Dengan strategi ini, Jawa Tengah diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berdaya saing tinggi.

3.1.4. Proyeksi dan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Arah pembangunan kewilayahan di Jawa Tengah adalah untuk mengembangkan perekonomian wilayah berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing daerah, dimana pembangunan perekonomian Jawa Tengah berbasis pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata.

Mendasarkan pada kondisi-kondisi tersebut dan didukung oleh data-data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perekonomian Jawa Tengah untuk tahun 2026 diproyeksikan pada kisaran angka 5,00-6,00%. Inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 1,5-3,5% sedangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2026, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 8,70-8,53% dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,71-4,27%. Pada aspek PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 52,0-55,0 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,360-0,365 di tahun 2026.

Tabel 3. 2
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Proyeksi	
			RKPD 2026	RPJMD 2025-2029
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00-6,00	5,00-6,00
2	PDRB per kapita	Juta Rp	52,00-55,00	52,00-55,00
3	Inflasi	%	1,5-3,5	1,5-3,5
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,71-4,27	4,71-4,27
5	Angka Kemiskinan	%	8,70-8,53	8,70-8,53
6	Rasio Gini	Angka	0,360-0,365	0,362- 0,367

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada "**Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis**". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:

1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
2) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
3) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai;
5) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran;
6) Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada *green jobs* dan *green investment* dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
7) Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital.

3.1.5.Kondisi Perekonomian Kabupaten Temanggung

Pada Tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung naik menjadi 5,66% yang artinya pertumbuhan jauh lebih cepat dibandingkan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada sektor PDRB menurut lapangan usaha diantaranya kenaikan yang cukup signifikan pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,03%, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 9,82%, sektor jasa lainnya sebesar 9,28%, sektor jasa perusahaan sebesar 7,52% dan sektor konstruksi sebesar 6,75%. Untuk sektor lain mengalami pertumbuhan yang tergolong kecil jika dibandingkan dengan sektor yang mengalami percapatan atau kenaikan.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari Rp17.852,53 miliar rupiah pada Tahun 2024 menjadi Rp18.863,34 miliar di Tahun 2025. Sektor yang memberikan sumbangan paling besar yaitu sektor industri pengolahan sebesar Rp4.552,53 miliar diikuti sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp4.339,37 miliar dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan sumbangan sebesar Rp3.863,49 miliar.

Efek dari peningkatan capaian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 berimbas pada indikator-indikator lainnya seperti capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,31% atau turun 0,04% dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 2,35%. Indikator lainnya yang menunjukkan perkembangan baik yaitu angka kemiskinan yang mengalami penurunan dari sebelumnya 8,67% pada Tahun 2024 menjadi 7,78% pada Tahun 2025. capaian indikator PDRB Atas Dasar Harga Berlaku juga mengalami kenaikan dari Rp28,92 triliun pada Tahun 2024 menjadi Rp31,20 triliun pada Tahun 2025 dan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku juga mengalami peningkatan dari Rp35,49 juta pada Tahun 2024 menjadi Rp38,00 juta pada Tahun 2025 atau naik sekitar Rp2,51 juta.

3.1.6. Proyeksi dan Arah Pembangunan Kabupaten Temanggung

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung tetap diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah terutama yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, industri pengolahan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan di sisi lain, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia.

Mendasarkan pada kondisi-kondisi di atas, maka perekonomian Kabupaten Temanggung tahun 2026 pada aspek pertumbuhan ekonomi diproyeksikan pada kisaran angka 5,10-5,50%. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 1,5-2,50%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Kabupaten Temanggung. Tahun 2026, angka kemiskinan diproyeksikan sebesar 7,90-7,85% dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,30. Sedangkan PDRB Per Kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 39,31 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Rasio Gini sebesar 0,370-0,360 di tahun 2026.

Keberhasilan pencapaian target pembangunan ke depan diharapkan dapat menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka menuju angka proyeksi 2,20-2,00%, hal ini didukung oleh beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tingkat pengangguran, diantaranya:

a. Penciptaan kesempatan kerja baru melalui penumbuhan industri padat karya maupun pengembangan UMKM;
b. Perluasan kerja di sektor informal;
c. Peningkatan keahlian dan kompetensi tenaga kerja;

d. Meningkatkan kemauan berwirausaha masyarakat melalui program tenaga kerja mandiri dengan fasilitas dukungan seperti peralatan usaha, pelatihan kerja serta kemudahan akses permodalan;
e. Memperkuat sistem informasi pasar kerja; dan
f. Perlindungan sosial bagi pekerja.

3.1.6.1. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam upaya guna menentukan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan di Kabupaten Temanggung, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan target di tingkat provinsi maupun nasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 sebesar 5,2-5,8%. Hal ini didasarkan atas berbagai pertimbangan baik di dalam negeri maupun luar negeri, misalnya mulai adanya pemulihan ekonomi global, meningkatnya investasi, meningkatnya ekspor terutama dari sektor manufaktur, meningkatnya mobilisasi penduduk, serta peningkatan konsumsi masyarakat. Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memproyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 menjadi 5,00-6,00%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai sebesar 5,73% dan lebih baik dibandingkan capaian Tahun 2025 yang sebesar 5,66% dikarenakan peningkatan sektor-sektor perekonomian seperti sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebagai sektor-sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar di Kabupaten Temanggung.

Dengan memperhatikan kondisi di tingkat provinsi dan nasional, maka terbaca adanya optimisme bahwa pada 2026 ekonomi akan tumbuh dan diharapkan aktivitas perekonomian kembali normal. Optimisme inilah yang menjadi dasar bagi proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2026, meskipun harus mempertimbangkan beberapa faktor yang pada akhirnya menyebabkan besaran pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi proyeksi pemerintah pusat maupun provinsi.

Faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung berupa investasi fisik maupun investasi modal manusia yaitu pendidikan. Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tidak mengutamakan sisi konsumsi namun lebih ke sisi produksi yaitu peningkatan dalam jumlah maupun kualitas produksi barang dan jasa, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat naik dengan meningkatkan produktivitas di setiap sektor perekonomian.

Tabel 3. 3
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2026

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2026	5,10-5,50	5,00-6,00	5,20-5,80
Perubahan 2026	5,10-5,50	5,00-6,00	5,20-5,80

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2026

Proyeksi target pertumbuhan ekonomi yang demikian dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri (global) seperti Geopolitik global yaitu konflik Rusia-Ukraina, konflik Amerika Serikat-Iran serta konflik Israel-Palestina yang memengaruhi situasi Timur Tengah sehingga memicu ketidakstabilan harga energi dan komoditas khususnya harga komoditas minyak dunia yang akhirnya memengaruhi harga komoditas lokal. Selain konflik adanya perang dagang antara Amerika Serikat-Tiongkok juga memengaruhi fluktuasi perekonomian nasional yang utamanya dapat dilihat dari harga komoditas yang tidak stabil dan cenderung mengalami kenaikan.

Beberapa upaya yang akan dilakukan guna memastikan pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan lebih baik lagi diantaranya peningkatan produktivitas sektor kearifan lokal seperti pertanian yang dapat ditingkatkan dengan cara:

a. Mendorong minat berusaha di bidang pertanian;
b. Peningkatan teknologi pertanian;
c. Mendorong persaingan yang sehat dalam jual beli sektor pertanian;
d. Pengembangan jenis komoditas agar berhasil guna;
e. Membuka peluang eskpor ke daerah lain;

f. Mendorong ekonomi kreatif semakin berkembang
g. Digitalisasi usaha produk pertanian, dan lain-lain.

3.1.6.2. Struktur Ekonomi

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung atas dasar harga konstan selama jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan pergerakan dan pergeseran di beberapa sub sektor. Struktur ekonomi Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3. 4
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,86	2,92	1,28	0,49	9,82
B	Pertambangan dan Penggalian	6,75	-3,94	3,12	4,56	1,53
C	Industri Pengolahan	2,00	1,09	4,32	3,65	3,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,84	5,26	5,86	8,26	3,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,62	0,22	4,36	0,96	0,52
F	Konstruksi	7,54	3,72	7,89	13,64	6,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,40	4,30	5,82	5,91	4,29
H	Transportasi dan Pergudangan	2,37	65,39	7,90	5,82	4,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,03	15,04	12,49	10,16	10,03
J	Informasi dan Komunikasi	5,98	2,24	11,25	9,91	9,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,42	0,51	2,91	4,62	4,52
L	Real Estate	2,32	5,8	8,36	7,70	4,35
M,N	Jasa Perusahaan	3,01	5,65	8,82	11,29	7,52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,26	1,60	5,11	8,01	1,70
P	Jasa Pendidikan	0,54	1,63	6,96	8,50	4,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,59	2,59	8,32	8,06	4,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,98	10,95	8,83	6,76	9,28
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**3,34**	**5,2**	**5,01**	**5,02**	**5,66**

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2026

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penentuan pertumbuhan ekonomi salah satunya yaitu sektor ekonomi yang menjadi pendukung utama. Ada 3 (tiga) sektor yang menjadi penggerak utama perekonomian di Kabupaten Temanggung yaitu industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

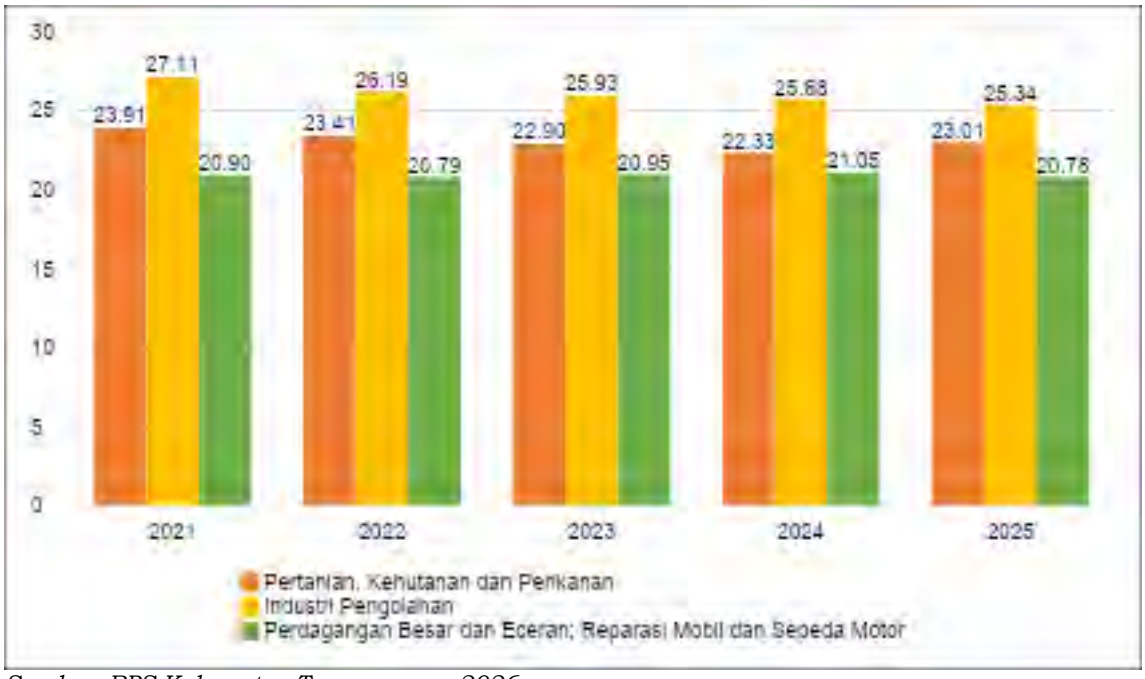

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2026.

Gambar 3. 1
Capaian Sektor Utama terhadap PDRB
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

3.1.6.3. PDRB per Kapita

Meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB Perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB Perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Penghitungan pendapatan yang benar-benar diterima oleh penduduk Kabupaten Temanggung sampai saat ini belum dapat dilakukan, karena belum tersedianya data arus pendapatan yang mengalir antar kabupaten atau kota. Namun demikian PDRB Perkapita masih cukup relevan untuk menggambarkan apakah secara rata-rata, pendapatan masyarakat mengalami peningkatan atau tidak.

Tabel 3. 5
Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2025

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		
	Target*	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)	Target*	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2021	22.000.000	28.484.021	4,24	19.220.000	19.370.430	0,78
2022	23.000.000	30.938.180	8,62	19.710.000	20.190.000	2,44
2023	29.570.000	33.290.000	7,60	20.010.000	21.030.000	5,10

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		
	Target*	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)	Target*	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2024	31.992.800	35.490.000	6,61	20.327.040	21.910.000	7,79
2025	33.682.020	38.002.300	7,08	21.400.308	22.972.760	2,99

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2026

Nilai PDRB Per Kapita selalu naik hal ini menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/ dinikmati oleh penduduk Kabupaten Temanggung saja, akan tetapi ada yang dimiliki/ dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung.

Pada tahun 2025 PDRB Perkapita mengalami peningkatan dengan pertumbuhannya menjadi 7,08%. Peningkatan pendapatan per kapita dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

a. Menaikkan investasi berdasarkan potensi daerah sampai kepada komoditas;
b. Meningkatkan program kewirausahaan, pengembangan UMKM dan pengembangan ekonomi kreatif;
c. Memaksimalkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri maupun sektor penggerak perekonomian;
d. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan keterampilan; dan
e. Meningkatkan produksi bagi sektor potensial daerah.

3.1.6.4. Inflasi

Pentingnya kestabilan harga dan pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Angka Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan menurun sehingga standar hidup dari masyarakat juga akan ikut turun dan akhirnya akan semakin menambah berat beban ekonomi masyarakat. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dibanding tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak

kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai mata uang rupiah.

Sejak tahun 2020 BPS hanya berwenang menghitung laju inflasi sampai level provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi daerah sampel, sedangkan Kabupaten Temanggung tidak masuk ke dalam daerah sampel sehingga angka inflasi Temanggung mengikuti inflasi Kabupaten Wonosobo sebagai *sister city*.

Tabel 3. 6
Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional

LOKASI	2021	2022	2023	2024	2025
Temanggung	1,70	5,63	2,89	1,52	2,62
Jawa Tengah	1,70	5,63	2,89	1,67	2,72
Nasional	1,87	5,51	2,61	1,57	2,92

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2026

Secara umum, data ini memperlihatkan adanya kenaikan harga yang cukup signifikan yang dialami oleh Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Inflasi ini dapat memberikan gambaran bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan dan disertai adanya peningkatan biaya produksi terutama yang terjadi di sektor-sektor strategis seperti pertanian dan peternakan yang disebabkan oleh kondisi global yang tidak mendukung peningkatan perekonomian. Perlu adanya kebijakan ekonomi yang diharapkan mampu menstabilkan inflasi sehingga biaya produksi bisa ditekan dan daya beli masyarakat bisa ditingkatkan kembali.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah diatur oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Keuangan daerah disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dengan berdasarkan pada program (*money follow program*), penyelesaian isu strategis dan permasalahan di daerah, Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mendukung pencapaian target RPJMD tahun 2025-2029. APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah, di mana kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dan mendukung pemulihan serta penguatan ekonomi daerah, diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Mengedepankan kriteria kinerja yang dinamis dan strategis untuk mendorong daerah lebih kompetitif, seperti penurunan angka pengangguran, kinerja pengendalian inflasi, indeks pencegahan korupsi;
b. Mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kualitas belanja APBD;
c. Mempertajam indikator yang selaras dengan pencapaian prioritas nasional;
d. Memperkuat indikator yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional;
e. Penyaluran berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada

daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) diharapkan dapat mengoptimalkan dan menguatkan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan kesejahteraan di daerah.

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemampuan daerah akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Memperhatikan berbagai kondisi obyektif masyarakat, aspirasi yang berkembang dan menyesuaikan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program asta cita antara lain :

1. Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan, dan Kesehatan
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
3. Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim
4. Pengendalian Inflasi Daerah
5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
6. Dukungan swasembada pangan
7. Pengembangan industry kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasukan hasil industry kerajinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
8. Pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mewujudkan visi da misi daerah, yang erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah serta mendukung tema pembangunan/arah kebijakan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yaitu “**Penguatan reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi ”**, dengan program prioritas sebagai berikut:

1. Penataan garis imajiner;
2. Penataan kapasitas dan kinerja birokrasi;

3. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan;
4. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan;
5. Optimalisasi pasar daerah;
6. Penguatan dan pelestarian seni budaya;
7. Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
8. Pelayanan dasar bidang pendidikan;
9. Pelayanan dasar bidang kesehatan;
10. Pelayanan sosial dan bidang keagamaan;
11. Pelayanan perijinan dan administrasi;
12. Integrasi data;
13. Pencegahan dan mitigasi bencana alam;
14. Digitalisasi dan smart city;
15. Pelestarian lingkungan hidup;
16. Pembangunan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi,
17. Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah;
18. Pengembangan atlet dan prestasi olahraga; dan
19. Peningkatan kualitas tenaga kerja.

Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan tema pembangunan/arah kebijakan dan program prioritas RKPD tahun 2026 melalui peningkatan penerimaan daerah, dan penajaman alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

3.1.1.Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Penerimaan pendapatan daerah pada Perubahan RKPD tahun 2026 diperkirakan tidak akan jauh berbeda dengan penerimaan pendapatan daerah pada APBD tahun 2026 penetapan. Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan. Kemampuan untuk menghimpun PAD dipengaruhi oleh beberapa hal, namun yang paling krusial adalah seberapa besar pertumbuhan sektor konsumsi, khususnya untuk barang kena Pajak Daerah. Pendapatan Transfer merupakan penyaluran pendapatan dari Pemerintah yang sifatnya sangat dinamis artinya memperhatikan penerimaan Pendapatan Negara, serta pemenuhan terhadap prioritas belanja yang ditentukan oleh Pemerintah. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah yang bersumber selain dari PAD.

Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan proyeksi Pendapatan Daerah pada perubahan tahun 2026 tetap mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan dari pada pertumbuhan yang agresif, sehingga proses perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Optimalisasi pemungutan PAD merupakan prioritas, yang terdiri atas 4 jenis dan memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu:

(1) pajak daerah;
(2) retribusi daerah;
(3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
(4) lain-lain PAD yang sah,

Dari ke-4 sumber PAD tersebut sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD Kabupaten Temanggung selain Pendapatan BLUD.

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah Dana Desa, Insentif Fiskal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Proyeksi Penerimaan dari Pendapatan Transfer sepenuhnya tergantung pada Pemerintah

Pusat, karena data penetapan pembagian sementara dan pembagian definitif untuk pemerintah daerah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri Keuangan, sehingga hanya bersifat koordinasi dan konfirmasi. Sedangkan untuk pemetaan potensi objek pajak tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah fungsinya hanya melaksanakan pencocokan atau rekonsiliasi kas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Beberapa asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi terhadap komponen pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dikatakan belum proporsional, karena prosentase proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah masing sangat rendah. Kontributor terbesar PAD berasal dari sektor Lain-lain PAD yang Sah yaitu Pendapatan BLUD. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan PAD pada Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dengan memperhatikan karakteristik masing-masing jenis pungutan, yaitu sebagai berikut:
   a. Pertumbuhan objek pajak daerah yang terdiri dari pajak reklame, pajak air tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diperkirakan sama atau sedikit lebih tinggi dari tahun 2026;
   b. Optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah, berasal dari penambahan objek baru dan penyesuaian tarif Retribusi Daerah. Digitalisasi penerimaan pendapatan retribusi yang terus digalakkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memudahkan transaksi pembayaran dan pengawasan realisasi pendapatan khususnya pada pendapatan retribusi Los/Kios Pasar;
   c. Optimalisasi penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu dengan meningkatkan kinerja BUMD sehingga dapat menghasilkan Dividen atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;

d. Optimalisasi Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yaitu dengan Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan.

2. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer diproyeksikan sebagai berikut:
   a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Desa dan Insentif Fiskal diperkirakan sama dengan penetapan Tahun Anggaran 2026, DBH dan DAU diperkirakan sama atau naik sedikit dibanding dengan penetapan Tahun Anggaran 2026, sedangkan DAK (Fisik dan Non Fisik) yang bersifat in out diperkirakan sama atau naik sedikit dibanding dengan penetapan Tahun Anggaran 2026;
   b. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperkirakan naik sedikit dibanding dengan penetapan Tahun Anggaran 2026, namun untuk Bantuan Keuangan yang besifat in out dianggarkan sesuai dengan usulan/hasil verifikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah:
   a. Pendapatan hibah diperkirakan hampir sama dengan penetapan Tahun Anggaran 2026, demikian juga pendapatan hibah yang berasal dari sumbangan pihak ketiga.
   b. Dana Darurat selama ini Pemerintah Kabupaten Temanggung belum pernah mendapatkan;
   c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan juga diperkirakan hampir sama dengan penetapan Tahun Anggaran 2026.

Pendapatan daerah tidak terlepas dari asumsi-asumsi, diantaranya:

1. Kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional;
2. Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah diantaranya alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM;
3. Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; dan

4. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Perbandingan Pendapatan daerah Kabupaten Temanggung.

Tabel 3. 7
Realisasi Pendapatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2025 dan APBD Tahun 2026

URAIAN					TAHUN ANGGARAN		
					REALISASI 2024	REALISASI 2025	APBD 2026
PENDAPATAN DAERAH					**2.099.479.855.788**	**1.917.280.341.340**	**1.883.601.918.712**
1	**Pendapatan Asli Daerah**				**388.858.102.726**	**439.351.499.834**	**416.593.288.775**
	a.	Pajak Daerah			76.926.746.042	135.839.678.413	139.968.634.896
	b.	Retribusi Daerah			10.925.370.668	222.787.513.581	204.605.772.815
	c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			22.645.578.254	231.53.792.414	22.685.506.988
	d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			278.360.407.762	57.570.515.426	49.333.374.076
2	**Pendapatan Transfer**				**1.710.621.753.062**	**1.447.928.841.506**	**1.479.542.629.937**
	a.	Transfer Pemerintah Pusat			**1.525.673.694.150**	**1.391.501.867.970**	**1.385.694.300.000**
		1)	Dana Perimbangan		1.250.481.698.150	-	-
			a)	Dana Transfer Umum-DBH	69.727.710.589	-	-
			b)	Dana Transfer Umum-DAU	843.895.369.956	-	-
			c)	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	67.587.633.850	-	-
			d)	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	269.270.983.755	-	-
		2)	Insentif Fiskal		28.501.104.000	9.002.280.000	-
		3)	Dana Desa		246.690.892.000	209.995.681.594	205.149.783.000
		4)	Dana Bagi Hasil		-	66.416.019.440	34.918.875.000
		5)	Dana Alokasi Umum		-	822.853.104.127	833.762.700.000
		6)	Dana Alokasi Khusus		-	283.234.782.809	311.862.942.000
	b.	Transfer antar Daerah			**184.948.058.912**	**86.426.973.536**	**93.848.329.937**
		1)	Pendapatan Bagi Hasil		125.426.694.912	76.688.377.736	81.314.329.937
		2)	Bantuan Keuangan		59.521.364.000	9.738.595.800	12.534.000.000
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**				**2.000.000.000**	-	-
	a.	Hibah			2.000.000.000	-	-
	b.	Dana Darurat			-	-	-
	c.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			-	-	-

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2026

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung sampai dengan Perubahan RKPD tahun 2026 masih bertumpu pada sumber

daya keuangan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan transfer antar-daerah, belum mampu bertumpu pada kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan daerah tidak terlepas dari asumsi-asumsi, diantaranya: kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah diantaranya alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; dan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Tabel 3. 8
Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Temanggung
Perubahan RKPD Tahun 2026

URAIAN	RKPD 2026	APBD 2026	P RKPD 2026
PENDAPATAN DAERAH	**1.942.885.528.728**	**1.883.601.918.712**	**1.883.601.918.712**
1. Pendapatan Asli Daerah	**409.932.332.351**	**416.593.288.775**	**416.593.288.775**
a. Pajak Daerah	138.418.634.896	139.968.634.896	139.968.634.896
b. Retribusi Daerah	239.424.185.891	204.605.772.815	204.605.772.815
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	21.838.440.564	22.685.506.988	22.685.506.988
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10.251.071.000	49.333.374.076	49.333.374.076
2. Pendapatan Transfer	**1.532.953.196.377**	**1.479.542.629.937**	**1.479.542.629.937**
a. Transfer Pemerintah Pusat	**1.451.638.866.440**	**1.385.694.300.000**	**1.385.694.300.000**
1) Dana Perimbangan	-	-	-
a) Dana Transfer Umum-DBH	-	-	-
b) Dana Transfer Umum-DAU	-	-	-
c) Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	-	-	-
d) Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	-	-	-
2) Insentif Fiskal	-	-	-
3) Dana Desa	238.898.620.000	205.149.783.000	205.149.783.000
4) Dana Bagi Hasil	80.200.387.000	34.918.875.000	34.918.875.000
5) Dana Alokasi Umum	789.563.477.000	833.762.700.000	833.762.700.000
6) Dana Alokasi Khusus	342.976.382.440	311.862.942.000	311.862.942.000
b. Transfer antar Daerah	**81.314.329.937**	**93.848.329.937**	**93.848.329.937**
1) Pendapatan Bagi Hasil	81.314.329.937	81.314.329.937	81.314.329.937
2) Bantuan Keuangan	-	12.534.000.000	12.534.000.000
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-
a. Hibah	-	-	-
b. Dana Darurat	-	-	-
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2026

Dari Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa proyeksi perubahan pendapatan daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pendapatan tahun anggaran sebelumnya. Kenaikan pendapatan tertinggi yaitu pada pendapatan transfer. Sedangkan untuk PAD hanya naik sedikit dimana Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berupa pendapatan BLUD menjadi salah satu penyumbang kenaikannya.

Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan karena:

a. Penyesuaian proyeksi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Target APBD Tahun Anggaran 2026;
b. Penyesuaian proyeksi Pendapatan Transfer RKPD Tahun 2026 pada rekening pendapatan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa berdasarkan penetapan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
c. Penyesuaian proyeksi Pendapatan Transfer RKPD Tahun 2026 pada rekening Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan bermotor dan Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi berdasarkan ketetapan alokasi Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk dapat mencapai target pendapatan di RKPD Perubahan 2026, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsipprinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

1. Upaya intensifikasi pendapatan ditempuh melalui upaya :
   a. Pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
   b. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak.
   c. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai

upaya meningkat-kan retribusi daerah.

d. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
e. Melakukan penagihan piutang PBB-P2 melalui informasi tunggakan pajak pada SPPT PBB-P2;
f. Meningkatkan pelayanan pajak daerah melalui tanda tangan elektronik pada SPPT PBB-P2;
g. Mempermudah dan memperluas cakupan pembayaran pajak daerah, baik dengan sistem *id billing*, Bima Qris Bank Jawa Tengah, BUMDes, Kantor Pos dan Indomaret;
h. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme pembayaran pajak dan pembayaran tunggakan pajak;
i. Updating perundangan/Perbub terkait pajak (Perbub Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel), Restoran, BPHTB, MBLB, Air Tanah, PBBP2, Hiburan, Reklame, Insentif Pajak, Nilai Sewa Reklame (NSR);
j. Melakukan update NJOP;
k. Melakukan pemasangan alat monitoring pajak antara lain yaitu di Restoran, Hotel dan Tempat Parkir.

2. Upaya ekstensifikasi pendapatan daerah melalui :
   a. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
   b. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha.
   c. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.
   d. Perlunya menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan.

Wujud sinergitas pemungutan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB antara Pemprov Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung antara lain:

1. Melakukan rapat kordinasi bersama terkait pemungutan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
2. Mendukung dan berperan aktif atas program-program yang diluncurkan Pemprov terutama terkait dengan PKB dan BBNKB;
3. Membantu pendistribusi Surat Tagihan kepada wajib pajak di wilayah Kabupaten Temanggung;
4. Bersinergi dengan UPPD Samsat Temanggung dan Kepolisian terkait kegiatan Operasi Gabungan di jalan raya yang dilakukan di wilayah Kabupaten Temanggung;
5. Bersinergi dengan UPPD Samsat Temanggung dan Kepolisian terkait kegiatan Gerakan Disiplin Pajak untuk Rakyat (gadis pantura) yang melakukan sidak ke perkantoran/tempat khusus di wilayah Kabupaten Temanggung; dan
6. Melakukan rekonsiliasi setiap bulan antara UPPD Samsat Temanggung dengan Bendahara Penerimaan terkait penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

3.1.2. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Realisasi belanja daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Gambaran rinci realisasi belanja daerah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 9
Realisasi Belanja Tahun 2024-2026 Semester I

URAIAN	TAHUN ANGGARAN		
	REALISASI 2024	REALISASI 2025	REALISASI 2026 s.d 30 Juni 2026
BELANJA DAERAH	**2.082.224.159.824**	**1.904.863.599.974**	**790.928.100.224**
1. Belanja Operasi	**1.512.987.691.753**	**1.442.464.681.531**	**663.948.042.937**
a. Belanja Pegawai	835.414.435.528	902.974.638.901	484.415.819.262
b. Belanja Barang dan Jasa	555.355.516.548	448.115.305.283	170.911.574.378
c. Belanja Bunga	-	-	-
d. Belanja Subsidi	-	-	-
e. Belanja Hibah	111.467.431.677	88.157.994.847	8.413.289.197
f. Belanja Bantuan Sosial	10.750.308.000	3.216.742.500	207.360.100
2. Belanja Modal	**164.561.497.546**	**90.927.981.288**	**4.966.251.196**
a. Belanja Tanah	-	-	-
b. Belanja Peralatan dan Mesin	77.286.656.183	54.325.324.635	2.836.154.059
c. Belanja Bangunan dan Gedung	37.465.772.157	5.584.442.140	1.845.055.053
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.954.115.310	29.184.507.901	285.042.084
e. Belanja modal aset tetap lainnya	7.796.173.009	1.829.706.612	-
a. Belanja modal aset lainnya	58.780.887	4.000.000	-
3. Belanja Tidak Terduga	**-**	**-**	**-**
4. Belanja Transfer	**404.674.970.525**	**371.470.937.155**	**122.013.806.091**
a. Belanja Bagi Hasil	8.753.922.170	13.659.810.224	-
b. Belanja Bantuan Keuangan	395.921.048.355	357.811.126.931	122.013.806.091

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2026 Anaudited.

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2026 digunakan fokus pada program-program prioritas yang akan dicapai, antara lain:

1. Melaksanakan program prioritas sesuai visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah;
2. Melaksanakan program prioritas yang mendukung arah kebijakan Prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah;
3. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat; dan
5. Melaksanakan program dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan minimal;

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Temanggung RKPD tahun 2026, Penetapan APBD Tahun 2026, dan proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2026 secara lengkap terinci pada tabel berikut:

Tabel 3. 10
Proyeksi Belanja Daerah Perubahan RKPD
Kabupaten Temanggung Tahun 2026

URAIAN	TAHUN ANGGARAN		
	RKPD 2026	APBD 2026	P RKPD 2026
BELANJA DAERAH	**2.330.929.130.615**	**2.103.835.918.712**	**2.103.835.918.712**
1. Belanja Operasi	**1.668.425.609.077**	**1.474.144.588.475**	**1.474.144.588.475**
a. Belanja Pegawai	1.032.782.297.058	863.464.894.628	863.464.894.628
b. Belanja Barang dan Jasa	471.290.491.319	516.999.013.347	516.999.013.347
c. Belanja Bunga	-	-	-
d. Belanja Subsidi	-	-	-
e. Belanja Hibah	158.201.189.700	87.837.549.500	87.837.549.500
f. Belanja Bantuan Sosial	6.151.631.000	5.843.131.000	5.843.131.000
2. Belanja Modal	**253.886.824.638**	**256.010.450.790**	**256.010.450.790**
a. Belanja Tanah	160.000.000	-	-
b. Belanja Peralatan dan Mesin	41.013.566.238	20.828.012.033	20.828.012.033
c. Belanja Bangunan dan Gedung	188.920.400.400	182.404.293.554	182.404.293.554
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.792.858.000	45.509.170.000	45.509.170.000
e. Belanja modal aset tetap lainnya	-	7.268.975.203	7.268.975.203
f. Belanja modal aset lainnya	-	-	-
3. Belanja Tidak Terduga	**1.000.000.000**	**1.198.339.000**	**1.198.339.000**
4. Belanja Transfer	**407.616.696.900**	**372.482.540.447**	**372.482.540.447**
a. Belanja Bagi Hasil	13.712.594.000	15.076.916.490	15.076.916.490
b. Belanja Bantuan Keuangan	393.904.102.900	357.405.623.957	357.405.623.957

Sumber: Bappeda dan BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2026

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung pada Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan karena:

a. Menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah;
b. Menyesuakan program prioritas Nasional dan Provinsi; dan

c. Penyesuaian belanja pada kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Alokasi Khusus berdasarkan penetapan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3.2.2.1. Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Persentase belanja operasi terhadap belanja daerah Kabupaten Temanggung RKPD tahun 2026, APBD Tahun 2026, dan proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2026 secara lengkap terinci pada tabel berikut:

Tabel 3. 11
Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Uraian	RKPD 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026
Belanja Operasi	1.668.425.609.077	1.474.144.588.475	1.474.144.588.475
Belanja Daerah	2.330.929.130.615	2.103.835.918.712	2.103.835.918.712
Persentase	71,58 %	70,07 %	70,07 %

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2026

Proporsi belanja operasional Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah pada Perubahan RKPD 2026 diproyeksi sebesar 70,07%.

3.2.2.2. Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

Tabel 3. 12
Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Uraian	RKPD 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026
Belanja Modal	253.886.824.638	256.010.450.790	256.010.450.790
Belanja Daerah	2.330.929.130.615	2.103.835.918.712	2.103.835.918.712
Persentase	10,89 %	12,17 %	12,17 %

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2026

Proporsi belanja modal Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah pada Perubahan RKPD 2026 diproyeksi sebesar 12,17%

3.2.2.3. Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Tabel 3. 13
Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Uraian	RKPD 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026
Belanja Transfer	407.616.696.900	372.482.540.447	372.482.540.447
Belanja Daerah	2.330.929.130.615	2.103.835.918.712	2.103.835.918.712
Persentase	17,49 %	17,70 %	17,70 %

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2026

Proporsi belanja transfer Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah mencapai rata- rata sebesar 17,70%.

3.2.2.4. Persentase Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3. 14
Persentase Belanja Tidak Terduga terhadap Belanja Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Uraian	RKPD 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.198.339.000	1.198.339.000
Belanja Daerah	2.330.929.130.615	2.103.835.918.712	2.103.835.918.712
Persentase	0,04 %	0,06 %	0,06 %

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2026

Proporsi belanja tidak terduga Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah Perubahan RKPD 2026 diproyeksikan sebesar 0,06%.

3.1.3. Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus adalah manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan.

3.2.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah. penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada Perubahan RKPD tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan Tahun Anggaran berkenaan adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
b) Penerimaan pinjaman daerah dilakukan manakala terjadi defisit anggaran, sedangkan SiLPA dan pencairan dana cadangan tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka akan dicukupi dengan penerimaan pinjaman daerah. Pinjaman ini dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, maupun dari pihak ketiga.

c) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
d) Penerimaan Pembiayaan ini dapat berupa penerimaan kembali atas investasi non permanen dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi.

3.2.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Pembentukan Dana Cadangan
   Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 tidak direncanakan pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan.
b. Penyertaan modal pemerintah daerah;
   Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Namun pada Perubahan RKPD Tahun 2026 tidak direncanakan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pemerintah daerah.
c. Pembayaran pokok hutang;
   Pengeluaran pembiayaan guna pembayaran pokok hutang pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah. pada Perubahan RKPD Tahun 2026 tidak direncanakan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok hutang.
d. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Pengeluaran Pembiayaan berupa pengeluaran perhitungan pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

Tabel 3. 15
Pembiayaan Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026

URAIAN	TAHUN ANGGARAN		
	RKPD 2026	APBD 2026	P-RKPD 2026
PEMBIAYAAN DAERAH	**307.683.363.278,50**	**207.700.000.000**	**207.700.000.000**
1. Penerimaan Pembiayaan	**307.683.363.278,50**	**207.700.000.000**	**207.700.000.000**
a. SiLPA	177.683.363.278,50	77.700.000.000	77.700.000.000
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		-	-
c. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		-	-
d. Pencairan Dana Cadangan	130.000.000.000,00	130.000.000.000	130.000.000.000
2. Pengeluaran Pembiayaan	**-**	**-**	**-**
a. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
b. Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
c. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	**-**	**-**	**-**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2026.

Berdasarkan tabel 3.15 dapat dilihat bahwa Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Perubahan RKPD Tahun 2026 memproyeksikan besaran SiLPA yang masih sama dengan penetapan APBD 2026 yaitu sebesar Rp.207.700.000.000,00.

Informasi dan data sebagai suatu sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah tertuang dan telah dilaksanakan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Tabel 3. 16
Kerangka Pendanaan Kabupaten Temanggung
Perubahan RKPD Tahun 2026

URAIAN	RKPD 2026	APBD 2026	P RKPD 2026
PENDAPATAN DAERAH	**1.942.885.528.728**	**1.883.601.918.712**	**1.883.601.918.712**
1. Pendapatan Asli Daerah	**409.932.332.351**	**416.593.288.775**	**416.593.288.775**
a. Pajak Daerah	138.418.634.896	139.968.634.896	139.968.634.896
b. Retribusi Daerah	239.424.185.891	204.605.772.815	204.605.772.815
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	21.838.440.564	22.685.506.988	22.685.506.988
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10.251.071.000	49.333.374.076	49.333.374.076

URAIAN	RKPD 2026	APBD 2026	P RKPD 2026
2. Pendapatan Transfer	**1.532.953.196.377**	**1.479.542.629.937**	**1.479.542.629.937**
a. Transfer Pemerintah Pusat	**1.451.638.866.440**	**1.385.694.300.000**	**1.385.694.300.000**
1) Dana Perimbangan	-	-	-
a) Dana Transfer Umum-DBH	-	-	-
b) Dana Transfer Umum-DAU	-	-	-
c)Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	-	-	-
d) Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	-	-	-
2) Insentif Fiskal	-	-	-
3) Dana Desa	238.898.620.000	205.149.783.000	205.149.783.000
3) Dana Bagi Hasil	80.200.387.000	34.918.875.000	34.918.875.000
4) Dana Alokasi Umum	789.563.477.000	833.762.700.000	833.762.700.000
5) Dana Alokasi Khusus	342.976.382.440	311.862.942.000	311.862.942.000
b. Transfer antar Daerah	**81.314.329.937**	**93.848.329.937**	**93.848.329.937**
1) Pendapatan Bagi Hasil	81.314.329.937	81.314.329.937	81.314.329.937
2) Bantuan Keuangan	-	12.534.000.000	12.534.000.000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-
a. Hibah	-	-	-
b. Dana Darurat	-	-	-
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
BELANJA DAERAH	**2.330.929.130.615**	**2.103.835.918.712**	**2.103.835.918.712**
1. Belanja Operasi	**1.668.425.609.077**	**1.474.144.588.475**	**1.474.144.588.475**
a. Belanja Pegawai	1.032.782.297.058	863.464.894.628	863.464.894.628
b. Belanja Barang dan Jasa	471.290.491.319	516.999.013.347	516.999.013.347
c. Belanja Bunga	-	-	-
d. Belanja Subsidi	-	-	-
e. Belanja Hibah	158.201.189.700	87.837.549.500	87.837.549.500
f. Belanja Bantuan Sosial	6.151.631.000	5.843.131.000	5.843.131.000
2. Belanja Modal	**253.886.824.638**	**256.010.450.790**	**256.010.450.790**
a. Belanja Tanah	160.000.000	-	-
b. Belanja Peralatan dan Mesin	41.013.566.238	20.828.012.033	20.828.012.033
c. Belanja Bangunan dan Gedung	188.920.400.400	182.404.293.554	182.404.293.554
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.792.858.000	45.509.170.000	45.509.170.000
e. Belanja modal aset tetap lainnya	-	7.268.975.203	7.268.975.203
f. Belanja modal aset lainnya	-	-	-
3. Belanja Tidak Terduga	**1.000.000.000**	**1.198.339.000**	**1.198.339.000**
4. Belanja Transfer	**407.616.696.900**	**372.482.540.447**	**372.482.540.447**

URAIAN	RKPD 2026	APBD 2026	P RKPD 2026
a. Belanja Bagi Hasil	13.712.594.000	15.076.916.490	15.076.916.490
b. Belanja Bantuan Keuangan	393.904.102.900	357.405.623.957	357.405.623.957
PEMBIAYAAN DAERAH	**307.683.363.278,5**	**207.700.000.000**	**207.700.000.000**
1. Penerimaan Pembiayaan	**307.683.363.278,5**	**207.700.000.000**	**207.700.000.000**
a. SiLPA	177.683.363.278,5	77.700.000.000	77.700.000.000
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-
c. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
d. Pencairan Dana Cadangan	130.000.000.000	130.000.000.000	130.000.000.000
2. Pengeluaran Pembiayaan	**-**	**-**	**-**
a. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
b. Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
c. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	**307.683.363.278,5**	**207.700.000.000**	**207.700.000.000**

3.3. Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan prestasi yang bagus karena memperoleh WTP sebanyak 15 kali pada tahun 2012-2026.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. VISI DAN MISI

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah. Visi dan misi ini telah disampaikan dalam masa kampanye yang kemudian menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung. Visi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah:

Temanggung untuk Semua

(Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman)

Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sejahtera	:	Masyarakat yang sehat, terpelajar dan berkecukupan
Berkelanjutan	:	Pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan tidak meningkatkan ketimpangan sosial
Mudah	:	Kemudahan infrastruktur transportasi, pelayanan administrasi publik, dan ketersediaan akses infrastruktur digital
Inklusif	:	Komitmen terhadap inklusivitas dan kesetaraan dalam semua upaya pembangunan
Aman	:	Terpenuhinya rasa aman bagi masyarakat untuk tinggal dan berkegiatan

Visi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 diwujudkan melalui 5 (lima) misi. Misi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan hal mendasar bagi pembangunan daerah, tidak terkecuali Kabupaten Temanggung. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi tetapi juga

menjamin keadilan sosial dengan menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan layanan dan peluang penting. Selain itu, perbaikan konektivitas infrastruktur juga akan meningkatkan akses masyarakat pada layanan pendidikan dan layanan kesehatan, meningkatkan pariwisata, dan meningkatkan aktivitas ekonomi warga. Selain itu, konektivitas juga terkait dengan penyediaan dan perluasan infrastruktur digital, untuk memastikan semua masyarakat, terutama di daerah pedesaan, memiliki akses dalam mendapat informasi, layanan, serta mengembangkan peluang baru dari ekonomi digital.

2. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil

Memprioritaskan diversifikasi ekonomi dan peningkatan mata pencaharian di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk menciptakan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini akan mengurangi tingkat ketergantungan pada satu sektor, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan menerapkan diversifikasi ekonomi, Temanggung dapat membangun masa depan yang lebih seimbang dan sejahtera bagi seluruh penduduknya, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dengan mendorong diversifikasi ekonomi, mendukung usaha kecil, dan memberikan pelatihan keterampilan baru, memastikan peluang kerja yang stabil dan bervariasi bagi semua orang.

3. Pemberdayaan melalui Pendidikan dan Kesehatan

Memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mendukung diversifikasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, mendorong kelestarian lingkungan, memperkuat tata kelola, dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Dengan berinvestasi pada pendidikan, keterampilan, dan kemampuan masyarakatnya, Temanggung dapat membangun masyarakat yang tangguh, dinamis, dan sejahtera serta mampu menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Berikutnya, pemerintah daerah wajib memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Temanggung agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

4. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan

Mengutamakan kelestarian lingkungan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, dan memenuhi tujuan keberlanjutan nasional dan global. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan, Kabupaten Temanggung dapat melindungi dan memulihkan lingkungan, menciptakan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan sehat serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan.

5. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif

Memprioritaskan tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan kelembagaan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memfasilitasi pembangunan yang efektif dan inklusif, memperkuat kinerja perekonomian, memastikan supremasi hukum, mendorong kohesi sosial, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan efisiensi kelembagaan, dan mendorong inovasi dan daya tanggap. Pada era kemajuan teknologi informasi saat ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan partisipasi masyarakat melalui media sosial untuk memberikan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan penilaian atas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan berinvestasi pada lembaga-lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel, Kabupaten Temanggung dapat menciptakan kerangka tata kelola yang mendukung pembangunan berkelanjutan, memberdayakan warganya, dan menjamin masa depan yang sejahtera dan stabil bagi semua orang.

Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya telah dilaksanakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan ditingkat nasional, provinsi maupun daerah. Sinkronisasi Visi dan Misi Kabupaten Temanggung dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah Nasional dan Provinsi Tahun 2025-2029 terdapat pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1
Sinkronisasi Visi dan Misi RPJP/RPJM Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

	NASIONAL		PROVINSI		DAERAH	
	RPJP Nasional 2025-2045	**RPJM Nasional 2025-2029**	**RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045**	**RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029**	**RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045**	**RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029**
Visi	Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan	Terwujudnya Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang Maju, Berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045	Kabupaten Temanggung yang Berbudaya, Maju dan Sejahtera pada Tahun 2045	TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman)
Misi	1. Transformasi Sosial	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	1. Transformasi Sosial	1. Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif, dan berwawasan global	1. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya	1. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas
	2. Transformasi Ekonomi	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	2. Transformasi Ekonomi	2. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri, dan berkelanjutan	2. Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas	2. Diversifikasi perekonomian untuk penghidupan yang stabil
	3. Transformasi Tata Kelola	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	3. Transformasi Tata Kelola	3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas	3. Mewujudkan lingkungan yang memiliki daya dukung memadai, berketahanan dan berkelanjutan	3. Pemberdayaan melalui pendidikan dan kesehatan
	4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas	4. Mewujudukan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui	4. Mewujudkan perekonomian yang produktif, adaptif dan berdaya saing	4. Mempromosikan kelestarian lingkungan

	NASIONAL		PROVINSI		DAERAH	
	RPJP Nasional 2025-2045	**RPJM Nasional 2025-2029**	**RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045**	**RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029**	**RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045**	**RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029**
		kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Ekonomi Makro Daerah	perencanaan tata ruang yang responsif		
	5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	5. Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	5. Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan	5. Mengembangkan pemanfaatan kemajuan teknologi digital dan peningkatan konektivitas wilayah	5. Menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif
	6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	6. Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan	6. Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta mengembangkan pembiayaan pembagunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.	6. Mewujudkan masyarakat sejahtera	
	7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkobo, judi dan penyelundupan	7. Sarana Dan Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan			
	8. Kesinambungan Pembangunan	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	8. Kesinambungan Pembangunan			

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

4.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SERTA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Perumusan **tujuan** pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, yaitu **Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman.** Guna mengetahui pencapaian tujuan pembangunan daerah digunakan indikator kinerja yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan sebagai keberhasilan masyarakat sejahtera, indek kepuasan masyarakat sebagai keberhasilan kelestarian lingkungan, keberhasilan kemudahan akses infrastruktur, pelayanan publik, partisipasi, kesetaraan dan rasa aman.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ditetapkan **sasaran** pembangunan daerah yaitu:

1. **Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan**

   Dalam rangka menciptakan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan dengan mengedepankan peningkatan produktivitas sektor PDRB, perwujudan stabilitas ekonomi daerah dan perwujudan ketahanan pangan. Selain itu juga menciptakan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan sehat serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan dengan mengedepankan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan (pendidikan, kesehatan, dan jaminan kesehatan), penurunan kemiskinan dan kesenjangan, peningkatan peran keluarga dalam pendidikan budi pekerti dan keagamaan. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator tingkat pengangguran terbuka, PDRB perkapita dan indeks pembangunan manusia.

2. **Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan**

   Dalam rangka melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau,

menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, meningkatkan kesehatan masyarakat, keberlanjutan pembangunan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berketahanan iklim, dan penurunan resiko bencana. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup.

3. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta menjamin keadilan sosial dengan mengedepankan pemerataan kualitas infrastruktur di perkotaan, perdesaan dan kawasan pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyelenggaraan konektivitas wilayah serta penataan ruang kewilayahan yang berkualitas. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing. Selain itu juga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan peningkatan reformasi birokrasi, perwujudan kohesi sosial, peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan peningkatan profesionalitas ASN. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing, indeks reformasi birokrasi dan indeks integritas nasional.

4. Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi maka dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, selain itu juga pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, serta pemenuhan hak anak. Indeks gini memperlihatkan ketimpangan kesejahteraan masyarakat dimana pembangunan yang berhasil bisa dikatakan apabila sebagian besar masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan secara merata atau ketimpangan minimal. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks pembangunan gender dan indeks gini.

5. Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya

Kondisi dimana masyarakat tanpa rasa takut atau khawatir dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Perlindungan rasa aman melibatkan berbagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindakan kriminal, yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks harmoni.

Berdasarkan penjelasan masing-masing tujuan dan sasaran, maka disajikan keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah diukur dengan indikator tujuan dan sasaran, dimana untuk target indikator kinerja RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 mempertimbangkan proyeksi target dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 untuk tahun 2026 yang secara rinci dijabarkan pada tabel 4.2:

Tabel 4. 2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2026
Visi: TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman) Misi: 1. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas 2. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang yang Stabil 3. Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan 4. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan 5. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif	Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,10 - 5,50
			Tingkat Kemiskinan	%	7,90-7,85
			Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	87,56
		1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	PDRB Perkapita (Rupiah)	juta rupiah	39,31
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,20 - 2,00
			Indeks Pembangunan Manusia	angka	73,3
		2. Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	75,5
		3. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	%	73,8
			Indeks Integritas Nasional	angka	77,72
			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	86,23
		4. Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini	angka	0,370 – 0,360
			Indeks Pembangunan Gender	angka	97,13
		5. Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Indeks Harmoni	angka	6,79

Sumber: RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Penetapan Target Indikator Makro Pembangunan pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Adapun penyelarasan target indikator makro pembangunan pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 3
Kesesuaian Penetapan Target Indikator Makro Pembangunan pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026

NO	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET KABUPATEN/KOTA SESUAI PERUBAHAN RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00 - 6,00	5,00 - 6,00	5,10-5,50	5,10-5,50
2	PDRB Per Kapita (Juta)	52,00 - 55,70	52,00 - 55,70	39,31	39,31
3	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	8,2	8,2	1,61	1,61
4	Tingkat Kemiskinan (%)	8,70-8,53	8,70-8,53	7,85-7,90	7,85-7,90
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,71 – 4,27	4,71 – 4,27	2,20-2,00	2,20-2,00
6	Rasio Gini	0,351 - 0,361	0,351 - 0,361	0,370-0,360	0,370-0,360
7	Indeks Modal Manusia *)	0,62	0,62	73,3	73,3
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	5,32	5,32	129.065,77	129.065,77
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	75,73	75,73	75,5	75,5

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029.

Penetapan Indikator Utama Pembangunan (IUP) adalah sebagai alat ukur pencapaian kinerja pembangunan jangka panjang daerah, yang ditetapkan selaras dengan ssaran pokok dan arah pembangunan. Penetapan IUP kabupaten/kota merujuk pada indikator hasil penyelarasan dengan IUP RPJPD Provinsi Jawa Tengah untuk kabupaten/kota yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan analisis masing-masing kabupaten/kota dalam rangka mengukur pencapaian kinerja pembangunan daerah. Persandingan Keselarasan IUP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. 4
Persandingan Keselarasan IUP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Agenda / Misi Pembangunan	Arah Pembangunan		Indikator			Target Tahun 2026
				IUP RKP Tahun 2027	IUP RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027	IUP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027	RKPD Kabupaten Temanggung
I	**Transformasi Sosial**	**1**	**Kesehatan untuk Semua**	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	4. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	76,45
				2. Kesehatan Ibu dan anak:	2. Kesehatan Ibu dan Anak		
				a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	5. Jumlah kematian ibu (kasus)	5
				b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	6. Prevalensi Stunting (%)	23,05
				3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	3. Insidensi Tuberkulosis		
					a) Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	7. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	74
					b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	8. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	87
				4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	9. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	95,75
		2	**Pendidikan Berkualitas yang Merata**	5. Hasil Pembelajaran	5. Hasil Pembelajaran		
				a) Rata-rata nilai PISA	a) Persentase kabupatan/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	10. Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Nasional (Seluruh Jenjang) (%) :	
				a-i Membaca	i) literasi membaca (%)	Literasi SD/Sederajat (%)	77,79
				a-ii Matematika	ii) numerasi (%)	Literasi SMP/Sederajat (%)	77,51
				a-iii Sains		Numerasi SD/Sederajat (%)	71,67
						Numerasi SMP/Sederajat (%)	72,84
				b) Rata-rata nilai asesmen nasional	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	15. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (%)	100

No	Agenda / Misi Pembangunan	Arah Pembangunan		Indikator			Target Tahun 2026
				IUP RKP Tahun 2027	IUP RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027	IUP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027	RKPD Kabupaten Temanggung
				b-i Literasi Membaca	i) literasi membaca (%)	19. Tingkat pemanfaatan perpustakaan (angka)	0,15
				b-ii Numerasi	ii) numerasi (%)		
				c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	c) Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 tahun (tahun)	8,04
				d) Harapan Lama Sekolah	d) Harapan Lama Sekolah	12. Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,16
						14. Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun (%)	95,41
				6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (%)	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	13. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	6,27
				7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)		
		3	**Perlindungan Sosial yang Adaptif**	8. Tingkat Kemiskinan (%)	8. Tingkat Kemiskinan (%)	1. Tingkat Kemiskinan (%)	7.85-7.90
						56. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (%)	21,22
				9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	38. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	60,32
				10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	-	Tidak ada
II	**Transformasi Ekonomi**	**4**	**IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**	11. Produktivitas Industri dan Pertanian	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	23. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	27,44
				a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)			
				b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)			
				12) Pengembangan Pariwisata	12. Pengembangan Pariwisata		

No	Agenda / Misi Pembangunan	Arah Pembangunan		Indikator			Target Tahun 2026
				IUP RKP Tahun 2027	IUP RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027	IUP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027	RKPD Kabupaten Temanggung
				a) Rasio PDB Pariwisata (%)	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum (%)	24. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,91
				b) Devisa Pariwisata (miliar USD)	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang)	25. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)	90
				13. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)	18. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (%)	49,35
				14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN	14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
				a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	a) i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi		
					ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi		
				b) Rasio Kewirausahaan (%)	b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	26. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,15
				c) Rasio Volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	27. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)	1,88
				d) Return on Asset (ROA) BUMN (%)	d) Return on Asset (ROA) BUMD (%)	28. Return on Asset (RoA) BUMD (%)	4,29
				15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik	15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
				a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	36. Tingkat Pengangguran Terbuka (angka)	2.20 - 2.00
				b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)		
				16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	37. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	69,59
				17. Tingkat Penguasaan IPTEK	17. Tingkat Penguasaan IPTEK		
				a) Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (% PDB)	- Kapabilitas Inovasi (Angka)	34. Kapabilitas Inovasi (Angka)	2,65
				b) Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)			
		5	**Penerapan Ekonomi Hijau**	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		

No	Agenda / Misi Pembangunan	Arah Pembangunan		Indikator			Target Tahun 2026
				IUP RKP Tahun 2027	IUP RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027	IUP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027	RKPD Kabupaten Temanggung
				a) Indeks Ekonomi Hijau	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Angka)		
				b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)		
		6	**Transformasi Digital**	19. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Angka)	39. Persentase rumah tangga dengan akses internet (%)	91,5
		7	**Integrasi Ekonomi Domestik & Global**	20. Biaya Logistik (% PDB)	20. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi (Angka)	29. Disparitas Harga (%)	±10
				21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	30. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	17,87
				22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)		
		8	**Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**	23. Kota dan desa maju, inklusif, dan berkelanjutan	23. Kota dan desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		
				a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	55. PDRB Per Kapita (juta rupiah)	39,31
				b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	40. Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak (%)	96,43
				c) Persentase Desa Mandiri (%)	c) Persentase Desa Mandiri (%)	35. Persentase desa mandiri (%)	41,35
					d) Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap (%)	41. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	89,85
					e) Indeks Pelayanan Transportasi (Angka)	42. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (%)	42,03
					f) Persentase keterwujudan penataan ruang (%)		

No	Agenda / Misi Pembangunan	Arah Pembangunan		Indikator			Target Tahun 2026
				IUP RKP Tahun 2027	IUP RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027	IUP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027	RKPD Kabupaten Temanggung
III	**Transformasi Tata Kelola**	**9**	**Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**	24. Indeks Materi Hukum	24. Indeks Reformasi Hukum (Angka)	51. Indeks Reformasi Hukum (Angka)	97,08
				25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Angka)	52. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (nilai)	3,75
				26. Indeks Pelayanan Publik	26. Indeks Pelayanan Publik	53. Indeks Pelayanan Publik (angka)	3,8
						50. Indeks Reformasi Birokrasi (angka)	86,23
				27. Anti Korupsi	27. Anti Korupsi		
				a) Indeks Integritas Nasional	a) Indeks Integritas Nasional	54. Indeks Integritas Nasional (angka)	77,72
				b) Indeks Persepsi Korupsi			
IV	**Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia**	**10**	**Hukum Berkeadilan dan Keamanan Nasional**	28. Indeks Pembangunan Hukum	28. Indeks Pembangunan Hukum - Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (Angka)		
				29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)		
		11	**Tangguh, dan Demokrasi Substansial**	30. Indeks Demokrasi Indonesia	30. Indeks Demokrasi Indonesia		
		12	**Stabilitas Ekonomi Makro**	31. Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,48
				32. Tingkat Inflasi (%)	32. Tingkat Inflasi (%)	Tingkat Inflasi (%)	1,50 - 2,50
				33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
				a) Aset Perbankan/PDB (%)	a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	32. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%)	2,76
				b) Aset Dana Pensiun/PDB (%)	b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)		
				c) Aset Asuransi /PDB (%)	c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)		
				d) Kapitalisasi Pasar Modal /PDB (%)	d) Total Kredit/PDRB (%)	33. Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%)	2,29

No	Agenda / Misi Pembangunan	Arah Pembangunan		Indikator			Target Tahun 2026
				IUP RKP Tahun 2027	IUP RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027	IUP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027	RKPD Kabupaten Temanggung
				e) Total Kredit /PDB (%)			
				34. Inklusi Keuangan (%)	34. Inklusi Keuangan (%)		
		13	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	35. Asia Power Index (Diplomatic Influence)	35. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (Kategori)		
				36. Asia Power Index (Military Capability)	36. Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah (Kategori)		
V	**Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**	**14**	**Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	16. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda(WBTB) yang dilestarikan (%)	20,7
						17. Jumlah pengunjung tempat bersejarah (orang)	29,706
				38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	20. Jumlah kejadian konflik SARA (kejadian)	8
		15	**Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Angka)	21. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (angka)	64,79
				40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	40. Indeks Ketimpangan Gender (Angka)	22. Indeks Ketimpangan Gender (angka)	0,201
		15	**Lingkungan Hidup Berkualitas**	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka)		
				42. Kualitas Lingkungan Hidup	42. Kualitas Lingkungan Hidup		
				a.i. Indeks Kualitas Udara (IKU)	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Angka)	46. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (angka)	75,5
				a.ii. Indeks Kualitas Air (IKA)	b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	43. Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	13,06
				a.iii. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	c) Pengelolaan Sampah		
				a.iv. Indeks Kualitas Air Laur (IKAL)	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	47. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah (%)	34,14
				b) Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT)		

No	Agenda / Misi Pembangunan	Arah Pembangunan		Indikator			Target Tahun 2026
				IUP RKP Tahun 2027	IUP RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027	IUP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027	RKPD Kabupaten Temanggung
				c) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)			
		16	**Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan**	43. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian menuju Kedaulatan Pangan	43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
				i. Ketahanan energi	a) Ketahanan Energi		
				- Indeks Ketahanan Energi	- Konsumsi Listrik (kWh)		
					- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar)		
					b) Kemandirian pangan		
				ii. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	- Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	9,29
					- Indeks Ketahanan Pangan (Angka)	3. Indeks Ketahanan Pangan (%)	79,63
				iii. Ketahanan air	c) Ketahanan Air		
				- Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)		
				- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	- Akses rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	44. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	31,13
					- Persentase Kondisi Baik Infrastruktur Tampungan Air Kewenangan Provinsi (Angka)		
					- Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi (%)	45. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (angka)	59,26
					- Persentasi Sungai Kondisi baik Kewenangan Provinsi (%)		
		17	**Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**	44. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	44. Indeks Risiko Bencana (Angka)	48. Indeks Risiko Bencana (angka)	101,48
				45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	45. Persentase Penurunan Emisi GRK	49. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (TonCO2eq)	1.129.065,77
				a. Kumulatif	a. Kumulatif (%)		
				b. Tahunan	b. Tahunan (%)		

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun, 2026

4.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi, maka dirumuskan penyesuaian strategi dan arah kebijakan pada tiap tahun dalam periode tersebut. Strategi untuk mencapai misi dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan misi **Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas,** adalah:
   a. Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan
   b. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah
2. Strategi untuk mewujudkan misi **Diversifikasi Perekonomian Untuk Penghidupan yang Stabil,** adalah:
   a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor perekonomian
   b. Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor perekonomian
3. Strategi untuk mewujudkan misi **Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan,** adalah:
   a. Peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan
   b. Peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan dan jaminan kesehatan
   c. Peningkatan pembangunan literasi masyarakat
   d. Peningkatan daya saing pemuda dan olah raga
   e. Peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin
   f. Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin
   g. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin
   h. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak
   i. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
   j. Peningkatan kualitas keluarga (pendidikan, agama dan keluarga berencana)
4. Strategi untuk mewujudkan misi **Mempromosikan Kelestarian Lingkungan,** adalah meningkatkan ketahanan lingkungan hidup terhadap iklim dan bencana.
5. Strategi untuk mewujudkan misi **Menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif**, adalah:
   a. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi
   b. Peningkatan kerukunan hidup bermasyarakat

c. Peningkatan keterbukaan informasi publik
d. Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan publik
e. Peningkatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi
f. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik
g. Peningkatan pendapatan asli daerah
h. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
i. Peningkatan kebijakan dan manajemen ASN
j. Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah

Sementara itu, arah kebijakan untuk menjabarkan strategi dari masing-masing misi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Visi	Misi		Tujuan dan Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN)	1	Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas	Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman **Sasaran:** 1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan 2. Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	1.1	Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan	1.1.1	penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum	✓	✓	✓	✓	✓
						1.1.2	penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman	✓	✓	✓	✓	✓
						1.1.3	penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	✓		✓		✓

Visi	Misi		Tujuan dan Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
			3. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik 4. Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan 5. Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	1.2	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	1.2.1	penyediaan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	✓				
						1.2.2	Penyediaan akses internet di seluruh wilayah	✓	✓	✓	✓	✓
						1.2.3	pelayanan transportasi yang sesuai standar dan terkoneksi		✓	✓	✓	
	2	Diversifikasi Perekonomian Untuk Penghidupan Yang Stabil		2.1.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor perekonomian	2.1.1	Peningkatan sektor industri dalam pembangunan ekonomi			✓		
						2.1.2	Peningkatan nilai usaha perdagangan			✓		
						2.1.3	Peningkatan kinerja koperasi dan UMKM	✓		✓		

Visi	Misi		Tujuan dan Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
						2.1.4	peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	✓	✓	✓		
						2.1.5	Peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan	✓	✓	✓	✓	
						2.1.6	Pembentukan ekosistem ekonomi syariah		✓			
				2.2.	Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor perekonomian	2.2.1	Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja	✓			✓	
						2.2.2	Tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan	✓		✓		
						2.2.3	Peningkatan produksi perikanan	✓		✓	✓	
						2.2.4	peningkatan pemajuan kebudayaan melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan SDM/lembaga kebudayaan	✓		✓		✓
						2.2.5	Peningkatan investasi	✓	✓	✓		
						2.2.6	Peningkatan jumlah layanan di Mal Pelayanan Publik (Mal Pelayanan Perizinan)		✓		✓	
	3	Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan		3.1.	Peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan	3.1.1	Peningkatan mutu layanan pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓
						3.1.2	Peningkatan pemenuhan wajib	✓	✓	✓	✓	✓

Visi	Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
					belajar 13 tahun melalui peningkatan pemerataan dan keterjangkauan penyelenggaraan layanan pendidikan utamanya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal					
				3.1.3	Peningkatan capaian SPM bidang pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓
				3.1.4	Penguatan pendidikan karakter, peningkatan kualitas guru, dan pengembangan kurikulum yang berbasis potensi/kearifan lokal	✓	✓	✓	✓	✓
				3.1.5	Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)	✓	✓	✓	✓	✓
				3.1.6	Peningkatan partisipasi pendidikan kesetaraan atau non formal	✓	✓	✓	✓	✓
				3.1.7	Peningkatan koordinasi dengan Kantor Kemenag untuk mendorong peningkatan cakupan	✓	✓	✓	✓	✓

Visi	Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
						literasi serta numerasi siswa pada satuan pendidikan keagamaan					
			3.2.	Peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan dan jaminan Kesehatan	3.2.1	Peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas	✓	✓	✓	✓	✓
					3.2.2	Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan jiwa	✓	✓	✓	✓	✓
					3.2.3	Peningkatan budaya berperilaku hidup sehat	✓	✓	✓	✓	✓
					3.2.4	Penguatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan serta pembiayaan kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓
					3.2.5	Peningkatan kesehatan lingkungan	✓	✓	✓	✓	✓
					3.2.6	Peningkatan kemajuan teknologi kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓
					3.2.7	Peningkatan capaian SPM bidang Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓
			3.3.	Peningkatan pembangunan literasi masyarakat	3.3.1	Peningkatan pemanfaatan perpustakaan		✓			
					3.3.2	Peningkatan minat gemar membaca untuk masyarakat		✓			

Visi	Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
			3.4.	Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga	3.4.1	Peningkatan daya saing dan partisipasi pemuda	✓			✓	
					3.4.2	Pengembangan atlet dan prestasi keolahragaan serta sarana prasarana olahraga	✓			✓	
					3.4.3	Peningkatan pembudayaan olahraga	✓			✓	
			3.5.	Peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin	3.5.1	Peningkatan infrastruktur dasar masyarakat miskin			✓		
					3.5.2	Fasilitasi pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin			✓		
			3.6.	Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin	3.6.1	Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial			✓		
					3.6.2	Penyediaan data yang akurat sebagai dasar penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran			✓		
					3.6.3	Peningkatan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial	✓		✓		
			3.7.	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin	3.7.1	Peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi secara kolaboratif dan multisektor	✓	✓	✓	✓	✓
			3.8.	Peningkatan perlindungan	3.8.1	Peningkatan pemenuhan hak anak		✓		✓	

Visi	Misi		Tujuan dan Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
					perempuan dan anak	3.8.2	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan		✓		✓	
						3.8.3	Peningkatan perlindungan khusus anak		✓		✓	
						3.8.4	Pencegahan perkawinan anak		✓		✓	
				3.9.	Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	3.9.1	Peningkatan pengarusutamaan gender		✓		✓	
						3.9.2	Peningkatan pemberdayaan perempuan	✓		✓		
				3.10.	Peningkatan kualitas keluarga (pendidikan, keagamaan, dan keluarga berencana	3.10.1	Peningkatan kualitas pembangunan keluarga		✓			✓
						3.10.2	Peningkatan pengendalian penduduk		✓			✓
						3.10.3	Peningkatan pembinaan keluarga berencana		✓			✓
						3.10.4	Penguatan pendidikan budi pekerti dan keagamaan		✓			✓
	4	Mempromosikan kelestarian lingkungan		4.1	Meningkatkan ketahanan lingkungan hidup terhadap iklim dan bencana	4.1.1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui integrasi hulu-hilir sistem pengelolaan persampahan, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta pengendalian pencemaran yang mendukung upaya	✓	✓	✓		

Visi	Misi		Tujuan dan Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
							adaptasi dan mitigasi perubahan iklim					
						4.1.2	Peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi bencana		✓		✓	✓
	5	Menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif		5.1.	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	5.1.1	Peningkatan kualitas kebijakan	✓				
						5.1.2	Peningkatan pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah	✓				
						5.1.3	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	✓				
						5.1.4	Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan melalui digitalisasi kearsipan				✓	
						5.1.5	Peningkatan tata kelola Pemerintah Desa	✓				
				5.2.	Peningkatan kerukunan hidup bermasyarakat	5.2.1	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	✓		✓		
						5.2.2	Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan	✓		✓		
						5.2.3	Peningkatan kerukunan umat beragama	✓		✓		
						5.2.4	Pemberdayaan organisasi masyarakat	✓		✓		

Visi	Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
			5.3.	Peningkatan keterbukaan informasi publik	5.3.1	Peningkatan layanan pengaduan dan konsultasi	✓			✓	
					5.3.2	Peningkatan tata kelola dan layanan informasi public	✓			✓	
			5.4.	Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan publik	5.4.1	Peningkatan inovasi yang berdampak pada pelayanan publik	✓		✓		
					5.4.2	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik	✓		✓		
			5.5.	Peningkatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi	5.5.1	Peningkatan infrastruktur pendukung TIK	✓			✓	
					5.5.2	Peningkatan ketersediaan jaringan internet ke seluruh rumah tangga	✓			✓	
					5.5.3	Peningkatan keamanan teknologi komunikasi dan informasi	✓			✓	
			5.6.	Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik	5.6.1	Peningkatan digitalisasi pelayanan publik	✓			✓	
			5.7.	Peningkatan pendapatan asli daerah	5.7.1	Peningkatan pengelolaan pajak yang akuntabel	✓	✓	✓		
					5.7.	Pemenuhan target pajak	✓	✓	✓		
			5.8.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	5.8.1	Peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah	✓	✓	✓		
					5.8.2	Peningkatan kualitas perbendaharaan akuntansi dan pelaporan	✓	✓	✓		

Visi	Misi		Tujuan dan Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
				5.9.	Peningkatan kebijakan dan manajemen ASN	5.9.1	Peningkatan pelayanaan kepegawaian				✓	
						5.9.2	Peningkatan kualitas ASN				✓	
						5.9.3	Peningkatan ketepatan penempatan ASN				✓	
				5.10	Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah	5.10.1	Penguatan kebijakan yang mendukung budaya riset dan inovasi daerah	✓			✓	
						5.10.2	Peningkatan kemitraan riset dan inovasi antar lembaga	✓			✓	
						5.10.3	Peningkatan sumber daya pendukung riset dan inovasi daerah	✓			✓	

Sumber : RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dirumuskan pentahapan RPJMD, dimana pada tahun 2026 yaitu **Penguatan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan**. Penguatan reformasi birokrasi dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik dan kepuasan masyarakat. Reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh baik aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pelayanan publik. Penguatan pertumbuhan ekonomi dilakukan pada tahun pertama karena sangat penting dan memberikan dampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua dalam kerangka kerja pembangunan jangka panjang daerah. Untuk itu perlu penyelarasan kebijakan antara RKPD tahun 2026 dengan RPJPD Tahun 2025-2045. Arah kebijakan jangka panjang daerah yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. 6
Keterkaitan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045	Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026
Penguatan nilai budaya di dalam aktivitas kehidupan masyarakat	Penguatan reformasi birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan
Pemerataan dan penguatan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung pelayanan publik	
Penguatan kualitas pelayanan lingkungan, mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim	
Penguatan produktivitas dan skala ekonomi untuk seluruh sektor ekonomi	
Penguatan akses dan konektivitas wilayah untuk menunjang sistem keterkaitan wilayah	
Penguatan dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial	

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.3. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026

4.3.1.Tema Pembangunan Tahun 2026

Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 bersumber dari tema pembangunan/arah kebijakan pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu “Penguatan reformasi birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan”. Adapun keselarasan antara tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan RKP Nasional Tahun 2026 tercantum pada tabel.

Tabel 4. 7
Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Tema RKP Nasional Tahun 2026	Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026
Kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif	Penguatan perekonomian daerah, kualitas sumber daya manusia, ketahanan sumber daya alam, dan lingkungan hidup serta tata kelola pemerintahan yang dinamis	Penguatan reformasi birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

Berdasarkan tabel 4.5, tema pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 selaras dengan tema pembangunan baik RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. **Tema RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2026** bersumber dari arah kebijakan pembangunan RPJMD 2025-2029 yaitu “**Penguatan reformasi birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan**”.

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dilakukan dengan menerapkan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

Gambar 4. 1
Konsep THIS dalam Kebijakan Pembangunan Kabupaten Temanggung

Tematik dalam hal ini ditunjukkan dengan proses perumusan prioritas yang memperhatikan tema pembangunan tahun berkenaan. Selanjutnya, penjabaran tema pembangunan menjadi program dan kegiatan pembangunan dalam rangkaian proses perencanaan serta penyelarasan dengan penganggaran menunjukkan penerapan pendekatan Holistik dalam merumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 melibatkan berbagai pemangku kepentingan meliputi Pemerintah Daerah, Akademisi, Masyarakat, Dunia Usaha serta Media (*pentahelix*) yang menggambarkan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung juga menerapkan pendekatan Integratif. Sedangkan pendekatan Spasial ditunjukkan dengan adanya lokasi program prioritas yang telah ditetapkan secara jelas.

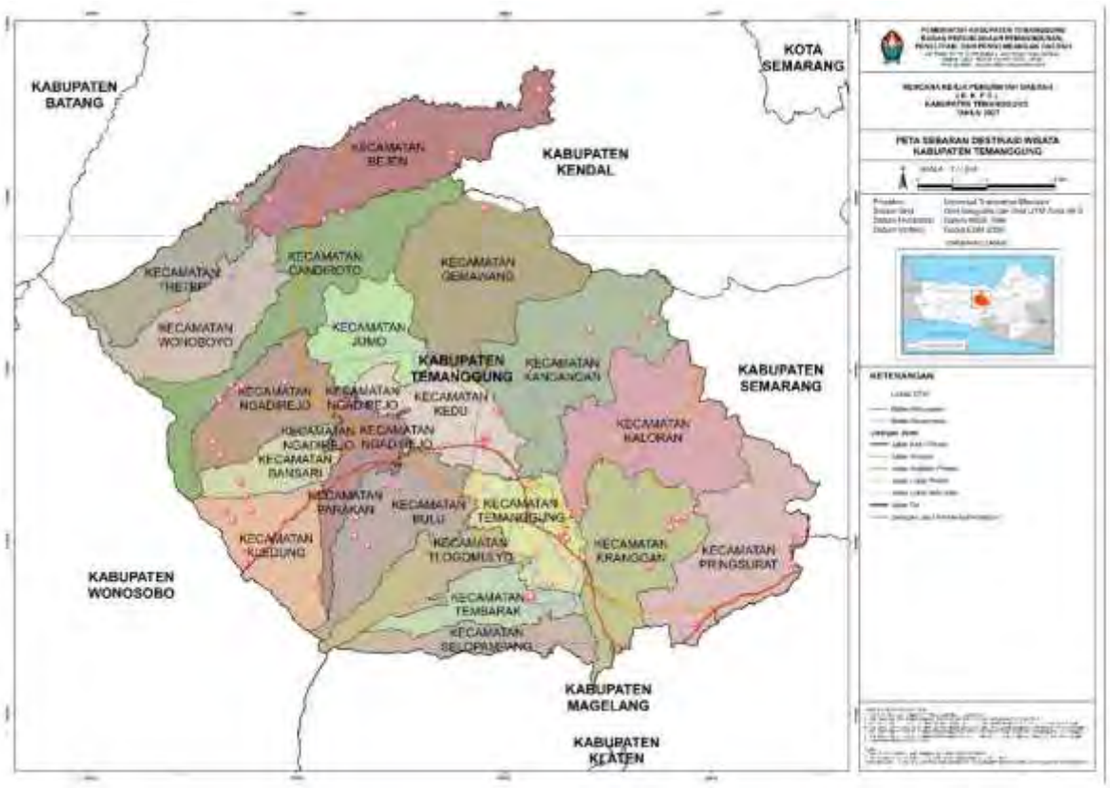

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

Gambar 4. 2
Implementasi Konsep THIS dalam Kebijakan Pembangunan

Oleh karena itu, pembangunan tahun 2026 ditujukan untuk Penguatan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan dengan prioritas dan fokus pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4. 8
Tema/Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2026

No	Tema/Arah Kebijakan	Fokus Pembangunan	Program Daerah	Perangkat Daerah
1	Penguatan Reformasi Birokrasi	Peningkatan kelembagaan sehingga lebih efektif dan akuntabel	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikkan Melalui Pendidikkan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Bakesbangpol
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Setda
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
			Program Pengelolaan Arsip	Dinpusip
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Setwan
		Penyempurnaan prosedur kerja, sistem informasi, dan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan publik	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bapperida
			Program Aplikasi Informatika	Dinkominfo

No	Tema/Arah Kebijakan	Fokus Pembangunan	Program Daerah	Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinkominfo
		Penguatan SDM aparatur negara melalui peningkatan kompetensi, pengembangan karier yang profesional dan berintegritas	Program Kepegawaian Daerah Program	BKPSDM
			Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Program Pencatatan Sipil	Dindukcapil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dindukcapil
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP Damkar
			Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Setda
		Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapperida
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP Damkasr
2	Penguatan Ketahanan Pangan	Diversifikasi Pangan Lokal, melalui pengembangan varietas dan jenis pangan alternatif yang mampu beradaptasi dengan kondisi lokal serta memperluas pasar produk pangan lokal	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPPP
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKPPP
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPPP
		Pengembangan infrastruktur penyimpanan dan distribusi melalui	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP

No	Tema/Arah Kebijakan	Fokus Pembangunan	Program Daerah	Perangkat Daerah
		pembangunan fasilitas penyimpanan, gudang dan sarana transportasi yang memadai untuk menjamin ketersediaan pangan sepanjang tahun	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKPPP
		Menjaga ketersediaan stock pangan dan kestabilan harga bahan pangan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan di masyarakat	Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPPP
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPPP
		Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian pangan, seperti pembentukan kelompok tani pekarangan produktif dan program ketahanan pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	DKPPP

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.3.2.Prioritas Pembangunan

A. Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 terdapat 8 prioritas nasional pembangunan (Asta Cita) dengan uraian sebagai berikut.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

B. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Melahirkan pemerintahan yang *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan perangkat desa
2. Pesantren Obah melalui penambahan dana pengembangan pesantren
3. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim
4. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana
5. Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional
6. Penanggulangan bencana dan keberlanjutan lingkungan melalui Mageri Segoro untuk mengamankan garis Pantai
7. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di kawasan industri
8. Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan
9. Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin
10. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja
11. Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agam dan beasiswa untuk siswa miksin, guru, santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi.

C. Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung

Pembangunan daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 diwujudkan dalam program prioritas sebagai berikut:

1. Penataan garis imajiner, dengan program aksi:
    1) Pembangunan *city walk* Jalan Jalan S. Parman, Jalan R. Suprapto, Jalan M.T. Haryono dan Jenderal Sudirman
    2) Rehabilitasi dan penataan kawasan alun-alun dan pendopo pengayoman
    3) Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan alun-alun
    4) Revitalisasi dan penataan kawasan stadion Bhumi Phala
    5) Revitalisasi Taman Kartini
    6) Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan stadion Bhumi Phala
    7) Pemeliharaan Pasar Kliwon
2. Penataan kapasitas dan kinerja birokrasi, dengan program aksi:
    1) Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi
    2) Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik
    3) Penerapan *merit system* dan *talent poll*
    4) Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi
    5) Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati
    6) Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, Amanah)
    7) Peningkatan kesejahteraan ketua RT dan RW
    8) Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (tata kelola kelurahan)
3. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan, dengan program aksi:
    1) Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perkebunan
    2) Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian
    3) Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk
    4) Regenerasi petani
    5) Penyediaan bibit ternak dan ikan

6) Peningkatan kapasitas petani dan peternak ikan
7) Pembangunan *greenhouse*

4. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan, dengan program aksi:
   1) Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten
   2) Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi
   3) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar pertanian (JUT dan Kereta Gantung)
   4) Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik
   5) Penyediaan air bersih dan sanitasi
   6) Penyediaan rumah layak huni
   7) Pembangunan *citywalk* Parakan (Jalan Diponegoro dan Jalan Brigjen Katamso)
   8) Pembangunan *citywalk* Ngadirejo (Perkotaan Ngadirejo)
5. Optimalisasi pasar daerah, dengan program aksi:
   1) Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif
   2) Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional
6. Penguatan dan pelestarian seni budaya, dengan program aksi:
   1) Pembentukan dewan kesenian di Kecamatan
   2) Pertemuan pegiat seni dan budaya
   3) Penghargaan pada seniman dan budayawan
   4) Pentas seni di ruang publik
   5) Pelaku seni dan budaya lokal go to school
   6) Regulasi dan pemakaian baju adat khas Temanggung
   7) Festival seni dan budaya tahunan Temanggung
   8) Informasi dan promosi pariwisata
   9) Desa wisata seni dan budaya pendukung ekonomi kreatif
   10) Rebranding Temanggung
7. Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dengan program aksi:
   1) Pembentukan Satgas PPA di Kecamatan dan Desa
   2) Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan
   3) Pembentukan desa ramah perempuan dan anak
   4) Pemberdayaan ekonomi perempuan
   5) Penyediaan *hotline/panic button*
8. Pelayanan dasar bidang pendidikan, dengan program aksi:
   1) Akses pendidikan untuk semua warga

2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru
3) Pimpinan daerah sambang sekolah
4) Penguatan database pendidikan
5) Fasilitasi desiminasi informasi terkait pendidikan
6) Fasilitasi usulan Pembangunan gedung SMA/SMK
7) Rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah SD dan SMP
8) Pemberdayaaan PAUD
9) Insentif kepada Guru Keagamaan
10) Penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah
11) Peningkatan literasi membaca melalui perpustakaan daerah

9. Pelayanan dasar bidang kesehatan, dengan program aksi:
   1) Kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan
   2) Peningkatan kualitas layanan kesehatan (Puskesmas)
   3) Pemeriksaan kesehatan gratis
   4) Peningkatan pelayanan posyandu di tingkat desa
   5) Peningkatan kualitas pelayanan RSUD
   6) Pembangunan gedung poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Jamak
   7) Penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas Wonoboyo
10. Pelayanan sosial dan bidang keagamaan, dengan program aksi:
   1) Penataan data program perlindungan sosial
   2) Penyediaan rumah singgah untuk keluarga pasien rujukan rumah sakit di Yogyakarta dan Semarang
   3) Peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dan marjinal
   4) Fasilitasi Penyediaan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat
11. Pelayanan perijinan dan administrasi, dengan program aksi:
   1) Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perijinan di mall pelayanan publik
12. Integrasi data, dengan program aksi:
   1) Penyepakatan protokol *interoperobilitas* data antar perangkat daerah
   2) Sinkronisasi dan integrasi data
13. Pencegahan dan mitigasi bencana alam, dengan program aksi:
   1) Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana
   2) Pembentukan desa tangguh bencana
   3) Peningkatan kapasitas relawan destana

4) Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam
5) Penambahan pos dan SDM untuk respon bencana
6) Penyediaan sumber air untuk penanganan kebencanaan
7) Penyediaan *early warning system*
8) Pencegahan longsor pada ruas jalan kabupaten

14. Digitalisasi dan *smart city*, dengan program aksi:
    1) Digitalisasi dan integrasi layanan digital
    2) Lapor Bupati
    3) Penyediaan dan peningkatan SDM
    4) Peningkatan kapasitas operator layanan digital di tingkat perangkat daerah dan pemerintah desa
    5) Pembuatan *superapps mobile*
    6) Penyediaan infrastruktur jaringan internet di perdesaan
    7) Penyediaan infrastruktur jaringan internet di Ruang publik strategis
15. Pelestarian lingkungan hidup, dengan program aksi:
    1) Perlindungan sumber mata air
    2) Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air
    3) Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat
    4) Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah
    5) Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST
    6) Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas
    7) Aksi bersih lingkungan
    8) Penghijauan di lokasi lahan kritis
    9) Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis
    10) Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis
16. Pembangunan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi, dengan program aksi:
    1) Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan
    2) Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM
    3) Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala
    4) Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi

5) BUMD Sehat

17. Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah, dengan program aksi:
    1) Peningkatan optimalisasi peran kelompok masyarakat dan dunia swasta dengan melibatkan akademisi dalam pembangunan daerah
    2) Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat dunia swasta dan akademisi
18. Pengembangan atlet dan prestasi olahraga, dengan program aksi:
    1) Pemajuan cabang olahraga unggulan
    2) Peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas atlet
    3) Pembinaan tata kelola pengelolaan klub dan penyelenggaraan event olahraga secara profesional
19. Peningkatan kualitas tenaga kerja, dengan program aksi:
    1) Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
    2) Peningkatan hubungan industri
    3) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)

Perumusan prioritas pembangunan/program prioritas daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD Tahun 2026 mempertimbangkan konsistensi/keselarasan/keterkaitan terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis, strategi dan arah kebijakan Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Permasalahan pembangunan Kabupaten Temanggung telah diidentifikasi berdasarkan kaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan isu strategis Kabupaten Temanggung memperhatikan gambaran kondisi daerah dan permasalahan, capaian indikator kinerja serta arah kebijakan. Penyusunan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan isu strategis yang ada.

Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah mulai dilibatkan sejak awal, yaitu adanya penggalian masalah dan isu strategis dalam Murenbang RKPD di kelurahan, kecamatan dan kabupaten dengan menghadirkan masyaarakat secara langsung. Proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung juga memanfaatkan media informasi kreatif berbasis teknologi informasi dan

komunikasi, sehingga desiminasi inofrmasi dan aspirasi masyarakat bisa dilakukan melalui media tersebut. Bentuk media yang digunakan antara lain melalui media sosial, yang menampilkan link materi , link saran masukan dan lain sebagainya melaui aplikasi Lintang Asmara (https://linktr.ee/lintangasmaraBapperidatmg) termasuk aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui link tersebut.

Adapun permasalahan pembangunan/isu strategis telah tertuang pada bab II P-RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Selanjutnya, permasalahan pembangunan tersebut diklasifikasikan kembali menurut masing-masing isu strategis yang ada guna pemetaan konsistensi terhadap prioritas pembangunan, strategi, dan arah kebijakan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 9
Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan/Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Temanggung Tahun 2026

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
1	Penanganan Kemiskinan	• Masih tingginya angka kemiskinan	1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan 2. Pelayanan dasar bidang pendidikan 3. Pelayanan dasar bidang kesehatan	Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan	• Penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum • Penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
				Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	• penyediaan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan • Penyediaan akses internet di seluruh wilayah • pelayanan transportasi yang sesuai standar dan terkoneksi
				Peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin	• Peningkatan infrastruktur dasar masyarakat miskin • Fasilitasi pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin
				Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin	• Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial • Penyediaan data yang akurat sebagai dasar penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran • Peningkatan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial
				Peningkatan pendapatan masyarakat miskin	• Peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi secara kolaboratif dan multisektor
2	Konektivitas dan Aksesibilitas	• Rendahnya kualitas dan pemerataan infrastruktur • Rendahnya pemenuhan akses air siap minum perpipaan • Belum optimalnya kondisi permukaan jalan mantap pada ruas-ruas jalan kewenangan kabupaten • Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur pada urusan pekerjaan umum	1. Penataan garis imajiner 2. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan	• Penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum • Penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
				Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	• Penyediaan akses internet di seluruh wilayah • Pelayanan transportasi yang sesuai standar dan terkoneksi

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas • Rendahnya pemenuhan akses air minum aman bagi rumah tangga • Belum optimalnya penyelesaian layanan perizinan PBG dan SLF • Belum optimalnya penanganan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur jembatan • Belum optimalnya pemenuhan target penetapan rencana detail tata ruang • Rendahnya pemenuhan akses sanitasi aman bagi rumah tangga • Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman • Rendahnya pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi rumah tangga			
3	Ketahanan Pangan	• Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kalori masyarakat • Belum optimalnya ketahanan pangan daerah • Belum terjaminnya stabilitas dan kontinuitas ketersediaan pangan pokok daerah • Belum terjaminnya kualitas konsumsi masyarakat • Masih rendahnya minat dan budaya konsumsi ikan di tingkat keluarga • Belum optimalnya produktivitas padi • Belum optimalnya produktivitas jagung • Belum terpenuhinya kebutuhan sarana alat mesin pertanian pangan utama	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor perekonomian	• Peningkatan produksi pertanisan dan ketahanan pangan • Tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan • Peningkatan produksi perikanan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
4	Diverfisikasi perekonomian untuk penghidupan stabil	• Belum optimalnya peran dan kontribusi sektor koperasi dalam menggerakkan perekonomian daerah • Rendahnya akselerasi penumbuhan wirausaha daerah • Belum bertumbuhnya ekosistem kesenian sebagai bagian dari ekonomi kreatif • Belum optimalnya kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap struktur PDRB daerah • Belum optimalnya pertumbuhan nilai ekspor daerah • Belum optimalnya kondisi fisik sarana perdagangan daerah • Belum optimalnya perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan • Belum optimalnya upaya hilirisasi komoditas unggulan daerah • Masih rendahnya rasio total kredit bank milik kabupaten/kota terhadap PDRB • Rendahnya total dana pihak ketiga pada bank milik daerah dibandingkan dengan PDRB • Tingkat Pengangguran Terbuka relatif rendah namun rentan terhadap fluktuasi ekonomi • Belum optimalnya penyerapan penduduk usia kerja ke dalam pasar kerja • Belum optimalnya penyiapan tenaga kerja yang kompeten • Masih tingginya kerentanan struktur investasi daerah terhadap dinamika ekonomi eksternal	1. Optimalisasi pasar daerah 2. Penguatan dan pelestarian seni budaya 3. Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi 4. Pelayanan perijinan dan administrasi 5. Peningkatan kualitas tenaga kerja	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor perekonomian	• Peningkatan sektor industri dalam pembangunan ekonomi • Peningkatan nilai usaha perdagangan • Peningkatan kinerja koperasi dan UMKM • Peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif • Peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan • Pembentukan ekosistem ekonomi syariah
				Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor perekonomian	• Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja • Peningkatan pemajuan kebudayaan melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan SDM/lembaga kebudayaan • Peningkatan investasi • Peningkatan jumlah layanan di Mal Pelayanan Publik (Mal Pelayanan Perizinan)
5	Kualitas Hidup dan Sumber Daya Manusia	• Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia	1. Pelayanan dasar bidang pendidikan	Peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan	• Peningkatan mutu layanan pendidikan • Peningkatan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui peningkatan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah • Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) • Tingginya anak tidak sekolah (putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan) • Masih terbatasnya sarana prasarana pendidikan jenjang SD dan SMP yang layak dan dalam kondisi baik	2. Pelayanan dasar bidang kesehatan 3. Pelayanan sosial dan bidang keagamaan 4. Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak 5. Pengembangan atlet dan prestasi olahraga		pemerataan dan keterjangkauan penyelenggaraan layanan pendidikan utamanya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal • Peningkatan capaian SPM bidang pendidikan • Penguatan pendidikan karakter, peningkatan kualitas guru, dan pengembangan kurikulum yang berbasis potensi/kearifan lokal • Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) • Peningkatan partisipasi pendidikan kesetaraan atau non formal Peningkatan koordinasi dengan Kantor Kemenag untuk mendorong peningkatan cakupan literasi serta numerasi siswa pada satuan pendidikan keagamaan
		• Belum optimalnya cakupan kepesertaan dan keaktifan jaminan kesehatan nasional (JKN) • Masih ditemukan kasus kematian ibu, kematian neonatal, kematian bayi, dan kematian balita • Masih tingginya kasus permasalahan gizi pada balita • Masih tingginya penemuan kasus penyakit tidak menular (TBC, Hipertensi, dll)		Peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan dan jaminan kesehatan	• Peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas • Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan jiwa • Peningkatan budaya berperilaku hidup sehat • Penguatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan serta pembiayaan kesehatan • Peningkatan kesehatan lingkungan • Peningkatan kemajuan teknologi kesehatan • Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan
		• Masih rendahnya pembangunan literasi masyarakat		Peningkatan pembangunan literasi masyarakat	• Peningkatan pemanfaatan perpustakaan • Peningkatan minat gemar membaca untuk masyarakat

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Masih rendahnya jumlah wirausaha muda dibanding jumlah pemuda • Masih minimnya prestasi yang diraih pada event olahraga yang diikuti		Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga	• Peningkatan daya saing dan partisipasi pemuda • Pengembangan atlet dan prestasi keolahragaan serta sarana prasarana olahraga • Peningkatan pembudayaan olahraga
		• Belum optimalnya pembangunan dan pemberdayaan gender • Masih rendahnya tingkat perlindungan terhadap anak • Masih rendahnya penggunaan KB pasca persalinan		Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	• Peningkatan pemenuhan hak anak • Peningkatan perlindungan terhadap perempuan • Peningkatan perlindungan khusus anak • Pencegahan perkawinan anak
				Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	• Peningkatan pengarusutamaan gender • Peningkatan pemberdayaan perempuan
				Peningkatan kualitas keluarga (pendidikan, keagamaan, dan keluarga berencana)	• Peningkatan kualitas pembangunan keluarga • Peningkatan pengendalian penduduk • Peningkatan pembinaan keluarga berencana • Penguatan pendidikan budi pekerti dan keagamaan
		• Belum optimalnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum		Peningkatan kerukunan hidup bermasyarakat	• Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum • Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan • Peningkatan kerukunan umat beragama • Pemberdayaan organisasi masyarakat
6	Kelestarian Lingkungan	• Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup • Belum optimalnya upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) daerah • Belum optimalnya pengendalian pencemaran udara • Belum optimalnya kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan dokumen lingkungan hidup • Masih tingginya tingkat risiko bencana	1. Pelestarian lingkungan hidup 2. Pencegahan dan mitigasi bencana alam	Meningkatkan ketahanan lingkungan hidup terhadap iklim dan bencana	• Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim • Peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi bencana

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
7	Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	• Belum maksimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tercermin dari nilai EPPD • Belum optimalnya capaian Indeks Manajemen Risiko (MRI) • Belum optimalnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) • Belum optimalnya manajemen dan pengawasan kearsipan	1. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi 2. Integrasi Data 3. Digitalisasi dan smart city 4. Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	• Peningkatan kualitas kebijakan • Peningkatan pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah • Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah • Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan melalui digitalisasi kearsipan • Peningkatan tata kelola Pemerintah Desa
		• Belum maksimalnya integrasi dan tata kelola SPBE		Peningkatan keterbukaan informasi publik	• Peningkatan layanan pengaduan dan konsultasi • Peningkatan tata kelola dan layanan informasi public
				Peningkatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi	• Peningkatan infrastruktur pendukung TIK • Peningkatan ketersediaan jaringan internet ke seluruh rumah tangga • Peningkatan keamanan teknologi komunikasi dan informasi
				Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik	• Peningkatan digitalisasi pelayanan publik
		Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dari IPKD		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	• Peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah • Peningkatan kualitas perbendaharaan akuntansi dan pelaporan
				Peningkatan pendapatan asli daerah	• Peningkatan pengelolaan pajak yang akuntabel • Pemenuhan target pajak
				Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	• Peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah • Peningkatan kualitas perbendaharaan akuntansi dan pelaporan
		• Belum optimalnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan kepegawaian		Peningkatan kebijakan dan manajeman ASN	• Peningkatan pelayanan kepegawaian • Peningkatan kualitas ASN • Peningkatan ketepatan penempatan ASN

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

2. Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2026

Berdasarkan amanat Pasal 178 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran, selanjutnya hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan. Adapun keterkaitan isu strategis, prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2026 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. 10
Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2026

No.	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Pokok-pokok Pikiran Tahunan DPRD
1.	Penanganan Kemiskinan	• Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan • Pelayanan dasar bidang pendidikan • Pelayanan dasar bidang kesehatan	**1. Meningkatkan kualitas SDM untuk percepatan peningkatan IPM dan pemenuhan SPM pelayanan dasar** (1) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan agar SPM pendidikan segera tuntas melalui: a. Pemenuhan standarisasi infrastruktur pendidikan memenuhi SPM b. Peningkatan upaya agar partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar meningkat sesuai SPM c. Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional d. Menggiatkan kembali pendidikan kesetaraan agar penduduk yang belum
2.	Konektivitas dan Aksesibilitas	• Penataan garis imajiner • Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	
3.	Ketahanan Pangan	• Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	
4.	Diversifikasi perekonomian untuk penghidupan yang stabil	• Optimalisasi pasar daerah • Penguatan dan pelestarian seni budaya • Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	

No.	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Pokok-pokok Pikiran Tahunan DPRD
		• Pelayanan perijinan dan administrasi • Peningkatan kualitas tenaga kerja	menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan e. Meningkatkan rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional f. Peningkatan bantuan teknis kepada PAUD agar jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD meningkat
5.	Kualitas Hidup dan Sumber Daya Manusia	• Pelayanan dasar bidang pendidikan • Pelayanan dasar bidang kesehatan • Pelayanan sosial dan bidang keagamaan • Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak • Pengembangan atlet dan prestasi olahraga	
6.	Kelestarian Lingkungan	• Pencegahan dan mitigasi bencana alam • Pelestarian lingkungan hidup	(2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, agar Indeks Kesehatan meningkat dan SPM kesehatan tuntas, dengan memastikan bahwa
7.	Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	• Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi • Integrasi data • Digitalisasi dan *smart city* • Pengembangan kerjaasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	a. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar b. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar c. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar d. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar e. Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar f. Setiap warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar g. Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar h. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar i. Setiap penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar j. Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar k. Setiap orang terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

No.	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Pokok-pokok Pikiran Tahunan DPRD
			l. Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (3) Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah memenuhi SPM, melalui: a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari b. Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari c. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik agar jumlah warga negara yang memperoleh pengolahan air limbah untuk limbah domestik d. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana e. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat **2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan industri pengolahan, agar lapangan kerja lebih luas dan kemiskinan serta pengangguran berkurang** **3. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian dan pelayanan dasar agar ketimpangan antar wilayah turun** **4. Peningkatan kinerja pelayanan publik pemerintahan daerah agar Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah terus meningkat** **5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dengan indikator Nilai SAKIP Daerah, Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terus meningkat lebih baik**

Sumber: Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026.

Adapun kesesuaian usulan pokok-pokok pikiran DPRD dengan bidang urusan dan program perangkat daerah sebagai berikut.

Tabel 4. 11
Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026

BIDANG URUSAN	URAIAN PERMASALAHAN	OPD TUJUAN	PROGRAM
Kebudayaan			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelompok Seni Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
	Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kesenian dan budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Kecamatan			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manding	Kelurahan Manding	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temanggung II	Kelurahan Temanggung II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Butuh	Kelurahan Butuh	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Giyanti	Kelurahan Giyanti	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidorejo	Kelurahan Sidorejo	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggong	Kelurahan Manggong	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parakan Wetan	Kelurahan Parakan Wetan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kertosari	Kelurahan Kertosari	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temanggung I	Kelurahan Temanggung I	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purworejo	Kelurahan Purworejo	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kowangan	Kelurahan Kowangan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Walitelon Selatan	Kelurahan Walitelon Selatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Walitelon Utara	Kelurahan Walitelon Utara	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parakan Kauman	Kelurahan Parakan Kauman	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jampirejo	Kelurahan Jampirejo	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jampiroso	Kelurahan Jampiroso	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jurang	Kelurahan Jurang	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebonsari	Kelurahan Kebonsari	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kranggan	Kelurahan Kranggan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banyuurip	Kelurahan Banyuurip	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mungseng	Kelurahan Mungseng	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

BIDANG URUSAN	URAIAN PERMASALAHAN	OPD TUJUAN	PROGRAM
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Madureso	Kelurahan Madureso	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tlogorejo	Kelurahan Tlogorejo	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Kelautan dan Perikanan			
	Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana perikanan	DKPPP	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kepemudaan dan Olahraga			
	Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung olahraga	Dindikpora	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Kesehatan			
	Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan milik Desa	Dinkes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Penanggulangan/Penanganan Stunting	Dinkes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Milik Desa	Dinkes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Lingkungan Hidup			
	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas ruang terbuka hijau dan pengelolaan sampah	DPRKPLH	Program Pengelolaan Persampahan
Pariwisata			
	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih dan perpipaan	DPUPR	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Pembangunan/rehabilitasi talud	DPUPR	Program Penyelenggaraan Jalan
	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ pengerasan jalan Desa/lingkungan permukiman	DPUPR	Program Penyelenggaraan Jalan
	Pembangunan/rehabilitasi jembatan	DPUPR	Program Penyelenggaraan Jalan
	Pengelolaan dan pemeliharaan embung Desa	DPUPR	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Pembangunan/rehabilitasi drainase	DPUPR	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	Pembangunan/rehabilitasi gedung serbaguna	Dinpermades	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
	Pemeliharaan/pembangunan gedung kantor dan balai Desa	Dinpermades	Program Penataan Desa
	Pembangunan/rehabilitasi gedung Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama	Dinpermades	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Pembangunan/pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana kelembagaan Desa	Dinpermades	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana keamanan Desa	Dinpermades	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
Pendidikan			

BIDANG URUSAN	URAIAN PERMASALAHAN	OPD TUJUAN	PROGRAM
	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pendidikan Dasar	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan
	Pengadaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Dasar	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan
	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan
	Pengadaan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan
	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pendidikan Menengah Pertama	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan
	Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan milik Desa	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan
	Pengadaan Sarana, Prasarana dan Utilitas SMP	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan
	Pengadaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga Berkualitas	DPPPAPPKB	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
Perhubungan			
	Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan	Dinhub	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Perpustakaan			
	Pembangunan/Rehabilisasi/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Dinpusip	Program Pembinaan Perpustakaan
Pertanian			
	Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana pertanian	DKPPP	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana peternakan	DKPPP	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan prasarana pertanian	DKPPP	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan prasarana peternakan	DKPPP	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
	Pembangunan/Rehabilitasi RTLH	DPRKPLH	Program Kawasan Permukiman
	Peningkatan Fasilitas RTLH	DPRKPLH	Program Kawasan Permukiman
Sekretariat Daerah			
	Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana lembaga	Bagian Kesejahteraan dan Bina Mental	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana ibadah	Bagian Kesejahteraan dan Bina Mental	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sosial			
	Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinsos	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Kabupaten	Dinsos	Program Penanganan Bencana

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2025

Hasil input usulan kegiatan hasil penelahaan pokok-pokok pikiran DPRD dalam SIPD sebagai berikut:

a. Pokir yang Disetujui

Dari total 1.613 usulan kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Temanggung yang masuk kedalam SIPD Kementerian Dalam Negeri tercatat ada 1.361 pokok pikiran yang disetujui oleh sistem.

Persetujuan terhadap usulan kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diberikan karena 1.361 usulan telah diinput sesuai kamus usulan kegiatan sehingga sudah sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah (yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah) dan dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu.

b. Pokir yang Ditolak/dikembalikan/dibatalkan

Dari total 1.361 usulan kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Temanggung yang masuk kedalam SIPD Kementerian Dalam Negeri tercatat ada 252 usulan kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD ditolak/dikembalikan/dibatalkan karena: 1) Dikembalikan ke pengusul (Tidak ada nama kelompok sehingga tidak diketahui status registernya); 2) Belum ada data anggaran yang diusulkan untuk usulan tersebut; 3) Belum ada nama kelompok penerima bantuan.

3. Keterkaitan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran Prioritas Nasional

Sebagaimana penjelasan terkait arah kebijakan dan strategi pembangunan secara nasional dituangkan ke dalam 8 Prioritas Nasional yang secara rinci dijabarkan di sasaran pada masing-masing PN. Dalam perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 perlu memperhatikan keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dengan prioritas nasional RPJMN Tahun 2025-2029. Keselarasan antara sasaran pembangunan daerah RPJMD dengan prioritas nasional RPJMN dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 12
Persandingan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan Sasaran Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2026	Prioritas Pembangunan
1	PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM Indikator: ● Indeks Demokrasi Indonesia ● Indeks HAM	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Indeks Harmoni	6,79	● Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah ● Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak ● Pelayanan sosial dan bidang keagamaan ● Pelayanan dasar bidang pendidikan ● Pelayanan dasar bidang kesehatan
				Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	97,13	
				Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	73,30	
2	PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2	Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan Indikator: ● *Asia Power Index (Military Capability)*	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Indeks Harmoni	6,79	● Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2026	Prioritas Pembangunan
			• *Asia Power Index (Diplomatic Influence)* • Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya • *Global Cybersecurity Index* • Indeks Keamanan Laut Nasional					• Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi
		3	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (*FEW Nexus*) Indikator: • Indeks Ketahanan Pangan • Pertumbuhan PDB Pertanian Kehutanan dan Perikanan	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	PDRB Perkapita (Juta Rupiah /tahun)	39,31 juta rupiah	• Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan • Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan
		4	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Energi secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (*FEW Nexus*) Indikator: • Indeks Ketahanan Energi • Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	-	-	-	-
		5	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi	Terwujudnya Perekonomian Yang	Terwujudnya peningkatan kualitas	Persentase infrastruktur	73,80%	Pembangunan dan rehabilitasi

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2026	Prioritas Pembangunan
			Kebutuhan Air secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (*FEW Nexus*) Indikator: • Indeks Ketahanan Air Nasional • Kapasitas Tampungan Air • Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan • Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	kewilayahan yang berdaya saing		infrastruktur dasar kewilayahan
		6	Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan Indikator: • Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global • *Indonesia Blue Economy Index* (IBEI) • Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (angka)	73,30	• Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Pelayanan perijinan dan administrasi • Digitalisasi dan Smart City
				Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan		PDRB Perkapita (Juta Rupiah /tahun)	39,31 juta rupiah	
				Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,20-2,00	
		7	Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau	Terwujudnya Perekonomian Yang	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip	Indeks kualitas	75,5	Pelestarian lingkungan hidup

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2026	Prioritas Pembangunan
			Indikator: ● Indeks ekonomi hijau ● Indeks kualitas pengelolaan sampah (IKPS) ● Timbulan sampah terolah di fasilitasi pengolahan sampah ● Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif ● Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tahunan ● Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati ● Indeks kualitas lingkungan hidup	Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	lingkungan hidup		
3	PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	8	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan Indikator: ● Stok infrastruktur terhadap PDB	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	73,80%	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan
		9	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB Indikator: ● Total aset sektor keuangan/PDB ● Aset perbankan/PDB	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas	PDRB per kapita	39,31 juta rupiah	● Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2026	Prioritas Pembangunan
			• Aset dana pensiun/PDB • Aset asuransi/PDB • Kapitalisasi pasar modal/PDB • Total kredit/PDB • Inklusi keuangan		pendidikan dan kesehatan			
				Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini / Gini Rasio	0,360-0,357	
		10	Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas Indikator: • Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal • Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB • Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah • Rasio kewirausahaan	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,20-2,00	• Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Peningkatan kualitas tenaga kerja
				Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini	0,370 – 0,360	
		11	Meningkatnya nilai tambah pariwisata Indikator: • Rasio PDB pariwisata • Devisa pariwisata	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas	PDRB per kapita	39,31 juta rupiah	• Penguatan dan pelestarian seni budaya • Pengembangan kerjasama pembangunan dan

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2026	Prioritas Pembangunan
					pendidikan dan kesehatan			peningkatan investasi
		12	Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif Indikator: ● Proporsi PDB ekonomi kreatif	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	PDRB per kapita	39,31 juta rupiah	● Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi ● Optimalisasi Pasar Daerah ● Digitalisasi dan Smart City ● Penataan garis imajiner
				Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini / Gini Rasio	0,370 – 0,360	
4	PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	13	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata Indikator: ● Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun ● Harapan Lama Sekolah ● Rata-rata nilai PISA : membaca, matematika, sains ● Rata-rata nilai asesmen tingkat nasional : literasi membaca numerasi	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	73,30	Pelayanan dasar bidang pendidikan
						Tingkat Pengangguran Terbuka	2,20-2,00	
				Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi	Indeks Pembangunan Gender	97,13	

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2026	Prioritas Pembangunan
			• Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi • Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi • Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Berkarakter	seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan			
		14	Terwujudnya kesehatan untuk semua Indikator: • Usia Harapan Hidup • Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*) (rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun) • Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) • Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita • Insidensi tuberculosis (per 100.000 penduduk) • Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	73,30	Pelayanan dasar bidang kesehatan
				Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	97,13	
		15	Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif Indikator:	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Gender	97,13	• Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2026	Prioritas Pembangunan
			• Indeks pembangunan kualitas keluarga • Indeks perlindungan anak • Indeks pembangunan pemuda • Indeks ketimpangan gender • Indeks pembangunan gender • Mobilitas penduduk lanjut usia • Mobilitas penduduk penyandang disabilitas		dalam seluruh aspek pembangunan			• Pelayanan sosial dan bidang keagamaan
		16	Menguatnya iptek, inovasi dan produktivitas tenaga kerja Indikator: • Peringkat indeks inovasi global • Tingkat pengangguran terbuka • Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB) • Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,20-2,00	Peningkatan kualitas tenaga kerja
		17	Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat Indikator: • Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	73,30	Pengembangan atlet dan prestasi olahraga

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2026	Prioritas Pembangunan
			• Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games • Peringkat pada Asian Games • Peringkat pada Asian Para Games • Peringkat pada SEA Games • Peringkat pada ASEAN Para Games • Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga					
5	PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	18	Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan Indikator: • Rasio PDB industri pengolahan	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	PDRB per kapita	39,31 juta rupiah	• Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Peningkatan kualitas tenaga kerja • Digitalisasi dan *smart city*
		19	Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global Indikator: • Biaya logistik • Pembentukan modal tetap bruto (%PDB)	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas	PDRB per kapita	39,31 juta rupiah	Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2026	Prioritas Pembangunan
			• Ekspor barang dan jasa (%PDB)		pendidikan dan kesehatan			
6	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	20	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan Indikator: • Tingkat kemiskinan • Tingkat kemiskinan ekstrem • Proporsi penduduk kelas menengah • Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan • Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	73,30	• Pelayanan sosial dan bidang keagamaan • Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Peningkatan kualitas tenaga kerja • Pelayanan dasar bidang pendidikan • Pelayanan dasar bidang kesehatan
				Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan		PDRB per kapita	39,31 juta rupiah	
				Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,20-2,00	
				Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini	0,370 – 0,360	
		21	Meningkatkan akses rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan Indikator: • Rumah tangga dengan akses hunian layak,	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	73,80%	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2026	Prioritas Pembangunan
			terjangkau dan berkelanjutan		ekonomi dan layanan publik			
		22	Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Indikator: ● Persentase desa mandiri	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	75,60	● Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi ● Digitalisasi dan Smart City ● Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan
				Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan		Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing (%)	73,80%	
		23	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indikator: ● Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB Nasional ● Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap PDB nasional	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	PDRB per kapita	39,31 juta rupiah	● Optimalisasi pasar daerah ● Pelayanan perijinan dan administrasi ● Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi ● Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan
				Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing (%)	73,80%	

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2026	Prioritas Pembangunan
					ekonomi dan layanan publik			
7	PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	24	Terwujunya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional Indikator: • Indeks pembangunan hukum • Indeks persepsi korupsi • Indeks Materi Hukum • Indeks Integritas Nasional • Indeks integritas partai politik	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Indeks integritas nasional	79,35	• Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi • Integrasi Data • Digitalisasi dan Smart City
		25	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani Indikator: • Indeks reformasi birokrasi nasional • Indeks Pelayanan Publik • Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik • Indeks pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	75,60	• Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi • Integrasi data • Digitalisasi dan *smart city*
		26	Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba Indikator: • Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas	Indeks integritas nasional	78,00	• Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi • Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2026	Prioritas Pembangunan
					ekonomi dan layanan publik			mitra pembangunan strategis daerah
		27	Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan Indikator: ● *Return on asset (RoA)* BUMN	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	PDRB per kapita	39,31 juta rupiah	Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
		28	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal sesuai potensi perekonomian dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan Indikator: ● Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB ● Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	PDRB per kapita	39,31 juta rupiah	● Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi ● Pelayanan perijinan dan administrasi
		29	Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif,	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui	PDRB per kapita	39,31 juta rupiah	● Pengembangan kerjasama pembangunan dan

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2026	Prioritas Pembangunan
			Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Indikator: ● Tingkat inflasi	dan Berbasis Lingkungan	pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			peningkatan investasi ● Optimalisasi pasar daerah ● Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan
				Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini / Gini Rasio	0,370 – 0,360	
8	PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	30	Terwujudnya kehidupan beragam yang maslahat dan berkebudayaan maju Indikator: ● Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) ● Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ● Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Indeks Harmoni	6,79	Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah
		31	Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim Indikator: ● Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks kualitas lingkungan hidup	75,5	Pencegahan dan mitigasi bencana alam
Jumlah Sasaran PN						**31**		
Jumlah Sasaran Pembangunan Daerah						**5**		

Sumber : Bapperida Kabupaten Temanggung dan RPJMN 2025-2029, 2026.

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa terdapat keterkaitan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Temanggung 2026 dengan sasaran prioritas nasional, akan tetapi terdapat 1 (satu) sasaran prioritas nasional yang tidak bisa ada keterkaitan secara langsung oleh sasaran dan prioritas pembangunan daerah dikarenakan urusan energi tidak menjadi kewenangan kabupaten yaitu Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Energi secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus).

Keselarasan antara prioritas pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan prioritas nasional RPJMN 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 13
Persandingan antara Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung 2025-2029

No	Prioritas Nasional RPJMN	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
1	PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Bakesbangpol
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol
2	PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Bakesbangpol
		2. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPPP
		3. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
			• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH
		4. Optimalisasi pasar daerah	• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinkopdag
		5. Pelestarian lingkungan hidup	• Program Pengelolaan Persampahan • Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	DPRKPLH

No	Prioritas Nasional RPJMN	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
			• Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
3	PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	1. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPAD
		2. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
		3. Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	Program Hubungan Industrial	Dinperinaker
		4. Penguatan dan pelestarian seni budaya	• Program Pemasaran Pariwisata • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinbudpar
		5. Optimalisasi pasar daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinkopdag
4	PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	1. Pelayanan dasar bidang pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindikpora
		2. Pelayanan dasar bidang kesehatan	• Program Pemennuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
		3. Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	• Program Perlindungan Perempuan • Program Pemenuhan Hak Anak • Program Peningkatan Kualitas Keluarga • Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPAPPKB
		4. Peningkatan kualitas tenaga kerja	• Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinperinaker
		5. Pengembangan atlet dan prestasi olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dindikpora
5	PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	1. Pelayanan perijinan dan administrasi	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
		2. Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
6	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi	1. Pelayanan sosial dan bidang keagamaan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos

No	Prioritas Nasional RPJMN	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
	dan pemberantasan kemiskinan	2. Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	Program Hubungan Industrial	Dinperinaker
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		3. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH
		4. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	• Program Penataan Desa • Program Administrasi Pemerintahan Desa • Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinpermades
7	PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi Setda
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapperida
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		2. Integrasi Data	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinkominfo
		3. Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Bakesbangpol
8	PN 8: Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	1. Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Bakesbangpol
		2. Pencegahan dan mitigasi bencana alam	Program Penanggulangan Bencana	BPBD

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

Sementara itu, keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD 2026 dengan sasaran Prioritas Nasional dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. 14
Keterkaitan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan Sasaran Prioritas Nasional

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	angka	73,30	Pelayanan dasar bidang pendidikan	1. Akses pendidikan untuk semua warga 2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru 3. Pimpinan daerah sambang sekolah 4. Penguatan database pendidikan 5. Fasilitasi desiminasi informasi terkait pendidikan 6. Fasilitasi usulan Pembangunan gedung SMA/SMK 7. Rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah SD dan SMP 8. Pemberdayaaan PAUD 9. Insentif kepada Guru Keagamaan 10. Penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah 11. Peningkatan Literasi membaca melalui perpustakaan daerah	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	1. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun 2. Harapan Lama Sekolah 3. Rata-rata nilai PISA : membaca, matematika, sains 4. Rata-rata nilai asesmen tingkat nasional : literasi membaca numerasi 5. Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi 6. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi 7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi
				Pelayanan dasar bidang kesehatan	1. Kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan 2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan (Puskesmas) 3. Pemeriksaan kesehatan gratis 4. Peningkatan pelayanan posyandu di tingkat desa 5. Peningkatan kualitas layanan RSUD 6. Pembangunan gedung poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Jamak 7. Penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas Wonoboyo		Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup 2. Angka Kelahiran Total (Total 3. Fertility Rate) (rata-rata 4. kelahiran per wanita usia 5. subur 15–49 tahun) 6. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 7. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 8. Insidensi tuberculosis (per 100.000 penduduk) 9. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
				Pengembangan atlet dan prestasi olahraga	1. Pemajuan cabang olahraga unggulan 2. Peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas atlet 3. Pembinaan tata kelola pengelolaan klub dan penyelenggaraan event olahraga secara profesional		Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat	1. Peringkat pada Asian Games 2. Peringkat pada Asian Para Games 3. Peringkat pada ASEAN Para Games 4. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga
	PDRB Perkapita	Juta rupiah	39,31	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	1. Optimalisasi produksi hasil pertanian dan Perkebunan 2. Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian 3. Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk 4. Regenerasi petani 5. Penyediaan bibit ternak dan ikan 6. Peningkatan kapasitas petani dan peternak ikan 7. Pembangunan *greenhouse*	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	1. Indeks Ketahanan Pangan 2. Pertumbuhan PDB Pertanian Kehutanan dan Perikanan 3. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat		Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan	1. Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global 2. Indonesia *Blue Economy Index* (IBEI) 3. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global
				Optimalisasi pasar daerah	1. Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif 2. Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional			
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM	PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	1. Total aset sektor keuangan/PDB 2. Aset perbankan/PDB 3. Aset dana pension/PDB 4. Aset asuransi/PDB

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
					3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat	kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi		5. Kapitalisasi pasar modal/PDB 6. Total kredit/PDB 7. Inklusi keuangan
				Optimalisasi pasar daerah	1. Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif 2. Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional			
				Penguatan dan pelestarian seni budaya	1. Pembentukan dewan kesenian di Kecamatan 2. Pertemuan pegiat seni dan budaya 3. Penghargaan pada seniman dan budayawan 4. Pentas seni di ruang publik 5. Pelaku seni dan budaya lokal go to school 6. Regulasi dan pemakaian baju adat khas Temanggung 7. Festival seni dan budaya tahunan Temanggung 8. Informasi dan promosi pariwisata 9. Desa wisata seni dan budaya pendukung ekonomi kreatif 10. Rebranding Temanggung		Meningkatnya nilai tambah pariwisata	1. Rasio PDB pariwisata 2. Devisa pariwisata
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat		Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif	Proporsi PDB ekonomi kreatif
				Pengembangan kerjasama		PN 5:	Terwujudnya peningkatan nilai	Rasio PDB industri pengolahan

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
				pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan	
							Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global	1. Biaya logistik 2. Pembentukan modal tetap bruto (%PDB) 3. Ekspor barang dan jasa (%PDB)
				Optimalisasi pasar daerah	1. Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif 2. Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	1. Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB Nasional 2. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap PDB nasional
				Pelayanan perijinan dan administrasi	Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perijinan di mall pelayanan publik			
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat			
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah		Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	1. Tingkat kemiskinan 2. Tingkat kemiskinan ekstrem 3. Proporsi penduduk kelas menengah 4. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 5. Persentase penyandang disabilitas yang

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
					antara lain pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat			bekerja di sektor formal
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat	PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan	*Return on asset* (RoA) BUMN
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat		Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan	1. Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB 2. Rasio Perpajakan terhadap PDB
				Pelayanan perijinan dan administrasi	Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perijinan di mall pelayanan publik			
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat		Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Tingkat inflasi

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
				Optimalisasi pasar daerah	1. Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif 2. Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional			
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,20-2,00	Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat	PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas	1. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal 2. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB 3. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah 4. Rasio kewirausahaan
				Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja 2. Peningkatan hubungan industri 3. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)			
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat		Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas	1. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal 2. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB 3. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah 4. Rasio kewirausahaan
				Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja 2. Peningkatan hubungan industri 3. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)			

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
				Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja 2. Peningkatan hubungan industri 3. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	Menguatnya iptek, inovasi dan produktivitas tenaga kerja	1. Peringkat indeks inovasi global 2. Tingkat pengangguran terbuka 3. Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB) 4. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
				Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja 2. Peningkatan hubungan industri 3. Penyusunan Rencana Kerja Tenaga Kerja (RTKD)	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	1. Tingkat kemiskinan 2. Tingkat kemiskinan ekstrem 3. Proporsi penduduk kelas menengah 4. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 2. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal
Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	75,50	Pelestarian lingkungan hidup	1. Perlindungan sumber mata air 2. Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air 3. Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat 4. Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah 5. Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST 6. Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas 7. Aksi bersih lingkungan 8. Penghijauan di lokasi lahan kritis 9. Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau	1. Indeks ekonomi hijau 2. Indeks kualitas pengelolaan sampah (IKPS) 3. Timbulan sampah terolah di fasilitasi pengolahan sampah 4. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif 5. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tahunan 6. Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati 7. Indeks kualitas lingkungan hidup

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
					10. Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis			
				Pencegahan dan mitigasi bencana alam	1. Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana 2. Pembentukan desa tangguh bencana 3. Peningkatan kapasitas relawan destana 4. Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam 5. Penambahan pos dan SDM untuk respon bencana 6. Penyediaan sumber air untuk penanganan kebencanaan 7. Penyediaan early warning system 8. Pencegahan longsor pada ruas jalan kabupaten	PN 8: Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	1. Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	%	73,80	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	1. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten 2. Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi 3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar pertanian (JUT dan Kereta Gantung) 4. Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik 5. Penyediaan air bersih dan sanitasi 6. Penyediaan rumah layak huni 7. Pembangunan *citywalk* Parakan (Jalan Diponegoro dan Jalan Brigjen Katamso)	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Air secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW *Nexus*)	1. Indeks Ketahanan Air Nasional 2. Kapasitas Tampungan Air 3. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan 4. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
					8. Pembangunan *citywalk* Ngadirejo (Perkotaan Ngadirejo)			
				Penataan garis imajiner	1. Pembangunan city walk Jalan Jalan S. Parman, Jalan R. Suprapto, Jalan M.T. Haryono dan Jenderal Sudirman 2. Rehabilitasi dan penataan kawasan alun-alun dan pendopo pengayoman 3. Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan alun-alun 4. Revitalisasi dan penataan kawasan stadion Bhumi Phala 5. Revitalisasi Taman Kartini 6. Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan stadion Bhumi Phala 7. Revitalisasi Pasar Kliwon	PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Stok infrastruktur terhadap PDB
				Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	1. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten 2. Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi 3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar pertanian (JUT dan Kereta Gantung) 4. Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik 5. Penyediaan air bersih dan sanitasi 6. Penyediaan rumah layak huni 7. Pembangunan *citywalk* Parakan (Jalan Diponegoro dan Jalan Brigjen Katamso)	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Meningkatkan akses rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
					8. Pembangunan *citywalk* Ngadirejo (Perkotaan Ngadirejo)			
	Indeks Integritas Nasional	angka	77,72	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	1. Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi 2. Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik 3. Penerapan merit system dan talent poll 4. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi 5. Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati 6. Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, amanah) 7. Peningkatan Kesejahteraan Ketua RT & RW 8. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (Tata Kelola Kelurahan)	PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Terwujunya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional	1. Indeks pembangunan hukum 2. Indeks persepsi korupsi 3. Indeks integritas partai politik
							Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika
	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	86,23	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	1. Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi 2. Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik 3. Penerapan merit system dan talent poll 4. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi 5. Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Persentase desa mandiri

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
					6. Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, amanah) 7. Peningkatan Kesejahteraan Ketua RT & RW 8. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (Tata Kelola Kelurahan)			
				Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	1. Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi 2. Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik 3. Penerapan merit system dan talent poll 4. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi 5. Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati 6. Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, amanah) 7. Peningkatan Kesejahteraan Ketua RT & RW 8. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (Tata Kelola Kelurahan)	PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	1. Indeks reformasi birokrasi nasional 2. Indeks pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri
				Integrasi data	1. Penyepakatan protokol interoperobilitas data antar perangkat daerah 2. Sinkronisasi dan integrasi data			
				Digitalisasi dan *smart city*	1. Digitalisasi dan integrasi layanan digital 2. Lapor Bupati 3. Penyediaan dan peningkatan SDM 4. Peningkatan kapasitas operator layanan digital di tingkat perangkat daerah dan pemerintah desa			

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
					5. Pembuatan superapps mobile 6. Penyediaan infrastruktur jaringan internet di perdesaan 7. Penyediaan infrastruktur jaringan internet di Ruang publik strategis			
Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini/Gini Rasio	angka	0,370-0,360	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	1. Optimalisasi produksi hasil pertanian dan Perkebunan 2. Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian 3. Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk 4. Regenerasi petani 5. Penyediaan bibit ternak dan ikan 6. Peningkatan kapasitas petani dan peternak ikan 7. Pembangunan *greenhouse*	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	1. Indeks Ketahanan Pangan 2. Pertumbuhan PDB Pertanian Kehutanan dan Perikanan 3. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat		Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan	1. Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global 2. Indonesia *Blue Economy Index* (IBEI) 3. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global
				Optimalisasi pasar daerah	1. Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif 2. Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional			
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM	PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	1. Total aset sektor keuangan/PDB 2. Aset perbankan/PDB 3. Aset dana pension/PDB 4. Aset asuransi/PDB

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
					3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat	kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi		5. Kapitalisasi pasar modal/PDB 6. Total kredit/PDB 7. Inklusi keuangan
				Optimalisasi pasar daerah	1. Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif 2. Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional			
				Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja 2. Peningkatan hubungan industri 3. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)		Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas	1. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal 2. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB 3. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah 4. Rasio kewirausahaan
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat		Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif	Proporsi PDB ekonomi kreatif
				Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja 2. Peningkatan hubungan industri 3. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	1. Tingkat kemiskinan 2. Tingkat kemiskinan ekstrem 3. Proporsi penduduk kelas menengah 4. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 5. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
	Indeks Pembangunan Gender	Angka	97,13	Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	1. Pembentukan Satgas PPA di Kecamatan dan Desa 2. Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan 3. Pembentukan desa ramah perempuan dan anak 4. Pemberdayaan ekonomi perempuan 12. Penyediaan *hotline/panic button*	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	1. Indeks pembangunan kualitas keluarga 2. Indeks perlindungan anak 3. Indeks pembangunan pemuda 4. Indeks ketimpangan gender 5. Indeks pembangunan gender 6. Mobilitas penduduk lanjut usia 7. Mobilitas penduduk penyandang disabilitas
				Pelayanan sosial dan bidang keagamaan	1. Penataan data program perlindungan sosial 2. Penyediaan rumah singgah untuk keluarga pasien rujukan rumah sakit di Yogyakarta dan Semarang 3. Peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dan marjinal 4. Fasilitasi Penyediaan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	1. Tingkat kemiskinan 2. Tingkat kemiskinan ekstrem 3. Proporsi penduduk kelas menengah 4. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 8. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal
Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Indeks Harmoni	angka	6,79	Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	1. Peningkatan optimalisasi peran kelompok masyarakat dan dunia swasta dengan melibatkan akademisi dalam pembangunan daerah 2. Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, dunia swasta dan akademisi	PN 8: Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	Terwujudnya kehidupan beragam yang maslahat dan berkebudayaan maju	1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) 2. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 3. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
						PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila,	1. Indeks Demokrasi Indonesia 2. Indeks HAM

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
							Demokrasi, dan HAM	
						PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan	1. Asia Power Index (Military Capability) 2. Asia Power Index (Diplomatic Influence) 3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya 4. *Global Cybersecurity Index* 5. Indeks Keamanan Laut Nasional

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

Berdasarkan tabel terdapat konsistensi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan sasaran Prioritas Nasional (termasuk ke dalam indikator kinerjanya). Selain itu, dapat dilihat bahwa indikator dampak digunakan sebagai indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Selain itu, keseluruhan program prioritas mempunyai indikator kinerja di mana indikator tersebut menggunakan indikator hasil.

4. Keterkaitan dan Konsistensi antara Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Kabupaten Temanggung

Perumusan prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan konsistensi dengan program prioritas, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 15
Keterkaitan dan Konsistensi antara Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Kabupaten Temanggung

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1.	Penataan garis imajiner	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	Pembangunan city walk Jalan Jalan S. Parman, Jalan R. Suprapto, Jalan M.T. Haryono dan Jenderal Sudirman	Persentase trotoar kondisi baik	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
		Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara	Rehabilitasi dan penataan kawasan alun-alun dan pendopo pengayoman	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	DPRKPLH
		Persentase trotoar kondisi baik	Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan alun-alun	Jumlah Produk Hukum Kelembagaan Pengelolaan Alun-alun	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum SETDA
			Revitalisasi dan penataan kawasan stadion Bhumi Phala	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA
			Revitalisasi Taman Kartini	Jumlah Fasilitasi Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DINBUDPAR
			Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan stadion Bhumi Phala	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA
			Revitalisasi Pasar Kliwon	Persentase pasar daerah kondisi baik/cukup baik	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG
2.	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	Indek pelayanan publik	Peningkatan tim asistensi peningkatan kapasitas dan	Persentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi SETDA

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			percepatan kinerja birokrasi			
		Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi SETDA
		Persentase AKIP PD berpredikat BB	Penerapan *merit system* dan *talent poll*	Indeks Sistem Merit	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		Indek sistem merit	Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPERIDA
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPERIDA
					Program Penelitian dan Pengembangan	BAPPERIDA
					Program Riset dan Inovasi	BAPPERIDA
					Program Pendaftaran Penduduk	DINDUKCAPIL
					Program Pencatatan Sipil	DINDUKCAPIL
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DINDUKCAPIL
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	INSPEKTORAT

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Pogram Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPAD
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pembangunan SETDA
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi SETDA Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan SETDA Bagian Kesra dan Bina Mental SETDA
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	KECAMATAN
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
			Fasilitasi antara Perangkat Daerah dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati	Persentase penyusunan dokumen perencanaan Desa tepat waktu	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DINPERMADES
			Desa Ceria (pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, Amanah)	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Berkinerja baik	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DINPERMADES
			Peningkatan kesejahteraan ketua RT dan RW	Presentasi laporan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	DINPERMADES

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				(RT,RW,PKK,Posyandu, LPMD dan Karang Taruna)	Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
			Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (tata kelola Kelurahan)	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan SETDA
3.	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	Indek ketahanan pangan	Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perkebunan	Produktivitas Padi Produktivitas jagung Produktivitas bawang putih Produktivitas bawang merah Produktivitas cabe rawit Produktivitas cabe keriting Produktivitas tembakau Produktivitas kopi robusta Produktivitas kopi arabika	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP
				Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama Persentase prasarana yang digunakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
				Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPPP
				Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	Program Penyuluhan Pertanian	DKPPP
			Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian	Persentase ketersediaan pangan pokok Indek ketahanan pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPPP
				Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	DINKOPDAG
				Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DINPERINAKER

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama Persentase prasarana yang digunakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
			Regenerasi petani	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	Program Penyuluhan Pertanian	DKPPP
			Penyediaan bibit ternak dan ikan	Jumlah produksi daging ternak besar Jumlah produksi daging ternak kecil Jumlah produksi ternak unggas Jumlah produksi telur Persentase kelahiran pedet	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP
				Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama Persentase prasarana yang digunakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
				Persentase penanganan penyakit hewan Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DKPPP
				Jumlah produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPPP
			Peningkatan kapasitas petani dan peternak ikan	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	Program Penyuluhan Pertanian	DKPPP
				Jumlah produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPPP
			Pembangunan *greenhouse*	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama Persentase prasarana yang digunakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
4.	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten	Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten	Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi	Persentase trotoar kondisi baik	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
		Persentase saluran drainase kondisi baik	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar pertanian (JUT dan Kereta Gantung)	Persentase prasarana yang digunakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
		Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	Penyediaan air bersih dan sanitasi	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
		Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak		• Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman • Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH
			Penyediaan rumah layak huni	• Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak • Persentase penanganan rumah tidak layak huni	Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH
			Pembangunan city walk Parakan (Jln. Diponegoro dan Jl. Brigjen Katamso)	Persentase trotoar kondisi baik	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
			Pembangunan citywalk Ngadirejo (perkotaan Ngadirejo)	Persentase trotoar kondisi baik	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
5.	Optimalisasi pasar daerah	Persentase pasar daerah kondisi baik/cukup baik	Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif	• Persentase pedagang yang menggunakan transaksi digital • Persentase pelaku usaha informal yang difasilitasi	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG
			Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional	Persentase pasar daerah kondisi baik/cukup baik	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG
6.	Penguatan dan pelestarian seni budaya	Jumlah festival seni dan budaya tahunan	Pembentukan dewan kesenian di Kecamatan	Jumlah Kelompok kesenian	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
		Jumlah desa wisata	Pertemuan pegiat seni dan budayawan	• Jumlah Kelompok kesenian • Jumlah Pelaku Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
			Penghargaan pada seniman dan budayawan	• Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan • Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan dan dipelihara	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
			Pentas seni di ruang publik	• Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Daya tarik Wisata • Jumlah Fasilitasi destinasi pariwisata	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
			Pelaku seni dan budaya lokal *go to school*	• Jumlah Kelompok kesenian • Jumlah Pelaku Budaya	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	DINBUDPAR
			Regulasi dan Pemakaian baju adat khas Temanggung	Jumlah Pelaku Budaya	program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
			Festival seni dan budaya tahunan Temanggung	Jumlah destinasi tujuan wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinbudpar	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
			Informasi dan promosi pariwisata	Jumlah destinasi tujuan wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinbudpar	Program Pemasaran Pariwisata	DINBUDPAR
			Desa wisata seni dan budaya pendukung ekonomi kreatif	Jumlah destinasi tujuan wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinbudpar	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DINBUDPAR

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Rebranding Temanggung	• Jumlah Ekonomi Kreatif yang berpotensi mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual • Jumlah pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi	Program Pemasaran Pariwisata	DINBUDPAR
7.	Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Rasio peningkatan pelayanan dampak kekerasan pada perempuan dan anak	Pembentukan satgas PPA	• Rasio peningkatan pelayanan dampak kekerasan pada perempuan dan anak • Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani • Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan • Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani • Rasio kasus kekerasan terhadap anak	Program Perlindungan Perempuan	DPPPAPPKB
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan	• Kabupaten Layak Anak • Prosentase terbentuknya DRPPA	Program Pemenuhan Hak Anak	DPPPAPPKB
		Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	Pembentukan desa ramah perempuan dan anak	• Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender • Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas • Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPAPPKB
		Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan tertangani	Pemberdayaan ekonomi perempuan	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPAPPKB
		Rasio kasus kekerasan terhadap anak	Penyediaan *hotline/panic button*	• Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender • Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPAPPKB

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				• Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani		
		Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	Penyediaan rumah singgah untuk keluarga pasien rujukan rumah sakit di Yogyakarta dan Semarang	• Presentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial • Presentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Program Rehabilitasi Sosial	DINAS SOSIAL
			Peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dan marjinal	Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINAS SOSIAL
				• Presentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial • Presentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Program Rehabilitasi Sosial	DINAS SOSIAL
8.	Pelayanan dasar bidang pendidikan	Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun	Akses pendidikan untuk semua warga	• Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun • Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 25 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
		Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun	Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru	• Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional • Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
		Rata-rata lama sekolah	Pimpinan daerah sambang sekolah	• Proporsi PAUD terakreditasi minimal B • Persentase SD terakreditasi minimal B • Persentase SMP terakreditasi minimal B • Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Harapan Lama Sekolah	Penguatan database pendidikan	• Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun • Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
			Fasilitasi desiminasi informasi terkait pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
			Fasilitasi usulan pembangunan Gedung SMA/SMK	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
			Rehabilitasi ruang kelas dan Gedung sekolah SD dan SMP	• Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional (seluruh jenjang) untuk literasi membaca SD/sederajat • Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional (seluruh jenjang) untuk literasi membaca SMP/sederajat • Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional (seluruh jenjang) untuk numerasi SD/sederajat • Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional (seluruh jenjang) untuk numerasi SMP/sederajat	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
			Pemberdayaan PAUD	• Proporsi PAUD terakreditasi minimal B • Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
			Insentif kepada Guru Keagamaan	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
			Penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah	Harapan Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Peningkatan literasi membaca melalui perpustakaan daerah	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Kegemaran Membaca Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	DINPUSIP
9.	Pelayanan dasar bidang kesehatan	Angka harapan hidup	Kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan	Cakupan penduduk penerima pemeriksaaan kesehatan gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		Angka kematian ibu	Peningkatan kualitas layanan kesehatan (Puskesmas)	Persentase Posyandu aktif bidang kesehatan Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		Cakupan kepsertaan jaminan kesehatan nasional	Pemeriksaan kesehatan gratis	Cakupan penduduk penerima pemeriksaaan kesehatan gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	Peningkatan pelayanan Posyandu di tingkat desa	Persentase Posyandu aktif bidang kesehatan Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
			Peningkatan kualitas layanan RSUD	Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan prasarana rumah sakit Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah sakit	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD
			Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung Tahu Jamak	Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan prasarana rumah sakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD
			Penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas Wonoboyo	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	DINAS KESEHATAN

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Fasilitasi penyediaan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat	• Presentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial • Presentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Program Rehabilitasi Sosial	DINAS SOSIAL
10.	Pelayanan sosial dan bidang keagamaan	Persentase desa dan kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Penataan data program perlindungan sosial	Persentase desa dan kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINAS SOSIAL
11.	Pelayanan perijinan dan administrasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik	Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perijinan di Mall Pelayanan Publik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
12.	Integrasi data	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	Penyepakatan protokol interoperobilitas data antar PD	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
		Persentase layanan publik secara elektronik	Sinkronisasi dan integrasi data	Persentase layanan publik secara elektronik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik		Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DINDUKCAPIL
13.	Pencegahan dan mitigasi bencana alam	Jumlah desa tangguh bencana	Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Pembentukan desa tangguh bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Peningkatan kapasitas relawan destana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
			Penambahan pos dan SDM untuk respon bencana	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
			Penyediaan sumber air untuk penanganan kebencanaan	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
			Penyediaan *early warning system*	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Pencegahan longsor pada ruas jalan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/ Kota	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
14.	Digitalisasi dan *smart city*	Persentase layanan publik secara elektronik	Digitalisasi dan integrasi layanan digital	Persentase layanan publik secara elektronik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
			Lapor Bupati	Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
			Penyediaan dan peningkatan SDM	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
			Peningkatan kapasitas operator layanan digital di tingkat perangkat daerah dan pemerintah desa	Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
			Pembuatan *superapps mobile*	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
			Penyediaan infrastruktur jaringan internet di pedesaan	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
			Penyediaan infrastruktur jaringan internet di ruang public strategis	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
15.	Pelestarian lingkungan hidup	Indek kualitas air	Perlindungan sumber mata air	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
		Indek kualitas udara	Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
		Cakupan pelayanan persampahan	Peningkatan pengelolaan sampah	• Timbulan sampah terolah difasilitas pengolah sampah • Persentase sampah yang terkelola	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPRKPLH

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			berbasis desa dan masyarakat	• Cakupan Pelayanan persampahan		
		Persentase jumlah TPS 3 R	Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah	Persentase jumlah TPS 3R	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPRKPLH
			Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST	• Timbulan sampah terolah difasilitas pengolah sampah • Persentase sampah yang terkelola • Cakupan Pelayanan persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH
			Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas		Program Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH
			Aksi bersih lingkungan	• Timbulan sampah terolah difasilitas pengolah sampah • Persentase sampah yang terkelola • Cakupan Pelayanan persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH
			Penghijauan di lokasi lahan kritis	Persentase luas lahan kritis tertangani	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
			Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis	Persentase luas lahan kritis tertangani	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
			Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola Persentase luas lahan kritis tertangani	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
16.	Pengembangan kerjasama pembangunan	Jumlah fasilitasi kemitraan usaha antara UMKM dengan	Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan	• Jumlah fasilitasi kemitraan usaha antara UMKM dengan Perusahaan perskala besar	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	dan peningkatan investasi	Perusahaan ber skala besar		• Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal yang terintegrasi		
			Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM	• Jumlah fasilitasi kemitraan usaha antara UMKM dengan Perusahaan perskala besar • Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal yang terintegrasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
			Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala	• Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal • Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
			Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi	• Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal • Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
			BUMD Sehat	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Perekonomian SETDA
			Peningkatan hubungan industrial	• Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja • Persentase perusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan • Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK • Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja • Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	Program Hubungan Industrial	Dinperinaker
17.	Pengembangan kerjaasama dan pemberdayaan	Persentase ormas yang mendapat pembinaan	Peningkatan optimalisasi peran kelompok masyarakat	Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan	BANKESBANGPOL

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	mitra pembangunan strategis daerah		dan dunia swasta dengan melibatkan akademisi dalam pembangunan daerah		Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	
			Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, dunia swasta dan akademisi	Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BANKESBANGPOL
18.	Pengembangan atlet dan prestasi olahraga	Persentase Atlet Unggulan	Pemajuan cabang olahraga unggulan	Persentase Cabang Olah Raga Unggulan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA
			Kesejahteraan dan profesionalitas atlet	Persentase Atlet Unggulan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA
			Pembinaan tata kelola pengelolaan klub dan penyelenggaraan event olahraga secara professional	• Cakupan pelatih yang bersertifikat • Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA
19.	Peningkatan kualitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	• Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	• DINPERINAKER
				Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	• Program Penempatan Tenaga Kerja	• DINPERINAKER
			Peningkatan hubungan industri	Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	• Program Hubungan Industrial	• DINPERINAKER
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan		DINPERINAKER

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

Berdasarkan tabel terdapat konsistensi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan sasaran Prioritas Nasional (termasuk ke dalam indikator kinerjanya). Selain itu, dapat dilihat bahwa indikator dampak digunakan sebagai indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Selain itu, keseluruhan program prioritas mempunyai indikator kinerja di mana indikator tersebut menggunakan indikator hasil.

5. Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Janji Tahunan Kepala Daerah

Perumusan prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan konsistensi dengan janji tahunan Kepala Daerah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 16
Persandingan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Janji Tahunan Kepala Daerah

No	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Janji Tahunan Kepala Daerah (Program Aksi Tahun 2026)
1	Pelayanan dasar bidang pendidikan	1. Akses pendidikan untuk semua warga
		2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru
		3. Pimpinan daerah sambang sekolah
		4. Penguatan database pendidikan
		5. Fasilitasi desiminasi informasi terkait pendidikan
		6. Fasilitasi usulan Pembangunan gedung SMA/SMK
		7. Rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah SD dan SMP
		8. Pemberdayaan PAUD
		9. Insentif kepada Guru Keagamaan
		10. Penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah
		11. Peningkatan Literasi Membaca melalui perpustakaan daerah
2	Pengembangan atlet dan prestasi olahraga	1. Pemajuan cabang olahraga unggulan
		2. Kesejahteraan dan profesionalitas atlet
		3. Pembinaan tata kelola pengelolaan klub dan penyelenggaraan event olahraga secara profesional
3	Pelayanan dasar bidang kesehatan	1. Kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan
		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Puskesmas
		3. Pemeriksaan kesehatan gratis
		4. Peningkatan pelayanan posyandu di tingkat desa
		5. Peningkatan kualitas layanan RSUD
		6. Pembangunan gedung poliklinik RSUD Kabupaten temanggung
		7. Penambahan fasilitas rawat inap puskesmas wonoboyo
		8. Fasilitasi Penyediaan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat
4	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	1. Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perkebunan
		2. Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian
		3. Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk
		4. Regenerasi petani
		5. Penyediaan bibit ternak dan ikan
		6. Peningkatan kapasitas petani dan peternak ikan

No	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Janji Tahunan Kepala Daerah (Program Aksi Tahun 2026)
5	Optimalisasi Pasar Daerah	1. Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif
		2. Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional
6	Penguatan dan pelestarian seni budaya	1. Informasi dan promosi pariwisata
		2. Desa wisata seni dan budaya pendukung ekonomi kreatif
		3. Rebranding Temanggung
7	Peningkatan kualitas tenaga kerja	Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
8	Pencegahan dan mitigasi bencana alam	1. Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana
		2. Pembentukan desa tangguh bencana
		3. Peningkatan kapasitas relawan destana
		4. Pencegahan longsor pada ruas jalan kabupaten
9	Pelestarian lingkungan hidup	1. Perlindungan sumber mata air
		2. Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air
		3. Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat
		4. Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah
		5. Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST
		6. Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas
		7. Aksi bersih lingkungan
		8. Penghijauan di lokasi lahan kritis
		9. Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis
		10. Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis
10	Penataan Garis Imajiner	1. Pembangunan city walk Jl. Jenderal Sudirman, Jl S. Parman, Jl R. Suprapto, Jl M.T. Haryono
		2. Rehabilitasi dan penataan kawasan alon-alon dan pendopo pengayoman
		3. Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan alon-alon
		4. Revitalisasi Pasar Kliwon
11	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten
		2. Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik
		3. Penyediaan air bersih dan sanitasi
		4. Penyediaan rumah layak huni
		5. Pembangunan city walk Parakan (Jln Diponegoro dan Jl Brigjen Katamso)
12	Pelayanan perijinan dan administrasi	Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perizinan di mall pelayanan publik
13	Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan
		2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM
		3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala

No	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Janji Tahunan Kepala Daerah (Program Aksi Tahun 2026)
		4. BUMD Sehat
		5. Peningkatan hubungan industrial
14	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	1. Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi
		2. Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik
		3. Penerapan merit system dan talent poll
		4. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi
		5. Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati
		6. Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, amanah)
		7. Peningkatan Kesejahteraan Ketua RT dan RW
		8. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (Tata Kelola Kelurahan)
15	Integrasi Data	1. Penyepakatan protokol interoperobilitas data antar PD
		2. Sinkronisasi dan integrasi data
16	Digitalisasi dan Smart City	1. Digitalisasi dan integrasi layanan digital
		2. Lapor Bupati
		3. Penyediaan dan peningkatan SDM
		4. Pembuatan superapps mobile
		5. Penyediaan infrastruktur jaringan internet di pedesaan
		6. Penyediaan infrastruktur jaringan internet di ruang publik strategis
17	Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	1. Pembentukan Satgas PPA di desa dan kecamatan
		2. Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan
		3. Pembentukan desa ramah perempuan dan anak
		4. Pemberdayaan ekonomi perempuan
		5. Penyediaan rumah singgah untuk keluarga pasien rujukan rumah sakit di Yogyakarta dan Semarang
		6. Peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dan marjinal
18	Pelayanan sosial dan bidang keagamaan	Penataan data program perlindungan sosial
19	Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	1. Peningkatan optimalisasi peran ormas dalam pembangunan daerah
		2. Pembinaan dan pemberdayaan ormas

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

6. Keselarasan prioritas pembangunan dengan prioritas nasional RPJMN 2025-2029

Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Sasaran PN RPJMN 2025-2029 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4. 17
Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Sasaran Prioritas Nasional RPJMN

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
1	PN 1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	
	Sasaran 1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.
	Indikator	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Harmoni
		Indeks Hak Asasi Manusia	
2	PN 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	
	Sasaran 1	Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.
	Indikator	Asia Power Index (Military Capability)	Indeks Harmoni
		Asia Power Index (Diplomatic Influence)	
		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	
		Global Cybersecurity Index	
		Indeks Keamanan Laut Nasional	
	Sasaran 2	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Indeks Ketahanan Pangan	PDRB per kapita
		Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	
	Sasaran 3	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	-
	Indikator	Indeks Ketahanan Energi	--
		Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	
	Sasaran 4	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik
	Indikator	Indeks Ketahanan Air Nasional	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing
		Kapasitas tampungan air (m3/kapita))	
		Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	
	Sasaran 5	Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)	PDRB per kapita
		Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	
		Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	
	Sasaran 6	Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
			lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan
	Indikator	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks kualitas lingkungan hidup
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)	
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)	
		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
		Indeks Kualitas Udara	
		Indeks Kualitas Air	
		Indeks Kualitas Lahan	
		Indeks Kualitas Air Laut	
3	PN 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	
	Sasaran 1	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik
	Indikator	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing
	Sasaran 2	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	PDRB per kapita
		Aset Perbankan/PDB (%)	
		Aset Dana Pensiun/PDB (%)	
		Aset Asuransi/PDB (%)	
		Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	
		Total Kredit/PDB (%)	
		Inklusi Keuangan (%)	
	Sasaran 3	Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	
		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	
		Rasio Kewirausahaan (%)	
	Sasaran 4	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Rasio PDB Pariwisata (%)	PDRB per kapita
		Devisa Pariwisata (Miliar USD)	
	Sasaran 5	Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	• Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
			kualitas layanan pendidikan dan kesehatan • Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan
	Indikator	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	PDRB per kapita Indeks Gini
4	PN 4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	
	Sasaran 1	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Indeks Pembangunan Manusia
		Harapan lama sekolah (tahun)	
		Rata-rata nilai PISA (a) Membaca (b) Matematika (c) Sains	
		Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: (a) Literasi Membaca (b) Numerasi	
		Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)	
		Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	
		Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	
	Sasaran 2	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Indeks Pembangunan Manusia
		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)	
		Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	
		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)c	
	Sasaran 3	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan
	Indikator	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Gender
		Indeks Perlindungan Anak	
		Indeks Pembangunan Pemuda	
		Indeks Ketimpangan Gender	
		Indeks Pembangunan Gender	
		Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	
		Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	
	Sasaran 4	Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
			peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Peringkat Indeks Inovasi Global	Tingkat Pengangguran Terbuka
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
		Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	
		Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	
	Sasaran 5	Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games	Indeks Pembangunan Manusia
		Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games	
		Peringkat pada Asian Games	
		Peringkat pada Asian Para Games	
		Peringkat pada SEA Games	
		Peringkat pada ASEAN Para Games	
		Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	
5	PN 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	
	Sasaran 1	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	PDRB per kapita
		Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	
	Sasaran 2	Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Biaya Logistik (% PDB)	PDRB per kapita
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	
6	PN 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
	Sasaran 1	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	• Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan • Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan
	Indikator	Tingkat kemiskinan (%)	Indeks Pembangunan Manusia PDRB per kapita Tingkat pengangguran terbuka Indeks Gini
		Tingkat kemiskinan ekstrem (%)	
		Proporsi penduduk kelas menengah (%)	
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	
		Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	
	Sasaran 2	Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
			merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik
	Indikator	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing
	Sasaran 3	Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik
	Indikator	Persentase desa mandiri (%)	Indeks Reformasi Birokrasi
	Sasaran 4	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%)	PDRB per kapita
		Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	
7	PN 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkobo, judi dan penyelundupan	
	Sasaran 1	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik
	Indikator	Indeks Pembangunan Hukum	Indeks integritas nasional
		Indeks Persepsi Korupsi	
		Indeks Materi Hukum	
		Indeks Integritas Nasional	
		Indeks Integritas Partai Politik	
	Sasaran 2	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik
	Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	Indeks Reformasi Birokrasi
		Indeks Pelayanan Publik	
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
		Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	
	Sasaran 3	Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik
	Indikator	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	Indeks integritas nasional
	Sasaran 4	Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	PDRB per kapita
	Sasaran 4	Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)	PDRB per kapita
		Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
	Sasaran 5	Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Tingkat Inflasi (%)	PDRB per kapita
8	PN 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
	Sasaran 1	Terwujudnya kehidupan beragam yang maslahat dan berkebudayaan maju	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya
	Indikator	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks Harmoni
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	
	Sasaran 2	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan
	Indikator	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	Indeks kualitas lingkungan hidup

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

Persandingan program prioritas dan program nomenklatur, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 18
Persandingan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan Program Nomenklatur

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
1	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		• Indeks Pembangunan Manusia (angka) • Tingkat Pengangguran Terbuka • PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	**Pelayanan dasar bidang pendidikan**	
		1) Tidak adanya pungutan yang dibebankan pada peserta didik 2) Meningkatnya akses pendidikan anak usia sekolah SD dan SMP (partisipasi murni) sebesar 100%.	- Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun - Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 25 tahun - Harapan Lama Sekolah	Akses pendidikan untuk semua warga	Program Pengelolaan Pendidikan
		1) Meningkatnya kualitas pendidikan guru. Misal strata pendidikan S1 2) Meningkatnya Jumlah guru yg sdh bersertifikasi (persentasenya dilihat dari baseline terakhir) 3) Meningkatnya kapasitas guru dalam menggunakan metode pembelajaran dan pengajaran yang sesuai dengan kapasitas tumbuh kembang anak	- persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik - persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik - persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik - persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik - Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru	Program Pengelolaan Pendidikan
		Meningkatnya kedekatan antara siswa dan pimpinan daerah, terutama dalam penyampaian gagasan pembangunan	- Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun - Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun - Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun kesetaraan	Pimpinan daerah sambang sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan
		1) Data pendidikan yang akurat, terpilah, akuntabel, dan andal 2) Meningkatnya Pemanfaatan data oleh PD dalam mendorong pengembangan pendidikan maupun non pendidikan	- Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang PAUD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	Penguatan database pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		1) Sistem informasi yang terbarukan dan mudah diakses oleh siswa 2) Meningkatnya jumlah siswa yang menerima beasiswa dari pemerintah maupun non pemerintah	- Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang PAUD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	Fasilitasi desiminasi informasi terkait pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		1) Adanya usulan dan pengawalan usulan pembangunan SMA pada	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	Fasilitasi usulan Pembangunan gedung SMA/SMK	

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		pemerintah provinsi 2) Terbangunnya SMA/SMK di kecamatan yang belum ada sekolahnya; Adanya pembangunan SMKI 1 unit, atau SMK yang memiliki pelatihan khusus.			
		1) Berkurangnya jumlah ruang kelas pada SD & SMP yang rusak atau tidak layak digunakan 2) Meningkatnya kualitas infrastruktur pendidikan pada tingkat SD dan SMP	- Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	Rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah SD dan SMP	Program Pengelolaan Pendidikan
		Meningkatnya kelembagaan PAUD	- Proporsi PAUD terakreditasi minimal B - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang PAUD kondisi baik - Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik - Rasio Siswa/Guru PAUD - APM PAUD (5-6 tahun) - Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD (Mendukung Wajar Dikdas 13 Tahun)	Pemberdayaan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan
		Tersedianya anggaran untuk pembayaran pengajar keagamaan	- Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun - Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun - Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun kesetaraan	Insentif kepada Guru Keagamaan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Tersedianya air bersih dan sanitasi di Satuan Pendidikan	- Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	Penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan
		Meningkatnya literasi membaca melalui perpustakaan daerah	- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat - Tingkat Kegemaran Membaca - Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Peningkatan Literasi Membaca melalui perpustakaan daerah	Program Pembinaan Perpustakaan
				Pengembangan atlet dan prestasi olahraga	
		- Kompetisi Rutin Olahraga Unggulan yang tidak hanya mencetak atlet tetapi juga menarik kunjungan wisatawan- Meningkatnya kerjasama dengan multipihak yg terkait dengan	- Persentase Atlet Unggulan- Persentase Cabang Olah Raga Unggulan- Cakupan pelatih yang bersertifikat- Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	Pemajuan cabang olahraga unggulan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		pengembangan cabang olahraga unggulan			
		- Pemberian Insentif & Pembinaan untuk Atlet Berprestasi secara berkelanjutan - Fasilitas/peralatan olahraga unggulan yang memenuhi standar nasiona		kesejahteraan dan profesionalitas atlet	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		- Manajemen klub olahraga unggulan yang profesional dan mandiri - Temanggung dipercaya untuk menyelenggarakan event olahraga unggulan ditingkat provinsi		Pembinaan tata kelola pengelolaan klub dan penyelenggaraan event olahraga secara profesional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
				Pelayanan dasar bidang kesehatan	
		Meningkatnya kepesertaan BPJS dan akses layanan	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Peningkatan kualitas layanan kesehatan (Puskesmas)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Cakupan Penduduk Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Pemeriksaan kesehatan gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya pelayanan posyandu di tingkat desa	Persentase Posyandu aktif bidang kesehatan	Peningkatan pelayanan posyandu di tingkat desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan di RSUD	Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah Sakit	Peningkatan kualitas layanan RSUD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Fasilitas Pelayanan kesehatan untuk UKM UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Pembangunan gedung poliklinik RSUD Kabupaten temanggung	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola	Proporsi fasilitas kesehatan sesuai standar	Penambahan fasilitas rawat inap puskesmas wonoboyo	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Tersedianya lokasi tanah untuk Sekolah Rakyat	-	Fasilitasi Penyediaan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat	-

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
				Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	
		Meningkatnya produksi dan kualitas hasil pertaniann serta peningkatan efisiensi produksi pertanian	Produktivitas Padi	Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perkebunan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Produktivitas jagung		
			Produktivitas bawang putih		
			Produktivitas bawang merah		
			Produktivitas cabai rawit		
			Produktivitas cabai keriting		
			Produktivitas tembakau		
			Produktivitas kopi robusta		
			Produktivitas kopi arabika		
			Jumlah produksi daging ternak besar		
			jumlah produksi daging ternak kecil		
			jumlah produksi ternak unggas		
			jumlah produksi telur		
			Persentase kelahiran pedet		
			Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama		
		Meningkatnya penyediaan infrastruktur pertanian yang sesuai dengan fungsinya	Persentase Prasarana yang digunakan		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Meningkatnya fasilitasi pengendalian dan penanggunlan bencana pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM petani dan penyuluh	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi		Program Penyuluhan Pertanian
		Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangans	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
		Meningkatnya promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	- Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri - Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi	Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
			promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota		
		Meningkatnya industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	- Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten - Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Produktivitas Padi	Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Produktivitas jagung		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
			Produktivitas bawang putih		
			Produktivitas bawang merah		
			Produktivitas cabai rawit		
			Produktivitas cabai keriting		
			Produktivitas tembakau		
			Produktivitas kopi robusta		
			Produktivitas kopi arabika		
		Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Prasarana yang digunakan		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Meningkatnya penyuluhan pertaninan	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	Regenerasi petani	Program Penyuluhan Pertanian
			Persentase Peningkatan kelas kelp tani		
		Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Jumlah produksi daging ternak besar	Penyediaan bibit ternak dan ikan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			jumlah produksi daging ternak kecil		
			jumlah produksi ternak unggas		
			jumlah produksi telur		
			Persentase kelahiran pedet		
		Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Prasarana yang digunakan		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan		Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyrakat veteriner
			Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat		

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	jumlah produksi perikanan budidaya		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Meningkatnya penyuluhan pertaninan	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	Peningkatan kapasitas petani dan peternak ikan	Program Penyuluhan Pertanian
			Persentase Peningkatan kelas kelp tani		
		Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	jumlah produksi perikanan budidaya		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Prasarana yang digunakan	Pembangunan greenhouse	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				Optimalisasi Pasar Daerah	
		Meningkatnya Pemerataan infrastruktur penunjang aktivitas perekonomian	Persentase pedagang yang menggunakan transaksi digital	Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Persentase pelaku usaha informal yang difasilitasi		
			Persentase pasar daerah kondisi baik/cukup baik	Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				Penguatan dan pelestarian seni budaya	
		Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Pelaku Budaya	Pembentukan dewan kesenian di Kecamatan	Program Pengembangan Kebudayaan
			Jumlah Kelompok kesenian	Pertemuan pegiat seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan
		Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Penghargaan pada seniman dan budayawan	Program Pengembangan Kebudayaan
			Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan dan dipelihara	Pentas seni di ruang publik	Program Pengembangan Kebudayaan
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Daya tarik Wisata	Pelaku seni dan budaya lokal go to school	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
			Jumlah Fasilitasi destinasi pariwisata	Regulasi dan Pemakaian baju adat khas Temanggung	program Pengembangan Kebudayaan
				Festival seni dan budaya tahunan Temanggung	Program Pengembangan Kebudayaan
		Meningkatnya pemasaran pariwisata	Jumlah destinasi tujuan wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinbudpar	Informasi dan promosi pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
		Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Ekonomi Kreatif yang berpotensi mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Desa wisata seni dan budaya pendukung ekonomi kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi	Rebranding Temanggung	
				Peningkatan kualitas tenaga kerja	
		Tersedianya tenaga kerja terampil dan siap kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	- Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi - Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan - Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan - Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja2. Program Penempatan Tenaga Kerja
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah	
2	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**Pencegahan dan mitigasi bencana alam**	
		Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana
		Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pembentukan desa tangguh bencana	Program Penanggulangan Bencana
		Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Peningkatan kapasitas relawan destana	Program Penanggulangan Bencana
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Meningkatnya layanan pemadaman yang dilakukan oleh petugas damkar	Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Meningkatnya jumlah Pos Pemadam Kebakaran dan SDM untuk respon bencana	Meningkatnya luas wilayah manajemen kebakaran	Penambahan pos dan SDM untuk respon bencana	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		Tersedianya sumber air untuk penanganan kebencanaan	Meningkatnya layanan pemadaman yang dilakukan oleh petugas damkar	Penyediaan sumber air untuk penanganan kebencanaan	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyediaan early warning system	Program Penanggulangan Bencana
		Meningkatnya layanan pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	Persentase layanan pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	Pencegahan longsor pada ruas jalan kabupaten	Program Penanggulangan Bencana
				Pelestarian lingkungan hidup	
		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	Perlindungan sumber mata air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah TPS 3R	Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
		Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah TPS 3R	Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah (IUP) - Persentase sampah yang terkelola - Cakupan Pelayanan persampahan	Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST	Program Pengelolaan Persampahan
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah (IUP) - Persentase sampah yang terkelola - Cakupan Pelayanan persampahan	Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas	Program Pengelolaan Persampahan
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah (IUP) - Persentase sampah yang terkelola - Cakupan Pelayanan persampahan	Aksi bersih lingkungan	Program Pengelolaan Persampahan

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase luas lahan kritis tertangani	Penghijauan di lokasi lahan kritis	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase luas lahan kritis tertangani	Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase luas lahan kritis tertangani	Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		- Persentase Infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing - Indeks Integritas Nasional - Indeks Reformasi Birokrasi		
				Penataan Garis Imajiner	
		Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik	Pembangunan city walk Jl. Jenderal Sudirman, Jl S. Parman, Jl R. Suprapto, Jl M.T. Haryono	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara	Rehabilitasi dan penataan kawasan alon-alon dan pendopo pengayoman	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		Terlaksananya regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan Alun-Alun	Jumlah Produk Hukum Kelembagaan Pengelolaan Alun-alun	Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan alon-alon	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya keteraturan tata ruang kota yang inklusif	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	Revitalisasi dan penataan kawasan stadion Bhumi Pala	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Fasilitasi Destinasi Pariwisata	Revitalisasi Taman Kartini	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Meningkatnya keteraturan tata ruang kota yang inklusif	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan stadion Bhumi Pala	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur penunjang aktivitas perekonomian	Persentase pasar daerah kondisi baik/cukup baik	Revitalisasi Pasar Kliwon	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
				Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan dan pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan
		Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik	Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Meningkatnya penyediaan infrastruktur pertanian yang sesuai dengan fungsinya	Persentase prasarana yang digunakan	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar pertanian (JUT dan Kereta Gantung)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
		Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Penyediaan air bersih dan sanitasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	- Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman - Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Meningkatnya Kawasan Permukiman	- Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak - Persentase penanganan rumah tidak layak huni	Penyediaan rumah layak huni	Program Kawasan Permukiman
		Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik	Pembangunan citywalk Parakan (Jln. Diponegoro dan Jl. Brigjen Katamso)	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik	Pembangunan citywalk Ngadirejo (Perkotaan Ngadirejo)	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
				Pelayanan perijinan dan administrasi	
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perijinan di mall pelayanan publik	Program Promosi Penanaman Modal
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		Terlaksananya kemitraan Usaha antara UMKM dengan perusahaan berskala besar	Jumlah fasilitasi kemitraan usaha antara UMKM dengan Perusahaan perskala besar	Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal yang terintegrasi	Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala	Program Promosi Penanaman Modal
		Meningkatnya jangkauan dan Strategi promosi penanaman modal	Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi	Program Promosi Penanaman Modal
		Meningkatnya BUMD dengan opini WTP	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	BUMD Sehat	Program Perekonomian dan Pembangunan
		Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan serta bermartabat	- Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (IUP)- Persentase perusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan- Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK - Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja - Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	Peningkatan hubungan industrial	Program Hubungan Industrial
				Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daeah	Persentase AKIP Perangkat Daearah berpredikat BB	Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Kepegawaian yang adil sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan latar belakang dari ASN	Indeks Sistem Merit	Penerapan merit system dan talent poll	Program Kepegawaian Daerah
		1. Meningkatnya Pelayanan pendaftaran penduduk 2. Meningkatnya pelayanan Pencatatan Sipil 3. Meningkatnya penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi	1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Penelitian Dan Pengembangan 4. Program Riset Dan Inovasi

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
					1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Meningkatnya Kepuasan Obyek Pemeriksaan terhadap pembinaan dan pengawasan Inspektorat			1. Program penyelenggaraan pengawasan 2. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
		Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah			1. Pogram Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Kualiatas Kinerja Pelayanan Birokrasi			1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Perekonomian dan Pembangunan 3. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Fungsi Dprd Secara Optimal			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
		Meningkatnya kinerja kecamatan dan kepuasan masyarakat			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		Terwujudnya fasilitasi antara Perangkat Daerah dengan Pemerintah Desa	Presentase penyusunan dokumen perencanaan Desa tepat waktu	Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati	Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Terwujudnya pelayanan di desa yang nyaman dan memuaskan masyarakat	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Berkinerja baik	Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, amanah)	Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Terwujudnya SDM (RT dan RW) yang mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa	Presentase laporan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW,PKK,Posyandu, LPMD dan Karang Taruna)	Peningkatan Kesejahteraan Ketua RT & RW	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat
		Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (Tata Kelola Kelurahan)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
				Integrasi Data	
		Terwujudnya keselarasan dan keterpaduan pertukaran data antar PD guna mendukung efisiensi layanan publik berbasis data	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	Penyepakatan protokol interoperobilitas data antar PD	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		Terciptanya satu sumber data terintegrasi yang akurat dan dapat diakses lintas instansi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making)	Persentase layanan publik secara elektronik	Sinkronisasi dan integrasi data	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Terwujudnya pemanfaatan data kependudukan	Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Digitalisasi dan Smart City	
		Peningkatan aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan	Persentase layanan publik secara elektronik	Digitalisasi dan integrasi layanan digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Terselenggaranya sistem pelaporan masyarakat yang responsif dan transparan, serta meningkatnya partisipasi warga dalam pengawasan dan pembangunan daerah berbasis digital	Persentase layanan publik secara elektronik	Lapor Bupati	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Meningkatnya kompetensi SDM di lingkungan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan inisiatif digital dan smart city secara berkelanjutan	Persentase layanan publik secara elektronik	Penyediaan dan peningkatan SDM	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Meningkatnya akses masyarakat desa terhadap layanan internet yang andal untuk mendukung layanan publik secara digital	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	Peningkatan kapasitas operator layanan digital di tingkat perangkat daerah dan pemerintah desa	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Tersedianya satu platform digital terpadu yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan	Persentase layanan publik secara elektronik	Pembuatan superapps mobile	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		secara cepat, efisien, dan user-friendly			
		Meningkatnya akses masyarakat desa terhadap layanan internet yang andal untuk mendukung layanan publik secara digital	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	Penyediaan infrastruktur jaringan internet di pedesaan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Tersedianya akses internet gratis dan merata di ruang publik strategis guna memperluas inklusi digital dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan digital	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	Penyediaan infrastruktur jaringan internet di Ruang publik strategis	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan		Indeks Gini Indeks Pembangunan Gender		
				Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	
		Meningkatnya Akses terhadap Layanan Perlindungan perempuan dan anak	- Rasio peningkatan pelayanan dampak kekerasan pada perempuan dan anak - Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani - Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan - Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani - Rasio kasus kekerasan terhadap anak	Pembentukan Satgas PPA	Program Perlindungan Perempuan
		Tersedianya Tempat Perlindungan yang Aman dan Layak bagi korban kekerasan	- Kabupaten Layak Anak - Prosentase terbentuknya DRPPA	Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan	Program Pemenuhan Hak Anak
		1) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dlm Kewirausahaan yg Berperspektif Gender 2) Meningkatnya Peran Ibu & Keluarga dlm Pendidikan/Pengasuhan Anak 3) Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan & Anak	- Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender - Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas	Pembentukan desa ramah perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perempuan	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	Pemberdayaan ekonomi perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Meningkatnya Akses Korban terhadap Bantuan Darurat	- Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	Penyediaan hotline/panic button	Program Peningkatan Kualitas Keluarga

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
			- Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas		
		Tersedianya rumah singgah pasien rujukan dari kabupaten	Presentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan rumah singgah untuk keluarga pasien rujukan rumah sakit di Yogyakarta dan Semarang	Program: Rehabilitasi Sosial
		- Meningkatnya kualitas data Fakir Miskin - Meningkatnya kualitas hidup lansia	- Presentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti - Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	Peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dan marjinal	Program: Rehabilitasi Sosial Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Pelayanan sosial dan bidang keagamaan	
		Meningkatnya kualitas data Fakir Miskin	Persentase desa dan kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Penataan data program perlindungan sosial	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial
5	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.		Indeks Harmoni	**Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah**	
		Meningkatnya ormas yang berdaya	Persentasae ormas yang mendapat pembinaan	Peningkatan optimalisasi peran kelompok masyarakat dan dunia swasta dengan melibatkan akademisi dalam pembangunan daerah	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya
				Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, dunia swasta dan akademisi	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

4.4. DUKUNGAN SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH

4.4.1. Dukungan terhadap Asta Cita oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung mendukung dalam perwujudan outcome prioritas dalam Asta Cita dalam bentuk program nomenklatur pada perangkat daerah sebagai berikut.

Tabel 4. 19
Outcome Prioritas dan Program dalam mendukung Asta Cita di Kabupaten Temanggung Tahun 2026

No	Asta Cita	Outcome Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Asta Cita	Perangkat Daerah	Ket
1	Asta Cita 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusi	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Program Penanggulangan Bencana	BPBD	
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	SATPOL PP DAMKAR	
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOL PP DAMKAR	
		Terakselerasinya transformasi Pemerintah digital di daerah	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinkominfo	
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinkominfo	
		Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Bakesbangpol	
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol	
2	Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR	
		Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR	

No	Asta Cita	Outcome Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Asta Cita	Perangkat Daerah	Ket
	ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	tata ruang			
		Meningkatnya ketahanan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPPP	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPPP	
		Lingkungan Hidup Berkualitas	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH	
			Program Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH	
		Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinkominfo	
		Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKPPP	
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	DKPPP	
		Meningkatnya Produksi Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP	
3	Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya pemerataan Penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	-	Belum ada
		Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub	
		Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	-	Belum ada
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinkopdag	
		Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinbudpar	
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinbudpar	

No	Asta Cita	Outcome Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Asta Cita	Perangkat Daerah	Ket
		MeningkatnyaKontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinbudpar	
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinbudpar	
4	Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindikpora	
		Kesehatan Untuk Semua	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	
		Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Program Pemberdayaan Sosial	Dinsos	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinsos	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinsos	
		Meningkatnya kinerja Pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker	
			Program Hubungan Industrial	Dinperinaker	
		Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPAPPKB	
			Program Perlindungan Khusus Anak	DPPPAPPKB	
		Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Program Pencatatan Sipil	Dindukcapil	
		Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPPAPPKB	
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPPAPPKB	

No	Asta Cita	Outcome Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Asta Cita	Perangkat Daerah	Ket
		Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dindikpora	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dindikpora	
		Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinpusip	
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Dinpusip	
5	Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR	
		Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR	
		Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub	
		Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	
		Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	-	Belum ada
			Program Pengembangan Ekspor	Dinkopdag	
		Tercapainya pertumbuhan pengolahan nonmigas sektor industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinperinaker	
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	-	Belum ada
6	Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	-	Belum ada
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	DPRKPLH	
		Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Program Pemberdayaan Sosial	Dinsos	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinsos	

No	Asta Cita	Outcome Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Asta Cita	Perangkat Daerah	Ket
		Meningkatnya kinerja Pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker	
			Program Hubungan Industrial	Dinperinaker	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	Program Penataan Desa	Dinpermades	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinpermades	
7	Asta Cita 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Terakselerasinya transformasi Pemerintah digital di daerah	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinkominfo	
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinkominfo	
		Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinkominfo	
		Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinkominfo	
		Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Bakesbangpol	
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol	
8	Asta Cita 8: Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Program Penanggulangan Bencana	BPBD	
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	SATPOL PP DAMKAR	
			Program Pencegahan, Penanggulangan,	SATPOL PP DAMKAR	

No	Asta Cita	Outcome Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Asta Cita	Perangkat Daerah	Ket
			Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		
		Lingkungan Hidup Berkualitas	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH	
			Program Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	Program Penataan Desa	Dinpermades	
		Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinpermades	
			Program Pengembangan Kebudayaan	Dinbudpar	
		Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinbudpar	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Dinpusip	
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Dinpusip	
		Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	Program Pengelolaan Arsip	Dinpusip	
		Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Bakesbangpol	
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol	

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4.2. Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (ProSN) oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

Program Strategis Nasional merupakan penerjemahan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mencakup Prloritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah

dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Temanggung mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional melalui program dan aktivitas riil sebagai berikut:

Tabel 4. 20
Dukungan Program Rill terhadap Program Strategis Nasional

No	ProSN	Dukungan Program Riil
1	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	- bantuan sosial, bantuan siswa miskin, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, bantuan dan rehabilitasi kelompok berkebutuhan khusus, pelayanan kesehatan dan pendidikan - peningkatan akses pekerjaan, peningkatan keterampilan dengan vokasi dan pelatihan, padat karya, pengembangan UMKM, pemberian dan penguatan modal untuk perorangan maupun kelompok - peningkatan akses pelayanan dasar infrastruktur, pendidikan, kesehatan dll, peningkatan konektivitas antar wilayah
2	Sekolah Rakyat	- Fasilitasi kesiapan lahan - Fasilitasi penyediaan guru dan tenaga kependidikan - Fasilitasi calon siswa/murid melalui data kemiskinan daerah
3	Pembangunan Tiga Juta Rumah	- Penyediaan regulasi tentang pembebasan BPHTB bagi MBR melalui Perbup Temanggung Nomor 48 Tahun 2024 - Penyediaan regulasi tentang pembebasan retribusi PBG bagi MBR melalui Perbup Nomor 49 Tahun 2024 - Pembebasan BPHTB bagi MBR di Kabupaten Temanggung - Pembebasan retribusi PBG untuk MBR di Kabupaten Temanggung - Pemberian subsidi pembangunan rumah baru bagi MBR
4	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri dan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Penyediaan regulasi terkait pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah melalui Perbup Temanggung Nomor 11 Tahun 2021
5	Jaminan Kesehatan Nasional	- Penyediaan regulasi tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional di Kabupaten temanggung melalui instruksi bupati temanggung Nomor 5 tahun 2023 - Penyediaan regulasi tentang pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan melaui Perbup Temanggung Nomor 21 tahun 2025 - Penyediaan regulasi tentang sistem kesehatan kabupaten temanggung melalui Perda Kabupaten Temanggung Nomor 2 tahun 2022 - Pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional
6	Makan Bergizi Gratis	- Pembentukan Satgas MBG Kabupaten Temanggung - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala oleh Tim Satgas MBG Kabupaten di Dapur SPPG - Rapat koordinasi pelaksanaan tindak lanjut permasalahan SPPG - Pelatihan penjamah makanan, Sertifikat SLHS (88 SPPG) Pengambilan sampel Air Dan makanan di SPPG, Pemeriksaan Kualitas Lingkungan, Monitoring dan Evaluasi Menu Program dan AKG program MBG

No	ProSN	Dukungan Program Riil
7	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	- Pemberian bantuan interaktif flat pannel (IFP) pada pendidikan dasar dan menengah - Pemenuhan akreditasi sekolah pada pendidikan dasar dan menengah - Penetapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi - Penyediaan regulasi SPM pendidikan di daerah (perbup temanggung nomor 11 tahun 2024) - Penyediaan regulasi SPM pendidikan PAUD (Perbup Temanggung nomor 81 tahun 2021) - Penyediaan regulasi penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD (Perbup Temanggung nomor 121 tahun 2021) - Penyediaan regulasi tentang penyelenggaraan pendidikan (Perda Temanggung Nomor 3 tahun 2025)
8	Pengendalian Inflasi	- Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Temanggung - Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Pangan Murah - Penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian Kabupaten Temanggung
9	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	- Pelaksanaan sosialisasi KDKMP pada 289 desa/kelurahan - Pelaksanaan mandatory declare oleh 289 desa/kelurahan - Fasilitasi penyediaan lahan - Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dalam pembangunan KDKMP di Kabupaten Temanggung - Pembentukan Satgas Percepatan pembentukan dan penyelenggaraan KDKMP kabupaten Temanggung
10	Kemudahan Perizinan di Daerah	- Penyediaan regulasi tentang penyelenggaraan perizinan berusaha melalui Perda Temanggung Nomor 6 tahun 2022 - Penyediaan layanan dan penerbitan PKKPR

Sumber: Bapperida Temanggung, 2026.

Adapun mendukung implementasi Program Strategis Nasional (ProSN) dalam program nomenklatur disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 21
Dukungan terhadap Program Strategis Nasional oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah
1	Penanggulangan Kemiskinan	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	**1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**DINSOS**
			1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
			1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		
			1.06.05.2.02.0009 - Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin		
			2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		**DKPPP**
			2.09.04.2.02. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah
			2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Sekolah Rakyat	**1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**DINSOS**
			1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
			1.06.05.2.02.0008 – Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
			2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINGDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		**DPRKPLH**
			2.11.06.2.01- **Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		
			2.11.06.2.01.0001- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	
		Pembangunan 3 juta rumah	**1.03.08 – PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**		**DPUPR**
			1.03.08.2.01 – Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
			1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah
			1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		**DPRKPLH**
			1.04.02.2.03 – Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
			1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	
			1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.04 – PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		**DPRKPLH**
			1.04.04.2.01 – Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
			1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang diperbaiki	
			1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		**DPRKPLH**
			1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		
			1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	
			1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	
2	Ketahanan Pangan	Swasembada Panan (Irigasi untuk mendukung swasembada pangan)	**1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		**DPUPR**
			1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah		

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah
			Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			1.03.02.2.01.0127 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku		
			1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	
			1.03.02.2.02.0023 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	
			1.03.02.2.02.0026 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	
		Operasionalisasi BPP	**3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		**DKPPP**
			3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
			3.27.07.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		
			3.27.07.2.01.0016 - Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa		
		Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/ Lumbung Pangan/*Food Estate*)	**1 03 12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		**DPUPR**
			1.03.12.2.01. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		
			1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	
			2.09.02- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		**DKPPP**
			2 09 02 2.01- Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot		

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah
			2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	
			2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	
			3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		**DKPPP**
			3.27.03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian		
			3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	
			3.27.03.2.01.0014 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	
		Pangan Akuatik	**3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**DKPPP**
			3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
			3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	
			3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
			3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		
			3.25.05.2.01.0012 - Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa	

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah
				kepatuhannya	
		Kampung Nelayan Merah Putih	**3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**DKPPP**
			3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			3.25.03.2.02.0001-Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	
			3.25.03.2.02.0002-Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	
			3.25.03.2.02.0004-Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha nelayan Skala Kecil	
3	Kesehatan Untuk Semua	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	**1.02.02- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**DINKES**
			1.02.02.2.02-Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			1.02.02.2.02.0015-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0046-Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	
			1.03.03- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		**DPUPR**
			1.03.03.2.01-Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
			1.03.03.2.01.0028-Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	
			2.09.03- PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		**DKPPP**
			2.09.03.2.01-Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah
			2.09.03.2.01.0007- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			2.14.04- PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		**DPPPAPPKB**
			2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
			2.14.04.2.02.0005- Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis	**1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**DINKES**
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0056- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	
			1.02.02.2.02.0057- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	
			2.12.04- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		**DINDUKCAPIL**
			2.12.04.2.04- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
			2.12.04.2.03.0004- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
		Jaminan Kesehatan Nasional	**1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah
			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			1.06.05- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		**DINSOS**
			1.06.05.2.02- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		
			1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	
			2.12.04- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		**DINDUKCAPIL**
			2.12.04.2.04- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
			2.12.04.2.03.0004- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
		Penuntasan Tuberkulosis (TBC)	**1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**DINKES**
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			1.02.02.2.02.0011- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0040- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			1.06.05- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		**DINSOS**
			1.06.05.2.02- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		
			1.06.05.2.02.0003- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.12.04- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		**DINDUKCAPIL**

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah
			2.12.04.2.04- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
			2.12.04.2.03.0004- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
		Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas Di Kabupaten/ Kota	**1.02.02- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**DINKES DAN RSUD**
			1.02.02.2.01- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
			1.02.02.2.01.0022- Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	
			1.02.03- PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		**DINKES**
			1.02.03.2.02- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		
			1.02.03.2.02.0002- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	
		Makan Bergizi Gratis	**1.01.02- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		**DINDIKPORA**
			1.01.02.2.01- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
			1.01.02.2.01.0049- Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	
			1.02.04- PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		**DINKES**
			1.02.04.2.04- Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan		

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah
			Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
			1.02.04.2.04.0001- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
			2.09.05- PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		**DKPPP**
			2.09.05.2.01- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		
			2.09.05.2.01.0007- Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	
			3.25.06- PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		**DKPPP**
			3.25.06 2.02- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		
			3.25.06.2.02.0002- Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
4	Perluasan Akses Pendidikan	Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	**1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		**DINDIKPORA**
			1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
			1.01.02.2.01.0038- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
			1.01.02.2.02.0051- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi	

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah
			dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
			1.01.02.2.03.0025- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
		Digitalisasi Pembelajaran	**1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		**DINDIKPORA**
			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
			1.01.02.2.02.0060- Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	
			1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
			1.01.02.2.03.0039- Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	
			1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
			1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
5	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi	**2.09.03- PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		**DKPPP**
			2.09.03.2.01- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
			2.09.03.2.01.0008- Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
			2.09.03.2.01.0020- Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	-	
			3.30.04- PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		**DINKOPDAG**

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah
			3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
			3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
		Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	**2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**		**DINKOPDAG**
			2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Adapun dukungan Pemerintah dalam mendukung Tematik Pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4. 22
Dukungan terhadap Tematik Pembangunan
oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

No.	Tematik	Indikator Tematik	Satuan	*Leading Sector*	Sub Kegiatan
1	Pengarustamaan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
		Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai		1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
					2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja
					2.08.02.2.01.0015 Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
					2.17.07.2.01.0021 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha
2	Perlindungan Anak	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	Persentase	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks		1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
					1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
					2.08.06.2.02.0012 Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota

No.	Tematik	Indikator Tematik	Satuan	*Leading Sector*	Sub Kegiatan
					5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
3	Masyarakat Adat	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diakui	%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
					2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
4	Ekonomi Syariah	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	Sekretariat Daerah	1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
		Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin		2.17.07.2.01.0027 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk
					3.26.02.2.04.0019 Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha
					3.31.02.2.01.0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
					4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
6	Penanggulangan Bencana	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	Persentase	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai		1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
					1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
					1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
					1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

4.4.3. Dukungan terhadap Program Prioritas dan Program Delegasi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung program prioritas dan Program Delegasi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Program delegasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 34 program/kegiatan yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, antara lain:

Tabel 4. 23
Dukungan terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

No	Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas Provinsi	Perangkat Daerah
1	Melahirkan Pemerintahan yang *good clear government* dan *collaborative governance* melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	SETDA

No	Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas Provinsi	Perangkat Daerah
	dan kualitas ASN dan perangkat desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DINPERMADES
2	Pesantren obah melalui penambahan dana pengembangan pesantren	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
3	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Program Perekonomian dan Pembangunan	SETDA
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DINBUDPAR
		Program Pemasaran Pariwisata	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	
4	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan *go international*, Sistem Informasi Desa (SID) dan tim tanggap bencana	Program Peningkatan Kerjasama Desa	DINPERMADES
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	
		Program Penanggulangan Bencana	BPBD
5	Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan pusat rekreasi dan promosi pembangunan dan gelanggang olahraga internasional	Program Pengembangan Perumahan	DPRKPLH
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD
		Program Perekonomian dan Pembangunan	SETDA
		Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
6	Penanggulangan bencana dan keberlanjutan lingkungan melalui “Mageri Segoro” untuk mengamankan garis pantai	Kabupaten Temanggung tidak memiliki pantai	
7	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan *day care* untuk buruh di kawasan industri	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
8	Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	BANKESBANGPOL
9	Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
10	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk lapangan kerja	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	DINDIKPORA
11	Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, guru, santri, penghala quran untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
		Program Kesejahteraan Rakyat	SETDA
		Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

Tabel 4. 24
Dukungan terhadap Program Intervensi Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

No	Program Intervensi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Intervensi Provinsi	Perangkat Daerah
1	Integrasi Aplikasi Pelayanan kedalam "Jateng Ngopeni"	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
2	*Smart Response* diwujudkan dengan *Call Center* 24 Jam "Jateng Nglakoni"	-	-
3	Kantor Gubernur Rumah Rakyat	-	-
4	Digitalisasi Manajemen Arsip	Program Pengelolaan Arsip	DINPUSIP
5	Penetapan Zona Integritas/Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD	Program Pendampingan dan Asistensi	INSPEKTORAT
6	Penguatan APIP dengan Menambah Anggaran dan Personil untuk Pengawasan mulai dari Tingkat Provinsi sampai Tingkat Desa	Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
7	Riset Potensi Daerah secara Sukarela berbasis Potensi Wilayah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
8	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan Pemberdayaan Ekonomi bagi Disabilitas, Perempuan, Pelaku Ekonomi Kreatif dan *Sport Center*)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPAPPKB
		Program Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	DINBUDPAR
9	Membangun 1.000 Desa/Kampung Wisata Baru	Program Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	DINBUDPAR
10	Pengembangan Destinasi Wisata Alam, Budaya dan Religi berdasarkan Potensi Wilayah		
	a. Pengembangan Wisata Alam 1. Dieng – Wonosobo 2. Geopark Karangsambung – Kebumen	-	-
	b. Pengembangan Wisata Budaya 1. Rambut Gimbal – Dieng 2. Desa Adat Bamokeling – Banyumas	-	-
	c. Pengembangan Wisata Religi 1. Kyai Soleh Darat – Kota Semarang 2. Sunan Kalijaga – Demak 3. Sunan Muria – Kudus 4. Klenteng Liong Hok Bio – Kota Magelang 5. Gereja Salib Putih – Salatiga 6. Prambanan dan Borobudur – Magelang	-	-
11	Pengembangan Destinasi Wisata berbasis Global dengan Prioritas Pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng dan Rawa Pening	-	-
12	Mendorong Pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas sebagai Sentra Ekonomi Jawa	-	-
13	Pengembangan Kebudayaan dan Cagar Budaya untuk Pertumbuhan Ekonomi serta		

No	Program Intervensi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Intervensi Provinsi	Perangkat Daerah
	Dukungan terhadap Kesejahteraan Budayawan Lokal		
	a. Pembinaan Kebudayaan Lokal Bekerjasama dengan ISI Surakarta	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
	b. Revitalisasi Taman Cagar Budaya	-	-
14	Penguatan Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINPERINAKER
		Program Penempatan Tenaga Kerja	
15	Percepatan Penanganan Stunting melalui Pemberian Suplemen dan Pemenuhan Gizi bagi Balita dan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
16	Menyediakan Paket Pendidikan Gratis (Seragam, Buku Pembelajaran dan Akses Internet)	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
17	Peningkatan Bantuan Keuangan Desa	-	-
18	Jambanisasi 100%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH
19	Pembelian Hasil Panen Petani dan Nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP
		Program Penyuluhan Pertanian	
20	Program Asuransi Gagal Panen bagi Petani dan Nelayan melalui Jamkrida	-	-
21	Mendorong Pembangunan Sistem Desalinasi khususnya pada Pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah untuk memenuhi Suplai Air Bersih dan mengatasi Dampak Eksploitasi Air Tanah (Pekalongan, Demak dan Semarang)	-	-
22	Mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru	-	-

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

Tabel 4. 25
Dukungan terhadap Program Aksi Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

No	Program Aksi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Aksi Provinsi	Perangkat Daerah
1	Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai Pusat Pelayanan Publik berbasis wilayah	-	-
2	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	BAGIAN HUKUM
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
3	Pengembangan *Sister Province*	-	-
4	Membentuk satuan tugas pengamanan data digital "*Cyber Security* Jawa Tengah" dengan memberdayakan ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK	Program Penyelenggaraan Persandian Dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DINKOMINFO
5	Program Kerjasama Forkopimda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BAGIAN HUKUM

No	Program Aksi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Aksi Provinsi	Perangkat Daerah
6	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	INSPEKTORAT
7	Transformasi Tata Kelola Tambang Galian C	-	-
8	Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah untuk PAD yang Optimal	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
9	Restrukturisasi Proses Bisnis dan Tata Kelola BUMD	Program Perekonomian dan Pembangunan	BAGIAN PEREKONOMIAN
10	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	BAPPERIDA
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINKES
11	Pemenuhan dan Peningkatan akses internet di desa (102 desa *blankspot*)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	DINKOMINFO
12	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	DINKOPDAG
13	Peningkatan kualitas jalan provinsi dengan lebar 7 meter	-	-
14	Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte)	-	-
15	Memastikan Integrasi Jaringan untuk menjamin Konektivitas Trans Jateng dengan Trans Kabupaten/Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi	-	-
16	Optimalisasi Pelabuhan dan Bandara Perintis di Jawa Tengah sebagai Generator Aktivitas Perekonomian Global	-	-
17	Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan Mendorong revitalisasi jalur kereta api	-	-
18	Insentif bagi investor yang menerapkan industri ramah lingkungan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	
19	Mendorong Pengembangan Kawasan Industri berorientasi lingkungan (industri hijau)	-	-
20	Pemulihan DAS Serayu dan Bengawan Solo dalam mendukung Potensi Ekonomi Sungai lainnya	-	-
21	Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi	-	-
22	Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian	-	-
23	Pendirian Koperasi Buruh	-	-
24	Promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya Internasional melalui kerja sama dengan Diaspora	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	DINBUDPAR
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
25	Event olahraga memancing terbesar di Asia	-	-

No	Program Aksi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Aksi Provinsi	Perangkat Daerah
26	Mendukung dan menjadikan Kegiatan Tarkam (Pertandingan Antar Kampung) masuk ke dalam Kalender Olahraga Provinsi	-	-
27	Pengembangan Investasi berbasis Padat Modal Infrastruktur Padat Karya	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	
28	Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	
29	Peningkatan status bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo menjadi bandara internasional	-	-
30	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	DINKOPDAG
31	Mendorong Kawasan Ekonomi khusus (KEK) Pariwisata Budaya di wilayah Pantai Selatan Jawa (Banyumas dan kebumen) dengan Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Desa	-	-
32	Pembentukan badan aglomerasi wilayah pembangunan di Jawa Tengah	-	-
33	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
34	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika/Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	DINKOMINFO/ DINBUDPAR
35	Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan Penyetaraan Ijazah dan mendapatkan pengakuan untuk mudah kerja dan setara lulusan sekolah negeri dan swasta	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
36	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
37	Menyiapkan Sistem Pendidikan Menengah untuk menciptakan Kesesuaian Pendidikan Pra-Kerja	-	-
38	Pemberdayaan Masyarakat Hutan Sosial	-	-
39	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPAPPKB
		Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS
40	Mengusulkan Lagu Lir Ilir sebagai warisan budaya ke UNESCO	-	-
41	Melanjutkan program bahasa daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	-	-
42	Penguatan dan Promosi Moderasi beragama bagi tokoh agama ke luar negeri	-	-
43	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	BANKESBANGPOL

No	Program Aksi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Aksi Provinsi	Perangkat Daerah
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
44	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Program Pemenuhan UKM dan UKP	DINKES
		Program Penunjang (BLUD)	DINKES (Puskesmas)
		Program Pemenuhan UKM dan UKP	DINKES (Puskesmas)
		Program Pemenuhan UKM dan UKP	DINKES (Puskesmas)
45	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Program Penunjang (BLUD)	DINKES
		Program Pemenuhan UKM dan UKP	
46	Pelayanan tanpa Antri Lansia dan Klinik Geriatri, Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan di rumah sakit	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD
47	BOSDa Madrasah Aliyah	-	-
48	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	-	-
49	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA
50	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
51	Mendorong Pembangunan Rumah Apung Kawasan Pesisir	-	-
52	Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional	-	-
53	Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati)	-	-
54	Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM	-	-
55	Penurunan tarif Trans Jateng menjadi Rp.1000 untuk Buruh, Lansia, Veteran, dan Pelajar	-	-
56	Petani milenial gajian	Program Penyuluhan Pertanian	DKPPP
57	Penguatan Tata Kelola CSR untuk Pembangunan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BAPPERIDA
58	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
59	Penegakan Regulasi Daerah terkait Air Tanah lebih intensif melalui evaluasi setiap 3 bulan sekali	-	-
60	Mendorong pembangunan *Giant Sea Wall* (Tanggul laut untuk mencegah abrasi, banjir rob dan sedimentasi tanah)	-	-
61	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DPRKPLH

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

Tabel 4. 26
Dukungan terhadap Program Delegasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

No	Program Delegasi Kabupaten	Aktivitas Rill yang Dilaksanakan	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Delegasi Kabupaten	Perangkat Daerah
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan *sport center*)	Pelatihan Keterampilan Kuliner: Meningkatkan Ekonomi Keluarga melalui Pembuatan Kue	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPAPPKB
		Pendataan Pelaku Subsektor Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	DINBUDPAR
2	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olahraga Internasional	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK	Sosialisasi Antikorupsi kepada ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa, Memasukkan Materi tentang Antikorupsi dalam Diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung	Program Perumusn Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	INSPEKTORAT
		Pendampingan Pembangunan Desa Antikorupsi di Kabupaten Temanggung		
		Penilaian/Evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) ZI kepada Perangkat Daerah yang akan diusulkan Penilaian oleh TPN		
4	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Mengkoordinir Pelaksanaan Pelayanan *Spelling* di Desa	Program Pemenuhan UKM dan UKP	DINKES
		Memaksimalkan Puskesmas Keliling	Program Penunjang (BLUD)	DINKES (Puskesmas)
		Memanfaatkan Pustu/PKD yang Ada dan Berfungsi	Program Pemenuhan UKM dan UKP	DINKES (Puskesmas)
		Memanfaatkan PKD dan Posyandu yang Ada di Setiap Desa	Program Pemenuhan UKM dan UKP	DINKES (Puskesmas)
5	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	Bukan Kewenangan Kabupaten		
6	Mendorong pembentukan Rumah	Pembentukan Satgas PPA di Tingkat	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPAPPKB

No	Program Delegasi Kabupaten	Aktivitas Rill yang Dilaksanakan	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Delegasi Kabupaten	Perangkat Daerah
	Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Kecamatan, Kelurahan dan Desa		
		Rumah Singgah yang Berfungsi untuk Perlindungan Sosial Sementara bagi PMKS/PPKS Terlantar	Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS
7	Membangun 1.000 Desa/Kampung wisata baru	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan	Program Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	DINBUDPAR
8	BUMDes Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	Pendampingan Pembentukan Badan Hukum untuk BUMDes	Program Penataan Desa	DINPERMADES
		Penyusunan Regulasi Daerah tentang BUMDes		
9	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
10	Cek Kesehatan Gratis	Melakukan Skrining Kesehatan melalui Cek Kesehatan Gratis dan Pemeriksaan Kesehatan di Posyandu secara Berkala	Program Pemenuhan UKM dan UKP	DINKES
11	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Penugasan Bidan untuk Pelayanan di Desa	Program Penunjang (BLUD)	DINKES
			Program Pemenuhan UKM dan UKP	DINKES
12	Melahirkan Pemerintahan yang *Good Clear Government dan Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Peningkatan Kesejahteraan, Profesionalitas dan Kualitas ASN dan Perangkat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DINPERMADES
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
		Pendidikan dan Pelatihan ASN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
13	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Temanggung	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	BAGIAN HUKUM
		Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
14	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	Bukan Kewenangan Kabupaten		
15	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Penguatan Anggaran dan Perubahan Manajemen Balai Rehabilitasi Sosial	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPPAPPKB
		Kolaborasi Perlindungan dan Pemberdayaan Anak		

No	Program Delegasi Kabupaten	Aktivitas Rill yang Dilaksanakan	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Delegasi Kabupaten	Perangkat Daerah
		Terlantar dan Fakir Miskin		
16	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Mengembangkan Wisata Ramah Muslim	Program Pemasaran Pariwisata	DINBUDPAR
		Penyusunan Lembaga Masyarakat Ekonomi Syariah	Program Perekonomian dan Pembangunan	BAGIAN PEREKONOMIAN
17	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Pendampingan Sertifikasi HAKI bagi UMKM	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	BAPPERIDA
		Pendampingan Sertifikasi P-IRT bagi UMKM	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINKES
18	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP
		Operasional RPH sesuai dengan Standar		
19	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan *go internasional*, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	Sistem Informasi Desa (SID)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DINPERMADES
		Penguatan Tim Tanggap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
20	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, *hydro*, maupun tenaga surya	Bukan Kewenangan Kabupaten		
21	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Peningkatan SDM dan Kelembagaan Kelompok Wanita	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	DKPPP
22	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Pelatihan dan Pendampingan untuk Menciptakan 1000 Konten Kretaor di Desa Wisata	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika/Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	DINKOMINFO/ DINBUDPAR
23	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Gelar Produk UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	DINKOPDAG
		Pendampingan Perizinan		
		Pelatihan Pengusaha UMKM		
24	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	Menyusun Regulasi Daerah tentang Ekonomi Hijau	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	BAPPERIDA
		Menyusun RAD tentang Ekonomi Hijau		
25	Mendorong pemenuhan	RTH Perkotaan	Program Pembinaan dan Pengawasan	DPRKPLH
		RTH Pedesaan		

No	Program Delegasi Kabupaten	Aktivitas Rill yang Dilaksanakan	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Delegasi Kabupaten	Perangkat Daerah
	kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa		terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
26	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	BANKESBANGPOL
27	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	Penanaman Nilai Universal dan Nilai Kebangsaan pada Siswa SMP/SMA Dialog Tokoh Lintas Agama	Program Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	BANKESBANGPOL
28	Peningkatan operasional kader Posyandu	Pendampingan pada Kader Posyandu	Program Pemenuhan UKM dan UKP	DINKES
29	Peningkatan kualitas hidup lansia	Pemberian Makan kepada Lansia Terlantar	Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS
		Melakukan Skrining Kesehatan Lansia melalui CKG	Program Pemenuhan UKM dan UKP	DINKES
30	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Identifikasi Partner Kerjasama Pengembangan Cafe Berdaya di setiap Kecamatan	Program Pemasaran Pariwisata	DINBUDPAR
31	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di Masing-Masing Desa/Kelurahan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	DINKOPDAG
32	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Pemberian Penghargaan bagi Atlet Berprestasi	Program Pengembangan Kapsitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA
		Penyusunan Peraturan Bupati Desain Olahraga Daerah		
		Pemberian Hibah kepada KONI		
33	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Penyusunan SK Penyelenggaran Sekolah Inklusi (1 Kecamatan 1 Sekolah)	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
		Penyusunan Perbup tentang Penyelenggaran Pendidikan Inklusif		
		Penyelenggaraan Bimtek Peningkatan Kapasitas Guru Inklusi		
		Pembentukan Tim KKG (Kelompok Kerja Guru Inklusif)		

No	Program Delegasi Kabupaten	Aktivitas Rill yang Dilaksanakan	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Delegasi Kabupaten	Perangkat Daerah
34	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Penyusunan Pembuatan Peta Rawan Bencana tingkat Desa	Program Penanggulangan Bencana	BPBD

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4.4. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dasar yang berkualitas dan merata kepada masyarakat. Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) diatur dalam beberapa regulasi, antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Selain sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen Pemerintah Daerah, implementasi SPM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga memperoleh pelayanan yang layak dan merata sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat 6 jenis SPM yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah sasaran dan prioritas daerah. Prioritas daerah dalam mendukung pencapaian SPM diarahkan pada pemenuhan layanan dasar tidak hanya dalam hal jenis tetapi juga mutu pelayanan. Secara lebih rinci, sasaran dan prioritas daerah Kabupaten Temanggung dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 27
Sasaran, Prioritas Daerah, dan Program yang Mendukung Pemenuhan SPM di Kabupaten Temanggung Tahun 2026

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM
1	Pendidikan	Pendidikan Dasar Usia Dini	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Pelayanan dasar bidang pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Pendidikan Dasar			
		Pendidikan Kesetaraan			
2	Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Pelayanan dasar bidang kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin			
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir			
		Pelayanan kesehatan balita			
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar			
		Pelayanan Kesehatan pada usia produktif			
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			
		Pelayanan kesehatan penderita DM			
		Pelayanan kesehatan ODGJ berat			
		Pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkulosis			
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	• Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan • Pelestarian lingkungan hidup	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalan Daerah Kabupaten/Kota			

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM
			Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Pengembangan Perumahan
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah kabupaten/ kota			
5	Ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten/Kota	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Pencegahan dan mitigasi bencana alam	• Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum • Program Penanggulangan Bencana • Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Pelayanan informasi rawan bencana			
		Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana			
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
6	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	• Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak • Pelayanan sosial dan bidang keagamaan	• Program Rehabilitasi Sosial • Program Penanganan Bencana
		Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti			
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti			
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis rehabilitasi di luar panti			
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota			

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4.5.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2026

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Musrenbang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga nasional dan menjadi salah satu tahapan dalam proses perencanaan sekaligus instrumen yang penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 juga telah memperhatikan hasil Musrenbang yang telah dilaksanakan pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun tingkat Kabupaten.

Adapun hasil Musrenbang di Kecamatan untuk perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 28
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026

No.	Tema Tahunan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Kecamatan
1.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Penyelenggaran Jalan	Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Jalan Mungseng – Tlogomulyo	Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar	DPUPR	Tlogomulyo
2.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Penyelenggaran Jalan	Peningkatan Ruas Jalan Muntung - Jumprit	Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar	DPUPR	Candiroto
3.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Penyelenggaran Jalan	Pelebaran Jalan Ruas Rowoseneng-Tlogopucang	Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar	DPUPR	Kandangan
4.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Penyelenggaran Jalan	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Ruas Jalan Gatak - Ngaditirto	Panjang jalan yang direhabilitasi	DPUPR	Selopampang
5.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Penguatan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Penyelenggaran Jalan	Pembangunan Senderan/Talud Jalan Mudal – Legoksari	Panjang jalan yang direhabilitasi	DPUPR	Tembarak

No.	Tema Tahunan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Kecamatan
	Ketahanan Pangan	merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik						
6.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Penyelenggaran Jalan	Pembangunan Jalan Aspal Dusun Kebonsari-Pugeran (Rekonstruksi Jalan Ngabeyan-Kebonsari)	Panjang jalan yang direhabilitasi	DPUPR	Wonoboyo
7.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Penataan Bangunan	Pembangunan Pavingisasi Trotoar Jalan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	DPUPR	Kledung
8.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Penyelenggaran Jalan	Pelebaran Peningkatan Jalan Ruas Lempuyang - Tretep	Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar	DPUPR	Tretep
9.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Drainase Tertutup Jl. Ky. Subechi	Jumlah sistem drainase perkotaan yang dibangun	DPUPR	Parakan

No.	Tema Tahunan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Kecamatan
10.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Penyelenggaran Jalan	Peningkatan Jalan Ruas Wanutengah - Bulu	Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar	DPUPR	Bulu
11.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Penyelenggaran Jalan	Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Bejen - Prangkokan	Panjang jalan yang direkonstruksi	DPUPR	Bejen
12.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Penyelenggaran Jalan	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Ruas Jalan Dlimoyo - Kentengsari	Panjang Jalan yang direhabilitasi	DPUPR	Ngadirejo
13.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Senderan Jalan dan Pelebaran Jalan (Ruas Jalan Kebraman-Gemawang)	Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar	DPUPR	Gemawang
14.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Kawasan Permukiman	Pembangunan RTLH	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	DPRKPLH	Kranggan

No.	Tema Tahunan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Kecamatan
		aktivitas ekonomi dan layanan publik						
15.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Kawasan Permukiman	RTLH	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	DPRKPLH	Kaloran
16.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Kawasan Permukiman	Pembangunan Rehabilitasi RTLH	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	DPRKPLH	Kedu
17.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengadaan Lampu Peringatan Jalan Kabupaten	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Bansari
18.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengadaan Lampu Jalan Di Ruas Jalan Kabupaten (Jalan Kedu Tegong)	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumo
19.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Penguatan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang	Optimalisasi pasar daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah,	Rehab gedung UMKM dan sarana prasarana digital	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil,	Pringsurat

No.	Tema Tahunan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Kecamatan
	Ketahanan Pangan	merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)			Menengah dan Perdagangan	
20.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Optimalisasi pasar daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pembangunan kios UMKM Kelurahan Jurang	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Temanggung

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4.6.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Ekstrem yang menargetkan angka kemiskinan 0%. Adapun dalam penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan mempedomani Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan 3 strategi penanggulangan kemiskinan yaitu:

a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, stabilitas harga dan program lain yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
b. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program peningkatan produktivitas masyarakat, pemberdataan masyarakat, peningkatan akses pekerjaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil dan program lain yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
c. Mengurangi wilayah kantong kemiskinan melalui program Peningkatan Infrastruktur Jalan, Peningkatan Akses Sanitasi Lingkungan dan Akses Air Bersih, Peningkatan Sarana Transportasi, Peningkatan Akses Komunikasi dan Informasi, Peningkatan Akses dan Layanan Sarana Pendidikan dan Kesehatan, dan program lain yang dapat mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

Strategi tersebut dilakukan dengan peningkatan validitas data yang memanfaatkan infrastruktur teknologi komunikasi dan pendataan secara bottom up untuk menjadi dasar intervensi yang akan dilakukan. Intervensi berbasis individu dan kewilayahan yang dilakukan secara kolaboratif, fokus dan tepat sasaran sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada. Fokus intervensi yang dilakukan adalah pemberian bantuan secara tepat sasaran, peningkatan akses layanan dan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat dengan pengembangan wisata dan pemberdayaan produk lokal.

Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat berkomitmen dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan, hal tersebut ditunjukan

dengan arah kebijakan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2026 yang juga sebagai penerapan dari 3 strategi penanggulangan kemiskinan.

Sasaran, prioritas daerah dan program dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4. 29
Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan

No	Strategi Penanggulangan	Sasaran/ Prioritas Pembangunan	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
1.	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, stabilitas harga dan program lain yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat.	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINKES
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	DINKES
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPPP
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPPP
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPAPPKB
			Program Perlindungan Khusus Anak	DPPPAPPKB
			Program Perlindungan Perempuan	DPPPAPPKB
			Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
			Program Pengembangan Perumahan	DPRKPLH
			Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS
			Program Penanganan Bencana	DINSOS
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	DINSOS
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
			Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran	SATPOL PP DAMKAR
2.	Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program peningkatan produktivitas	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	DINKES

No	Strategi Penanggulangan	Sasaran/ Prioritas Pembangunan	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
	masyarakat, pemberdataan masyarakat, peningkatan akses pekerjaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil dan program lain yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat	ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPPP
			Program Hubungan Industrial	DINPERINAKER
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINPERINAKER
			Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
			Program Perekonomian dan Pembangunan	SETDA
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	DINKOPDAG
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	DINKOPDAG
			Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
3.	Mengurangi wilayah kantong kemiskinan melalui program Peningkatan Infrastruktur Jalan, Peningkatan Akses Sanitasi Lingkungan dan Akses Air Bersih, Peningkatan Sarana Transportasi, Peningkatan Akses Komunikasi dan Informasi, Peningkatan Akses dan Layanan Sarana Pendidikan dan Kesehatan, dan program lain yang dapat mengurangi kantong-kantong kemiskinan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINKES
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPAPPKB
			Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH
			Program Pengembangan Perumahan	DPRKPLH
			Program Penanganan Bencana	DINSOS

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

Dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan Pemerintah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten bersinergi dengan berbagai pihak seperti lembaga amal zakat, CSR dan TJSLP dalam membantu intervensi percepatan penghapusan kemiskinan.

4.4.7.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung

Pemerintah telah menetapkan stunting menjadi isu prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pada tahun 2024 prevalensi stunting Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencapai angka sebesar 27,3%. Capaian tersebut masih jauh dari target nasional yang telah ditetapkan sebesar 18,8%. Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk mencapai target nasional tersebut, hal ini ditunjukkan dengan arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Berikut merupakan sasaran, prioritas daerah, dan program dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Temanggung, sebagaimana dalam tabel.

Tabel 4. 30
Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Penanganan Stunting

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
1	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Pelayanan dasar bidang kesehatan	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
		Optimalisasi produksi pertanian dan perkebunan	• Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPPP
2	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	• Program Pengendalian Penduduk • Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera • Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPPAPPKB
3	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan infrastruktur dan konektivitas transportasi publik	• Program Kawasan Permukiman • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH
		Pembangunan infrastruktur dan konektivitas transportasi publik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4.8.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDGs Kabupaten Temanggung

Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung dan berkomitmen dalam mendukung terwujudnya tujuan SDGs sejumlah 17 tujuan melalui beberapa program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah

dan dikoordinasikan oleh Bapperida Kabupaten Temanggung. Ada satu tujuan yaitu tujuan 10 yang tidak secara langsung berkontribusi karena hal tersebut merupakan kewenangan pusat.

Tabel 4. 31
Keterkaitan Tujuan SDGs, Sasaran Daerah dan Prioritas Daerah di Kabupaten Temanggung

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah/Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik, dengan prioritas pembangunan daerah: 1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan 2. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinpermades
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinpermades
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH
		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, dengan prioritas pembangunan daerah: 1. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan 2. Optimalisasi Pasar Daerah 3. Peningkatan kualitas tenaga kerja 4. Pelayanan dasar bidang pendidikan 5. Pelayanan dasar bidang kesehatan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinkopdag
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinperinaker
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPPP
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPPP
			Program Pengelolaan Pendidikan	Dindikpora
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, dengan prioritas pembangunan daerah: 1. Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak 2. Pelayanan sosial dan bidang keagamaan	Program Pemberdayaan Sosial	Dinsos
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinsos
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos
			Program Penanganan Bencana	Dinsos
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPPAPPKB
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPPAPPKB
		Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan, dengan prioritas pembangunan daerah: 1. Pencegahan dan mitigasi bencana alam	Program Penanggulangan Bencana	BPBD

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah/Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, dengan prioritas pembangunan daerah: 1. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan 2. Pelayanan dasar bidang kesehatan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPPP
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPPP
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, dengan prioritas pembangunan daerah: 1. Pelayanan dasar bidang kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, dengan prioritas pembangunan daerah: 1. Pelayanan dasar bidang pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindikpora
		Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik, dengan prioritas pembangunan daerah: 1. Integrasi data	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinkominfo
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik, dengan prioritas pembangunan daerah: 1. Integrasi data	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinkominfo
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik, dengan prioritas pembangunan daerah: 1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, dengan prioritas pembangunan daerah:	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah/Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
		1. Pelayanan dasar bidang kesehatan		
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua	tidak ada indikator di Pemerintah Kabupaten Temanggung karena ESDM bukan kewenangan kabupaten/kota		
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik, dengan prioritas pembangunan daerah: 1. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi 2. Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Perekonomian Setda
			Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, dengan prioritas pembangunan daerah: 1. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan 2. Peningkatan kualitas tenaga kerja 3. Penguatan dan pelestarian seni budaya 4. Optimalisasi pasar daerah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinbudpar
			Program Pemasaran Pariwisata	Dinbudpar
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinbudpar
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKPPP
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPPP
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinkopdag
9	Membangun infrastruktur yang tangguh meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik, dengan prioritas pembangunan daerah: 1. Integrasi data	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinkominfo
		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, dengan prioritas pembangunan daerah: 1. Peningkatan kualitas tenaga kerja	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik, dengan prioritas pembangunan daerah: 1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan 2. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinpermades
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinpermades
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah/Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, dengan prioritas pembangunan daerah: 1. Pelayanan dasar bidang pendidikan 2. Pelayanan dasar bidang kesehatan 3. Optimalisasi pasar daerah 4. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindikpora
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinkopdag
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPPP
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPPP
		Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, dengan prioritas pembangunan daerah: 1. Pelayanan sosial dan bidang keagamaan 2. Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Program Jaminan dan Perlindungan Sosial	Dinsos
			Program Pembinanan Keluarga Berencana (KB)	DPPPAPPKB
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPPAPPKB
11	Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik, dengan prioritas pembangunan daerah: 1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Kawasan permukiman	DPRKPLH
		Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan, dengan prioritas pembangunan daerah: 1. Pencegahan dan mitigasi bencana alam	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, dengan prioritas pembangunan daerah: 1. Peningkatan kualitas tenaga kerja	Program Hubungan Industrial	Dinperinaker
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan, dengan prioritas pembangunan daerah: 1. Pelestarian lingkungan hidup	Program Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan, dengan prioritas pembangunan daerah:	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah/Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
		1. Pelestarian lingkungan hidup		
14	Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan	Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak ada indikator berikut karena tidak mempunyai laut		
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan	Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak ada indikator berikut karena bukan merupakan indikator di tingkat kabupaten/kota		
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik, dengan prioritas pembangunan daerah: 1. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD
			Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi Setda
			Program Pencatatan Sipil	Dindukcapil
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik, dengan prioritas pembangunan daerah: 1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPAD
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4.9.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung

Strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung. Sesuai Perbup ini, seluruh perangkat daerah dan desa wajib menyusun perencanaan penganggaran responsif gender pada semua program dan kegiatan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada menggunakan teknik analisis gender berupa GAP *(Gender Analysis Pathway)* dan GBS *(Gender Budget Statement).* Penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender dilaksanakan setiap tahun sebelum penyusunan rencana kerja anggaran.

Tabel 4. 32
Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
1.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pelayanan dasar bidang pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindikpora
		Pelayanan dasar bidang kesehatan	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Dinkes

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		Upaya Kesehatan Masyarakat ● Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota	RSUD
		Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	Program Penyuluhan Pertanian	DKPPP
		Optimalisasi Pasar Daerah	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinkopdag
		Penguatan dan pelestarian seni budaya	● Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ● Program Pengembangan Kebudayaan ● Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinbudpar
		Peningkatan kualitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker
2.	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Pencegahan dan mitigasi bencana alam	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP dan Damkar
		Pelestarian lingkungan hidup	Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH
3.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
			Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH
		Pelayanan perijinan dan administrasi	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
		Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
		Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Pembangunan Setda
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum Setda
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	INSPEKTORAT
			● Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ● Program Riset Dan Inovasi Program Penelitian dan Pengembangan	Bapperida
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BPKPAD
			● Program Kepegawaian Daerah ● Program Pendidikan dan Pelatihan	BPKSDM
			Program Pendaftaran Penduduk	Dindukcapil
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			• Program Peningkatan Kerjasama Desa • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat • Program Administrasi Pemerintahan Desa • Program Penataan Desa	Dinpermades
			Program Pengelolaan Arsip	Dinpusip
		Digitalisasi dan *Smart City*	Program Pengelolaan dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
4	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	• Program Peningkatan Kualitas Keluarga • Program Perlindungan Perempuan	DPPAPPPKB
		Pelayanan sosial dan bidang keagamaan	• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Pemberdayaan Sosial • Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan • Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS
5.	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	• Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan • Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	BANKESBANGPOL

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4.10. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - *The Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. *Triple planetary* crisis akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as-usual* (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler.

Sebagai respon terhadap kondisi diatas, Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya melalui Sasaran dan Prioritas Daerah sebagai berikut:

Tabel 4. 33
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
1	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Pelestarian lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPRKPLH
			Program Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH
		Pencegahan dan mitigasi bencana alam	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
2	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4.11. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang, salah satu Kawasan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi di Jawa Tengah adalah Kawasan Pendukung Pengembangan Kawasan Strategis.

Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan Sekitarnya. Kawasan Pariwisata Borobudur merupakan *Cultural Heritage Masterpiece* - Mahakarya Budaya Dunia, diharapkan menjadi magnet dan daya tarik wisatawan manca negara. Lokasi Borobudur yang berada di Kabupaten Magelang, berbatasan dengan DI Yogyakarta tentu harus dapat mengoptimalkan potensi lainnya yang ada di Kawasan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung.

Pengembangan kawasan Borobudur tersebut selaras dengan Kegiatan Prioritas dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan untuk meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan. Selain itu, berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Gelangmanggung dilakukan melalui Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur *(Cultural Heritage Tourism*) yang Terintegrasi dengan Kawasan Dieng dan Terpadu dengan Pariwisata DIY. Berdasarkan hal tersebut, Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur sebagai berikut.

Tabel 4. 34
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
1	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Penataan Garis Imajiner	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	DPRKPLH
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DINBUDPAR
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG
		Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
			Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	DINHUB
2	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Penguatan dan pelestarian seni budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
			Program Pemasaran Pariwisata	DINBUDPAR
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DINBUDPAR

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4.12. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Arah Kebijakan Kewilayahan WP Gelangmanggung

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, program unggulan dan program strategis dalam mengimplementasikan WP Gelangmanggung sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur *(Cultural Heritage Tourism)* yang Terintegrasi dengan Kawasan Dieng dan Terpadu dengan Pariwisata DIY melalui:
   a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antarmoda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata.
   b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara.
2. Pengembangan Ekonomi Kreatif (Kriya) melalui:
   a. Pengembangan inovasi pada desa-desa wisata melalui pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas BUMDes dan UMKM guna mendukung ekosistem kreatif WP Gelangmanggung;
   b. Mendorong kerjasama UMKM dan/atau BUMDes dengan IKM unggulan di WP Gelangmanggung
3. Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Sektor Pertanian (komoditas unggulan: kopi, tembakau, aren, tanaman perkebunan, sapi potong, kerbai, domba, itik, ayam buras, dan perikanan budidaya) melalui:
   a. Peningkatan produksi pertanian
   b. Hilirisasi pertanian

Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Temanggung telah berkontribusi dalam mendukung Pengembangan WP Gelangmanggung melalui:

1. Penguatan KabupatenTemanggung sebagai penghubung menuju destinasi pariwisata super prioritas Borobudur dan Dieng diharapkan dapat sekaligus menjadi simpul wisata alam dari Gunung Sindoro Sumbing maupun wisata Posong.
2. Penguatan komoditas perkebunan unggulan (kopi dan tembakau srintil) menjadi komoditas ekspor unggulan.
3. Pengembangan agrowisata kopi yang terintegrasi dengan ekosistem pariwisata borobudur, dieng, sindoro sumbing.
4. Penguatan dalam pengembangan ekraf berbasis potensi lokal seperti kerajinan bambu dll.
5. Penguatan konektivitas dan aksesibilitas Kabupaten Temanggung sebagai simbol wisata di WP Gelangmanggung.
6. Penguatan keterhubungan ekonomi dan integrasi rantai pasok di WP Gelangmanggung.

Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Arah Kebijakan Kewilayahan WP Gelangmanggung sebagai berikut:

Tabel 4. 35
Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Kewilayahan WP Gelangmanggung

SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAAERAH
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DINHUB
	Penguatan dan pelestarian seni budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	DINBUDPAR
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DINBUDPAR
		Program Pemasaran Pariwisata	DINBUDPAR
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	DINBUDPAR
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DINBUDPAR
	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPPP
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPPP
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPPP
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	DKPPP
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKPPP
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPPP
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	DKPPP
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKPPP
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP

SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAAERAH
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DKPPP
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPPP
		Program Penyuluhan Pertanian	DKPPP
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4.13. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

Berdasarkan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 diperlukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi yang memiliki arah pembangunan yang merata, terarah, fokus, terukur, dan strategi yang tepat dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang -Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sesuai dengan usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah disepakati 35 usulan program/ kegiatan di Kawasan Purwomanggung mencakup Purworejo, Wonosobo, Magelang dan Temanggung dengan mayoritas usulan program/ kegiatan berada pada sektor jalan/jembatan dan pariwisata. Total estimasi nilai investasi dari seluruh usulan tersebut sebesar Rp45.280,5 Miliar yang dibiayai melalui 3 (tiga) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 28 usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp4.280,5 M; (2) KPBU terdiri dari 6 (enam) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp32.500 M; dan (3) BUMN terdiri dari 1 (satu) usulan program/ kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp8.500 M.

Adapun usulan program/ kegiatan dengan lokus Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 36
Usulan Program/ Kegiatan Kawasan Purwomanggung di Lokasi Kabupaten Temanggung Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN PERPRES 79/2019	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
1	Pembangunan prasarana konservasi SDA Sungai 'Bodri, Kab. Kendal dan Kab. Temanggung	150	APBN
2	Pembangunan Jalan Lingkar Parakan, Kab. Temanggung dan Kab. Wonosobo	350	APBN
3	Peningkatan Jalan 25,0 APBN Pringsurat - Secang - Batas Yogya, Kab. Temanggung	25	APBN
4	Pengembangan Kawasan Kopi dan Pengembangan Kawasan Agropolitan PRING KRAKAL (Pringsurat, Kranggan, Kaloran), Kab. Temanggung	100	APBN

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019.

Adapun sasaran dan prioritas daerah dalam mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 di Kabupaten Temanggung sebagai berikut.

Tabel 4. 37
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
			Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	DINHUB
2	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Pelestarian lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4.14. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Temanggung secara umum dibentuk dari pemerataan penyediaan infrastruktur dasar pada kawasan perkotaan dan perdesaan yang berkelanjutan dan perwujudan aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan dimaksud mencakupnpenyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum, penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan perwujudan aksesibilitas dan konektivitas wilayah dimaksud mencakupmpenyediaan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan dan pelayanan

transportasi yang sesuai standar dan terkoneksi untuk memastikan pemerataan perkembangan wilayah di Kabupaten Temanggung.

Selain penyediaan infrastruktur fisik sebagaimana disebutkan diatas, terdapat infrastruktur lintas sektor yang turut berperan dalam yang peningkatan kualitas kesejahteraan dan pembangunan manusia serta pengembangan wilayah melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan, olahraga dan kesehatan, sarana prasarana pencegahan kebencanaan dan perlindungan lingkungan, serta infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dan pertanian.

Adapun sasaran dan prioritas daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Tabel 4. 38
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
1	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
			Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	DINHUB
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH
			Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH
2	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
		Optimalisasi Pasar Daerah	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG
3	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Pelayanan dasar bidang pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
		Pelayanan dasar bidang kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
4	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Pencegahan dan mitigasi bencana alam	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOL PP DAMKAR
			Program Penanggulangan Bencana	BPBD

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
		Pelestarian lingkungan hidup	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPRKPLH
			Program Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH
5	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Digitalisasi dan Smart City	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4.15. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Pintu Tol Bawen-Yogyakarta

Salah satu usulan program/kegiatan yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 yaitu Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Kabupaten Magelang sepanjang 71 km. Kabupaten Temanggung yang posisinya dilalui oleh ruas tersebut direncanakan akan menjadi salah satu lokasi pintu tol yang berada di Kecamatan Pringsurat. Dukungan dalam implementasi pintu tol Bawen-Yogyakarta tersebut dituangkan dalam sasaran dan prioritas daerah sebagai berikut.

Tabel 4. 39
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Pintu Tol Bawen-Yogyakarta

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
			Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	DINHUB
2	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian	Program Pengembangan Ekspor	DINKOPDAG
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	DINKOPDAG
3	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan	Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pelatihan Kerja dan	DINPERINAKER

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	pendidikan dan kesehatan	Peningkatan kualitas tenaga kerja	Produktivitas Tenaga Kerja	
			Program Penempatan Tenaga Kerja	DINPERINAKER
			Program Hubungan Industrial	DINPERINAKER

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4.16. Penyelenggaran Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 sebagai landasan bagi instansi pemerintah untuk menyusun, mengelola, dan berbagi data secara lebih terbuka dan bertanggung jawab. Dengan standar yang telah ditetapkan, data yang dihasilkan akan memiliki format yang seragam, meta data yang jelas, serta dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Temanggung ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung serta SK Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung, di mana Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas sebagai Wali Data yang bertanggung jawab mengadakan Forum Satu Data, termasuk menyelenggarakan forum pengumpulan data statistik sektoral pada tahun 2023 dengan mengundang BPS Kabupaten Temanggung dan perangkat daerah sebagai produsen data. Portal data daerah Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dapat diakses melalui laman https://data.temanggungkab.go.id/ dan telah terintegrasi dengan portal Satu Data Indonesia dengan kode akun yaitu 330562.

Dalam rangka mengintegrasikan kebijakan pusat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024, Kabupaten Temanggung telah menyusun Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Temanggung yang ditetapkan melalui SK Bupati Temanggung Nomor 050/291 Tahun 2023. Di sisi lain, dalam penyelenggaraan statistik sektoral, Wali Data berkoordinasi dengan BPS

Kabupaten Temanggung sebagai pembina data, menetapkan data prioritas, standar data, dan meta data. Hal ini dituangkan dalam SK Kepala Bapperida Kabupaten Temanggung Nomor 050/004.1/2023 tentang Data Prioritas Statistik Sektoral, Standar Data, dan Metadata Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung memiliki kemanfaatan besar untuk berbagai kepentingan dan pihak, salah satunya dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang efektif harus didasarkan pada data yang akurat, valid, dan terintegrasi. Pemanfaatan Satu Data Indonesia dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung salah satunya terlihat dari penggunaan portal https://gis.temanggungkab.go.id/ yang merupakan portal Pemerintah Kabupaten Temanggung yang menyediakan data-data sektoral. Dengan ketersediaan data yang akurat, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran serta menentukan prioritas pembangunan sebagai acuan dalam mengalokasikan anggaran secara lebih efektif dan efisien.

4.4.17. Penyelenggaraan Pengendalian Pemerintah Daerah

Pengendalian pemerintahan daerah merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional, serta prinsip tata kelola yang baik. Dengan sistem pengendalian yang efektif, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan kinerja, mencegah penyimpangan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan pada sistem pengendalian pemerintah daerah di Kabupaten Temanggung didukung dengan adanya Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Keberadaan dan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam menjalankan fungsi pengawasan internal didukung oleh Keputusan Bupati Temanggung Nomor 710/363 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Program ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Program tersebut juga menjadi acuan dan pedoman dalam pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024. Selain APIP, keberadaan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki peran yang juga penting dalam mendukung penyelenggaraan pengendalian pemerintahan di Kabupaten Temanggung. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPIP secara berkelanjutan, diperlukan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas SPIP. Hal ini didukung dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Temanggung Nomor 712/0000825 Tahun 2023 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung yang memiliki tugas untuk menilai dan memastikan kualitas penyelenggaraan SPIP.

Dalam rangka memperkuat penerapan SPIP dan mencapai tujuan pemerintahan daerah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah. Menindaklanjuti kebutuhan tersebut, melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung selanjutnya menjadi acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah dalam mengelola risiko, sehingga manajemen risiko dapat dijalankan secara efektif dan sistematis.

4.4.18. Manajemen Risiko

Risiko menurut *ISO 31000:2018 adalah* ***dampak ketidakpastian terhadap sasaran*** *dan* ***tujuan***. Risiko dapat muncul pada seluruh aspek organisasi, baik pada aspek operasional level kegiatan, atau level strategis dan kebijakan. Sehingga organisasi harus mengelola risiko yang diprediksi akan muncul agar pencapaian tujuan tidak terhambat, yang dikenal sebagai manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan rangkaian proses meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko suatu organisasi.

Upaya mewujudkan *good governance* yang baik dalam lingkungan Pemerintahan meningkatkan pentingnya implementasi manajemen risiko di tingkat instansi pemerintah. Kewajiban penerapan manajemen risiko pada instansi pemerintah mulai berlaku sejak diterbitkannya PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dimana pada Pasal 13 disebutkan bahwa Pimpinan Instansi wajib melakukan penilaian risiko. *Good governance* yang baik sejalan dengan manajemen risiko yang efektif.

Sejalan dengan diterbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menjadi komitmen pemerintah dalam mengelola risiko pembangunan nasional dan daerah.

Dalam mengawal RKPD, pengelolaan risiko pembangunan daerah dilakukan secara kolaboratif. Sinergi pengelolaan risiko tersebut menjadi unsur penting dalam meningkatkan keyakinan yang memadai oleh semua pihak dalam mencapai sasaran pembangunan.

Penerapan manajemen risiko pada RKPD Tahun 2026 akan difokuskan pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dan selanjutnya akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi tiap semester.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. RENCANA KERJA DAERAH

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 serta selaras dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah. RKPD disusun dengan mensinkronkan perencanaan dan penganggaran melalui tiga langkah yaitu pertama, melanjutkan implementasi *money follows* program, dengan cara mengintegrasi sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan. Kedua, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, pemerintah provinsi maupun pusat. Ketiga, memperkuat kendali program dengan melakukan pengendalian, monitoring serta evaluasi.

Tahapan penyusunan program merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan analisis dan metodologi perumusan sasaran pembangunan daerah. Indikasi rencana program disusun untuk menjabarkan sasaran pembangunan daerah dan dalam rangka pencapaian indikator sasaran serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Seiring dengan RKP Tahun 2026 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 menyelaraskan program sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas sesuai dengan RKP Tahun 2026.

5.1.1. Dukungan Program Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 terhadap Prioritas Nasional (PN)

5.1.1.1. Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Terhadap Arah Kebijakan RKP Tahun 2026

Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung terhadap 8 Prioritas Pemerintah Pusat yang tercantum dalam RKP 2026 melalui dukungan beberapa program beserta anggarannya. Dukungan program beserta anggaran tersebut juga mendukung tema RKP 2026 yaitu **"Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif"**. Dukungan program dan anggaran dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 terhadap Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. 1
Rekapitulasi Dukungan Program Kabupaten Temanggung Tahun 2026
Terhadap Kegiatan Prioritas Utama RKP Tahun 2026

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2026	Jumlah Program Yang Mendukung Prioritas Rkp Tahun 2026	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1	535.000.000	595.250.000	Bakesbangpol
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru	27	58.839.091.907	45.257.014.989	DKPPP DPRKPLH Dinkopdag DPMPTSP DINKOMINFO
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4	4.080.247.750	3.315.483.175	Dinkominfo Dinbudpar Dinkopdag
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas	15	2.476.971.798.320	2.194.217.158.860	Dindikpora BKPSDM Bapperida Dinkes
5	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	-			
6	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	2	20.329.578.775	10.457.296.928	Dinsos Dinpermades
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat	4	818.941.324.000	501.550.275.894	Bankesbangpol BKPSDM BPKPAD

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2026	Jumlah Program Yang Mendukung Prioritas Rkp Tahun 2026	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
	Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan				
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	2	7.910.500.000	7.537.750.000	Bankesbangpol Dinbudpar
TOTAL			**3.387.607.540.752**	**2.762.930.229.846**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Pemerintah Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Prioritas Nasional melalui integrasi program dan kegiatan daerah yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penganggaran, pelaksanaan program, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan guna memastikan tercapainya target-target pembangunan nasional.

A. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Tabel 5. 2
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama Prioritas Nasional 1

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia								
1	**Kegiatan Prioritas Utama**.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100	%	535.000.000	595.250.000	Kesatuan Bangsa dan Politik	Bakesbangpol

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

B. Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Tabel 5. 3
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama Prioritas Nasional 2

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
2	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru								
	Kegiatan Prioritas Utama Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest	Program perekonomian dan Pembangunan	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	100	%	868.193.500	804.096.750	Penanaman Modal	DPMPTSP
			Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	100	%				
			Persentase pelaporan kegiatan	100	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			PD/Unit kerja tepat waktu						
			Persentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	100	%				
			Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	20	%				
			Persentase Pendampingan proses PBJ	100	%				
			Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%				
			Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%				
			Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	83,33	%				
	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah	-							
	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatra Selatan	-							

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Pengembangan kawasan sentra produks pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan	-							
	Pengembangan kawasan sentra produksipangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase penanganan kerawanan pangan	100	%	50.000.000	70.000.000	Pangan	DKPPP
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar	100	%	20.000.000	50.000.000	Pangan	DKPPP
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok	100	%	50.000.000	25.000.000	Pangan	DKPPP
		program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	90,03	Angka	350.000.000	25.000.000	Pangan	DKPPP
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana pertanian	Produktivitas Padi	6,16	ton/ha	20.147.681.407	11.533.717.939	Pertanian	DKPPP
			Produktivitas jagung	5,55	ton/ha				
			Produktivitas bawang putih	6,15	ton/ha				
			Produktivitas bawang merah	7,1	ton/ha				
			Produktivitas cabai rawit	7,01	ton/ha				
			Produktivitas cabai keriting	7,01	ton/ha				
			Produktivitas tembakau	0,643	ton/ha				
			Produktivitas kopi robusta	0,7025	ton/ha				
			Produktivitas kopi arabika	0,41	ton/ha				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Jumlah produksi daging ternak besar	807,654	kg				
			jumlah produksi daging ternak kecil	268,11	kg				
			jumlah produksi ternak unggas	6.243.337	kg				
			jumlah produksi telur	6.867.846	kg				
			Persentase kelahiran pedet	48	%				
			Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	37,13	%				
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana yang digunakan	100	%	5.625.000.000	5.618.625.000	Pertanian	DKPPP
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	78	%	50.000.000	50.000.000	Pertanian	DKPPP
	Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	140,2	ton	50.000.000	25.000.000	Peternakan dan Perikanan	DKPPP
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	jumlah produksi perikanan budidaya	10.672,01	ton	250.000.000	195.000.000	Peternakan dan Perikanan	DKPPP
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan	10	%	50.000.000	25.000.000	Peternakan dan Perikanan	DKPPP
		Program pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi pengolahan ikan	395752	ton	260.000.000	80.750.000	Peternakan dan Perikanan	DKPPP

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Pembangunan pangan hewani	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	86	%	647.300.000	260.250.000	Peternakan dan Perikanan	DKPPP
			Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	76	%				
	Pembangunan pangan lokal dan nabati	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan		%	50.000.000	70.000.000	Pangan	DKPPP
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar	100	%	20.000.000	50.000.000	Pangan	DKPPP
	Fortifikasi dan biofortifikasi pangan	program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	90,03	Angka	350.000.000	25.000.000	Pangan	DKPPP
	Peningkatan penyediaan energi	-							
	Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi	-							
	Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan	-							
	Konservasi sumberdaya air	Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	59,26	Angka	3.063.000.000	1.713.000.000	Pekerjaan Umum	DPUPR
	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air	100	%	275.000.000	3.445.563.000	Pekerjaan Umum	DPUPR

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			minum sehari-hari						
			Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	59,02	%				
			Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	31,14	%				
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	31,13	%				
	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	13,06	%	9.050.198.000	2.634.961.000	Lingkungan Hidup	DPRKPLH
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	100	%				
	Pengembangan terpadu pesisir utara jawa	-							
	Penguatan faktor pendukung ekonom digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik secara elektronik	75	%	1.780.719.000	1.520.718.800	Komunikasi dan Informatika	Dinkominfo
			Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi	37,68	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Komunikasi yang baik						
			Persentase rumah tangga dengan akses internet	91,5	%				
	Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67	%	1.936.000.000	2.372.301.500	Perdagangan	Dinkopdag
			Persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	2	%				
			Persentase Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	6,85	%				
	Pengelolaan susut dan sisa pangan	-							
	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar	100	%	20.000.000	50.000.000	Pangan	DKPPP
	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	60,03	angka	220.000.000	237.000.000	Lingkungan Hidup	DPRKPLH
			Luas Lahan kritis tertangani	4	Ha				
			Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	7,4	%				
			Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	23,3	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	15,7	%				
	Peningkatan kualitas ekosistem gambut	-							
	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan regional	Persentase jumlah TPS 3R	17,3	%			Lingkungan Hidup	DPRKPLH
		Program Pengelolaan persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	34,14	%	6.828.000.000	7.188.015.500	Lingkungan Hidup	DPRKPLH
			Persentase sampah yang terkelola	64,07	%				
			Cakupan Pelayanan persampahan	77,85	%				
	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	Program Pengembangan Sisem dan pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah TPS 3R	17,3	%			Lingkungan Hidup	DPRKPLH
		Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	34,14	%	6.828.000.000	7.188.015.500	Lingkungan Hidup	DPRKPLH
			Persentase sampah yang terkelola	64,07	%				
			Cakupan Pelayanan persampahan	77,85	%				
	Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut	-							

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

C. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

Tabel 5. 4
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama PN 3

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
3	Prioritas Nasional: 03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi								
	Kegiatan Prioritas Utama Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya	-							
	Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik secara elektronik	75	%	1.780.719.000	1.520.718.800	Komunikasi dan Informatika	Dinkominfo
			Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	37,68	%				
			Persentase rumah tangga dengan akses internet	91,5	%				
	Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas BorobudurYogyakarta-Prambanan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi	17	DTW	100.000.000	54.800.000	Pariwisata	Dinbudpar
			Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata	598	orang				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
		Program Pemasaran Pariwisata	Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100	%	325.250.000	137.625.000	Pariwisata	Dinbudpar
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP)	90	orang				
			Jumlah pengunjung tempat bersejarah	29,706	orang				
	Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena	-							
	Percepatan pembagunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba	-							
	Percepatan pembangunan destinasi prioritas Labuan Bajo	-							
	Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim	-							
	Pengembangan koperasi sektor produksi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	0,25	%	1.874.278.750	1.602.339.375	Perdagangan, dan UMKM	Dinkopdag

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

D. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Tabel 5. 5
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama PN 4

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
4	Prioritas Nasional: 04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas								
	Kegiatan Prioritas Utama								
	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	57,45	%	120.654.381.040	116.631.726.500	Pendidikan	Dindikpora
			Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	64,25	%				
			Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	70	%				
			Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	66,04	%				
			Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	72	%				
			Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	86,53	%				
			Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik	16,6	%				
			Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	28,57	%				
			Iklim Inklusivitas SD	56,69	nilai				
			Iklim Keamanan SD	73,22	nilai				
			Iklim Kebhinekaan SD	71,78	nilai				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Iklim Inklusivitas SMP	62,04	nilai				
			Iklim Keamanan SMP	70,41	nilai				
			Iklim Kebhinekaan SMP	71,32	nilai				
			Rasio Guru/Siswa SD	01:28	angka				
			Rasio Guru/Siswa SMP	01:32	angka				
			Rasio Guru/Siswa PAUD	01:15	angka				
			Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	100	%				
			APK SD Sederajat	99,71	%				
			APM SD Sederajat	93,11	%				
			APK SMP Sederajat	100	%				
			APM SMP Sederajat	86,65	%				
			APM PAUD (5-6)	85,95	%				
			Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD	100	%				
			Angka Putus Sekolah SD Sederajat	266	angka				
			Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat	620	angka				
			Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	777	angka				
			Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM)	2,379	angka				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Jenjang SMP sederajat						
			Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun	220	angka				
			Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun	255	angka				
	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	57,45	%	120.654.381.040	116.631.726.500	Pendidikan	Dindikpora
			Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	64,25	%				
			Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	70	%				
			Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	66,04	%				
			Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	72	%				
			Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	86,53	%				
			Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik	16,6	%				
			Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	28,57	%				
			Iklim Inklusivitas SD	56,69	nilai				
			Iklim Keamanan SD	73,22	nilai				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Iklim Kebhinekaan SD	71,78	nilai				
			Iklim Inklusivitas SMP	62,04	nilai				
			Iklim Keamanan SMP	70,41	nilai				
			Iklim Kebhinekaan SMP	71,32	nilai				
			Rasio Guru/Siswa SD	01:28	angka				
			Rasio Guru/Siswa SMP	01:32	angka				
			Rasio Guru/Siswa PAUD	01:15	angka				
			Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	100	%				
			APK SD Sederajat	99,71	%				
			APM SD Sederajat	93,11	%				
			APK SMP Sederajat	100	%				
			APM SMP Sederajat	86,65	%				
			APM PAUD (5-6)	85,95	%				
			Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD	100	%				
			Angka Putus Sekolah SD Sederajat	266	angka				
			Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat	620	angka				
			Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	777	angka				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat	2,379	angka				
			Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun	220	angka				
			Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun	255	angka				
	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	57,45	%	120.654.381.040	116.631.726.500	Pendidikan	Dindikpora
			Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	64,25	%				
			Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	70	%				
			Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	66,04	%				
			Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	72	%				
			Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	86,53	%				
			Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik	16,6	%				
			Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	28,57	%				
			Iklim Inklusivitas SD	56,69	nilai				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Iklim Keamanan SD	73,22	nilai				
			Iklim Kebhinekaan SD	71,78	nilai				
			Iklim Inklusivitas SMP	62,04	nilai				
			Iklim Keamanan SMP	70,41	nilai				
			Iklim Kebhinekaan SMP	71,32	nilai				
			Rasio Guru/Siswa SD	01:28	angka				
			Rasio Guru/Siswa SMP	01:32	angka				
			Rasio Guru/Siswa PAUD	01:15	angka				
			Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	100	%				
			APK SD Sederajat	99,71	%				
			APM SD Sederajat	93,11	%				
			APK SMP Sederajat	100	%				
			APM SMP Sederajat	86,65	%				
			APM PAUD (5-6)	85,95	%				
			Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD	100	%				
			Angka Putus Sekolah SD Sederajat	266	angka				
			Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat	620	angka				
			Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	777	angka				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat	2,379	angka				
			Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun	220	angka				
			Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun	255	angka				
	Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul		-						
	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, inservice training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pengembangan potensi ASN	24,73	%	514.375.000	320.000.000	Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDM
	Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi	-							
	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	60	%	53.000.000	27.000.000	Riset dan Inovasi daerah	Bappeda
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis	50	%	207.000.000	113.000.000	Riset dan Inovasi daerah	Bappeda

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase inovasi yang dimanfaatkan	60	%				
	Penurunan kematian ibu dan anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	#N/A	%	264.131.312.400	230.298.669.020	Kesehatan	Dinkes
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	%				
			Angka kematian bayi	11,84	Per 1.000 KH				
			Angka kematian neonatal	8,24	Per 1.000 KH				
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%				
			Prevalensi wasting balita	7,5	%				
			Insiden Stunting balita (kasus baru)	3	%				
			Persentase anemia pada ibu hamil	11,2	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	100	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	100	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan	100	%				
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	25	%				
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	84,5	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN	83	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna	96,67	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	85	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	100	%				
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%				
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi	100	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			dini HIV sesuai standar						
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%				
			Persentase penderita Hipertensi	100	%				
			mendapatkan pelayanan kesehatan	0					
			sesuai standar	0					
			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%				
			Prevalensi Obesitas	15	%				
			Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	73,08	%				
			Insidensi Hepatitis B	20	per 100.000 penduduk				
			Prevalensi kusta	0,1	per 1000 penduduk				
			Eliminasi Rabies	0	%				
			Penurunan Angka Kematian Dengue	0,4	%				
			Eliminasi Malaria	100	%				
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	100	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	80	%				
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	69,58	%				
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	50	%				
			Persentase Desa /Kelurahan STBM	25	%				
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	20	%				
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100	%				
			Persentase Capaian Pengembangan Rumah Sakit	100	%				
			Persentase Capaian Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	100	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	19	%				
			Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	5	%				
	Pencegahan dan penurunan stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	%	264.131.312.400	230.298.669.020	Kesehatan	Dinkes
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	%				
			Angka kematian bayi	11,84	Per 1.000 KH				
			Angka kematian neonatal	8,24	Per 1.000 KH				
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%				
			Prevalensi wasting balita	7,5	%				
			Insiden Stunting balita (kasus baru)	3	%				
			Persentase anemia pada ibu hamil	#N/A	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	100	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	100	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan	100	%				
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	25	%				
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	84,5	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN	83	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna	96,67	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	85	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	100	%				
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%				
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%				
			Persentase penderita Hipertensi	100	%				
			mendapatkan pelayanan kesehatan						
			sesuai standar						
			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%				
			Prevalensi Obesitas	15	%				
			Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	73,08	%				
			Insidensi Hepatitis B	20	per 100.000 penduduk				
			Prevalensi kusta	0,1	per 1000 penduduk				
			Eliminasi Rabies	0	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Penurunan Angka Kematian Dengue	0,4	%				
			Eliminasi Malaria	100	%				
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	100	%				
			Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	80	%				
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	69,58	%				
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	50	%				
			Persentase Desa/Kelurahan STBM	25	%				
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	20	%				
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100	%				
			Persentase Capaian Pengembangan Rumah Sakit	100	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase Capaian Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	100	%				
			Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	19	%				
			Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	5	%				
	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	%	264.131.312.400	230.298.669.020	Kesehatan	Dinkes
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	%				
			Angka kematian bayi	11,84	Per 1.000 KH				
			Angka kematian neonatal	8,24	Per 1.000 KH				
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%				
			Prevalensi wasting balita	7,5	%				
			Insiden Stunting balita (kasus baru)	3	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase anemia pada ibu hamil	#N/A	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	100	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	100	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan	100	%				
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	25	%				
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	84,5	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN	83	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna	96,67	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	85	%				
			Persentase fasilitas pelayanan	100	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			kesehatan dengan SPA sesuai standar						
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%				
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%				
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%				
			Persentase penderita Hipertensi	100	%				
			mendapatkan pelayanan kesehatan	0					
			sesuai standar	0					
			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%				
			Prevalensi Obesitas	15	%				
			Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	73,08	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Insidensi Hepatitis B	20	per 100.000 penduduk				
			Prevalensi kusta	0,1	per 1000 penduduk				
			Eliminasi Rabies	0	%				
			Penurunan Angka Kematian Dengue	0,4	%				
			Eliminasi Malaria	100	%				
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	100	%				
			Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	80	%				
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	69,58	%				
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	50	%				
			Persentase Desa /Kelurahan STBM	25	%				
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	20	%				
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana	100	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			dan Prasarana Rumah Sakit						
			Persentase Capaian Pengembangan Rumah Sakit	100	%				
			Persentase Capaian Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	100	%				
			Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	19	%				
			Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	5	%				
	Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	%	264.131.312.400	230.298.669.020	Kesehatan	Dinkes
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	%				
			Angka kematian bayi	11,84	Per 1.000 KH				
			Angka kematian neonatal	8,24	Per 1.000 KH				
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Prevalensi wasting balita	7,5	%				
			Insiden Stunting balita (kasus baru)	3	%				
			Persentase anemia pada ibu hamil	#N/A	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	100	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	100	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan	100	%				
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	25	%				
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	84,5	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN	83	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna	96,67	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan	85	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			perbekalan kesehatan sesuai standar						
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	100	%				
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%				
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%				
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%				
			Persentase penderita Hipertensi	100	%				
			mendapatkan pelayanan kesehatan	0					
			sesuai standar	0					
			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%				
			Prevalensi Obesitas	15	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	73,08	%				
			Insidensi Hepatitis B	20	per 100.000 penduduk				
			Prevalensi kusta	0,1	per 1000 penduduk				
			Eliminasi Rabies	0	%				
			Penurunan Angka Kematian Dengue	0,4	%				
			Eliminasi Malaria	100	%				
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	100	%				
			Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	80	%				
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	69,58	%				
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	50	%				
			Persentase Desa/Kelurahan STBM	25	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	20	%				
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100	%				
			Persentase Capaian Pengembangan Rumah Sakit	100	%				
			Persentase Capaian Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	100	%				
			Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	19	%				
			Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	5	%				
	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	%	264.131.312.400	230.298.669.020	Kesehatan	Dinkes
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	%				
			Angka kematian bayi	11,84	Per 1.000 KH				
			Angka kematian neonatal	8,24	Per 1.000 KH				
			Persentase bayi baru lahir	100	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir						
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%				
			Prevalensi wasting balita	7,5	%				
			Insiden Stunting balita (kasus baru)	3	%				
			Persentase anemia pada ibu hamil	11,2	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	100	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	100	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan	100	%				
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	25	%				
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	84,5	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN	83	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna	96,67	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	85	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	100	%				
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%				
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%				
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%				
			Persentase penderita Hipertensi	100	%				
			mendapatkan pelayanan kesehatan	0					
			sesuai standar	0					

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%				
			Prevalensi Obesitas	15	%				
			Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	73,08	%				
			Insidensi Hepatitis B	20	per 100.000 penduduk				
			Prevalensi kusta	0,1	per 1000 penduduk				
			Eliminasi Rabies	0	%				
			Penurunan Angka Kematian Dengue	0,4	%				
			Eliminasi Malaria	100	%				
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	100	%				
			Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	80	%				
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	69,58	%				
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan	50	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan						
			Persentase Desa/Kelurahan STBM	25	%				
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	20	%				
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100	%				
			Persentase Capaian Pengembangan Rumah Sakit	100	%				
			Persentase Capaian Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	100	%				
			Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	19	%				
			Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	5	%				
	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	%	264.131.312.400	230.298.669.020	Kesehatan	Dinkes
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Angka kematian bayi	11,84	Per 1.000 KH				
			Angka kematian neonatal	8,24	Per 1.000 KH				
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%				
			Prevalensi wasting balita	7,5	%				
			Insiden Stunting balita (kasus baru)	3	%				
			Persentase anemia pada ibu hamil	11,2	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	100	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	100	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan	100	%				
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	25	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	84,5	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN	83	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna	96,67	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	85	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	100	%				
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%				
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%				
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase penderita Hipertensi	100	%				
			mendapatkan pelayanan kesehatan	0					
			sesuai standar	0					
			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%				
			Prevalensi Obesitas	15	%				
			Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	73,08	%				
			Insidensi Hepatitis B	20	per 100.000 penduduk				
			Prevalensi kusta	0,1	per 1000 penduduk				
			Eliminasi Rabies	0	%				
			Penurunan Angka Kematian Dengue	0,4	%				
			Eliminasi Malaria	100	%				
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	100	%				
			Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	80	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	69,58	%				
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	50	%				
			Persentase Desa/Kelurahan STBM	25	%				
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	20	%				
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100	%				
			Persentase Capaian Pengembangan Rumah Sakit	100	%				
			Persentase Capaian Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	100	%				
			Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	19	%				
			Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	5	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	%	264.131.312.400	230.298.669.020	Kesehatan	Dinkes
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	%				
			Angka kematian bayi	11,84	Per 1.000 KH				
			Angka kematian neonatal	8,24	Per 1.000 KH				
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%				
			Prevalensi wasting balita	7,5	%				
			Insiden Stunting balita (kasus baru)	3	%				
			Persentase anemia pada ibu hamil	11,2	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	100	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	100	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60	100	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan						
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	25	%				
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	84,5	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN	83	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna	96,67	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	85	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	100	%				
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%				
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%				
			Persentase penderita Hipertensi	100	%				
			mendapatkan pelayanan kesehatan	0					
			sesuai standar	0					
			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%				
			Prevalensi Obesitas	15	%				
			Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	73,08	%				
			Insidensi Hepatitis B	20	per 100.000 penduduk				
			Prevalensi kusta	0,1	per 1000 penduduk				
			Eliminasi Rabies	0	%				
			Penurunan Angka Kematian Dengue	0,4	%				
			Eliminasi Malaria	100	%				
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	100	%				
			Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi	80	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah						
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	69,58	%				
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	50	%				
			Persentase Desa /Kelurahan STBM	25	%				
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	20	%				
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100	%				
			Persentase Capaian Pengembangan Rumah Sakit	100	%				
			Persentase Capaian Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	100	%				
			Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	19	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	5	%				
	Investasi pelayanan kesehatan primer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	%	264.131.312.400	230.298.669.020	Kesehatan	Dinkes
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	%				
			Angka kematian bayi	11,84	Per 1.000 KH				
			Angka kematian neonatal	8,24	Per 1.000 KH				
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%				
			Prevalensi wasting balita	7,5	%				
			Insiden Stunting balita (kasus baru)	3	%				
			Persentase anemia pada ibu hamil	#N/A	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	100	%				
			Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15	100	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			s.d 59 tahun) sesuai standar						
			Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan	100	%				
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	25	%				
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	84,5	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN	83	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna	96,67	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	85	%				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	100	%				
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%				
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV	100	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar						
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%				
			Persentase penderita Hipertensi	100	%				
			mendapatkan pelayanan kesehatan	0					
			sesuai standar	0					
			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%				
			Prevalensi Obesitas	15	%				
			Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	73,08	%				
			Insidensi Hepatitis B	20	per 100.000 penduduk				
			Prevalensi kusta	0,1	per 1000 penduduk				
			Eliminasi Rabies	0	%				
			Penurunan Angka Kematian Dengue	0,4	%				
			Eliminasi Malaria	100	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	100	%				
			Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	80	%				
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	69,58	%				
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	50	%				
			Persentase Desa/Kelurahan STBM	25	%				
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	20	%				
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100	%				
			Persentase Capaian Pengembangan Rumah Sakit	100	%				
			Persentase Capaian Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik	100	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			fasilitas pelayanan kesehatan						
			Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	19	%				
			Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	5	%				
	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan esehatan bergerak dan daerah sulit akses	-							
	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	2,28	per 1000	1.183.781.000	1.472.627.200	Kesehatan	Dinkes
	Pengembangan Manajemen Talenta								
	Nasional (MTN) seni budaya								
	Pengembangan Manajemen Talenta								
	Nasional (MTN) riset dan inovasi								
	Pengembangan Manajemen Talenta								
	Nasional (MTN) olahraga								

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

E. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Tabel 5. 6
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama PN 5

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD Yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
3	**Prioritas Nasional: 05-Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri**								
	Kegiatan Prioritas Utama	-							
	Pengembangan hilirisasi Nikel	-							
	Pengembangan hilirisasi Tembaga	-							
	Pengembangan hilirisasi Bauksit	-							
	Pengembangan hilirisasi Timah	-							
	Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit	-							
	Pengembangan hilirisasi Kelapa	-							
	Pengembangan hilirisasi Rumput Laut	-							
	Pengembangan hilirisasi Kimia	-							
	Pengembangan industri semikonduktor								
	Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil								
	Penguatan industri logam dasar, besi dan baja								
	Pengembangan industri dirgantara								
	Pengembangan KEK Sei Mangke								
	Pengembangan KIT Batang								
	Pengembangan KI Weda bay								

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

F. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Tabel 5. 7
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama PN 6

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD Yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
6	**Prioritas Nasional: 06-Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan**								
	Kegiatan Prioritas Utama								
	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	100	%	20.319.578.775	10.452.296.928	Sosial	Dinsos
			Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	86	%				
	Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif	-							
	Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif	-							
	Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara	-							
	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	-							
	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa	Program Penataan Desa	Presentase Desa yang terfasilitasi dalam rangka penataan Desa	100	%	10.000.000	5.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinprmades

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

G. Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Tabel 5. 8
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama PN 7

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD Yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
3	**Prioritas Nasional: 07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan**								
	Kegiatan Prioritas Utama								
	Pencegahan tindak pidana korupsi	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100	%	535.000.000	595.250.000	Kesatuan Bangsa dan Politik	Bakesbangpol
	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pengembangan potensi ASN	24,73	27,21	514.375.000	320.000.000	Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDM
	Transformasi digital layanan publik prioritas	-							
	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan	Program Pengelolaan keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD	75	%	408.945.974.500	250.317.512.947	Keuangan	BKPAD
			Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%				
			Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%				
			Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	100	%				
			Persentase Penyampaian	100	%				

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD Yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu						
	Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak	Program Pengelolaan keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD	75	%	408.945.974.500	250.317.512.947	Keuangan	BKPAD
			Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%				
			Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%				
			Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	100	%				
			Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100	%				

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

H. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur

Tabel 5. 9
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama PN 8

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD Yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
8	**Prioritas Nasional: 08-Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur**								
	Kegiatan Prioritas Utama								
	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100	%	535.000.000	595.250.000	Kesatuan Bangsa dan Politik	Bakesbangpol
	Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	Program Pengembangan kebudayaan	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda	1	Obyek	7.375.500.000	6.942.500.000	Kebudayaan	Dinbudpar
			Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata	10	Kelompok				
			Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata	10	Orang				
	Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut								

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dukungan program daerah dalam RKPD 2026 untuk mendukung Kegiatan Prioritas Utama pada 8 Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang secara rekapitulasi dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 5. 10
Dukungan Program Daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2026 terhadap Program Prioritas/Kegiatan Prioritas Masing-Masing Prioritas Nasional

No	Jumlah Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas RKP Tahun 2026			Dukungan Program Daerah RPD/ RKPD Tahun 2026			
	Prioritas Nasional	Program Pembangunan	Kegiatan Prioritas	RPJMD Tahun 2025-2029		RKPD Tahun 2026	
				Program Daerah	Persentase	Program Daerah	Persentase
1	PN 1	5	10	1	100%	1	100%
2	PN 2	24	143	22	100%	22	100%
3	PN 3	8	36	4	100%	4	100%
4	PN 4	19	70	6	100%	6	100%
5	PN 5	5	23	0	0%	0	0%
6	PN 6	9	44	2	100%	2	100%
7	PN 7	14	36	3	100%	3	100%
8	PN 8	4	25	2	100%	2	100%

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

5.1.1.2. Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Terhadap Asta Cita

Dukungan kebijakan pembangunan daerah dalam mendukung tema tahunan pembangunan tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 11
Dukungan program RKPD terhadap Asta Cita

Asta Cita	Perangkat Daerah	Program	Subkegiatan	APBD Penetapan	Perubahan RKPD
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	5.000.000	65.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	310.500.000	425.500.000
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	12.500.000	12.500.000
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	20.000.000	15.800.000
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	68.139.375	68.139.375
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	25.000.000	25.000.000
			Pameran Dagang Nasional	150.000.000	-
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	75.000.000	75.000.000
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengawasan Penanaman Modal	10.000.000	10.000.000
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5.000.000	5.000.000
	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	314.100.000	314.100.000
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	75.000.000	125.000.000

Asta Cita	Perangkat Daerah	Program	Subkegiatan	APBD Penetapan	Perubahan RKPD
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7.500.000	7.500.000
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	45.000.000	45.000.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	6.702.881.439	6.931.717.939
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000
	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	17.499.600	17.499.600
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	25.000.000	25.000.000
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	277.500.000	270.500.000
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	25.000.000	25.000.000
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	300.000.000	300.000.000
	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	84.000.000

Asta Cita	Perangkat Daerah	Program	Subkegiatan	APBD Penetapan	Perubahan RKPD
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	25.000.000
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	5.000.000	5.000.000
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	-
	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	511.000.000	511.000.000
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.760.695.500	1.760.695.500
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	11.046.315.000	11.026.315.000
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21.185.711.320	21.185.711.320
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	250.258.000	250.258.000
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	15.000.000	15.000.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	3.500.000	3.500.000
	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	10.000.000	10.000.000
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	605.000.000	605.000.000

Asta Cita	Perangkat Daerah	Program	Subkegiatan	APBD Penetapan	Perubahan RKPD
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	10.000.000	10.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	5.000.000	5.000.000
	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	702.500.000	277.500.000
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9.014.976.990	9.328.164.190
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya	20.000.000	20.000.000
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	7.710.000	7.710.000
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2.298.000.000	5.331.815.500
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1.241.200.000	1.841.200.000
	Satuan Polisi Pamongpraja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	800.000.000	800.000.000

Asta Cita	Perangkat Daerah	Program	Subkegiatan	APBD Penetapan	Perubahan RKPD
	dan Pemadam Kebakaran		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	50.000.000	75.000.000
Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	64.366.800	64.366.800
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	15.000.000	15.000.000
				58.356.854.024	62.075.493.224

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

5.1.1.3. Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Terhadap Tema Tahunan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan Visi dan Misi dilaksanakan secara bertahap. Fokus tahapan dalam setiap tahunnya ditetapkan melalui tema tahunan pembangunan. Tema tahunan pembangunan merupakan fokus kebijakan serta upaya yang dilakukan pada setiap tahun selama 5 tahun periode RPJMD. Adapun tema tahunan pembangunan Tahun 2026 dalam RPJMD Kabupaten Temanggung adalah "**Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan"**.

Dukungan kebijakan pembangunan daerah dalam mendukung tema tahunan pembangunan tahun 2026 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5. 12
Dukungan Program Daerah terhadap Tema Tahunan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung: Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan

No	Tema/Arah Kebijakan	Fokus Pembangunan	Program Daerah	Perangkat Daerah	Anggaran	Perubahan Anggaran
1	Penguatan Reformasi Birokrasi	Peningkatan kelembagaan sehingga lebih efektif dan akuntabel	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Bakesbangpol	1.827.819.500	1.980.319.500
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Setda	4.558.206.591	5.072.948.954
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda	30.144.130.000	24.438.475.350
			Program Pengelolaan Arsip	Dinpusip	9.000.000	4.500.000
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Setwan	16.860.356.663	14.766.396.400
		Penyempurnaan prosedur kerja, sistem informasi, dan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan publik	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bapperida	53.000.000	27.000.000
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinkominfo	1.780.719.000	1.520.718.800
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo	505.000.000	543.500.000
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinkominfo	334.999.600	317.499.600
		Penguatan SDM aparatur negara melalui peningkatan kompetensi, pengembangan karier yang profesional dan berintegritas	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	586.977.500	441.580.500
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	514.375.000	320.000.000
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat	5.050.000.000	5.050.000.000
		Pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Program Pencatatan Sipil	Dindukcapil	6.000.000	3.000.000
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dindukcapil	97.261.225	102.931.225
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP	100.000.000	54.500.000
			Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP	700.000.000	80.000.000

No	Tema/Arah Kebijakan	Fokus Pembangunan	Program Daerah	Perangkat Daerah	Anggaran	Perubahan Anggaran
			Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP	212.000.000	76.000.000
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	99.000.000	45.000.000
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP Damkar	863.177.750	2.973.946.250
			Program Penanggulangan Bencana	BPBD	1.054.828.000	942.806.000
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Setda	868.193.500	804.096.750
		Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	3.750.000.000	3.750.000.000
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapperida	350.000.000	690.000.000
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	400.604.000	310.271.500
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD	408.945.974.500	250.317.512.947
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP Damkar	1.560.006.393	1.239.914.000
2	Penguatan Ketahanan Pangan	Diversifikasi Pangan Lokal, melalui pengembangan varietas dan jenis	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPPP	350.000.000	25.000.000
		pangan alternatif yang mampu beradaptasi dengan kondisi lokal serta	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKPPP	50.000.000	25.000.000
		memperluas pasar produk pangan lokal	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPPP	250.000.000	195.000.000
		Pengembangan infrastruktur penyimpanan dan distribusi melalui	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP	5.625.000.000	5.618.625.000
		pembangunan fasilitas penyimpanan, gudang	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP	20.147.681.407	11.533.717.939

No	Tema/Arah Kebijakan	Fokus Pembangunan	Program Daerah	Perangkat Daerah	Anggaran	Perubahan Anggaran
		dan sarana transportasi				
		yang memadai untuk menjamin ketersediaan pangan sepanjang tahun	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKPPP	260.000.000	80.750.000
		Menjaga ketersediaan stock pangan dan kestabilan harga bahan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPPP	50.000.000	70.000.000
		untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan di masyarakat	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPPP	50.000.000	50.000.000
		Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian pangan,	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	DKPPP	50.000.000	25.000.000
		seperti pembentukan kelompok tani pekarangan produktif dan program				
		ketahanan pangan				

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

5.1.2. Super Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)

Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.

Konsep Tematik

Penerapan konsep tematik telah diterapkan dalam pembangunan daerah, hal ini dapat dilihat dari adanya prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan pada setiap tahunnya dan sesuai dengan arah kebijakan daerah.

Konsep tematik juga diwujudkan dalam penetapan prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung, pada tahun 2026 adalah 1) Penguatan infrastruktur pertanian dan pariwisata melalui peningkatan dan pemeliharaan fasilitas penunjang seperti jalan, irigasi dan infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. 2)Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekowisata dan Budaya Lokal melalui pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi dengan pelestarian lingkungan dan budaya lokal. 3) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan pembinaan petani , pelaku UMKM, dan pelaku wisata secara profesional dan berkelanjutan. 4) Promosi dan Pemasaran Terintegrasi.

Konsep Holistik

Tingkat penerapan konsep holistik terkait perencanaan yang komprehensif, Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan konsep holistik yaitu perencanaan yang komprehensif dari hulu ke hilir, antara lain gerakan penanganan anak usia sekolah tidak sekolah, gerakan penanganan kemiskinan, dan gerakan penanganan stunting.

Konsep Integratif

Penerapan konsep integratif juga dilakukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kebijakan pembangunan daerah yang melibatkan semua perangkat daerah, antara lain kegiatan penanganan kemiskinan melalui 1 perangkat daerah 1 desa dampingan, penanganan stunting yang melibatkan semua perangkat daerah, kegiatan SDGs yang didukung banyak program dan anggaran di semua perangkat daerah.

Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah juga dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung berkolaborasi

dengan aktor non pemerintah baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia dan pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan penanganan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan (SDGs), penanganan stunting, penanganan anak usia sekolah tidak sekolah, pelaksanaan kabupaten sehat, TMMD dan masih banyak lainnya. Penerapan konsep integratif terkait pelibatan stakeholders di luar OPD di daerah Kabupaten Temanggung diantaranya aktor non pemerintah yang dilibatkan adalah akademisi, tim penggerak PKK, lembaga amil zakat, BAZNAS, komunitas tertentu, kelompok masyarakat, media massa, TJSLP dan masih banyak lagi. Selain itu, terdapat pula pemanfaatan media informasi kreatif dalam proses perencanaan dengan melibatkan media sosial/media massa.

Konsep Spasial

Penerapan konsep Spasial juga diterapkan dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan penanganan stunting, kemiskinan dan infrastruktur yang dilaksanakan di semua kecamatan dengan salah satu tujuannya tidak ada kesenjangan antarwilayah, dan hasilnya pemetaan juga dapat dilihat dalam bentuk peta/spasial.

Tabel 5. 13
Keruntutan Kebijakan Pembangunan Daerah RKPD 2026 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2027: Pengembangan Sektor Pertanian dan Pariwisata untuk Mendukung Ekonomi yang Berkelanjutan				
1	Penguatan infrastruktur pertanian dan pariwisata melalui peningkatan dan pemeliharaan fasilitas penunjang seperti jalan, irigasi dan infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	DPUPR
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	DPUPR
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Dinhub
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Dinbudpar
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	DKPPP
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	
2	Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekowisata dan Budaya Lokal melalui pengembangan destinasi wisata	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata, baik Dalam dan Luar Negeri	Dinbudpar

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
	yang terintegrasi dengan pelestarian lingkungan dan budaya lokal			
		Program Pengembangan Daya Tarik Destinasi Wisata	Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi	Dinbudpar
			Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata	
		Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Dinbudpar
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	DPRKPLH
		Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	DPRKPLH
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	DPRKPLH
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	
			Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	DPRKPLH
3	Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan pembinaan petani, pelaku UMKM, dan pelaku wisata secara	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	DKPPP
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah,	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan	Dinkopdag

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
	profesional dan berkelanjutan	Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Dinkopdag
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	
		Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Dinkopdag
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Dinkopdag
		Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata, baik Dalam dan Luar Negeri	Dinbudpar
		Program Pengembangan Daya Tarik Destinasi Wisata	Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi	Dinbudpar
			Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata	
4	Promosi dan Pemasaran Terintegrasi	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	DPMPTSP
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	
		Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Dinkopdag
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinkopdag
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Dinkopdag

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

5.1.3. Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah

1. Dukungan terhadap Program Strategis Nasional oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

Pemerintah Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan nasional yang terintegrasi, berkelanjutan, dan inklusif. Dukungan tersebut diwujudkan melalui sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 14
Dukungan terhadap Program Strategis Nasional oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Perubahan Anggaran	OPD
1	Penanggulangan Kemiskinan	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	**1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				**DINSOS**
			1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
			1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	810.000.000	277.500.000	
			1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		18.615.444.300	9.328.164.190	
			1.06.05.2.02.0009 - Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin				
			2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				**DKPPP**
			2.09.04.2.02. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				
			2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan	30.000.000	50.000.000	

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Perubahan Anggaran	OPD
			Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
		Sekolah Rakyat	**1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				**DINSOS**
			1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
			1.06.05.2.02.0008 – Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		10.000.000	5.000.000	
			2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINGDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				**DPRKPLH**
			2.11.06.2.01- **Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				
			2.11.06.2.01.0001- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			
		Pembangunan 3 juta rumah	**1.03.08 – PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**				**DPUPR**
			1.03.08.2.01 – Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				
			1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),	125.000.000	72.500.000	

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Perubahan Anggaran	OPD
			Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
			1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				**DPRKPLH**
			1.04.02.2.03 – Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
			1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun			
			1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota			
			1.04.04 – PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				**DPRKPLH**
			1.04.04.2.01 – Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
			1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang diperbaiki			
			1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				**DPRKPLH**
			1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada				

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Perubahan Anggaran	OPD
			Daerah Kabupaten/Kota				
			1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			
			1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh			
2	Ketahanan Pangan	Swasembada Panan (Irigasi untuk mendukung swasembada pangan)	**1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**				**DPUPR**
			1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
			1.03.02.2.01.0127 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku				
			1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
			1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.500.000.000	1.350.000.000	
			1.03.02.2.02.0023 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara			
			1.03.02.2.02.0026 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara			
		Operasionalisasi BPP	**3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**				**DKPPP**

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Perubahan Anggaran	OPD
			3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				
			3.27.07.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				
			3.27.07.2.01.0016 - Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa				
		Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/ Lumbung Pangan/*Food Estate*)	**1 03 12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**				**DPUPR**
			1.03.12.2.01. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				
			1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota			
			2.09.02- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				**DKPPP**
			2 09 02 2.01- Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot				
			2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia			
			2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	50.000.000	25.000.000	
			3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				**DKPPP**
			3.27.03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian				

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Perubahan Anggaran	OPD
			3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan			
			3.27.03.2.01.0014 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan			
		Pangan Akuatik	**3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**				**DKPPP**
			3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
			3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia			
			3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				
			3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			
			3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
			3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				
			3.25.05.2.01.0012 - Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya			
		Kampung Nelayan Merah Putih	**3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**				**DKPPP**
			3.25.03.2.02 Pemberdayaan				

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Perubahan Anggaran	OPD
			Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				
			3.25.03.2.02.0001-Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50.000.000	25.000.000	
			3.25.03.2.02.0002-Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya			
			3.25.03.2.02.0004-Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha nelayan Skala Kecil			
3	Kesehatan Untuk Semua	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	**1.02.02-PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**DINKES**
			1.02.02.2.02-Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			1.02.02.2.02.0015-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	312.657.000	10.000.000	
			1.02.02.2.02.0046-Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	338.090.000	238.170.000	
			1.03.03-PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				**DPUPR**
			1.03.03.2.01-Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				
			1.03.03.2.01.0028-Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun			
			2.09.03-PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				**DKPPP**
			2.09.03.2.01-Penyediaan dan				

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Perubahan Anggaran	OPD
			Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				
			2.09.03.2.01.0007-Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			
			2.14.04-PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				**DPPPAPPKB**
			2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
			2.14.04.2.02.0005-Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.827.000.000	1.278.900.000	
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis	**1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**DINKES**
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	28.305.742.000	21.185.711.320	
			1.02.02.2.02.0056-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-			

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Perubahan Anggaran	OPD
			1.02.02.2.02.0057-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-			
			2.12.04-PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				**DINDUK CAPIL**
			2.12.04.2.04-Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
			2.12.04.2.03.0004-Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			
		Jaminan Kesehatan Nasional	**1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	28.305.742.000	21.185.711.320	
			1.06.05-PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				**DINSOS**
			1.06.05.2.02-Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota				
			1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	10.000.000	5.000.000	
			2.12.04-PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				**DINDUK CAPIL**
			2.12.04.2.04-Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
			2.12.04.2.03.0004-Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Perubahan Anggaran	OPD
		Penuntasan Tuberkulosis (TBC)	**1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**DINKES**
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			1.02.02.2.02.0011- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	41.720.000	2.006.492.500	
			1.02.02.2.02.0040- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
			1.06.05- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				**DINSOS**
			1.06.05.2.02- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota				
			1.06.05.2.02.0003- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	18.615.444.300	9.328.164.190	
			2.12.04- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				**DINDUK CAPIL**
			2.12.04.2.04- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
			2.12.04.2.03.0004- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan			
				Pemanfaatan Data Kependudukan			
		Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas Di Kabupaten/ Kota	**1.02.02- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**DINKES DAN RSUD**

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Perubahan Anggaran	OPD
			1.02.02.2.01-Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
			1.02.02.2.01.0022-Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	165.000.000.000		
			1.02.03-PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				**DINKES**
			1.02.03.2.02-Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				
			1.02.03.2.02.0002-Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			
		Makan Bergizi Gratis	**1.01.02-PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				**DINDIKPORA**
			1.01.02.2.01-Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
			1.01.02.2.01.0049-Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50.000.000	25.000.000	
			1.02.04-PROGRAM SEDIAAN				**DINKES**

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Perubahan Anggaran	OPD
			FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
			1.02.04.2.04-Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				
			1.02.04.2.04.0001-Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
			2.09.05-PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				**DKPPP**
			2.09.05.2.01-Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				
			2.09.05.2.01.0007-Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan	20.000.000	50.000.000	
				dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota			
			3.25.06-PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				**DKPPP**
			3.25.06 2.02-Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				
			3.25.06.2.02.0002-Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil			

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Perubahan Anggaran	OPD
				Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko			
4	Perluasan Akses Pendidikan	Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	**1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				**DINDIKPORA**
			1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
			1.01.02.2.01.0038-Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20.000.000	10.000.000	
			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
			1.01.02.2.02.0051-Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10.000.000	5.000.000	
			1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
			1.01.02.2.03.0025-Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	30.000.000		
		Digitalisasi Pembelajaran	**1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				**DINDIKPORA**
			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
			1.01.02.2.02.0060-Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	20.000.000	10.000.000	
			1.01.02.2.03 - Pengelolaan				

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Perubahan Anggaran	OPD
			Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
			1.01.02.2.03.0039-Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	25.000.000	12.500.000	
			1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keseteraan				
			1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
5	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi	**2.09.03-PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**				**DKPPP**
			2.09.03.2.01-Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				
			2.09.03.2.01.0008-Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota			
			2.09.03.2.01.0020-Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	-			
			3.30.04-PROGRAM STABILISASI HARGA				**DINKOP DAG**
			BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
			3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				
			3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan	50.000.000	34.247.500	

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Perubahan Anggaran	OPD
			Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			
		Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	**2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**				**DINKOP DAG**
			2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
			2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota			

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Adapun dukungan Pemerintah dalam mendukung Tematik Pembangunan sebagai berikut:

Tabel 5. 15
Dukungan terhadap Tematik Pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

No	Tematik	Indikator Tematik	Satuan	*Leading Sector*	Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
1	Pengarustamaan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	20.000.000	10.000.000
		Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai		1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	338.090.000	250.258.000
					2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	340.000.000	340.000.000
					2.08.02.2.01.0015 Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota		
					2.17.07.2.01.0021 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha		
2	Perlindungan Anak	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	Persentase	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks		1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10.000.000	10.000.000
					1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	25.000.000	25.000.000

No	Tematik	Indikator Tematik	Satuan	*Leading Sector*	Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
					Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		
					2.08.06.2.02.0012 Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota		
					5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		
3	Masyarakat Adat	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diakui	%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		
					2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20.000.000	12.000.000
4	Ekonomi Syariah	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	Sekretariat Daerah	1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	810.000.000	277.500.000
		Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin		2.17.07.2.01.0027 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk		
					3.26.02.2.04.0019 Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha		
					3.31.02.2.01.0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota		
					4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	52.500.000	26.250.000
6	Penanggulangan Bencana	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	Persentase	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0	0
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai		1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0	0
					1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	30.000.000	0
					1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	135.000.000	35.000.000
					1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

2. Dukungan terhadap Program Prioritas dan Program Delegasi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

Pemerintah Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan program prioritas serta program delegasi Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang sinergis, terpadu, dan berkelanjutan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui penyelarasan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah, serta pengintegrasian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Program delegasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 34 program/kegiatan yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, antara lain:

Tabel 5. 16
Dukungan terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

No	Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Prioritas Provinsi	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
1	Melahirkan Pemerintahan yang *good clear government* dan *collaborative governance* melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan perangkat desa	Program Kepegawaian Daerah	586.977.500	441.580.500	BKPSDM
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	514.375.000	320.000.000	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	32.701.289.266	31.531.808.977	SETDA
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.558.862.748	4.096.295.764	DINPERMADES
2	Pesantren obah melalui penambahan dana pengembangan pesantren	Program Pengelolaan Pendidikan	120.654.381.040	116.631.726.500	DINDIKPORA
3	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Program Perekonomian dan Pembangunan	868.193.500	804.096.750	SETDA
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100.000.000	54.800.000	DINBUDPAR
		Program Pemasaran Pariwisata	325.250.000	137.625.000	
4	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan *go international*, Sistem Informasi Desa (SID) dan tim tanggap bencana	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.558.862.748	4.096.295.764	
		Program Penanggulangan Bencana	1.054.828.000	942.806.000	BPBD
5	Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni	Program Pengembangan Perumahan	829.999.550	529.349.252	DPRKPLH

No	Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Prioritas Provinsi	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
	melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan pusat rekreasi dan promosi pembangunan dan gelanggang olahraga internasional	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	408.945.974.500	250.317.512.947	BPKPAD
		Program Perekonomian dan Pembangunan	868.193.500	804.096.750	SETDA
		Program Penataan Bangunan Gedung	2.245.000.000	1.957.500.000	DPUPR
		Program Pengelolaan Pendidikan	120.654.381.040	116.631.726.500	DINDIKPORA
6	Penanggulangan bencana dan keberlanjutan lingkungan melalui "Mageri Segoro" untuk mengamankan garis pantai	Kabupaten Temanggung tidak memiliki pantai			
7	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan *day care* untuk buruh di kawasan industri	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.625.000.000	5.618.625.000	DKPPP
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	50.000.000	25.000.000	
8	Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	30.144.130.000	24.438.475.350	SETDA
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	535.000.000	595.250.000	BANKESBANGPOL
9	Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	264.131.312.400	230.298.669.020	DINKES
10	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk lapangan kerja	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	87.500.000	32.500.000	DINDIKPORA
11	Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, guru, santri, penghala quran untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi	Program Pengelolaan Pendidikan	120.654.381.040	116.631.726.500	DINDIKPORA
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	30.144.130.000	24.438.475.350	SETDA
		Program Kepegawaian Daerah	586.977.500	441.580.500	BKPSDM

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel 5. 17
Dukungan terhadap Program Intervensi Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

No	Program Intervensi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Intervensi Provinsi	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
1	Integrasi Aplikasi Pelayanan kedalam "Jateng Ngopeni"	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.780.719.000	1.520.718.800	DINKOMINFO
2	*Smart Response* diwujudkan dengan *Call Center* 24 Jam "Jateng Nglakoni"	-			-
3	Kantor Gubernur Rumah Rakyat	-			-
4	Digitalisasi Manajemen Arsip	Program Pengelolaan Arsip	9.000.000	4.500.000	DINPUSIP

No	Program Intervensi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Intervensi Provinsi	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
5	Penetapan Zona Integritas/Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.750.000.000	3.750.000.000	INSPEKTORAT
6	Penguatan APIP dengan Menambah Anggaran dan Personil untuk Pengawasan mulai dari Tingkat Provinsi sampai Tingkat Desa	Program Penyelenggaraan Pengawasan	5.050.000.000	5.050.000.000	INSPEKTORAT
7	Riset Potensi Daerah secara Sukarela berbasis Potensi Wilayah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	408.945.974.500	250.317.512.947	BPKPAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	423.000.000	274.250.000	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	522.219.244	380.909.622	
8	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan Pemberdayaan Ekonomi bagi Disabilitas, Perempuan, Pelaku Ekonomi Kreatif dan *Sport Center*)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	30.000.000	23.500.000	DPPPAPPKB
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30.000.000	10.000.000	DINBUDPAR
9	Membangun 1.000 Desa/Kampung Wisata Baru	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100.000.000	54.800.000	DINBUDPAR
10	Pengembangan Destinasi Wisata Alam, Budaya dan Religi berdasarkan Potensi Wilayah				
	a. Pengembangan Wisata Alam	-			-
	1. Dieng – Wonosobo				
	2. Geopark Karangsambung – Kebumen				
	b. Pengembangan Wisata Budaya	-			-
	1. Rambut Gimbal – Dieng				
	2. Desa Adat Bamokeling – Banyumas				
	c. Pengembangan Wisata Religi	-			-
	1. Kyai Soleh Darat – Kota Semarang				
	2. Sunan Kalijaga – Demak				
	3. Sunan Muria – Kudus				
	4. Klenteng Liong Hok Bio – Kota Magelang				
	5. Gereja Salib Putih – Salatiga				
	6. Prambanan dan Borobudur – Magelang				
11	Pengembangan Destinasi Wisata berbasis Global dengan Prioritas Pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng dan Rawa Pening	-			-
12	Mendorong Pengembangan Pelabuhan Tanjung	-			-

No	Program Intervensi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Intervensi Provinsi	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
	Mas sebagai Sentra Ekonomi Jawa				
13	Pengembangan Kebudayaan dan Cagar Budaya untuk Pertumbuhan Ekonomi serta Dukungan terhadap Kesejahteraan Budayawan Lokal				
	a. Pembinaan Kebudayaan Lokal Bekerjasama dengan ISI Surakarta	Program Pengembangan Kebudayaan	7.375.500.000	6.942.500.000	DINBUDPAR
	b. Revitalisasi Taman Cagar Budaya	-			-
14	Penguatan Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	611.000.000	305.500.000	DINPERINAKER
		Program Penempatan Tenaga Kerja	400.250.000	370.125.000	
15	Percepatan Penanganan Stunting melalui Pemberian Suplemen dan Pemenuhan Gizi bagi Balita dan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	264.131.312.400	230.298.669.020	DINKES
16	Menyediakan Paket Pendidikan Gratis (Seragam, Buku Pembelajaran dan Akses Internet)	Program Pengelolaan Pendidikan	120.654.381.040	116.631.726.500	DINDIKPORA
17	Peningkatan Bantuan Keuangan Desa	-			-
18	Jambanisasi 100%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.050.198.000	2.634.961.000	DPRKPLH
19	Pembelian Hasil Panen Petani dan Nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	20.147.681.407	11.533.717.939	DKPPP
		Program Penyuluhan Pertanian	3.517.520.000	179.037.900	
20	Program Asuransi Gagal Panen bagi Petani dan Nelayan melalui Jamkrida	-			-
21	Mendorong Pembangunan Sistem Desalinasi khususnya pada Pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah untuk memenuhi Suplai Air Bersih dan mengatasi Dampak Eksploitasi Air Tanah (Pekalongan, Demak dan Semarang)	-			-
22	Mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru	-			-

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel 5. 18
Dukungan terhadap Program Aksi Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

No	Program Aksi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Aksi Provinsi	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
1	Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai Pusat Pelayanan Publik berbasis wilayah	-			-
2	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	30.144.130.000	24.438.475.350	BAGIAN HUKUM
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	20.319.578.775	10.452.296.928	DINSOS
3	Pengembangan *Sister Province*	-			-
4	Membentuk satuan tugas pengamanan data digital "*Cyber Security* Jawa Tengah" dengan memberdayakan ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	334.999.600	317.499.600	DINKOMINFO
5	Program Kerjasama Forkopimda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.558.206.591	5.072.948.954	BAGIAN HUKUM
6	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.750.000.000	3.750.000.000	INSPEKTORAT
7	Transformasi Tata Kelola Tambang Galian C	-			-
8	Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah untuk PAD yang Optimal	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	408.945.974.500	250.317.512.947	BPKPAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	423.000.000	274.250.000	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	522.219.244	380.909.622	
9	Restrukturisasi Proses Bisnis dan Tata Kelola BUMD	Program Perekonomian dan Pembangunan	868.193.500	804.096.750	BAGIAN PEREKONOMIAN
10	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	400.604.000	310.271.500	BAPPERIDA
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	351.963.000	1.812.855.000	DINKES
11	Pemenuhan dan Peningkatan akses internet di desa (102 desa *blankspot*)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	505.000.000	543.500.000	DINKOMINFO
12	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.874.278.750	1.602.339.375	DINKOPDAG
13	Peningkatan kualitas jalan provinsi dengan lebar 7 meter	-			-
14	Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte)	-			-
15	Memastikan Integrasi Jaringan untuk menjamin Konektivitas Trans Jateng dengan Trans	-			-

No	Program Aksi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Aksi Provinsi	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
	Kabupaten/Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi				
16	Optimalisasi Pelabuhan dan Bandara Perintis di Jawa Tengah sebagai Generator Aktivitas Perekonomian Global	-			-
17	Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan Mendorong revitalisasi jalur kereta api	-			-
18	Insentif bagi investor yang menerapkan industri ramah lingkungan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100.000.000	54.500.000	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	212.000.000	76.000.000	
19	Mendorong Pengembangan Kawasan Industri berorientasi lingkungan (industri hijau)	-			-
20	Pemulihan DAS Serayu dan Bengawan Solo dalam mendukung Potensi Ekonomi Sungai lainnya	-			-
21	Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi	-			-
22	Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian	-			-
23	Pendirian Koperasi Buruh	-			-
24	Promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya Internasional melalui kerja sama dengan Diaspora	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	20.000.000	110.000.000	DINBUDPAR
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	45.000.000	27.500.000	
25	Event olahraga memancing terbesar di Asia	-			-
26	Mendukung dan menjadikan Kegiatan Tarkam (Pertandingan Antar Kampung) masuk ke dalam Kalender Olahraga Provinsi	-			-
27	Pengembangan Investasi berbasis Padat Modal Infrastruktur Padat Karya	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100.000.000	54.500.000	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	700.000.000	80.000.000	
28	Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	20.147.681.407	11.533.717.939	DKPPP
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.625.000.000	5.618.625.000	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	647.300.000	260.250.000	

No	Program Aksi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Aksi Provinsi	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
29	Peningkatan status bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo menjadi bandara internasional	-			-
30	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	50.000.000	25.000.000	DINKOPDAG
31	Mendorong Kawasan Ekonomi khusus (KEK) Pariwisata Budaya di wilayah Pantai Selatan Jawa (Banyumas dan kebumen) dengan Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Desa	-			-
32	Pembentukan badan aglomerasi wilayah pembangunan di Jawa Tengah	-			-
33	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	400.604.000	310.271.500	BAPPERIDA
34	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.780.719.000	1.520.718.800	DINKOMINFO/
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	30.000.000	10.000.000	DINBUDPAR
35	Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan Penyetaraan Ijazah dan mendapatkan pengakuan untuk mudah kerja dan setara lulusan sekolah negeri dan swasta	Program Pengelolaan Pendidikan	120.654.381.040	116.631.726.500	DINDIKPORA
36	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	20.147.681.407	11.533.717.939	DKPPP
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.625.000.000	5.618.625.000	
37	Menyiapkan Sistem Pendidikan Menengah untuk menciptakan Kesesuaian Pendidikan Pra-Kerja	-			-
38	Pemberdayaan Masyarakat Hutan Sosial	-			-
39	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	320.000.000	20.000.000	DPPPAPPKB
		Program Rehabilitasi Sosial	1.328.000.000	869.750.000	DINSOS
40	Mengusulkan Lagu Lir Ilir sebagai warisan budaya ke UNESCO	-			-
41	Melanjutkan program bahasa daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	-			-
42	Penguatan dan Promosi Moderasi beragama bagi tokoh agama ke luar negeri	-			-

No	Program Aksi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Aksi Provinsi	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
43	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	535.000.000	595.250.000	BANKESBANGPOL
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	200.000.000	64.750.000	
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	40.000.000	125.000.000	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	536.213.000	620.441.081	
44	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	264.131.312.400	230.298.669.020	DINKES
		Program Penunjang (BLUD)			DINKES (Puskesmas)
		Program Pemenuhan UKM dan UKP			DINKES (Puskesmas)
		Program Pemenuhan UKM dan UKP			DINKES (Puskesmas)
45	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	264.131.312.400	230.298.669.020	DINKES
46	Pelayanan tanpa Antri Lansia dan Klinik Geriatri, Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan di rumah sakit	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	340.430.995.030	375.973.945.182	
47	BOSDa Madrasah Aliyah	-			-
48	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	-			-
49	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.990.960.200	4.729.000.000	DINDIKPORA
50	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Program Pengelolaan Pendidikan	120.654.381.040	116.631.726.500	DINDIKPORA
51	Mendorong Pembangunan Rumah Apung Kawasan Pesisir	-			-
52	Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional	-			-
53	Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati)	-			-
54	Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM	-			-
55	Penurunan tarif Trans Jateng menjadi Rp.1000 untuk Buruh, Lansia, Veteran, dan Pelajar	-			-
56	Petani milenial gajian	Program Penyuluhan Pertanian	3.517.520.000	179.037.900	DKPPP

No	Program Aksi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Aksi Provinsi	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
57	Penguatan Tata Kelola CSR untuk Pembangunan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	53.000.000	27.000.000	BAPPERIDA
58	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	1.054.828.000	942.806.000	BPBD
59	Penegakan Regulasi Daerah terkait Air Tanah lebih intensif melalui evaluasi setiap 3 bulan sekali	-			-
60	Mendorong pembangunan *Giant Sea Wall* (Tanggul laut untuk mencegah abrasi, banjir rob dan sedimentasi tanah)	-			-
61	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	10.000.000	5.000.000	DPRKPLH

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel 5. 19
Dukungan terhadap Program Delegasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

No	Program Delegasi Kabupaten	Rencana Aktivitas	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Delegasi Kabupaten	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan *sport center*)	Pelatihan Keterampilan Kuliner: Meningkatkan Ekonomi Keluarga melalui Pembuatan Kue	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	30.000.000	23.500.000	DPPPAPPKB
		Pendataan Pelaku Subsektor Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30.000.000	10.000.000	DINBUDPAR
2	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olahraga Internasional	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Program Kawasan Permukiman	3.394.000.000	2.384.600.000	DPRKPLH
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara	Sosialisasi Antikorupsi kepada ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa, Memasukkan Materi tentang	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.750.000.000	3.750.000.000	INSPEKTORAT

No	Program Delegasi Kabupaten	Rencana Aktivitas	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Delegasi Kabupaten	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
	Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK	Antikorupsi dalam Diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung				
		Pendampingan Pembangunan Desa Antikorupsi di Kabupaten Temanggung				
		Penilaian/Evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) ZI kepada Perangkat Daerah yang akan diusulkan Penilaian oleh TPN				
4	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Memaksimalkan Puskesmas Keliling	Program Penunjang	340.430.995.030	375.973.945.182	DINKES
		Mengkoordinir Pelaksanaan Pelayanan *Spelling* di Desa	Program Pemenuhan UKM dan UKP	264.131.312.400	230.298.669.020	DINKES
		Memanfaatkan Pustu/PKD yang Ada dan Berfungsi				
		Memanfaatkan PKD dan Posyandu yang Ada di Setiap Desa				
5	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	Bukan Kewenangan Kabupaten				
6	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Pembentukan Satgas PPA di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	320.000.000	20.000.000	DPPPAPPKB
		Rumah Singgah yang Berfungsi untuk Perlindungan Sosial Sementara bagi PMKS/PPKS Terlantar	Program Rehabilitasi Sosial	1.328.000.000	869.750.000	DINSOS
7	Membangun 1.000 Desa/Kampung wisata baru	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100.000.000	54.800.000	DINBUDPAR
8	BUMDes Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	Pendampingan Pembentukan Badan Hukum untuk BUMDes	Program Penataan Desa	10.000.000	5.000.000	DINPERMADES
		Penyusunan Regulasi Daerah tentang BUMDes				
9	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	1.054.828.000	942.806.000	BPBD
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Program Penanggulangan Bencana	1.054.828.000	942.806.000	BPBD

No	Program Delegasi Kabupaten	Rencana Aktivitas	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Delegasi Kabupaten	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
10	Cek Kesehatan Gratis	Melakukan Skrining Kesehatan melalui Cek Kesehatan Gratis dan Pemeriksaan Kesehatan di Posyandu secara Berkala	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	264.131.312.400	230.298.669.020	DINKES
11	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Penugasan Bidan untuk Pelayanan di Desa	Program Penunjang	340.430.995.030		DINKES
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	264.131.312.400	230.298.669.020	DINKES
12	Melahirkan Pemerintahan yang *Good Clear Government dan Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Peningkatan Kesejahteraan, Profesionalitas dan Kualitas ASN dan Perangkat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.558.862.748	4.096.295.764	DINPERMADES
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				
		Pendidikan dan Pelatihan ASN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	514.375.000	320.000.000	BKPSDM
13	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Temanggung	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	30.144.130.000	24.438.475.350	BAGIAN HUKUM
		Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	20.319.578.775	10.452.296.928	DINSOS
14	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	Bukan Kewenangan Kabupaten				
15	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Penguatan Anggaran dan Perubahan Manajemen Balai Rehabilitasi Sosial	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.264.081.650	4.232.306.825	DPPPAPPKB
		Kolaborasi Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Terlantar dan Fakir Miskin				
16	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Mengembangkan Wisata Ramah Muslim	Program Pemasaran Pariwisata	325.250.000	137.625.000	DINBUDPAR
		Penyusunan Lembaga Masyarakat Ekonomi Syariah	Program Perekonomian dan Pembangunan	868.193.500	804.096.750	BAGIAN PEREKONOMIAN
17	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)	Pendampingan Sertifikasi HAKI bagi UMKM	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	400.604.000	310.271.500	BAPPERIDA

No	Program Delegasi Kabupaten	Rencana Aktivitas	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Delegasi Kabupaten	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
	dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Pendampingan Sertifikasi P-IRT bagi UMKM	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	351.963.000	1.812.855.000	DINKES
18	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) Operasional RPH sesuai dengan Standar	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	20.147.681.407	11.533.717.939	DKPPP
19	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan *go internasional*, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	Sistem Informasi Desa (SID)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.558.862.748	4.096.295.764	DINPERMADES
		Penguatan Tim Tanggap Bencana	Program Penanggulangan Bencana		942.806.000	BPBD
20	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, *hydro*, maupun tenaga surya	Bukan Kewenangan Kabupaten				
21	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Peningkatan SDM dan Kelembagaan Kelompok Wanita	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	350.000.000	25.000.000	DKPPP
22	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Pelatihan dan Pendampingan untuk Menciptakan 1000 Konten Kretaor di Desa Wisata	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.780.719.000	1.520.718.800	DINKOMINFO
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30.000.000	10.000.000	DINBUDPAR
23	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Gelar Produk UMKM Pendampingan Perizinan Pelatihan Pengusaha UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.874.278.750	1.602.339.375	DINKOPDAG
24	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	Menyusun Regulasi Daerah tentang Ekonomi Hijau	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	400.604.000	310.271.500	BAPPERIDA
		Menyusun RAD tentang Ekonomi Hijau				
25	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di	RTH Perkotaan	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan	10.000.000	5.000.000	DPRKPLH
		RTH Pedesaan				

No	Program Delegasi Kabupaten	Rencana Aktivitas	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Delegasi Kabupaten	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
	Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa		dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			
26	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	200.000.000	64.750.000	BANKESBANGPOL
27	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	Penanaman Nilai Universal dan Nilai Kebangsaan pada Siswa SMP/SMA Dialog Tokoh Lintas Agama	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	535.000.000	595.250.000	BANKESBANGPOL
28	Peningkatan operasional kader Posyandu	Pendampingan pada Kader Posyandu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	264.131.312.400	230.298.669.020	DINKES
29	Peningkatan kualitas hidup lansia	Pemberian Makan kepada Lansia Terlantar	Program Rehabilitasi Sosial	1.328.000.000	869.750.000	DINSOS
		Melakukan Skrining Kesehatan Lansia melalui CKG	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	264.131.312.400	230.298.669.020	DINKES
30	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Identifikasi Partner Kerjasama Pengembangan Cafe Berdaya di setiap Kecamatan	Program Pemasaran Pariwisata	325.250.000	137.625.000	DINBUDPAR
31	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di Masing-Masing Desa/Kelurahan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	50.000.000	25.000.000	DINKOPDAG
32	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Pemberian Penghargaan bagi Atlet Berprestasi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.990.960.200	4.729.000.000	DINDIKPORA
		Penyusunan Peraturan Bupati Desain Olahraga Daerah				
		Pemberian Hibah kepada KONI				
33	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Penyusunan SK Penyelenggaran Sekolah Inklusi (1 Kecamatan 1 Sekolah)	Program Pengelolaan Pendidikan	120.654.381.040	116.631.726.500	DINDIKPORA
		Penyusunan Perbup tentang Penyelenggaran				

No	Program Delegasi Kabupaten	Rencana Aktivitas	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Delegasi Kabupaten	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
		Pendidikan Inklusif				
		Penyelenggaraan Bimtek Peningkatan Kapasitas Guru Inklusi				
		Pembentukan Tim KKG (Kelompok Kerja Guru Inklusif)				
34	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Penyusunan Pembuatan Peta Rawan Bencana tingkat Desa	Program Penanggulangan Bencana	1.054.828.000	942.806.000	BPBD

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

3. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 5. 20
Dukungan Program Kabupaten Temanggung terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung SPM Tahun 2026

No	Program	Subkegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	95.000.000	47.500.000	DINDIKPORA
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	30.000.000	15.000.000	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	0	0	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	545.000.000	70.000.000	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	150.000.000	0	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.085.000.000	2.551.150.000	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	30.000.000	15.000.000	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	125.385.200	62.692.600	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30.000.000	15.000.000	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	280.000.000	290.000.000	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	3.849.677.040	60.000.000	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	342.000.000	0	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	320.000.000	0	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	42.000.000	21.000.000	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	40.000.000	220.000.000	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	35.000.000	17.500.000	

No	Program	Subkegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	300.000.000	291.500.000	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	610.000.000	605.000.000	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	168.300.000	64.278.900	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.689.632.800	5.700.359.100	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.600.690.000	9.206.441.200	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.637.046.000	3.210.944.700	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	290.000.000	148.600.000	
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	50.000.000	25.000.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	110.000.000	50.000.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	55.000.000	35.000.000	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	25.000.000	12.500.000	DINKES
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	25.000.000	1.542.720.800	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25.000.000	12.500.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	72.795.000	167.500.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	30.760.000	12.500.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	25.000.000	12.500.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	41.720.000	2.006.492.500	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	28.520.000	12.500.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	44.360.000	12.500.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25.000.000	12.500.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	25.000.000	12.500.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	25.000.000	12.500.000	
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	150.000.000	54.000.000	DPUPR
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0	3.290.533.000	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	125.000.000	101.030.000	

No	Program	Subkegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	9.050.198.000	2.634.961.000	DPRKPLH
5	Program Pengembangan Perumahan	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	#N/A	0	DPRKPLH
		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.000.000	10.000.000	
6	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	626.268.393	800.000.000	SATPOL PP dan DAMKAR
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	153.910.000	25.000.000	
7	Program Penanggulangan Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	20.000.000	10.000.000	BPBD
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	25.000.000	12.492.000	
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	70.000.000	53.000.000	
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	495.828.000	347.914.000	
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	0	0	
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0	0	
		Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	29.000.000	0	
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0	0	
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	250.000.000	334.400.000	
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	0	0	
8	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	334.184.750	363.816.750	SATPOL PP dan DAMKAR
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	142.237.000	75.044.500	
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	235.256.000	269.335.000	
9	Program Rehabilitasi Sosial	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	1.000.000	DINSOS
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000	2.500.000	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10.000.000	10.000.000	

No	Program	Subkegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	25.000.000	25.000.000	
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10.000.000	8.000.000	
		Pemberian Layanan Kedaruratan	528.000.000	504.000.000	
		Pemberian Layanan Rujukan	15.000.000	5.000.000	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.000.000	4.000.000	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15.000.000	5.000.000	
		Penyediaan Alat Bantu	35.000.000	10.000.000	
		Penyediaan Permakanan	650.000.000	290.250.000	
		Penyediaan Sandang	60.000.000	25.000.000	
10	Program Penanganan Bencana	Pelayanan Dukungan Psikososial	2.000.000	1.000.000	DINSOS
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.000.000	1.500.000	
		Penyediaan Makanan	45.000.000	22.500.000	
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	4.000.000	2.000.000	

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

4. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD 2026

Tabel 5. 21
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD 2026

Program	Kegiatan	Pagu	PD Pengampu	Kecamatan
Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Jalan Mungseng – Tlogomulyo	377.000.000	DPUPR	TLOGOMULYO
Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Ruas Jalan Muntung – Jumprit	634.000.000	DPUPR	CANDIROTO
Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran Jalan Ruas Rowoseneng - Tlogopucang	882.000.000	DPUPR	KANDANGAN
Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Ruas Jalan Gatak – Ngaditirto	336.000.000	DPUPR	SELOPAMPANG
Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Senderan/Talud Jalan Mudal – Legoksari	538.000.000	DPUPR	TEMBARAK
Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan Aspal Dusun Kebonsari-Pugeran (Rekonstruksi Jalan Ngabeyan-Kebonsari)	516.000.000	DPUPR	WONOBOYO
Program Penataan Bangunan	Pembangunan Pavingisasi Trotoar Jalan	433.000.000	DPUPR	KLEDUNG
Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran Peningkatan Jalan Ruas Lempuyang - Tretep	366.000.000	DPUPR	TRETEP
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Drainase Tertutup Jl. Ky. Subechi	688.000.000	DPUPR	PARAKAN
Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Jalan Ruas Wanutengah – Bulu	723.000.000	DPUPR	BULU
Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Bejen -Prangkokan	561.000.000	DPUPR	BEJEN

Program	Kegiatan	Pagu	PD Pengampu	Kecamatan
Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan/Rehab ilitasi/Peningkatan Ruas Jalan Dlimoyo - Kentengsari	868.000.000	DPUPR	NGADIREJO
Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Senderan Jalan dan Pelebaran Jalan (Ruas Jalan Kebraman- Gemawang)	559.000.000	DPUPR	GEMAWANG
Program Kawasan Permukiman	Pembangunan RTLH	611.000.000	DPRKPLH	KRANGGAN
Program Kawasan Permukiman	RTLH	685.000.000	DPRKPLH	KALORAN
Program Kawasan Permukiman	Pembangunan Rehabilitasi RTLH	748.000.000	DPRKPLH	KEDU
Program Penyelengga Raan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengadaan Lampu Peringatan Jalan Kabupaten	349.000.000	Dinas Perhubungan	BANSARI
Program Penyelengga Raan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengadaan Lampu Jalan Di Ruas Jalan Kabupaten (Jalan Kedu Tegong)	477.000.000	Dinas Perhubungan	JUMO
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rehab gedung UMKM dan Sarana prasarana digital	737.000.000	Dinkopdag	PRINGSURAT
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pembangunan kios UMKM kelurahan jurang	926.000.000	Dinkopdag	TEMANGGUNG
TOTAL		**12.014.000.000**		

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

5. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanggulangan Kemiskinan

Tabel 5. 22
Program Daerah yang Mendukung Penanganan Kemiskinan

No	Perangkat Daerah	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Perubahan Anggaran (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	-	-
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	-	150.000.000
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	-
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	250.000.000	334.400.000
5	Badan Penanggulangan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban	70.000.000	53.000.000

No	Perangkat Daerah	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Perubahan Anggaran (Rp)
	Bencana Daerah		Bencana Kabupaten/Kota		
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	495.828.000	347.914.000
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	20.000.000	10.000.000
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	135.000.000	35.000.000
9	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	393.423.070.000	233.579.006.957
10	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	351.963.000	1.159.563.000
11	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		165.000.000.000
12	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengembangan Puskesmas	9.748.000.000	6.548.852.975
13	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	360.592.400	279.468.000
14	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	15.423.799.000	11.046.315.000
15	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	100.000.000	132.521.000
16	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	25.000.000	1.542.720.800
17	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	44.360.000	248.980.000
18	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25.000.000	12.500.000
19	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	28.520.000	12.500.000

No	Perangkat Daerah	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Perubahan Anggaran (Rp)
		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
20	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	25.000.000	12.500.000
21	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	25.000.000	12.500.000
22	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	30.760.000	122.460.000
23	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	41.720.000	2.441.576.500
24	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	25.000.000	12.500.000
25	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	100.000.000	50.000.000
26	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular		#N/A
27	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Tidak Menular		#N/A
28	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	43.500.000	35.000.000
29	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	6.500.000	3.000.000
30	Dinas Kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		65.063.000
31	Dinas Kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang	92.161.000	238.944.000

No	Perangkat Daerah	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Perubahan Anggaran (Rp)
			Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
32	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	72.795.000	1.616.598.000
33	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25.000.000	12.500.000
34	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	25.000.000	12.500.000
35	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	312.657.000	7.015.691.000
36	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24.960.000	973.630.000
37	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	106.905.000	1.085.808.000
38	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	28.305.742.000	21.185.711.320
39	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	20.000.000	5.000.000
40	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	338.090.000	250.258.000
41	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Layanan Imunisasi	38.920.000	474.891.000
42	Dinas Kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	153.776.000	162.026.000
43	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		653.292.000
44	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam	30.000.000	50.000.000

No	Perangkat Daerah	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Perubahan Anggaran (Rp)
			1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
45	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	20.000.000	20.000.000
46	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50.000.000	25.000.000
47	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	350.000.000	25.000.000
48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	4.733.000.000	2.317.500.000
49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	688.000.000	619.200.000
50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000	250.000.000
51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	125.000.000	101.030.000
52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-	3.290.533.000
53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	150.000.000	75.000.000
54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	150.000.000	75.000.000
55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.500.000.000	1.350.000.000
56	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	163.000.000	163.000.000
57	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.689.632.800	5.700.359.100
58	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	150.000.000	75.000.000
59	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	55.000.000	35.000.000
60	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	300.000.000	291.500.000
61	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	610.000.000	605.000.000

No	Perangkat Daerah	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Perubahan Anggaran (Rp)
62	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.637.046.000	3.210.944.700
63	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10.000.000	5.000.000
64	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	545.000.000	70.000.000
65	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	168.300.000	64.278.900
66	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Dana BOP PAUD	12.109.490.000	11.840.250.000
67	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	80.000.000	50.000.000
68	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5.290.930.000	6.043.850.000
69	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	50.000.000	25.000.000
70	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	200.000.000	100.000.000
71	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	425.000.000	1.775.000.000
72	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	46.658.550.000	44.258.720.000
73	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	70.000.000	38.600.000
74	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	30.000.000	-
75	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	660.000.000	776.150.000
76	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	32.166.920.000	31.183.040.000
77	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	20.000.000	10.000.000
78	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000	60.000.000
79	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Perluasan Kesempatan Kerja	340.000.000	340.000.000

No	Perangkat Daerah	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Perubahan Anggaran (Rp)
80	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	20.250.000	10.125.000
81	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	11.000.000	5.500.000
82	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja	9.000.000	4.500.000
83	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	9.000.000	4.500.000
84	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	22.000.000	11.000.000
85	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-
86	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	799.999.550	519.349.252
87	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.000.000	10.000.000
88	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.394.000.000	2.384.600.000
89	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	235.000.000	84.000.000
90	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyediaan Makanan	45.000.000	22.500.000
91	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyediaan Sandang	40.000.000	20.000.000
92	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.000.000	1.500.000
93	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Pelayanan Dukungan Psikososial	2.000.000	1.000.000
94	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	12.000.000	7.500.000
95	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	799.131.000	799.131.000

No	Perangkat Daerah	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Perubahan Anggaran (Rp)
		DAN JAMINAN SOSIAL			
96	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rujukan Anak-Anak Terlantar	15.000.000	7.500.000
97	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	70.003.475	35.001.738
98	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	18.615.444.300	9.328.164.190
99	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	5.000.000
100	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Permakanan	300.000.000	2.000.000
101	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Sandang	20.000.000	5.000.000
102	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Alat Bantu	35.000.000	10.000.000
103	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15.000.000	5.000.000
104	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10.000.000	10.000.000
105	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	25.000.000	25.000.000
106	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000	2.500.000
107	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10.000.000	8.000.000
108	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Layanan Kedaruratan	528.000.000	504.000.000
109	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.000.000	4.000.000
110	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	1.000.000
111	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	4.000.000	2.000.000
112	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Layanan Rujukan	15.000.000	5.000.000
113	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	5.000.000
114	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	25.000.000

No	Perangkat Daerah	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Perubahan Anggaran (Rp)
115	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	-
116	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	810.000.000	277.500.000
117	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	10.000.000	5.000.000
118	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	80.000.000	40.000.000
119	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	334.184.750	363.816.750
120	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	50.000.000	225.000.000
121	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	52.500.000	26.250.000
122	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	50.000.000	25.000.000
123	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	10.000.000	5.000.000
124	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	20.000.000	10.000.000

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

6. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung

Penanganan stunting di Kabupaten Temanggung Tahun 2026 diarahkan pada penguatan keberlanjutan hasil percepatan penurunan stunting yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, dengan fokus pada peningkatan kualitas intervensi dan ketepatan sasaran. Upaya ini merupakan bagian dari kontribusi daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga mengarahkan penguatan kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) secara berjenjang hingga tingkat desa, serta optimalisasi pemanfaatan data *by name by*

address untuk memastikan ketepatan intervensi. Kolaborasi lintas sektor dan kemitraan dengan swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat terus ditingkatkan guna memperluas cakupan dan efektivitas program. Guna menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud, maka dukungan kegiatan yang bersumber dari APBD sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5. 23
Program Daerah yang Mendukung Aksi Konvergensi Stunting
Tahun 2026

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	15.423.799.000	11.046.315.000	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	72.795.000	167.500.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25.000.000	12.500.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	25.000.000	1.542.720.800	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	25.000.000	12.500.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	44.360.000	12.500.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25.000.000	12.500.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	312.657.000	10.000.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24.960.000	845.770.000	
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	353.089.000	384.161.000	
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	338.090.000	238.170.000	
			Pengelolaan Layanan Imunisasi	38.920.000	10.000.000	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	351.963.000	12.960.000	Dinas Kesehatan
3	Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	217.800.000	173.400.000	DPPPAPPKB
4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.063.307.000	1.448.737.000	DPPPAPPKB
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi	275.000.000	15.000.000	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
		Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas			
5	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluaga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	#N/A	169.966.000	DPPPAPPKB
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita)	1.827.000.000	1.278.900.000	
			Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.192.400.000	2.740.500.000	
6	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-	3.290.533.000	DPUPR
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	9.050.198.000	2.634.961.000	DPRKPLH
8	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.394.000.000	2.384.600.000	DPRKPLH
9	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	350.000.000	25.000.000	DKPPP
10	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75.000.000	37.500.000	Bapperida
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.000.000	5.000.000	

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

7. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDGs Kabupaten Temanggung

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen dalam mendukung keberhasilan program pembangunan berkelanjutan/SDGS, pengarusutamaan tata kelola Pemerintahan yang baik, dan pengarusutamaan gender dan didukung oleh sebagian besar perangkat daerah serta lembaga non pemerintah. Program daerah yang mendukung pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (SDGs), pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pengarusutamaan gender sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5. 24
Program Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	15.423.799.000	11.046.315.000	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	72.795.000	167.500.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25.000.000	12.500.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	25.000.000	1.542.720.800	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	25.000.000	12.500.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	44.360.000	12.500.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25.000.000	12.500.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	312.657.000	10.000.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24.960.000	845.770.000	
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	353.089.000	384.161.000	
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	338.090.000	238.170.000	
			Pengelolaan Layanan Imunisasi	38.920.000	10.000.000	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	351.963.000	12.960.000	Dinas Kesehatan
3	Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	217.800.000	173.400.000	DPPPAPPKB

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
		Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.063.307.000	1.448.737.000	DPPPAPPKB
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	275.000.000	15.000.000	
5	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluaga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130.000.000	169.966.000	DPPPAPPKB
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.827.000.000	1.278.900.000	
			Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.192.400.000	2.740.500.000	
6	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-	3.290.533.000	DPUPR
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	9.050.198.000	2.634.961.000	DPRKPLH
8	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.394.000.000	2.384.600.000	DPRKPLH
9	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	350.000.000	25.000.000	DKPPP

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
		Angka Kecukupan Gizi				
10	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75.000.000	37.500.000	Bapperida
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.000.000	5.000.000	

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel 5. 25
Program Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pengarusutamaan Gender

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
I	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**			
1	Program Pengelolaan Pendidikan	tujuan 1	V	V
		tujuan 2		
		tujuan 4		
II	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**			
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	tujuan 1	V	V
		tujuan 2		
		tujuan 3		
		tujuan 6		
		tujuan 13		
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	tujuan 3	V	V
3	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	tujuan 3	V	V
III	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**			
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	tujuan 6	V	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	tujuan 1		V
		tujuan 6		
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	tujuan 1	V	
4	Program Pengembangan Permukiman	tujuan 1	V	V
5	Program Penataan Bangunan Gedung	tujuan 9	V	
6	Program Penyelenggaraan Jalan	tujuan 9	V	
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	tujuan 9	V	
		tujuan 11		
		tujuan 13		
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	tujuan 9	V	
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	tujuan 9	V	
IV	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**			
1	Program Pengembangan Perumahan	tujuan 1		V
		tujuan 6		
2	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	tujuan 1		V
		tujuan 6		
		tujuan 11		
V	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**			
1	Program Penanggulangan Bencana	tujuan 1	V	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
		tujuan 11		
		tujuan 13		
2	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana			V
3	Program Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban Umum			V
VI	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**			
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	tujuan 1	V	V
		tujuan 2		
		tujuan 3		
2	Program Rehabilitasi Sosial	tujuan 3	V	
3	Program Pemberdayaan Sosial			V
VII	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**			
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	tujuan 1	V	V
		tujuan 8		
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	tujuan 8	V	V
3	Program Hubungan Industrial	tujuan 8	V	
		tujuan 10		
VIII	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**			
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	tujuan 5	V	V
		tujuan 16		
2	Program Perlindungan Perempuan	tujuan 16	V	V
		tujuan 5		
		tujuan 10		
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	tujuan 3		V
4	Program Pemenuhan Hak Anak	tujuan 16	V	
5	Program Perlindungan Khusus Anak	tujuan 10	V	
IX	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**			
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	tujuan 2	V	
		tujuan 13		
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	tujuan 2	V	
		tujuan 8		
		tujuan 13		
X	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**			
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	tujuan 6	V	
		tujuan 9		
		tujuan 12		
		tujuan 13		
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	tujuan 13	V	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	tujuan 6	V	
		tujuan 11		
		tujuan 13		
		tujuan 15		
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	tujuan 6	V	
		tujuan 12		
		tujuan 13		
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	tujuan 6	V	
6	Program Pengelolaan Persampahan	tujuan 1	V	V
		tujuan 12		
		tujuan 11		
		tujuan 13		
XI	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**			
1	Program Pencatatan Sipil	tujuan 1	V	V
		tujuan 16		
		tujuan 17		

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	tujuan 16	V	V
3	Program Pendaftaran Penduduk	tujuan 16	V	V
XII	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**			
1	Program Penataan Desa	tujuan 10	V	
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	tujuan 10	V	
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	tujuan 10	V	
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	tujuan 10	V	
5	Program Pembinaan dan Fasilitas Perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa			V
6	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat			V
XIII	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**			
1	Program Pengendalian Penduduk	tujuan 1		V
		tujuan 3		
		tujuan 5		
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	tujuan 1		V
		tujuan 3		
		tujuan 5		
3	Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera	tujuan 3	V	V
XIV	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**			
1	Program Pengembangn Iklim Penanaman Modal	tujuan 8	V	
		tujuan 9		
2	Program Pengembangan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	tujuan 8	V	
3	Program Pelayanan Penanaman Modal			V
XV	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Publik**			
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	tujuan 16	V	V
2	Program Aplikasi Informatika	tujuan 4	V	V
		Tujuan 9		
XVI	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**			
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tujuan 3	V	
		tujuan 11		
XVII	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi**			
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	tujuan 8		V
XVIII	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**			
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	tujuan 1	V	
		tujuan 4		
		tujuan 8		
XIX	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**			
1	Program Pengembangan Kebudayaan	tujuan 8	V	
2	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	tujuan 11	V	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan		V	
4	Program Pembinaan Perpustakaan			V
XX	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan**			
1	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	tujuan 2	V	
		tujuan 8		
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	tujuan 8	V	
XXI	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**			

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	tujuan 8	V	
2	Program Pemasaran Pariwisata	tujuan 8	V	
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	tujuan 8	V	
XXII	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**			
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	tujuan 2 tujuan 13	V	
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tujuan 13	V	
3	Program Pengendalian bencana Pertanian	Tujuan 13	V	
4	Program Penyuluhan Pertanian	Tujuan 13	V	
XXIII	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**			
1	Program Pengembangan Ekspor	tujuan 17	V	
2	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Tujuan 12	V	
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			V
XXIV	**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**			
1	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	tujuan 8		V
XXV	**Sekretariat Daerah**			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tujuan 1 tujuan 4	V	
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tujuan 12 tujuan 16 tujuan 17	V	V
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	tujuan 16 tujuan 8	V	V
4	Program Administrasi Umum	tujuan 16	V	
XXVI	**Perencanaan**			
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tujuan 11	V	V
2	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	tujuan 1 tujuan 11 tujuan 17	V	V
3	Program Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam			V
XXVII	**Keuangan**			
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	tujuan 16 tujuan 17	V	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	tujuan 16	V	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	tujuan 16 tujuan 17	V	
XXVIII	**Kepegawaian**			
1	Program Kepegawaian Daerah		V	
XXIX	**Pendidikan Dan Pelatihan**			
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	tujuan 5 tujuan 16	V	V
XXX	**Penelitian Dan Pengembangan**			
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	tujuan 1 tujuan 9	V	
XXXI	**Inspektorat Daerah**			
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan		V	V
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		V	
XXXII	**Kecamatan**			
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		V	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		V	
XXXIII	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**			
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	tujuan 5		V
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial	Tujuan 3	V	

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Berdasarkan pemetaan Indikator SDG's dalam dokumen perencanaan daerah terdapat indikator tujuan, indikator sasaran, indikator program, dan indikator yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah. Beberapa indikator SDG's yang bukan merupakan kewenangan daerah otomatis tidak ada dukungannya di Renja maupun RKPD. Hasil pemetaan indikator SDG's sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 26
Pemetaan Indikator SDGs dalam Dokumen Perencanaan Daerah

No	Spesifikasi Indikator	Pilar Sosial	Pilar Ekonomi	Pilar Lingkungan	Pilar Hukum dan Tata Kelola	Jumlah Indikator
1	Indikator Kinerja Tujuan	2	1	0	0	3
2	Indikator Kinerja Sasaran	0	4	0	3	7
3	Indikator Kinerja Program	24	7	16	10	57
4	Indikator Pada Renstra PD	34	3	0	2	39
5	Indikator Bukan Kewenangan	7	3	0	1	11
Jumlah		67	18	16	16	117

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

8. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung

Strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 tahun 2018 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung. Sesuai Perbup ini, seluruh perangkat daerah dan desa wajib menyusun perencanaan penganggaran responsif gender pada semua program dan kegiatan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang ada menggunakan Teknik analisis gender berupa GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan GBS (Gender Budget Statement). Adapun penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender dilaksanakan setiap tahun sebelum penyusunan rencana kerja anggaran.

Tabel 5. 27
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung

No	Program	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Pengelolaan Pendidikan	120.654.381.040	116.631.726.500	Dindikpora
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	264.131.312.400	230.298.669.020	Dinkes
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	351.963.000	1.812.855.000	Dinkes
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota	286.855.949.139	375.974.057.782	Dinkes
5	Program Penyuluhan Pertanian	3.517.520.000	179.037.900	DKPPP
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.936.000.000	2.372.301.500	Dinkopdag
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.076.857.678	4.121.074.246	Dinbudpar
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	7.375.500.000	6.942.500.000	Dinbudpar
9	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	100.000.000	54.800.000	Dinbudpar
10	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	611.000.000	305.500.000	Dinperinaker
11	Program Penanggulangan Bencana	1.054.828.000	942.806.000	BPBD
12	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.560.006.393	1.239.914.000	Satpol PP dan Damkar
13	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.394.000.000	2.384.600.000	DPRKPLH
14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	275.000.000	3.445.563.000	DPUPR
15	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	10.689.821.400	12.939.314.215	Dinhub
16	Program Promosi Penanaman Modal	700.000.000	80.000.000	DPMPTSP
17	Program Perekonomian dan Pembangunan	868.193.500	804.096.750	Bagian Pembangunan Setda
18	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	30.144.130.000	24.438.475.350	Bagian Hukum Setda

No	Program	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
19	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	16.860.356.663	14.766.396.400	Sekretariat DPRD
20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	13.280.625.236	14.321.405.722	INSPEKTORAT
21	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	350.000.000	690.000.000	Bapperida
22	Program Riset Dan Inovasi Daerah	207.000.000	113.000.000	Bapperida
23	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	53.000.000	27.000.000	Bapperida
24	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.558.206.591	29.296.181.375	BPKPAD
25	Program Kepegawaian Daerah	586.977.500	441.580.500	BPKSDM
26	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	514.375.000	320.000.000	BPKSDM
27	Program Pendaftaran Penduduk	500.000.000	594.330.000	Dindukcapil
28	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.973.500	13.000.000	Kecamatan
29	Program Peningkatan Kerja sama Desa	10.000.000	5.000.000	Dinpermades
30	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	160.000.000	272.000.000	Dinpermades
31	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.558.862.748	4.096.295.764	Dinpermades
32	Program Penataan Desa	10.000.000	5.000.000	Dinpermades
33	Program Pengelolaan Arsip	9.000.000	4.500.000	Dinpusip
34	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	505.000.000	543.500.000	Dinkominfo
35	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	320.000.000	20.000.000	DPPAPPPKB
36	Program Perlindungan Perempuan	10.000.000	3.500.000	DPPAPPPKB
37	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	20.319.578.775	10.452.296.928	DINSOS
38	Program Pemberdayaan Sosial	310.000.000	119.000.000	DINSOS
39	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	12.000.000	7.500.000	DINSOS
40	Program Rehabilitasi Sosial	1.328.000.000	869.750.000	DINSOS
41	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	535.000.000	595.250.000	BANKESBANGPOL

No	Program	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
42	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.827.819.500	1.980.319.500	BANKESBANGPOL

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

9. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen **mendukung** proses adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 28
Program Daerah yang Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

No	Program	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	220.000.000	237.000.000	DPRKPLH
2	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-	DPRKPLH
3	Program Pengelolaan Persampahan	6.828.000.000	7.188.015.500	DPRKPLH
4	Program Penanggulangan Bencana	1.054.828.000	942.806.000	BPBD
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.050.198.000	2.634.961.000	DPRKPLH

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

10. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam kawasan. Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat mendukung kegiatan tersebut dan mengalokasikan program kegiatan terhadap pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata di kawasan pariwisata sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5. 29
Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung Terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur Tahun 2026

No	Program	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	4.733.000.000	2.317.500.000	DPUPR
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	7.330.000.000	7.941.139.800	DPRKPLH
3	Program Pemerintahan dan	30.144.130.000	24.438.475.350	Bagian Hukum

	Kesejahteraan Rakyat			
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.990.960.200	4.729.000.000	DINDIKPORA
5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100.000.000	54.800.000	DINBUDPAR
6	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.936.000.000	2.372.301.500	DINKOPDAG
7	Program Penyelenggaraan Jalan	20.060.000.000	52.882.912.000	DPUPR
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	4.733.000.000	2.317.500.000	DPUPR
9	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	10.689.821.400	12.939.314.215	DINHUB
10	Program Pengembangan Kebudayaan	7.375.500.000	6.942.500.000	DINBUDPAR
11	Program Pemasaran Pariwisata	325.250.000	137.625.000	DINBUDPAR
12	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100.000.000	54.800.000	DINBUDPAR

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Pengembangan Borobudur sebagai destinasi pariwisata super prioritas selain mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, juga membutuhkan dukungan dari daerah sekitarnya, salah satunya adalah Kabupaten Temanggung. Potensi yang mendukung pengembangan Borobudur yang berada di Kabupaten Temanggung salah satunya adalah event yang dilaksanakan secara rutin di Kawasan Borobudur yaitu pengambilan air suci, persemayaman air suci di Candi Mendut dan perayaan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur. Sejumlah Biksu yang berasal dari 11 majelis agama Buddha di Indonesia, mengikuti ritual pengambilan air suci (berkah) untuk perayaan Hari Raya Waisak di Mata Air Jumprit Temanggung persisnya di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Air berkah tersebut akan disemayamkan di Candi Mendut dan akan digunakan dalam perayaan detik-detik Waisak di Candi Borobudur. Air di Umbul Jumprit memang bukan air biasa. Bagi Umat Budha, air Umbul Jumprit dianggap sebagai air suci pembersih jiwa manusia. Harapan pengambilan air suci ini untuk seluruh manusia di dunia agar sadar bahwa jiwa ini bagaikan jiwa Sang Buddha. Penuh cinta kasih tanpa memandang aliran dan agama. Salah seorang Wakil Bhikkhu,

Dwi Virya, mengatakan dalam agama Buddha air suci mempunyai makna filosofis yang sangat tinggi.

11. Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan WP Gelang Manggung

Pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung terlaksananya Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kota Wilayah Pengembangan magelang-Kabupaten Magelang- Kabupaten Temanggung (WP Gelang Manggung). Program kegiatan yang direncanakan dalam mendukung percepatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 30
Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Kewilayahan WP Gelangmanggung

No	Program	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	10.689.821.400	12.939.314.215	DINHUB
2	Program Pengembangan Kebudayaan	7.375.500.000	6.942.500.000	DINBUDPAR
3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	45.000.000	27.500.000	DINBUDPAR
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100.000.000	54.800.000	DINBUDPAR
5	Program Pemasaran Pariwisata	325.250.000	137.625.000	DINBUDPAR
6	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	20.000.000	110.000.000	DINBUDPAR
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30.000.000	10.000.000	DINBUDPAR
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	50.000.000	25.000.000	DKPPP
9	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	350.000.000	25.000.000	DKPPP
10	Program Penanganan Kerawanan Pangan	50.000.000	70.000.000	DKPPP
11	Program Pengawasan Keamanan Pangan	20.000.000	50.000.000	DKPPP

No	Program	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
12	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	50.000.000	25.000.000	DKPPP
13	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	250.000.000	195.000.000	DKPPP
14	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	50.000.000	25.000.000	DKPPP
15	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	260.000.000	80.750.000	DKPPP
16	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	20.147.681.407	11.533.717.939	DKPPP
17	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.625.000.000	5.618.625.000	DKPPP
18	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	647.300.000	260.250.000	DKPPP
19	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	50.000.000	50.000.000	DKPPP
20	Program Penyuluhan Pertanian	3.517.520.000	179.037.900	DKPPP

Sumber : Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun, 2026

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Gelangmanggung diperlukan Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antarmoda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan Trans Jateng Koridor Borobudur-Kutoarjo yang terhubung dengan moda transportasi kereta api Prameks rute Kutoarjo-Yogyakarta dan inisiasi proses rencana pengembangan koridor baru Trans Jateng Koridor Temanggung- Borobudur dengan peningkatan peran dan keterlibatan pemerintahan kabupaten/kota di WP Gelang Manggung. Program strategis penggerak pertumbuhan ekonomi pada WP Gelang Manggung meliputi pengembangan ekonomi kreatif (kriya) dan peningkatan produksi serta hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan kopi, tembakau, aren, tanaman perkebunan, sapi potong, kerbau, domba, itik, ayam buras, dan perikanan budidaya).

12. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, Pemerintah Daerah menetapkan sasaran pembangunan yang berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan, peningkatan konektivitas wilayah, serta penguatan daya saing daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Adapun sasaran dan prioritas daerah dalam mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 di Kabupaten Temanggung sebagai berikut.

Tabel 5. 31
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

No	Program	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Penyelenggaraan Jalan	20.060.000.000	52.882.912.000	DPUPR
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	4.733.000.000	2.317.500.000	DPUPR
3	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	10.689.821.400	12.939.314.215	DINHUB
4	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	220.000.000	237.000.000	DPRKPLH

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

13. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2026

Program pembangunan infrastruktur pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 difokuskan untuk mendukung terwujudnya program prioritas bupati yaitu “Penataan Garis Imajiner”. Garis Imajiner perkotaan diharapkan akan memberikan kemudahan akses dan meningkatkan konektivitas bagi masyarakat.

Tabel 5. 32
Dukungan Program Kabupaten Temanggung terhadap Pembangunan Infrastruktur Tahun 2026

No	Program	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Penyelenggaraan Jalan	20.060.000.000	52.882.912.000	DPUPR
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	4.733.000.000	2.317.500.000	DPUPR
3	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	10.689.821.400	12.939.314.215	DINHUB
4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.625.000.000	5.618.625.000	DKPPP
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	275.000.000	3.445.563.000	DPUPR

No	Program	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.050.198.000	2.634.961.000	DPRKPLH
7	Program Kawasan Permukiman	3.394.000.000	2.384.600.000	DPRKPLH
8	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.625.000.000	5.618.625.000	DKPPP
9	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.936.000.000	2.372.301.500	DINKOPDAG
10	Program Pengelolaan Pendidikan	120.654.381.040	116.631.726.500	DINDIKPORA
11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	264.131.312.400	230.298.669.020	DINKES
12	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	863.177.750	2.973.946.250	SATPOL PP DAMKAR
13	Program Penanggulangan Bencana	1.054.828.000	942.806.000	BPBD
14	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-	DPRKPLH
15	Program Pengelolaan Persampahan	6.828.000.000	7.188.015.500	DPRKPLH
16	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.780.719.000	1.520.718.800	DINKOMINFO

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

14. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Pintu Tol Bawen – Yogyakarta

Pada tahun 2022, Provinsi Jawa Tengah memiliki agenda pembangunan jalan tol ruas Bawen-Yogyakarta dengan pintu tol di Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Peluang tersebut ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui kegiatan penataan ruang yaitu peninjauan kembali dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung 2011-2031 agar keberadaan pintu tol ini memungkinkan tumbuhnya ekonomi baru serta mendukung pengembangan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Temanggung. Harapannya Kabupaten Temanggung tidak sebatas dilewati tetapi bisa menjadi daerah tujuan.

Tabel 5. 33
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Pintu Tol Bawen-Yogyakarta

No	Program	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Penyelenggaraan Jalan	20.060.000.000	52.882.912.000	DPUPR
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	4.733.000.000	2.317.500.000	DPUPR
3	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	10.689.821.400	12.939.314.215	DINHUB

No	Program	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
4	Program Pengembangan Ekspor	200.000.000	25.000.000	DINKOPDAG
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.874.278.750	1.602.339.375	DINKOPDAG
6	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100.000.000	54.500.000	DPMPTSP
7	Program Promosi Penanaman Modal	700.000.000	80.000.000	DPMPTSP
8	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	611.000.000	305.500.000	DINPERINAKER
9	Program Penempatan Tenaga Kerja	400.250.000	370.125.000	DINPERINAKER
10	Program Hubungan Industrial	120.000.000	60.000.000	DINPERINAKER

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

15. Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Terhadap Satu Data Indonesia

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 34
Program Daerah yang Mendukung Satu Data Indonesia

No	Program	Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	505.000.000	543.500.000	Dinkominfo
2	Program pengelolaan aplikasi informatika	1.780.719.000	1.520.718.800	Dinkominfo
3	Program penyelenggaraan statistik Sektoral	30.000.000	15.000.000	Dinkominfo
4	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	350.000.000	690.000.000	Bappeda

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

5.2. PENDANAAN DAERAH

Penyusunan rencana kerja dan pendanaan daerah Tahun 2026 memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, isu strategis daerah, serta kebutuhan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pendekatan perencanaan dilakukan secara holistik-tematik, integratif, dan berbasis kinerja untuk memastikan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan. Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung disusun dalam rangka memenuhi sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025- 2029 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional. Selain itu

juga berpedoman pada tema pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yaitu “Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan”.

5.2.1. Kegiatan Prioritas Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang

Program dan kegiatan prioritas yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Bidang Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diprioritaskan pada beberapa capaian Bidang Pendidikan yang belum sesuai target yang ditetapkan oleh Pusat dan hasil Rakortek Provinsi mengenai arahan Kemendikbud untuk pencapaian SPM Pendidikan yang tertuang dalam Rapor Pendidikan sebagaimana Surat Kemdikbudristekdikti Nomor 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 Tanggal 16 Februari 2024 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kab/Kota yaitu melalui kegiatan peningkatan angka partisipasi sekolah 5-6 tahun, angka partisipasi sekolah 7-15 tahun dan angka partisipasi sekolah 7-18 tahun, peningkatan satuan PAUD terakreditasi minimal B, peningkatan kemampuan numerasi dan literasi SD dan SMP. Terkait implementasi Pendidikan Pancasila dan Pendidikan karakter juga menjadi perhatian semua pihak baik perangkat daerah terkait, sekolah, Lembaga terkait Pendidikan dan masyarakat.

Identifikasi pemetaan dan kebutuhan guru juga secara berkala dilakukan dan dikoordinasikan dengan BKPSDM terkait formasi dan pengadaannya.

PAUD juga menjadi salah satu prioritas karena menjadi pijakan dasar terkait SDM generasi masa depan, yaitu melalui peningkatan kualitas dalam perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, adanya layanan pendampingan sehingga mampu mencegah perundungan, kekerasan dan intoleransi. Tidak hanya PAUD, berdasarkan data masih adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah dan angka putus sekolah maka juga diprioritaskan untuk peningkatan kualitas layanan Pendidikan kesetaraan melalui perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan,

adanya layanan pendampingan sehingga mampu mencegah perundungan, kekerasan dan intoleransi.

Berdasarkan hasil evaluasi, program di bidang Pendidikan juga diarahkan pada kegiatan peningkatan angka rata-rata lama sekolah, pengurangan angka putus sekolah SD dan SMP sederajat, peningkatan kondisi fasilitas pendidikan ruang kelas, pencapaian target SMP dengan akreditasi minimal, pencapaian target kelulusan peserta pendidikan kesetaraan, peningkatan jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, pengurangan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) dan peningkatan APK PAUD.

2) Bidang Kesehatan

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penurunan angka kematian bayi, penurunan angka kematian balita; penurunan angka kematian neonatal,; dan penurunan jumlah rumah tidak sehat.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan akreditasi utama fasilitas kesehatan tingkat pertama

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan keamanan pangan sebagai langkah untuk peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor serta peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pembangunan bendung dan jaringan irigasi.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai upaya meningkatkan akses air minum layak menuju akses air minum aman.

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada kegiatan penambahan jalan kabupaten yang dilengkapi dengan Drainase agar meminimalisir resiko kerusakan jalan.

Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung serta rehabilitasi bangunan gedung.

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas trotoar di sejumlah titik di Temanggung.

Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas jalan dan jembatan di sejumlah titik di Temanggung.

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR),penyusunan dokumen pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah serta dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang.

4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Pengembangan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan rumah susun. Program ini dilakukan dalam rangka mewujudkan rumah susun yang bersih, sehat dan layak huni sehingga tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan akses sanitasi layak

5) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada penanganan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan

patroli, pengamanan dan pengawalan; penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran agar sesuai dengan jangkauan wilayah.

Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana serta Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dalam upaya meningkatkan kinerja dalam merespon laporan kejadian bencana pada saat waktu tanggap.

6) Bidang Sosial

Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pelatihan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dan fasilitasi program-program kegiatan PSM.

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada penjemputan masyarakat yang termasuk warga migrant korban tindak kekerasan dan pemberian stimulan bagi korban.

Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi sosial pada masyarakat yang membutuhkan

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan pelayanan pemerlu jaminan dan perlindungan sosial dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.

Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan kebutuhan sosial bagi masyarakat korban bencana alam dan sosial dan peningkatan pemberdayaan masyarakat terkait siap siaga jika terjadi bencana.

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional.

b. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar

1) Bidang Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan beberapa pelatihan untuk memperkaya skill bagi tenaga kerja yang belum memenuhi standar kompetensi sehingga mampu bersaing dalam mencari lapangan kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan penyuluhan dan bimbingan serta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja guna ikut serta menekan angka TPT.

Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan mediasi apabila ada perselisihan hubungan industrial dan pembinaan kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten untuk menggaungkan potensi perempuan dan mengurangi paham atau budaya patriarki, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan

Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan dan mediasi bagi perempuan korban kekerasan serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan pelayanan, pengaduan dan penjangkauan korban.

Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga guna meningkatkan ketahanan keluarga.

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak serta pemenuhan hak anak sesuai dengan kebutuhannya baik secara fisik maupun psikis.

Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak dengan sosialisasi dan advokasi upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

3) Bidang Pangan

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan seperti lumbung pangan, lantai jemur dan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya, pemanfaatan teknologi pangan serta diversifikasi pangan

Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan informasi terkait kerentanan dan ketahanan pangan, serta dan mencukupi ketersediaan pangan

Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan kelembagaan keamanan pangan serta peningkatan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan.

4) Bidang Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan untuk kegiatan penyusunan kebijakan yang mengatur penggunaan lahan sesuai dengan fungsinya sehingga sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan pada kegiatan pengujian parameter kualitas lingkungan hidup yang meliputi media tanah, air dan udara kemudian hasilnya akan dituangkan dalam dokumen hasil uji yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penentuan arah kebijakan terutama dalam penanganan lahan kritis, mitigasi adanya fenomena perubahan iklim, serta menjaga kualitas lingkungan hidup

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini difokuskan pada kegiatan pemeliharaan hutan kota, taman kota, dan terpenuhinya RTH

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi izin penyimpanan sementara limbah B3 sehingga mencegah pencemaran lingkungan

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini difokuskan untuk pengawasan terhadap usaha yang harus memiliki Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi sehingga tidak merusak lingkungan dan mencegah sengketa lingkungan

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan

Program ini difokuskan pada kegiatan yang penjagaan kelestarian lingkungan hidup oleh berbagai stakeholders serta fasilitasi sarana prasarana kegiatan adiwiyata (tempat sampah, biopori, tanaman)

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini difokuskan pada kegiatan penilaian terhadap kinerja stakeholders yang berperan dalam pelestarian lingkungan hidup

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan pada kegiatan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terhadap PPLH

Program Pengelolaan Persampahan

Program ini difokuskan pada kegiatan pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan kinerja pengelola persampahan, dan pemilahan sampah yang selanjutnya akan diolah.

5) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Pendaftaran Penduduk

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang meliputi penerbitan KTP dan KIA di Kabupaten Temanggung.

Program Pencatatan Sipil

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil.

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini difokuskan untuk meningkatkan kepemilikan masyarakat terhadap dokumen kependudukan dan catatan sipil.

6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Penataan Desa

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana desa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan

manajemen desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian serta kesejahteraan desa sehingga terwujud desa berpredikat mandiri

Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa, dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini difokuskan pada kegiatan pendampingan serta peningkatan kapasitas sumber daya pengelola/lembaga kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) guna identifikasi potensi desa swasembada dalam rangka pembangunan desa.

7) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Pengendalian Penduduk

Program ini difokuskan pada kegiatan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta data-data dan pelayanannya terhadap masyarakat

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya KB serta batasan PUS melalui pemberian advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) serta publikasi dan promosi program melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini difokuskan pada kegiatan pengadaan BIB KIT pada 20 *locus stunting* serta Pembinaan PKBR di PIK Remaja dan BKR.

8) Bidang Perhubungan

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sosialisasi SOP berkendara dan peningkatan sarana prasarana serta pengelolaan terminal tipe C.

9) Bidang Komunikasi dan Informatika

Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pelayanan komunikasi dan informatika untuk masyarakat, fasilitasi akses internet di area publik yang ada, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku PPID.

Program Aplikasi Informatika

Program ini difokuskan pada kegiatan Pembangunan jaringan fiber optik antar kecamatan, pengelolaan pusat data pemerintah daerah, dan pengembangan aplikasi.

10) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan koperasi terutama koperasi yang tidak sehat.

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi melalui pendidikan dan latihan koperasi.

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi, sosialisasi dan pendampingan pembiayaan serta pemasaran usaha koperasi.

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini difokuskan pada kegiatan pemberdayaan, pembinaan dan peningkatan kelas UMKM melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, pemasaran dan pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro.

Program Pengembangan UMKM

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi pengembangan UMKM sehingga terwujud peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

11) Bidang Penanaman Modal

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini difokuskan pada kegiatan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal.

Program Promosi Penanaman Modal

Program ini difokuskan pada kegiatan menginformasikan tentang potensi dan peluang investasi penanaman modal yang ada pada daerah guna menarik investor.

Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem yang terintegrasi.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal

12) Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan pembinaan pemuda sehingga terwujud peningkatan kapasitas pemuda

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pelatihan olahraga, pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi, pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang representatif, pembinaan cabang olah raga dan sistem informasi pendataan keolahragaan dan kepemudaan.

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

13) Bidang Statistik

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pengelolaan data statistik sektoral, peningkatan validitas data produsen, dan fasilitasi koordinasi pemerintah daerah dan BPS guna sinkronisasi data.

14) Bidang Persandian

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pengamanan sistem informasi supaya terwujud kualitas keamanan informasi Pemerintah Daerah sesuai standar dan meningkatkan jumlah sistem elektronik sudah teruji keamanannya.

15) Bidang Kebudayaan

Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan jumlah pelaku/kelompok seni dan budaya yang produktif melalui pengembangan kualitas SDM, serta kegiatan pembinaan sejarah

Kabupaten Temanggung melalui penggalian sejarah lokal temanggung melalui narasumber ahli.

16) Bidang Perpustakaan

Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembudayaan gemar membaca di kalangan masyarakat, serta pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan, sekolah, TBM (Taman Bacaan Masyarakat) dan perpustakaan daerah untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan peminjam di perpustakaan.

Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini difokuskan pada kegiatan monitoring dalam rangka pengumpulan naskah kuno penambahan koleksi nasional di wilayah Kabupaten Temanggung.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Bidang Kelautan dan Perikanan

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini difokuskan pada kegiatan swasembada pada ikan konsumsi, pengembangan kapasitas kelompok pembudidaya ikan kecil, dan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan.

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini difokuskan pada penyusunan dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di dilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di wilayah Kabupaten Temanggung.

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini difokuskan pada kegiatan penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko, penyediaan ikan untuk konsumsi dan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil.

2) Bidang Pariwisata

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini difokuskan pada kegiatan perencanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan destinasi wisata dan kegiatan

pembinaan atau pendampingan desa wisata serta peningkatan kapasitas pelaku wisata.

3) Bidang Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan melalui pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B, penyediaan peta lahan LP2B dan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya.

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini difokuskan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, kegiatan pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner untuk meningkatkan produktivitas hasil peternakan.

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) penyebab bencana pertanian.

Program Penyuluhan Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, dan pembentukan sekolah lapang kelompok tani.

4) Bidang Perdagangan

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini difokuskan pada kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana prasarana di pasar daerah, perbaikan pada sarana prasarana pendukung pasar untuk memperlancar informasi dan komunikasi antara pasar dengan dinas dan penertiban pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan.

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini difokuskan pada kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar daerah dan penyusunan laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan, kegiatan pengendalian pengawasan pasar untuk mengantisipasi kenaikan harga/inflasi bahan pokok di masyarakat serta pelaksanaan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.

Program Pengembangan Ekspor

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan pelaku usaha produk ekspor unggulan.

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini difokuskan pada kegiatan metrologi legal berupa tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada kegiatan penyempurnaan rumusan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama pada setiap level organisasi agar lebih berorientasi hasil dan memiliki indikator yang relevan maupun terukur sehingga ada keselarasan dalam penjabaran kinerja mulai dari level Kabupaten, Perangkat Daerah, hingga individu dan penyusunan SAKIP.

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum, fasilitasi bantuan hukum, koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pendokumentasian perundangan di JDIH secara tepat waktu, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pelayanan publik oleh masing-masing perangkat daerah, dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memenuhi standar.

Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini difokuskan pada kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan mempersiapkan secara baik perencanaan dari OPD serta kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan, pengoptimalan dalam penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan, pencatatan non-tender

atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu, kerjasama yang efektif dengan dewan pengawas dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD.

2) Sekretariat DPRD

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada kegiatan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan kesejahteraan anggota DPRD, serta pemenuhan kegiatan tertib administrasi.

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini difokuskan pada kegiatan percepatan pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, optimalisasi kegiatan aspirasi DPRD, serta fasilitasi Tugas DPRD.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan optimalisasi ketercapaian kinerja pembangunan daerah, kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, serta fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di semua perangkat daerah agar terwujud konsistensi perencanaan pembangunan.

2) Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM penelitian dan pengembangan, kegiatan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan daerah, kegiatan penjaringan dan fasilitasi serta pemanfaatan hasil kreativitas dan inovasi, serta kegiatan pemetaan daya saing daerah, serta penguatan kelembagaan kelitbangan

3) Keuangan

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi penyusunan IKPD, kegiatan penyusunan dan pengelolaan keuangan serta

perbendaharaan daerah sehingga dokumen penganggaran tepat waktu, serta kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah terkait dalam mewujudkan konsistensi penganggaran dengan perencanaan.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan inventarisasi dan penataan barang milik daerah.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dan kegiatan peningkatan pendapatan asli daerah.

4) Kepegawaian

Program Kepegawaian Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan pelayanan terhadap kebutuhan dan kesejahteraan pegawai di semua perangkat daerah, kegiatan fasilitasi dan motivasi pegawai perempuan dalam beberapa jabatan struktural, kegiatan optimalisasi updating pegawai secara mandiri, dan kegiatan fasilitasi sistem merit di lingkungan pegawai.

5) Pendidikan dan Pelatihan

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kepesertaan pegawai dalam pengembangan kompetensi manajerial dan non manajerial

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Inspektorat Daerah

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program pemerintah dan kegiatan pencegahan korupsi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini difokuskan pada kegiatan pendampingan dan asistensi terhadap semua pelaksana program pemerintah

g. Unsur Kewilayahan

1) Kecamatan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini difokuskan pada kegiatan optimalisasi pelayanan publik di kecamatan, pengadaan sarana dan prasarana kecamatan, serta kegiatan peningkatan kapasitas SDM kecamatan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini difokuskan pada kegiatan penguatan kelembagaan desa, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kelurahan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini difokuskan pada kegiatan penegakan Perda, dan kegiatan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat terkait kepemilikan KPT-Elektronik dan pembayaran PBB.

h. Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini difokuskan pada kegiatan sosialisasi dan pengembangan wawasan kebangsaan pada masyarakat semua elemen.

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Program ini difokuskan pada kegiatan pendidikan politik terutama bagi pemilih pemula.

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini difokuskan pada kegiatan pencegahan perkembangan aliran sesat, kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, kegiatan pembinaan terhadap penghayat aliran kepercayaan, kegiatan monitoring dan evaluasi

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan penanganan konflik sosial.

5.2.2.Pagu Indikatif per Program berdasarkan Urusan dan Bidang

Berikut adalah rekapitulasi pagu indikatif pada setiap program berdasarkan urusannya di RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Secara rinci untuk penjabaran program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator kinerja dan pagunya dituangkan dalam lampiran RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Tabel 5. 35
Rekapitulasi Anggaran per Urusan dan per Bidang

No	Urusan	Total Anggaran	Total Perubahan Anggaran
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.469.788.983.180**	**1.357.500.660.600**
1	PENDIDIKAN	764.106.577.840	627.363.734.146
2	KESEHATAN	606.343.988.430	610.024.242.002
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	53.358.001.516	80.132.886.538
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.223.999.550	2.913.949.252
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.892.299.103	18.903.158.991
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	27.864.116.741	18.162.689.671
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**167.243.006.445**	**162.468.083.196**
1	TENAGA KERJA	7.697.012.320	7.488.526.559
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.928.836.359	4.496.105.392
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	26.605.563.649	25.840.043.120
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	28.056.260.984	33.969.696.915
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.807.060.738	6.229.608.253
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.143.453.050	8.186.471.515
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.252.870.650	6.854.815.465
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	17.536.314.473	19.488.490.153
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.180.479.901	8.404.961.977
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	16.970.262.781	16.566.701.967
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.974.783.598	3.639.176.260
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.578.460.200	5.136.500.000
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	30.000.000	15.000.000
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	334.999.600	317.499.600
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	11.497.357.678	11.049.724.246
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.640.290.464	4.780.261.774
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	9.000.000	4.500.000
III	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**33.663.751.407**	**21.693.047.839**

No	Urusan	Total Anggaran	Total Perubahan Anggaran
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	610.000.000	325.750.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	475.250.000	353.775.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	29.987.501.407	17.641.630.839
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.251.000.000	2.456.000.000
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	340.000.000	915.892.000
IV	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**115.960.141.650**	**108.651.906.539**
1	SEKRETARIAT DAERAH	63.713.612.766	56.774.381.077
2	SEKRETARIAT DPRD	52.246.528.884	51.877.525.462
V	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**446.777.751.646**	**293.105.266.306**
1	PERENCANAAN	7.348.427.207	6.861.882.908
2	KEUANGAN	433.509.765.348	280.268.853.944
3	KEPEGAWAIAN	5.145.184.091	5.514.529.454
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	514.375.000	320.000.000
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	260.000.000	140.000.000
VI	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**22.105.849.320**	**23.121.405.722**
1	INSPEKTORAT DAERAH	22.105.849.320	23.121.405.722
VII	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**67.513.785.123**	**62.490.559.267**
1	KECAMATAN	67.513.785.123	62.490.559.267
VIII	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**7.583.639.845**	**6.521.541.076**
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.583.639.845	6.521.541.076

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel 5. 34
Rencana Pembiayaan per Urusan dan Program

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**416.492.364.908**	**370.360.073.150**	
1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**120.654.381.040**	**116.631.726.500**	
	Program Pengelolaan Pendidikan	**Program Pengelolaan Pendidikan**				**120.654.381.040**	**116.631.726.500**	**DINDIKPORA**
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	%	57,45			
			Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	%	64,25			
	Meningkatnya Kompetensi Pendidik	Meningkatnya Kompetensi Pendidik	Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	70			
			Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	66,04			
			Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	%	72			
			Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	86,53			
			Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik	%	16,6			
			Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	%	28,57			
	Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi	Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi	Iklim Inklusivitas SD	nilai	56,69			
			Iklim Keamanan SD	nilai	73,22			
			Iklim Kebhinekaan SD	nilai	71,78			
			Iklim Inklusivitas SMP	nilai	62,04			
			Iklim Keamanan SMP	nilai	70,41			
			Iklim Kebinekaan SMP	nilai	71,32			
	Tercukupinya kebutuhan pendidik	Tercukupinya kebutuhan pendidik	Rasio Guru/Siswa SD	angka	0,0611111			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
			Rasio Guru/Siswa SMP	angka	0,0638889			
			Rasio Guru/Siswa PAUD	angka	0,0520833			
			Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100			
	Meningkatnya Kesempatan bersekolah	Meningkatnya Kesempatan bersekolah	APK SD Sederajat	%	99,71			
			APM SD Sederjat	%	93,11			
			APK SMP Sederajat	%	100			
			APM SMP Sederjat	%	86,65			
			APM PAUD (5-6	%	85,95			
			Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD	%	100			
	Menurunnya Angka Tidak Sekolah	Menurunnya Angka Tidak Sekolah	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	angka	266			
			Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat	angka	620			
			Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	angka	777			
			Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat	angka	2,379			
			Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun	angka	220			
			Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun	angka	255			
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**265.912.993.400**	**234.050.184.220**	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**264.131.312.400**	**230.298.669.020**	**DINAS KESEHATAN**
	Menurunnya kasus kematian ibu	Menurunnya kasus kematian ibu	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	%	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
	Menurunnya kasus kematian balita	Menurunnya kasus kematian balita	Angka kematian bayi	Per 1.000 KH	11,84			
			Angka kematian neonatal	Per 1.000 KH	8,24			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100			
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100			
	Menurunnya kasus dan faktor resiko stunting	Menurunnya kasus dan faktor resiko stunting	Prevalensi wasting balita	%	7,5			
			Insiden Stunting balita (kasus baru)	%	3			
			Persentase anemia pada ibu hamil	%	11,2			
	Terpenuhinya pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup sesuai standar	Terpenuhinya pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100			
			Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	%	100			
			Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan	%	100			
	Meningkatnya tata kelola pelayanan kesehatan	Meningkatnya tata kelola pelayanan kesehatan	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	25			
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	84,5			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN	%	83			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna	%	96,67			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	85			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	%	100			
	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100			
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100			
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100			
			Persentase penderita Hipertensi	%	100			
			mendapatkan pelayanan kesehatan					
			sesuai standar					
			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100			
			Prevalensi Obesitas	%	15			
			Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	%	73,08			
			Insidensi Hepatitis B	per 100.000 penduduk	20			
			Prevalensi kusta	per 1000 penduduk	0,1			
			Eliminasi Rabies	%	0			
			Penurunan Angka Kematian Dengue	%	0,4			
			Eliminasi Malaria	%	100			
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	100			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	%	80			
	Meningkatnya kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Meningkatnya kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	%	69,58			
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	%	50			
	Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan	Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan	Persentase Desa/Kelurahan STBM	%	25			
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	%	20			
	Meningkatnya fasilitas pelayanan di RSUD	Meningkatnya fasilitas pelayanan di RSUD	Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	%	100			**RSUD**
			Persentase Capaian Pengembangan Rumah Sakit	%	100			**RSUD**
			Persentase Capaian Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	%	100			**RSUD**
	Meningkatnya masyarakat berperilaku hidup sehat	Meningkatnya masyarakat berperilaku hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	%	19			
			Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	%	5			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**				**1.183.781.000**	**1.472.627.200**	**DINAS KESEHATAN**
	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	per 1000 penduduk	2,28			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**				**245.937.000**	**466.033.000**	**DINAS KESEHATAN**
	Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	62			
			Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	58			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**				**351.963.000**	**1.812.855.000**	**DINAS KESEHATAN**
	Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase posyandu aktif bidang kesehatan	%	87			
1,03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**41.526.698.000**	**66.279.136.000**	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**				**3.063.000.000**	**1.713.000.000**	**DPUPR**
	Meningkatnya kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Meningkatnya kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	59,26			
	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	**Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**				**275.000.000**	**3.445.563.000**	**DPUPR**
	Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih	Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	100			
			Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	59,02			
			Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	31,14			
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	31,13			
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**				**9.050.198.000**	**2.634.961.000**	**DPRKPLH**
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	13,06			
			Persentase warga negara yang memperoleh	%	100			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
			layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)					
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**				**1.088.000.000**	**869.200.000**	**DPUPR**
	Meningkatnya kualitas jaringan drainase perkotaan	Meningkatnya kualitas jaringan drainase perkotaan	Presentase saluran drainase kondisi baik	%	69,25			
	Program penataan bangunan gedung	**Program penataan bangunan gedung**				**2.245.000.000**	**1.957.500.000**	**DPUPR**
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	80,25			
			Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG	%	64,64			
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**				**4.733.000.000**	**2.317.500.000**	**DPUPR**
	Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase Trotoar Kondisi Baik (%)	%	68,63			
			Persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten (%)	%	10,13			
	Program Penyelenggaraan Jalan	**Program Penyelenggaraan Jalan**				**20.060.000.000**	**52.882.912.000**	**DPUPR**
	Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan	Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	%	89,85			
			Persentase Jembatan dalam kondisi baik (%)	%	94,37			
			Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan (%)	%	22,62			
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**				**62.500.000**	**45.000.000**	**DPUPR**
	Meningkatnya Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi	Meningkatnya Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi	Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina (%)	%	100			
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**				**950.000.000**	**413.500.000**	**DPUPR**

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
	Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan tata ruang (%)	%	90,38			
			Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan (%)	%	50,01			
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	**Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**				-	-	**DPRKPLH**
	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah TPS 3R	%	17,3			
1,04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**4.223.999.550**	**2.913.949.252**	
	Program Pengembangan Perumahan	**Program Pengembangan Perumahan**				**829.999.550**	**529.349.252**	**DPRKPLH**
	Meningkatnya Hunian Layak	Meningkatnya Hunian Layak	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	%	100			
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100			
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100			
	Program Kawasan Permukiman	**Program Kawasan Permukiman**				**3.394.000.000**	**2.384.600.000**	**DPRKPLH**
	Meningkatnya Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	%	96,43			
			Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani	%	48,81			
			Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	69,06			
			Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	%	80,03			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
1,05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**3.478.012.143**	**5.156.666.250**	
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**1.560.006.393**	**1.239.914.000**	**SATPOL PP DAN DAMKAR**
								SATPOL PP DAN DAMKAR
	Meningkatnya kapasitas SDM satlinmas	Meningkatnya kapasitas SDM satlinmas	Persentase Satlinmas yang terlatih	%	30,79			
	Meningkatnya layanan aduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	Meningkatnya layanan aduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	%	100			
	Meningkatnya penegakan pelanggaran perda dan perbup	Meningkatnya penegakan pelanggaran perda dan perbup	Persentase penegakan Pelanggaran Perda/Perbup	%	100			
	Meningkatnya layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Meningkatnya layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100			
	Program Penanggulangan Bencana	**Program Penanggulangan Bencana**				**1.054.828.000**	**942.806.000**	**BPBD**
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100			
	Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100			
	Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100			
	Meningkatnya koordinasi penanganan pasca bencana	Meningkatnya koordinasi penanganan pasca bencana	Persentase koordinasi penanganan pasca bencana	%	100			
	Meningkatnya layanan pemulihan sementara kerusakan fisik akibat	Meningkatnya layanan pemulihan sementara kerusakan	Persentase tertanganinya	%	100			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
	bencana pada masa tanggap darurat bencana	fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana					
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**				**863.177.750**	**2.973.946.250**	**SATPOL PP DAN DAMKAR**
	Meningkatnya pemahaman Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap layanan respon time sesuai aturan yang berlaku	Meningkatnya pemahaman Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap layanan respon time sesuai aturan yang berlaku	Tingkat Waktu Tanggap *(Respon Time Rate)* dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100			
	Meningkatnya layanan pemadaman yang dilakukan oleh petugas damkar	Meningkatnya layanan pemadaman yang dilakukan oleh petugas damkar	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100			
	Meningkatnya layanan pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh relawan kebakaran	Meningkatnya layanan pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh relawan kebakaran	Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	%	100			
	Meningkatnya luas wilayah manajemen kebakaran	Meningkatnya luas wilayah manajemen kebakaran	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	%	61,05			
	Meningkatnya jumlah inspeksi bangunan/gedung/lingkungan yang menjadi prioritas	Meningkatnya jumlah inspeksi bangunan/gedung/lingkungan yang menjadi prioritas	Persentase Bangunan/Gedung yang menjadi prioritas inspeksi	%	6,15			
	Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manuasia (operasi penyelamatan non Kebakaran)	Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manuasia (operasi penyelamatan non Kebakaran)	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia (operasi penyelamatan non kebakaran)	%	100			
1,06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**22.222.978.775**	**11.607.546.928**	
	Program Pemberdayaan Sosial	**Program Pemberdayaan Sosial**				**310.000.000**	**119.000.000**	**DINAS SOSIAL**

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100			
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**				**12.000.000**	**7.500.000**	**DINAS SOSIAL**
	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100			
	Program Rehabilitasi Sosial	**Program Rehabilitasi Sosial**				**1.328.000.000**	**869.750.000**	
	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100			
			Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100			
			Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100			
			Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100			
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**				**20.319.578.775**	**10.452.296.928**	**DINAS SOSIAL**
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial						**DINAS SOSIAL**
			Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data	%	100			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
			terpadu penanggulangan kemiskinan					
			Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	%	86			
	Program Penanganan Bencana	**Program Penanganan Bencana**				**174.000.000**	**87.000.000**	
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100			
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**				**79.400.000**	**72.000.000**	**DINAS SOSIAL**
	Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100			
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**66.878.080.286**	**58.363.553.100**	
2,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**1.131.250.000**	**735.625.000**	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**				**315.000.000**	**903.392.000**	**DINPERINAKER**
	Meningkatnya implementasi pelaksanaan program sesuai dengan dokumen Rencana Tenaga Kerja	Meningkatnya implementasi pelaksanaan program sesuai dengan dokumen Rencana Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100			
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**				**611.000.000**	**305.500.000**	**DINPERINAKER**
	Meningkatnya keterampilan dan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri	Meningkatnya keterampilan dan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri						**DINPERINAKER**
			Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	50			
			Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	%	82			
	Program Penempatan Tenaga Kerja	**Program Penempatan Tenaga Kerja**				**400.250.000**	**370.125.000**	**DINPERINAKER**

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di dunia kerja	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di dunia kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	%	37			
			Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	%	32			
			Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	%	37			
			Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	94			
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	69,59			
	Program Hubungan Industrial	**Program Hubungan Industrial**				**120.000.000**	**60.000.000**	**DINPERINAKER**
	Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan serta bermartabat	Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan serta bermartabat	Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan	%	42,52			
			Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	75			
			Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	47			
			Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	%	100			
2,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**450.000.000**	**92.500.000**	
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**				**30.000.000**	**23.500.000**	**DPPPAPPKB**
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	9,7			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
			Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,35			
	Program Perlindungan Perempuan	**Program Perlindungan Perempuan**				**10.000.000**	**3.500.000**	**DPPPAPPKB**
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	%	100			
			Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	angka	5,15			
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**				**320.000.000**	**20.000.000**	**DPPPAPPKB**
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas (%)	%	73,08			
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**				**80.000.000**	**42.000.000**	**DPPPAPPKB**
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komperhensif	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komperhensif	Kabupaten Layak Anak (Kategori)	kategori	Madya			
			Prosentase terbentuknya DRPPA (%)	%	30,1			
	Program Perlindungan Khusus Anak	**Program Perlindungan Khusus Anak**				**10.000.000**	**3.500.000**	**DPPPAPPKB**
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak	angka	63,2			
			Persentase pernikahan usia anak	%	0,092			
			Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani	%	100			
			Rasio kasus kekerasan terhadap anak	angka	8,48			
2,03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**470.000.000**	**170.000.000**	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk**				**50.000.000**	**25.000.000**	**DKPPP**

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
		Kedaulatan dan Kemandirian Pangan						
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok	%	100			
	Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan masyarakat	**Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan masyarakat**				**350.000.000**	**25.000.000**	**DKPPP**
	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	90,03			
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**				**50.000.000**	**70.000.000**	**DKPPP**
	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan masyarakat	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan masyarakat	Presentase penanganan kerawanan pangan	%	100			
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**				**20.000.000**	**50.000.000**	**DKPPP**
	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar	%	100			
2,04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**-**		
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**						**DPRKPLH**
	Terselesaikannya sengketa tanah garapan	Terselesaikannya sengketa tanah garapan	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	%				
	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	**Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**						**DPRKPLH**
	Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%				
2,05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**14.473.000.000**	**15.418.655.300**	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**				**45.000.000**	**22.500.000**	**DPRKPLH**
	Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100			
			Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	%	100			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
			dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup					
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**				**220.000.000**	**237.000.000**	**DPRKPLH**
	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	angka	60,03			
			Luas Lahan kritis tertangani	Ha	4			
			Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	%	7,4			
			Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	%	23,3			
			Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	%	15,7			
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**				**7.330.000.000**	**7.941.139.800**	**DPRKPLH**
	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara	%	80			
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**				**10.000.000**	**5.000.000**	**DPRKPLH**
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100			
			Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	%	100			
			Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi	%	100			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
			menimbulkan pencemaran udara					
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**				**20.000.000**	**15.000.000**	**DPRKPLH**
	Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	30,93			
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**				**10.000.000**	**5.000.000**	**DPRKPLH**
	Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100			
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**				**10.000.000**	**5.000.000**	**DPRKPLH**
	Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100			
	Program Pengelolaan Persampahan	**Program Pengelolaan Persampahan**				**6.828.000.000**	**7.188.015.500**	**DPRKPLH**
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	34,14			
			Persentase sampah yang terkelola	%	64,07			
			Cakupan Pelayanan persampahan	%	77,85			
2,06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**603.261.225**	**700.261.225**	
	Program Pendaftaran Penduduk	**Program Pendaftaran Penduduk**				**500.000.000**	**594.330.000**	**DINDUKCAPIL**
	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	%	97,2			
	Program Pencatatan Sipil	**Program Pencatatan Sipil**				**6.000.000**	**3.000.000**	**DINDUKCAPIL**
	Meningkatnya Pelayanan pencatatan sipil	Meningkatnya Pelayanan pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	99,98			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**				**97.261.225**	**102.931.225**	**DINDUKCAPIL**
	Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase ketersediaan Sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan Administrasi	%	71			
			Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	%	32			
			Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	%	15			
2,07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**4.738.862.748**	**4.378.295.764**	
	Program Penataan Desa	**Program Penataan Desa**				**10.000.000**	**5.000.000**	**DINPERMADES**
	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa	Presentase Desa yang terfasilitasi dalam rangka penataan Desa	%	100			
	Program Peningkatan Kerja sama Desa	**Program Peningkatan Kerja sama Desa**				**10.000.000**	**5.000.000**	
	Meningkatnya Kerja Sama Desa	Meningkatnya Kerja Sama Desa	Persentase kerjasama antar Desa	%	100			
			Persentase kerjasama Desa dengan pihak ketiga	%	100			
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**				**4.558.862.748**	**4.096.295.764**	**DINPERMADES**
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel	Presentase Desa dalam penyusunan LPPD tepat waktu	%	100			
			Presentase Desa dalam penyusunan RKPDes tepat waktu	%	100			
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**				**160.000.000**	**272.000.000**	**DINPERMADES**
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase laporan LKD	%	8,33			
			Persentase BUM Desa Maju dan berkembang	%	40,6			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
2,08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**12.252.870.650**	**6.854.815.465**	
	Program Pengendalian Penduduk	**Program Pengendalian Penduduk**				**493.800.000**	**249.000.000**	**DPPPAPPKB**
	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	angka	58,8			
			Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi {unmetneed)	%	7,58			
			Median usia kawin pertama (MUKP)	angka	20,1			
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19 tahun)	%	9,22			
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**				**7.494.989.000**	**2.373.508.640**	**DPPPAPPKB**
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	46,95			
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	%	77,8			
			Persentase KB pasca persalinan	%	59,9			
			Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri	%	15,91			
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**				**4.264.081.650**	**4.232.306.825**	**DPPPAPPKB**
	meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita	%	45,75			
			Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	angka	87,4			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
			Indeks lansia berdaya	angka	58			
2,09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**10.689.821.400**	**12.939.314.215**	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**				**10.689.821.400**	**12.939.314.215**	**DINHUB**
	Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan	Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP)	%	42,03			
			Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	%	67,14			
	Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan	Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan	Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan	%	99,66			
	Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan	Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan	Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten	%	36,63			
			Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	%	65,11			
	Meningkatnya pengelolaan perparkiran	Meningkatnya pengelolaan perparkiran	Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik	%	100			
			Persentase Layanan Perhubungan	%	100			
	Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	%	89,39			
			Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	82,22			
			Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	100			
2,1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**2.285.719.000**	**2.064.218.800**	
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	**Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**				**505.000.000**	**543.500.000**	**DINKOMINFO**
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase lembaga binaan dan mitra	%	85,75			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
			diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif					
			Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	%	100			
			Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	%	100			
			Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik	%	17,5			
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**				**1.780.719.000**	**1.520.718.800**	**DINKOMINFO**
	Meningkatnya kualitas layanan publik	Meningkatnya kualitas layanan publik	Persentase layanan publik secara elektronik	%	75			
			Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	%	37,68			
			Persentase rumah tangga dengan akses internet	%	91,5			
2,11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**1.949.278.750**	**1.639.839.375**	
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**				**25.000.000**	**12.500.000**	**DINKOPDAG UKM**
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan	%	12,25			
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	**Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**				**50.000.000**	**25.000.000**	**DINKOPDAG UKM**
	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	%	4,54			
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)**				**1.874.278.750**	**1.602.339.375**	**DINKOPDAG UKM**

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	%	0,25			
2,12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**1.111.000.000**	**255.500.000**	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**				**100.000.000**	**54.500.000**	**DPMPTSP**
	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Realisasi Total terhadap target investasi	%	92			
	Program Promosi Penanaman Modal	**Program Promosi Penanaman Modal**				**700.000.000**	**80.000.000**	**DPMPTSP**
	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	%	92			
	Program Pelayanan Penanaman Modal	**Program Pelayanan Penanaman Modal**				**212.000.000**	**76.000.000**	**DPMPTSP**
	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo	%	92			
			Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	92			
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**				**99.000.000**	**45.000.000**	**DPMPTSP**
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal	%	92			
2,13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**7.578.460.200**	**5.136.500.000**	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**				**87.500.000**	**32.500.000**	**DINDIKPORA**
	Meningkatnya kemampuan pemuda dan keaktifan organisasi kepemudaan	Meningkatnya kemampuan pemuda dan keaktifan organisasi kepemudaan	Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan	%	4			
			Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	87			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**				**6.990.960.200**	**4.729.000.000**	**DINDIKPORA**
	Meningkatnya Kualitas sarana prasarana olahraga dan kompetensi pelatih olah raga	Meningkatnya Kualitas sarana prasarana olahraga dan kompetensi pelatih olah raga	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	%	63			
			Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat	%	78			
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**				**500.000.000**	**375.000.000**	**DINDIKPORA**
	Meningkatnya Keaktifan organisasi kepramukaan	Meningkatnya Keaktifan organisasi kepramukaan	Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif	%	98,22			
2,14	**BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**30.000.000**	**15.000.000**	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**				**30.000.000**	**15.000.000**	**DINKOMINFO**
	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi, dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi, dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)	angka	50			
			Ketersediaan data statistik sektoral	%	100			
2,15	**BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**334.999.600**	**317.499.600**	
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**				**334.999.600**	**317.499.600**	**DINKOMINFO**
	Meningkatnya keamanan siber dan sandi dilingkungan pemerintah daerah	Meningkatnya keamanan siber dan sandi dilingkungan pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	300			
2,16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**7.420.500.000**	**6.970.000.000**	
	Program Pengembangan Kebudayaan	**Program Pengembangan Kebudayaan**				**7.375.500.000**	**6.942.500.000**	**DINBUDPAR**
	Meningkatnya pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Meningkatnya pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda	Obyek	1			
			Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata	Kelompok	10			
			Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata	Orang	10			
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**				**45.000.000**	**27.500.000**	**DINBUDPAR**

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
	peningkatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	peningkatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Jumlah Cagar Budaya	Obyek	3			
2,17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**1.350.056.713**	**671.028.356**	
	Program Pembinaan Perpustakaan	**Program Pembinaan Perpustakaan**				**1.276.042.213**	**663.318.356**	**DINPUSIP**
	Terlaksananya pembinaan perpustakaan	Terlaksananya pembinaan perpustakaan	Persentase pengunjung di perpustakaan	%	25			
			Persentase perpustakaan yang aktif	%	36			
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**				**74.014.500**	**7.710.000**	**DINPUSIP**
	Terselenggaranya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Terselenggaranya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase penelusuran naskah kuno	%	100			
2,18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**9.000.000**	**4.500.000**	
	Program Pengelolaan Arsip	**Program Pengelolaan Arsip**				**9.000.000**	**4.500.000**	**DINPUSIP**
	Meningkatnya pengelolaan arsip	Meningkatnya pengelolaan arsip	Persentase arsip yang dialihmediakan	%	65			
			Persentase pembinaan kearsipan	%	75,55			
III	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**33.663.751.407**	**21.651.697.839**	
3,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**610.000.000**	**325.750.000**	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**				**50.000.000**	**25.000.000**	**DKPPP**
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	140,2			
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**				**250.000.000**	**195.000.000**	**DKPPP**
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	jumlah produksi perikanan budidaya	ton	10.672,01			
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan**				**50.000.000**	**25.000.000**	**DKPPP**
	Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan	%	10			
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	**Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**				**260.000.000**	**80.750.000**	**DKPPP**

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Jumlah produksi pengolahan ikan	ton	395.752			
3,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**475.250.000**	**312.425.000**	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**				**100.000.000**	**54.800.000**	**DINBUDPAR**
	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi	DTW	17			
			Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata	orang	598			
	Program Pemasaran Pariwisata	**Program Pemasaran Pariwisata**				**325.250.000**	**137.625.000**	**DINBUDPAR**
	Meningkatnya pemasaran pariwisata	Meningkatnya pemasaran pariwisata	Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	%	100			
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP)	orang	90			
			Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	29,706			
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**				**20.000.000**	**110.000.000**	**DINBUDPAR**
	Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	orang	1			
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**				**30.000.000**	**10.000.000**	**DINBUDPAR**
	Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif	Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif	Jumlah Pelaku Ekraf yang terdata	orang	130			
3,03	**URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PERTANIAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PERTANIAN**				**29.987.501.407**	**17.641.630.839**	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**				**20.147.681.407**	**11.533.717.939**	**DKPPP**
	Meningkatnya produksi, dan kualitas hasil pertanian	Meningkatnya produksi, dan kualitas hasil pertanian	Produktivitas Padi	ton/ha	6,16			
			Produktivitas jagung	ton/ha	5,55			
			Produktivitas bawang putih	ton/ha	6,15			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
			Produktivitas bawang merah	ton/ha	7,1			
			Produktivitas cabai rawit	ton/ha	7,01			
			Produktivitas cabai keriting	ton/ha	7,01			
			Produktivitas tembakau	ton/ha	0,643			
			Produktivitas kopi robusta	ton/ha	0,7025			
			Produktivitas kopi arabika	ton/ha	0,41			
			Jumlah produksi daging ternak besar	kg	807,654			
			jumlah produksi daging ternak kecil	kg	268,11			
			jumlah produksi ternak unggas	kg	6.243.337			
			jumlah produksi telur	kg	6.867.846			
			Persentase kelahiran pedet	%	48			
			Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	37,13			
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**				**5.625.000.000**	**5.618.625.000**	**DKPPP**
	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Prasarana yang digunakan	%	100			
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**				**647.300.000**	**260.250.000**	**DKPPP**
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	%	86			
			Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	76			
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**				**50.000.000**	**50.000.000**	**DKPPP**
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	%	78			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
	Program Penyuluhan Pertanian	**Program Penyuluhan Pertanian**				**3.517.520.000**	**179.037.900**	**DKPPP**
	Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan petani	Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan petani	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	%	58			
			Persentase Peningkatan kelas kelompok tani	%	1,3			
3,04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**2.251.000.000**	**2.456.000.000**	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**				**1.936.000.000**	**2.372.301.500**	**DINKOPDAG UKM**
	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	%	67			
			Persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	%	2			
			Persentase Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	%	6,85			
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**				**80.000.000**	**41.198.500**	**DINKOPDAG UKM**
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	%	90			
	Program Pengembangan Ekspor	**Program Pengembangan Ekspor**				**200.000.000**	**25.000.000**	**DINKOPDAG UKM**
	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor	US$	126.276.147			
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	**Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen**				**35.000.000**	**17.500.000**	**DINKOPDAG UKM**
	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	%	95			
3,05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**340.000.000**	**915.892.000**	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**				**315.000.000**	**903.392.000**	**DINPERINAKER**
	Meningkatnya pertumbuhan industri	Meningkatnya pertumbuhan industri	Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	48,27			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri**				**-**		**DINPERINAKER**
	Meningkatnya komitmen perizinan berusaha sektor industri	Meningkatnya komitmen perizinan berusaha sektor industri	Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri	%	0,6			
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**				**25.000.000**	**12.500.000**	**DINPERINAKER**
	Meningkatnya Pemanfaatan informasi industri	Meningkatnya Pemanfaatan informasi industri	Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas	%	2			
IV	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**47.872.680.163**	**40.008.968.500**	
4,01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**31.012.323.500**	**25.242.572.100**	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**				**30.144.130.000**	**24.438.475.350**	
	Terlaksananya kegiatan keagamaan, fasilitasi rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan	Terlaksananya kegiatan keagamaan, fasilitasi rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	%	80			BAG. KESRA DAN BINA MENTAL
			Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	88			BAG. KESRA DAN BINA MENTAL
			Indeks Zakat Nasional	Angka	0,81			
	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Persentase administrasi tata pemerintahan yang baik	%	100			BAG. PEMERINTAHAN
	Meningkatnya Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri	Meningkatnya Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	%	100			BAG. PEMERINTAHAN
	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan di bidang Hukum	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan di bidang Hukum	Persentase produk hukum yang difasilitasi	%	100			BAG. HUKUM
			Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100			BAG. HUKUM
			Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	%	100			BAG. HUKUM
			Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	%	100			BAG. HUKUM
			Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin	%	100			BAG. HUKUM
	Program Perekonomian dan Pembangunan	**Program Perekonomian dan Pembangunan**				**868.193.500**	**804.096.750**	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
	Meningkatnya kinerja kegiatan administrasi pembangunan	Meningkatnya kinerja kegiatan administrasi pembangunan	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	100			BAG. PEMBANGUNAN
			Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	%	100			
			Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	100			
	Terselenggaranya Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Terselenggaranya Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Persentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	%	100			BAG. PBJ
			Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	%	20			
			Persentase Pendampingan proses PBJ	%	100			
	Meningkatnya pengelolaan bidang perekonomian	Meningkatnya pengelolaan bidang perekonomian	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100			BAG. PEREKONOMIAN
			Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%	100			
			Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	83,33			
4,02	**SEKRETARIAT DPRD**	**SEKRETARIAT DPRD**				**16.860.356.663**	**14.766.396.400**	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**				**16.860.356.663**	**14.766.396.400**	**SEKRETARIAT DPRD**
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	%	100			
			Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Dilaksanakan Sesuai Rencana	%	100			
			Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	100			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
			Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD	%	100			
	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Laporan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan oleh DPRD	%	90			
			Persentase Laporan Pembahasan kebijakan Anggaran	%	90			
V	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**412.003.150.244**	**252.874.524.569**	
5,01	**PERENCANAAN**	**PERENCANAAN**				**750.604.000**	**1.000.271.500**	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**				**350.000.000**	**690.000.000**	**BAPPERIDA**
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Perencaaan Pembangunan Daerah	**%**	90			
			Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko	**%**	55			
			Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	1			
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**				**400.604.000**	**310.271.500**	**BAPPERIDA**
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemeritahan dan pembangunan manusia	%	88			
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang ekonomi dan SDA	%	88			
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang infrastruktur	%	88			
5,02	**KEUANGAN**	**KEUANGAN**				**409.891.193.744**	**250.972.672.569**	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**				**408.945.974.500**	**250.317.512.947**	**BPKPAD**

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
	Meningkatnya Kualitas Penganggaran	Meningkatnya Kualitas Penganggaran	Cakupan pengalokasian anggaran belanja *mandatory spending* dalam APBD	%	75			
			Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perbendaharaan Daerah	Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100			
			Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	%	100			
	Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban & pelaporan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban & pelaporan keuangan daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	%	100			
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**				**423.000.000**	**274.250.000**	**BPKPAD**
	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	%	100			
			Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja	%	98,25			
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**522.219.244**	**380.909.622**	**BPKPAD**
	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	%	4,57			
			Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah	%	98,29			
5,03	**BIDANG KEPEGAWAIAN**	**BIDANG KEPEGAWAIAN**				**586.977.500**	**441.580.500**	
	Program Kepegawaian Daerah	**Program Kepegawaian Daerah**				**586.977.500**	**441.580.500**	**BKPSDM**
	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Persentase layanan kepegawaian tepat waktu	%	100			
	Meningkatnya keterisian jabatan	Meningkatnya keterisian jabatan	Persentase keterisian jabatan	%	85,16			
	Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan ASN	Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan ASN	Persentase Kebutuhan ASN	%	100			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	%	99,18			
	Meningkatnya kedisiplinan ASN	Meningkatnya kedisiplinan ASN	Persentase kedisiplinan ASN	%	99,48			
5,04	**BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**514.375.000**	**320.000.000**	
	Program Pengembangan Sumber daya Manusia	**Program Pengembangan Sumber daya Manusia**				**514.375.000**	**320.000.000**	**BKPSDM**
	Meningkatnya kualitas pengembangan potensi ASN	Meningkatnya kualitas pengembangan potensi ASN	Persentase pengembangan potensi ASN	%	24,73			
5,05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**260.000.000**	**140.000.000**	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**				**53.000.000**	**27.000.000**	**BAPPERIDA**
	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	%	60			
	Program Riset dan Inovasi Daerah	**Program Riset dan Inovasi Daerah**				**207.000.000**	**113.000.000**	**BAPPERIDA**
	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis	%	50			
			Persentase inovasi yang dimanfaatkan	%	60			
VI	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**8.800.000.000**	**8.800.000.000**	
6,01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**INSPEKTORAT DAERAH**				**8.800.000.000**	**8.800.000.000**	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**				**5.050.000.000**	**5.050.000.000**	**INSPEKTORAT**
	Meningkatnya Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang efektif dan efisien	Meningkatnya Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang efektif dan efisien	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I, II, III,IV, Khusus)	%	100			
	Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Peesentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	%	100			
	Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	%	100			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**				**3.750.000.000**	**3.750.000.000**	**INSPEKTORAT**
	Mewujudkan Keyakinan Terhadap Proses Pengawasan	Mewujudkan Keyakinan Terhadap Proses Pengawasan	Persentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan	%	100			
	Mewujudkan komitmen pembangunan Zona Integritas	Mewujudkan komitmen pembangunan Zona Integritas	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	100			
	Meningkatnya respon terhadap aduan masyarakat	Meningkatnya respon terhadap aduan masyarakat	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	100			
	Meningkatnya identifikasi Resiko dan Pengendaliannya pada Perangkat Daerah	Meningkatnya identifikasi Resiko dan Pengendaliannya pada Perangkat Daerah	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100			
VII	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**14.611.093.805**	**11.202.924.700**	
7,01	**KECAMATAN**	**KECAMATAN**				**14.611.093.805**	**11.202.924.700**	
	Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	**Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik**				**2.013.700.710**	**2.010.188.950**	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan	%	100			Kecamatan Temanggung
				%	100			Kecamatan Tembarak
				%	100			Kecamatan Pringsurat
				%	100			Kecamatan Kaloran
				%	100			Kecamatan Parakan
				%	100			Kecamatan Bulu
				%	100			Kecamatan Kedu
				%	100			Kecamatan Kandangan
				%	100			Kecamatan Candiroto
				%	100			Kecamatan Ngadirejo
				%	100			Kecamatan Jumo
				%	100			Kecamatan Wonoboyo

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
				%	100			Kecamatan Kranggan
				%	100			Kecamatan Bejen
				%	100			Kecamatan Kledung
				%	100			Kecamatan Bansari
				%	100			Kecamatan Tlogomulyo
				%	100			Kecamatan Selopampang
				%	100			Kecamatan Gemawang
				%	100			Kecamatan Tretep
			Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan	%				
				%	90,2			Kecamatan Temanggung
				%	97,8			Kecamatan Tembarak
				%	95,5			Kecamatan Pringsurat
				%	98,52			Kecamatan Kaloran
				%	95			Kecamatan Parakan
				%	95,07			Kecamatan Bulu
				%	96			Kecamatan Kedu
				%	96			Kecamatan Kandangan
				%	95			Kecamatan Candiroto
				%	97,72			Kecamatan Ngadirejo
				%	100			Kecamatan Jumo
				%	100			Kecamatan Wonoboyo
				%	96,25			Kecamatan Kranggan
				%	95,25			Kecamatan Bejen
				%	96,5			Kecamatan Kledung
				%	96,5			Kecamatan Bansari
				%	100			Kecamatan Tlogomulyo
				%	100			Kecamatan Selopampang
				%	100			Kecamatan Gemawang
				%	96			Kecamatan Tretep

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**11.846.614.000**	**8.663.398.263**	
	Meningkatnya sarana dan prasarana serta lembaga kemasyarakatan di kelurahan	Meningkatnya sarana dan prasarana serta lembaga kemasyarakatan di kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak	%				SEMUA KELURAHAN
				%	84,5			Kecamatan Temanggung
				%	100			Kecamatan Parakan
				%	100			Kecamatan Ngadirejo
				%	84			Kecamatan Kranggan
			Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif	%				SEMUA KELURAHAN
				%	100			Kecamatan Temanggung
				%	100			Kecamatan Parakan
				%	100			Kecamatan Ngadirejo
				%	100			Kecamatan Kranggan
	Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum	**Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum**				**250.800.000**	**264.000.000**	
	Meningkatnya koordinasi penanganan gangguan kamtibmas dan bencana alam	Meningkatnya koordinasi penanganan gangguan kamtibmas dan bencana alam	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam	%	100			
				%	100			Kecamatan Temanggung
				%	100			Kecamatan Tembarak
				%	100			Kecamatan Pringsurat
				%	100			Kecamatan Kaloran
				%	100			Kecamatan Parakan
				%	100			Kecamatan Bulu
				%	100			Kecamatan Kedu
				%	100			Kecamatan Kandangan
				%	100			Kecamatan Candiroto

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
				%	100			Kecamatan Ngadirejo
				%	100			Kecamatan Jumo
				%	100			Kecamatan Wonoboyo
				%	100			Kecamatan Kranggan
				%	100			Kecamatan Bejen
				%	100			Kecamatan Kledung
				%	100			Kecamatan Bansari
				%	100			Kecamatan Tlogomulyo
				%	100			Kecamatan Selopampang
				%	100			Kecamatan Gemawang
				%	100			Kecamatan Tretep
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**486.779.095**	**265.337.487**	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa/kelurahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa/kelurahan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	%	100			
				%	100			Kecamatan Temanggung
				%	100			Kecamatan Tembarak
				%	100			Kecamatan Pringsurat
				%	100			Kecamatan Kaloran
				%	100			Kecamatan Parakan
				%	100			Kecamatan Bulu
				%	100			Kecamatan Kedu
				%	100			Kecamatan Kandangan
				%	100			Kecamatan Candiroto
				%	100			Kecamatan Ngadirejo
				%	100			Kecamatan Jumo
				%	100			Kecamatan Wonoboyo
				%	100			Kecamatan Kranggan

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
				%	100			Kecamatan Bejen
				%	100			Kecamatan Kledung
				%	100			Kecamatan Bansari
				%	100			Kecamatan Tlogomulyo
				%	100			Kecamatan Selopampang
				%	100			Kecamatan Gemawang
				%	100			Kecamatan Tretep
					100			
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu	%	100			
				%	100			Kecamatan Temanggung
				%	100			Kecamatan Tembarak
				%	100			Kecamatan Pringsurat
				%	100			Kecamatan Kaloran
				%	100			Kecamatan Parakan
				%	100			Kecamatan Bulu
				%	100			Kecamatan Kedu
				%	100			Kecamatan Kandangan
				%	100			Kecamatan Candiroto
				%	100			Kecamatan Ngadirejo
				%	100			Kecamatan Jumo
				%	100			Kecamatan Wonoboyo
				%	100			Kecamatan Kranggan
				%	100			Kecamatan Bejen
				%	100			Kecamatan Kledung
				%	100			Kecamatan Bansari
				%	100			Kecamatan Tlogomulyo
				%	100			Kecamatan Selopampang
				%	100			Kecamatan Gemawang
				%	100			Kecamatan Tretep

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	%	100			
				%	100			Kecamatan Temanggung
				%	100			Kecamatan Tembarak
				%	100			Kecamatan Pringsurat
				%	100			Kecamatan Kaloran
				%	100			Kecamatan Parakan
				%	100			Kecamatan Bulu
				%	100			Kecamatan Kedu
				%	100			Kecamatan Kandangan
				%	100			Kecamatan Candiroto
				%	100			Kecamatan Ngadirejo
				%	100			Kecamatan Jumo
				%	100			Kecamatan Wonoboyo
				%	100			Kecamatan Kranggan
				%	100			Kecamatan Bejen
				%	100			Kecamatan Kledung
				%	100			Kecamatan Bansari
				%	100			Kecamatan Tlogomulyo
				%	100			Kecamatan Selopampang
				%	100			Kecamatan Gemawang
				%	100			Kecamatan Tretep
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**13.200.000**	**-**	
VIII	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**3.139.032.500**	**3.385.760.581**	
8,01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**3.139.032.500**	**3.385.760.581**	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				**535.000.000**	**595.250.000**	**BANKESBANGPOL**
	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	100			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**				**1.827.819.500**	**1.980.319.500**	**BANKESBANGPOL**
	Meningkatnya demokrasi melalui pendidikan politik	Meningkatnya demokrasi melalui pendidikan politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	%	100			
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**				**40.000.000**	**125.000.000**	**BANKESBANGPOL**
	Meningkatnya ormas yang berdaya	Meningkatnya ormas yang berdaya	Persentasae ormas yang mendapat pembinaan	%	20			
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**				**200.000.000**	**64.750.000**	**BANKESBANGPOL**
	Meningkatnya kerukunan agama, budaya, suku, dan kondisi sosial ekonomi yang kondusif	Meningkatnya kerukunan agama, budaya, suku, dan kondisi sosial ekonomi yang kondusif	Jumlah kejadian konflik SARA	kejadian	8			
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**				**536.213.000**	**620.441.081**	**BANKESBANGPOL**
	Meningkatnya koordinasi dalam deteksi dini	Meningkatnya koordinasi dalam deteksi dini						
			Persentase koordinisasi deteksi dini konflik di masyarakat	%	100			
XX	**NON URUSAN**	**NON URUSAN**				**1.285.942.279.303**	**1.206.661.729.506**	
xx	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**				**1.285.942.279.303**	**1.202.633.332.106**	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100			**SEMUA PERANGKAT DAERAH**
	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100			BAG. UMUM
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	76			BAG. UMUM
				%	100			BAG. UMUM

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME DOKUMEN RPJMD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME DOKUMEN RKPD	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH
					TARGET	PAGU	PAGU PERUBAHAN	
	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah					
	Terlaksananya pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	Terlaksananya pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	%	100			BAG. PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	Meningkatnya pengelolaan organisasi dan pelayanan publik	Meningkatnya pengelolaan organisasi dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai				BAG. ORGANISASI
			Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	%	100			BAG. ORGANISASI
	Meningkatnya kualitas pelayanan di RSUD	Meningkatnya kualitas pelayanan di RSUD	Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah Sakit	nilai	92			RSUD
			Persentase indikator mutu pelayanan medis yang mencapai target	%	80			RSUD
			Persentase indikator mutu penunjang medis dan nonmedis yang mencapai target	%	80			RSUD
			Persentase indikator mutu keperawatan yang mencapai target	%	82			RSUD
			Peringkat Penilaian Kinerja BLUD RSUD	nilai	94			RSUD
			Persentase kecukupan SDMK sesuai standar	%	75			RSUD
			Persentase capaian ketersediaan sarpras dan alkes sesuai standar	%	80			RSUD
			Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan	%	75			RSUD
			Persentase SIMRS yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	70			RSUD
			Persentase indikator kinerja keuangan BLUD yang mencapai target	%	80			RSUD
			Jumlah			**2.330.929.130.616**	**2.035.559.970.545**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dilakukan karena menjadi dasar dalam proses penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan bedasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan. Perubahan RKPD Tahun 2026 memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen PPAS sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026, penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026, dan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Implementasi semua program pembangunan daerah Kabupaten Temanggung akan terwujud apabila didukung komitmen semua pihak sehingga terwujud pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung pada tahun 2026.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003